



Atik Hartati - Sarwono

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas X



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

1

Atik Hartati - Sarwono

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas X



PUSAT KURIKULUM DAN PERBUKUAN
Kementerian Pendidikan Nasional

Hak cipta pada Kementerian Pendidikan Nasional
Dilindungi Undang-Undang

Pendidikan Kewarganegaraan

Untuk SMA/MA Kelas X

Penulis : Atik Hartati - Sarwono

Ukuran buku : 17,6 x 25 cm

Atik Hartati

Pendidikan Kewarganegaraan / penulis, Atik Hartati, Sarwono. —
Jakarta : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Kementerian Pendidikan
Nasional, 2011.

2 jil. : foto; 25 cm.

untuk SMA/MA Kelas X

Termasuk bibliografi

Indeks

ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)

ISBN 978-979-095-672-8 (jil.1.2)

1. Kewarganegaraan—Studi Pengajaran I. Judul

II. Sarwono

323.607

Hak Cipta buku ini dialihkan kepada Kementerian Pendidikan Nasional
dari penulis Atik Hartati - Sarwono

Diterbitkan oleh Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011

Bebas digandakan sejak November 2010 s.d November 2025

Diperbanyak oleh

ata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Kementerian Pendidikan Nasional, sejak tahun 2007, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Kementerian Pendidikan Nasional ini dapat diunduh (*download*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta, Juni 2011

Kepala Pusat Kurikulum dan Perbukuan

Puji syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Berkehendak. Atas kehendak-Nya, kami dapat menyelesaikan penulisan buku yang berjudul Pendidikan Kewarganeraan untuk SMA/MA Kelas X ini. Penulisan buku ini bertujuan untuk menyediakan buku teks pelajaran bagi Anda, peserta didik SMA/MA Kelas X, sebagai sarana dalam proses belajar. Buku ini disajikan dengan menyesuaikan tingkat perkembangan kognitif peserta didik. Bahasa yang digunakan pun sesuai dengan kematangan emosi dan sosial peserta didik.

Setiap konsep dan subkonsep disajikan dengan melibatkan unsur pengetahuan, sikap, wawasan global, dan keterampilan civic. Hal tersebut bertujuan agar Anda mampu:

1. berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan,
2. berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta antikorupsi,
3. berkembang secara demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia, serta
4. berinteraksi dengan bangsa lain dalam percaturan dunia dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan buku ini mempertimbangkan kecenderungan dalam teori belajar, pendekatan pembelajaran, dan kecenderungan global pendidikan kewarganeraan. Namun, tentunya masih banyak kekurangannya. Untuk itu, saran perbaikan sangat kami harapkan dari pengguna buku ini. Kehadiran buku ini tak lepas dari dukungan berbagai pihak, baik rekan editor, layouter, penata grafis, penata sampul, dan masih banyak lagi. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik ini.

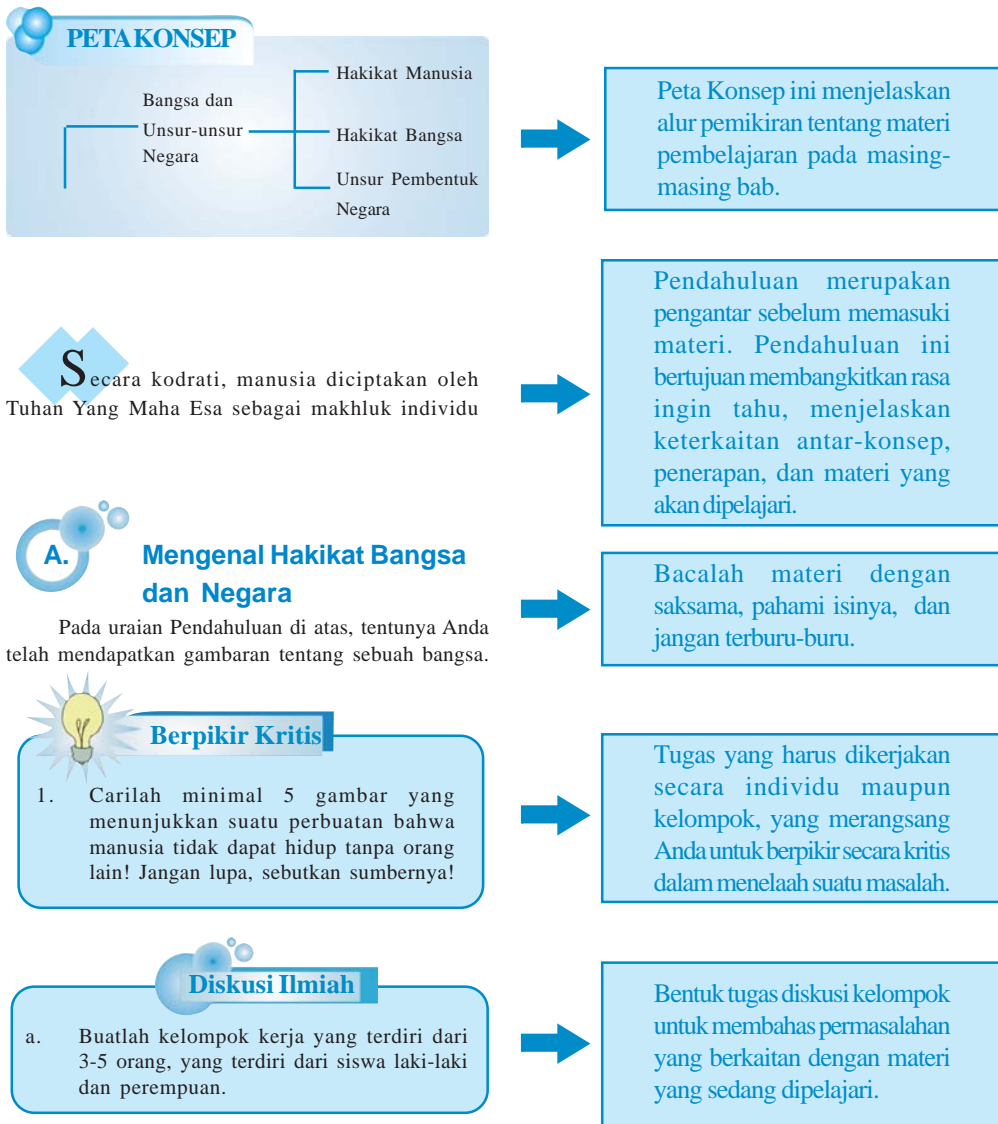
Akhir kata, penulis berharap buku ini dapat digunakan dengan baik dan memberikan manfaat bagi khazanah pendidikan di Indonesia. Selamat belajar, semoga sukses!

Surakarta, April 2010

Tim Penulis

Petunjuk Penggunaan Buku

Buku ini merupakan salah satu bahan ajar yang diharapkan dapat membantu Anda melakukan pembelajaran secara efektif dan efisien. Cepat atau lambatnya penguasaan kompetensi pada setiap kegiatan belajar, sangat bergantung pada kesungguhan Anda dalam mempelajari materi. Oleh karena itu, pahami petunjuk penggunaan buku ini untuk memudahkan Anda dalam menguasai kompetensi yang diharapkan.





KATA SANG TOKOH

Seorang patriot sejati akan selalu membenci terjadinya ketidakadilan di negaranya sendiri



Ungkapan maupun ucapan sang tokoh yang berkaitan erat dengan materi yang sedang dipelajari.



Selayang Pandang

1. Beberapa pengertian tentang bangsa :
 - a. Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib (Otto Bauer)



Istilah ini untuk menggantikan kata "rangkuman", yaitu ringkasan dari uraian materi pada tiap bab. Anda dapat menambahkan kalimat tertentu pada kolom ini jika diperlukan.



UJI KOMPETENSI



1. Sebagai penunjang unsur persatuan dan kesatuan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan seluruh wilayah di Indonesia harus ada kesamaan
 - a. tujuan
 - b. taktik dan strategi
 - c. pendapat
 - d. kekuatan perahanan
 - e. pertahanan dan keamanan



Kolom ini berisi soal-soal, baik pilihan ganda maupun uraian, yang wajib Anda kerjakan setelah mempelajari materi pada setiap bab. Jangan beranjak mempelajari bab selanjutnya jika Anda merasa kesulitan mengerjakan soal-soal tersebut.



Glosarium

Apatride : orang yang tidak memiliki kewarganegaraan

Asas hukum : kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada



Untuk mengetahui arti suatu kata yang mungkin menurut Anda sulit, Anda dapat melihat pada halaman glosarium. Glosarium ini disajikan menurut abjad untuk memudahkan pencarian. Inventarisasi pada glosarium dapat ditambah jika Anda masih menemukan kata yang sulit. Gunakan bantuan Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat.



Indeks

A

Achmad Ali

39

Amendemen

142, 146, 147, 151, 160, 201, 202, 230, 231,



Untuk memudahkan dalam mencari kata atau nama seseorang, disediakan Indeks. Indeks juga disusun menurut Abjad untuk memudahkan pencarian.

Setelah memahami hal-hal di atas, semoga Anda lebih mudah mempelajari buku ini dan memperoleh hasil yang maksimal. Buku ini mengembangkan tiga aspek yang terdapat pada diri Anda, yaitu kognitif, psikomotorik, dan afektif. Selamat belajar, semoga sukses.

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	iv
Petunjuk Penggunaan Buku	v
Daftar Isi	vii
Daftar Gambar	ix
BAB 1 Bangsa dan Negara Indonesia	1
A. Hakikat Bangsa dan Negara	2
B. Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan	7
C. Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)	19
D. Memupuk Semangat Kebangsaan	23
Uji Kompetensi	32
BAB 2 Sistem Hukum Dan Peradilan Nasional	37
A. Hukum di Indonesia	38
B. Peradilan Nasional	50
C. Sikap Positif terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku	66
D. Korupsi	70
E. Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia	76
Uji Kompetensi	81
BAB 3 Aktif Berpartisipasi dalam Penegakan Hak Asasi Manusia	85
A. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)	86
B. Sejarah Perkembangan HAM	92
C. Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM	96
D. Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM	105
E. Peran Serta terhadap Penegakan HAM	115
Uji Kompetensi	120
Latihan Ulangan Umum Semester 1	125
BAB 4 Keterkaitan Antara Dasar Negara dan Konstitusi	131
A. Dasar Negara	132
B. Konstitusi Negara	141
C. Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia	146
D. Kedudukan Pembukaan UUD 1945	149
Uji Kompetensi	158

BAB 5 Warga Negara	161
A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia	162
B. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	179
C. Upaya Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara	186
Uji Kompetensi	195
 BAB 6 Sistem Politik Di Indonesia	 199
A. Suprastruktur dan Infrastruktur Politik	200
B. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara	215
C. Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik di Indonesia	239
Uji Kompetensi	244
 Latihan Ulangan Umum Semester 2	 249
Glosarium	257
Daftar Pustaka	260
Indeks	263

Daftar Gambar

BAB 1

Gambar 1.1	Anak dilahirkan	3
Gambar 1.2	Gotong royong	4
Gambar 1.3	Ernest Renant	5
Gambar 1.4	Upacara Bendera	23
Gambar 1.5	Bung Tomo	25
Gambar 1.6	Rapat Budi Utomo	26

BAB 2

Gambar 2.1	Pengadilan	40
Gambar 2.2	Sidang Paripurna MPR	46
Gambar 2.3	Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)	48
Gambar 2.4	Montesquieu	48
Gambar 2.5	Peradilan Militer	61
Gambar 2.6	Razia kendaraan bermotor	69
Gambar 2.7	Demonstrasi	78

BAB 3

Gambar 3.1	Piagam Deklarasi Universal HAM	87
Gambar 3.2	Dr. Franz Magnis Suseno	88
Gambar 3.3	Bayi	89
Gambar 3.4	Pemilu	91
Gambar 3.5	Deklarasi Universal HAM	93
Gambar 3.6	Sidang BPUPKI	95
Gambar 3.7	Nazi Jerman	97
Gambar 3.8	Kasus Tanjung Priok	100
Gambar 3.9	Marsinah	101
Gambar 3.10	Gerakan reformasi	101
Gambar 3.11	Pemboman Hiroshima dan Nagasaki	106
Gambar 3.12	Pengadilan terhadap Slobadan Milosevic	113
Gambar 3.13	Perang etnis di Rwanda	113

BAB 4

Gambar 4.1	Karl Marx, Lenin, Mao Tse Tung	134
Gambar 4.2	Adolf Hitler, Benito Mussolini, Hideki Tojo	135
Gambar 4.3	Prof. Dr. Sri Soemantri	142
Gambar 4.4	Dekrit Presiden 5 Juli 1959	154

BAB 5

Gambar 5.1	Konferensi Meja Bundar	167
Gambar 5.2	Demonstrasi Buruh	180
Gambar 5.3	Pendidikan	184
Gambar 5.4	Pegawai Negeri	188
Gambar 5.5	Kampanye Partai	188

BAB 6

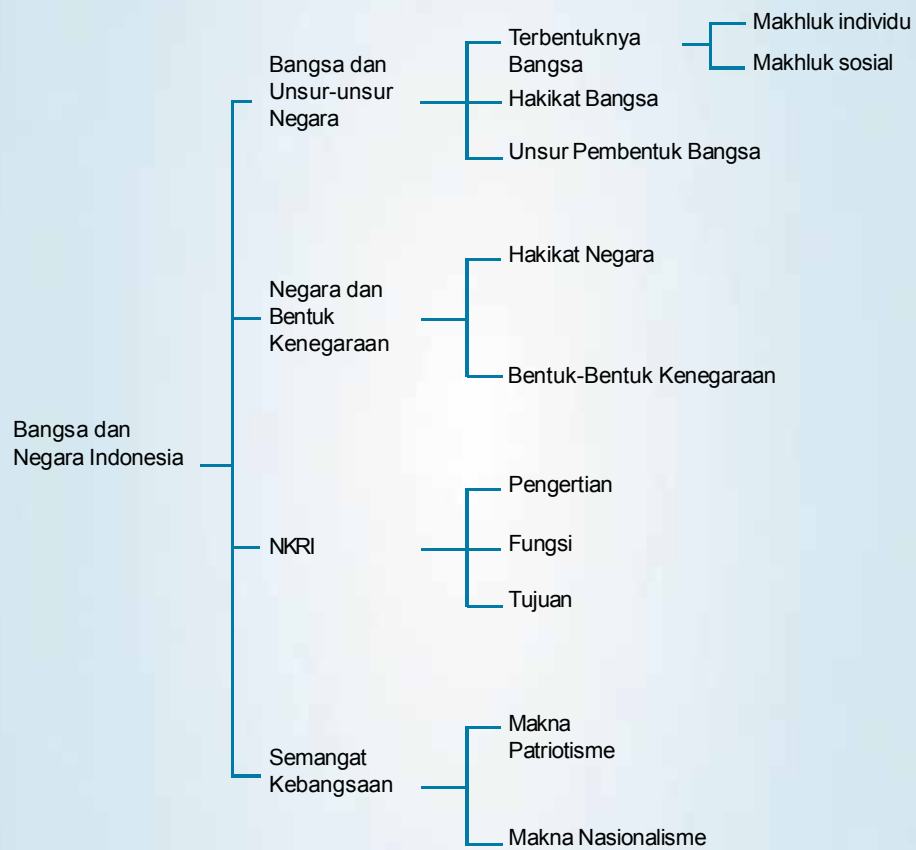
Gambar 6.1	Pelantikan presiden	202
Gambar 6.2	Pemberian tanda kehormatan	204
Gambar 6.3	Hakim Mahkamah Konstitusi	207
Gambar 6.4	Sembilan partai politik	209
Gambar 6.5	Peserta pemilu tahun 1999	211
Gambar 6.6	Talk show di radio	214
Gambar 6.7	Pemilu	219
Gambar 6.8	Ratu Elizabeth	222

BAB 1

Bangsa dan Negara Indonesia



PETA KONSEP



Secara kodrati, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Dalam kaitannya sebagai makhluk sosial, manusia tentu selalu berhubungan dengan sesama demi mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, terjadi interaksi dalam suatu wadah yang disebut masyarakat. Interaksi dalam masyarakat ini pun masih terpilah-pilah menjadi beberapa bidang, misalnya interaksi dalam bidang ekonomi, bidang hukum, bidang pendidikan, bidang politik, bidang spiritual, dan sebagainya. Untuk itu, setiap manusia akan tunduk pada bidang yang mewadahnya.

Terlebih lagi jika manusia itu berkedudukan sebagai warga negara. Manusia-manusia inilah yang disebut dengan rakyat. Mereka harus tunduk dan patuh pada kekuasaan negara. Dalam sekelompok manusia yang bernama rakyat, akan membentuk negara yang pada akhirnya disebut bangsa.

Jadi, apa hakikat bangsa itu? Untuk menemukan jawabannya, coba pelajari uraian materi dalam bab ini. Anda diajak untuk belajar memahami hakikat bangsa, di mana di dalamnya terdapat kelompok rakyat yang merasa senasib sepenanggungan untuk hidup bersama dalam wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A. Hakikat Bangsa dan Negara

Pada uraian Pendahuluan di atas, tentunya Anda telah mendapatkan gambaran tentang sebuah bangsa. Adanya suatu bangsa, tidak lepas dari adanya sekelompok manusia. Manusia ini menduduki posisi sebagai rakyat dan warga negara. Dalam upaya mempertahankan identitasnya, setiap warga negara tentu memegang suatu prinsip dan sikap tertentu untuk mewujudkannya. Sikap itulah yang tercermin dalam sebuah semangat yang dikenal dengan nasionalisme dan patriotisme. Bagaimana perwujudan kedua sikap tersebut? Terlebih dahulu Anda akan diajak belajar mengenal hakikat manusia sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Selanjutnya, Anda akan diajak belajar untuk memahami pengertian sebuah bangsa dan negara. Berikut ini uraiannya.

1. Terbentuknya Bangsa

Secara etimologi, kata "manusia" berasal dari dua bahasa, yaitu bahasa Sanskerta dan bahasa Latin. Dalam bahasa Sanskerta, kata "manusia" berasal dari kata *manu*, sedangkan dalam bahasa Latin, kata "manusia" berasal dari kata *mens*. Kedua asal kata tersebut mempunyai arti berakal budi. Berdasarkan etimologi inilah, dapat memberi petunjuk tentang hakikat manusia yang sebenarnya. Petunjuk ini pula yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya sebagai ciptaan Tuhan. Secara kodrati, manusia dianugerahi akal, perasaan, pikiran, dan keyakinan, sehingga memiliki kualitas hidup. Manusia juga merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan derajat paling tinggi dibanding makhluk hidup lainnya.

Dalam kehidupannya di masyarakat, manusia mempunyai kedudukan sebagai berikut.

a. Manusia sebagai Makhluk Individu



Sumber : <http://images.detik.com>

Gambar 1.1 Sejak dilahirkan memang seorang manusia adalah sebuah makhluk individual

Individu berasal dari kata *individere* artinya tidak dapat dibagi-bagikan atau sebagai manusia yang berdiri-sendiri, manusia perorangan. Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sejak lahir adalah merupakan makhluk pribadi yang tersusun atas jasmani dan rohani. Jasmani membutuhkan sandang, pangan dan papan, sedangkan rohani membutuhkan sesuatu yang tidak dibutuhkan jasmani seperti keamanan dari rasa takut, perlindungan dari rasa ketidakadilan, dan kepercayaan atau keyakinan terhadap Sang Pencipta ketika mengalami suatu kesulitan. Setiap individu memiliki kemampuan potensial kodrati untuk tumbuh dan berkembang, mulai sejak dalam kandungan ibunya, lahir dan kemudian tumbuh berkembang sampai dewasa. Pada dasarnya manusia merupakan *Homo Sapiens* (suatu makhluk yang berakal dan budi). Artinya bahwa manusia yang berpengalaman serta dikaruniai jasmani dan rohani, yang keduanya merupakan kesatuan dan perpaduan serasi yang disebut pribadi.

Manusia memiliki akal budi dan kehendak. Pada awalnya merupakan suatu potensi. Jika dikembangkan terus-menerus akan menjadi pribadi yang sempurna dan mencapai tujuan eksistensinya. Sehubungan dengan itu ia diberi hak-hak asasi, yaitu hak-hak asasi manusia sebagai manusia. Dia tidak hanya berhak menggunakan haknya-haknya itu, namun juga wajib menggunakannya karena hanya secara demikian manusia dapat mengemban tugasnya dan mencapai eksistensinya.

Sejak dilahirkan memang seorang manusia adalah sebuah makhluk individual, namun kenyataannya dia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Sebagai contoh, seorang bayi senantiasa membutuhkan bantuan dan perhatian ibunya agar dia dapat terus tumbuh dan berkembang. Tiap-tiap individu mempunyai keunikan (spesifikasi) yang membedakannya dengan individu yang lain. Keunikan individu memuat (kelebihan dan kekurangan) pada tiap pribadi. Kekurangan manusia yang satu dapat diisi kelebihan manusia yang lainnya. Dengan demikian, maka kesemuanya itu akan mendasari rasa menerima keberadaan dan kebutuhan untuk menjalin kerja sama dengan manusia lain. Sebagai individu, manusia juga hidup bermasyarakat.

Ia hidup, tumbuh, serta berkembang dalam masyarakat di mana dia berada. Hidup, tumbuh, serta berkembangnya suatu individu dalam masyarakat dihayatinya dalam kehidupan nyata dan spontan setiap hari.

Segala yang dikerjakannya, akan merasa ditentukan oleh kehadiran manusia-manusia lain. Ia akan tetap membutuhkan kebersamaan dengan orang lain.

b. Manusia sebagai Makhluk Sosial

Berdasarkan pendapat Aristoteles dan Ibn Khaldun dalam buku "*Ibn Khaldun, The Father of Economic*" karya GN. Atiyeh, IM. Oweiss (1988), manusia tidak mungkin hidup tanpa bantuan orang lain dan selanjutnya dengan menggunakan daya pikirnya manusia berupaya agar dapat memenuhi kebutuhan pokok, tentu dengan memerlukan bantuan orang lain. Untuk menjalin hubungan satu sama lain memerlukan aktivitas komunikasi. Oleh karena itu, kecenderungan manusia



Sumber: <http://www.ppk.or.id>

Gambar 1.2 Kegiatan gotong-royong sebagai bukti manusia sebagai makhluk sosial.

berkeinginan untuk hidup serasi sebagai timbal balik satu sama lain karena manusia mempunyai dua hasrat yaitu berkeinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya dan menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya.

Untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitar tersebut, manusia mempergunakan akal, pikiran, perasaan dan kehendaknya. Dalam menghadapi alam sekelilingnya seperti udara yang dingin, atau alam yang kejam, maka manusia membuat pakaian. Manusia harus makan agar badanya tetap sehat. Mereka mengambil makanan dari alam sekitarnya dengan menggunakan akalnya. Kondisi dan situasi lingkungan alam merupakan faktor yang memotivasi untuk bekerja sama dengan orang lain. Secara modern dorongan tersebut menimbulkan kelompok sosial dalam kehidupan manusia ini karena manusia tidak mungkin hidup tanpa orang lain. Kelompok sosial tersebut merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama.

Naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain disebut (*gregariousness*). Oleh sebab itulah, manusia juga disebut sebagai *Social Animal* (hewan sosial), atau hewan yang mempunyai naluri untuk senantiasa hidup selalu bersama. Naluri untuk hidup bersama tergambarkan dari hasrat manusia untuk selalu menjadi satu (berkelompok) dengan manusia lain dalam suatu masyarakat. Oleh sebab itulah manusia selalu mempergunakan pikirannya.

Berpegang pada pendapat Aristoteles dan Ibnu Khaldun di atas, muncul paham bahwasanya manusia adalah makhluk sosial. Sesungguhnya kemampuan manusia mengembangkan dirinya sendiri sebagai makhluk individu hanya dipunyai manusia karena ia berada dalam anggota masyarakat. Manusia hanya akan disebut manusia, jika ia berada dalam lingkungan manusia lainnya. Jadi, sifat sosial dari manusia bukan sekadar atribut tambahan, tetapi sesuatu yang mendalam dan hakiki yang menentukan kehidupan manusia.

Secara realitas, seorang manusia itu hidup bersama dalam berbagai kelompok yang beragam latar belakangnya. Mula-mula manusia hidup dalam sebuah keluarga. Lalu berdasarkan kepentingan dan wilayah tempat tinggalnya, ia hidup dalam kesatuan sosial yang disebut masyarakat (*community*) dan bangsa.



Berpikir Kritis

1. Carilah minimal 5 gambar yang menunjukkan suatu perbuatan bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain! Jangan lupa, sebutkan sumbernya!
2. Susunlah gambar-gambar tersebut menjadi klipang yang menarik dengan memberikan komentar pada setiap gambar! Hal yang dibahas dalam komentar antara lain:
 - alasan perlunya dilakukan perbuatan tersebut,
 - maksud dan tujuan dilakukannya perbuatan tersebut,
 - manfaat yang diperoleh,
 - nilai/ajaran yang terkandung
3. Selanjutnya, buatlah resume sebanyak lima halaman, lalu kumpulkan pada Bapak/Ibu Guru untuk dinilai!

2. Memahami Hakikat Bangsa

Istilah bangsa merupakan terjemahan dari kata *Nation* (bahasa Inggris). Kata *Nation* berasal dari bahasa Latin *natio* yang artinya sesuatu telah lahir. Kata itu bermakna keturunan, kelompok orang yang berada dalam satu garis keturunan. *Nation* dalam istilah bahasa Indonesia, artinya bangsa. Kata *nation* berubah menjadi *national* yang artinya kebangsaan. Pahamnya dinamakan nasionalisme, yang artinya paham kebangsaan atau semangat kebangsaan.

a. Menurut Otto Bauer (Jerman)

Dalam buku “*The Austrians: A Thousand-year Oddesey*” karangan Gordon (1996), Otto Bauer mengatakan bahwa bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki persamaan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib dan pengamalan sejarah budaya yang tumbuh dan berkembang bersama bangsa tersebut. Dalam Perancis, bangsa adalah suatu *Charakter Gemeinschaft* (persamaan nasib/karakter).

b. Menurut Ernest Renant (Prancis)

Dalam bukunya yang berjudul *La Reforme Intellectuelle et Morale* (1929), Ernest Renant berpendapat bahwa bangsa adalah kesatuan jiwa. Jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu. Dalam istilah Perancis, bangsa adalah *Ledesir d’etre ensemble*. Bangsa dapat terdiri atas ratusan, ribuan, bahkan jutaan manusia, tetapi sebenarnya merupakan kesatuan jiwa. Apabila semua manusia yang hidup di dalamnya mempunyai kehendak untuk bersatu maka sudah merupakan satu bangsa.



Sumber :
<http://www.denstoredanske.dk/>

Gambar 1.3 Ernest Renant

c. Menurut Hans Kohn (Jerman)

Menurut Hans Kohn dalam bukunya “*Nationalism and Liberty: The Swiss Example*” (1956), bangsa diartikan sebagai hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Suatu bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tidak bisa dirumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa memiliki berbagai faktor obyek tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Faktor-faktor itu berupa persamaan keturunan, wilayah, bahasa, adat istiadat, kesamaan politik, perasaan, dan agama.

d. Menurut Jalobsen dan Lipman

Menurut Jalobsen dan Lipman dalam buku “*Politics: Individual and State*” karya Robert Wesson (1998), bangsa adalah suatu kesatuan budaya (*cultural unity*) dan satu kesatuan politik (*political unity*). Dari beberapa pengertian bangsa oleh beberapa orang ahli yang satu denganlainnya berbeda. Hal ini disebabkan oleh sudut pandang mereka yang berbeda pula.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai jenis definisi para ahli tata negara tentang konsep bangsa, kerjakan tugas ini!

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (1-2 halaman) mengenai pengertian bangsa menurut pendapat Anda!
2. Anda dapat memilih negara-negara mana pun (selain Indonesia) di dunia sebagai contoh dalam memperkuat definisi yang Anda buat sendiri.
3. Lengkapi data-data Anda dengan mencari di berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya. Kumpulkan tugas Anda kepada Guru untuk diberi nilai!

3. Unsur-unsur Pembentuk Bangsa

Benedict Anderson dalam bukunya “*The Nation as Imagines Community*” (2001) mengartikan bangsa sebagai komunitas politik yang dibayangkan dalam wilayah yang jelas batasnya dan berdaulat. Definisi Benedict Anderson lebih menekankan pada faktor subjektif dimana menekankan pada faktor-faktor subjektif seperti sikap, persepsi dan sentimen. Secara garis besar Ada tiga unsur pokok dari pengertian itu, yaitu :

a. Komunitas politik yang dibayangkan

Anggota dari bangsa yang paling kecil sekalipun tidak saling kenal. Meskipun demikian, para anggota bangsa itu selalu memandang satu sama lain sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Perasaan sebangsa inilah yang menyebabkan banyak anggotanya rela mati bagi komunitas yang dibayangkan itu.

b. Mempunyai batas wilayah yang jelas

Bangsa dibayangkan sebagai sesuatu yang pada hakikatnya bersifat terbatas. Mengapa? Karena bangsa-bangsa yang paling besar sekalipun yang penduduknya ratusan juta jiwa mempunyai batas wilayah yang relatif jelas. Di luar perbatasan itu adalah bangsa-bangsa lain.

c. Berdaulat

Bangsa dibayangkan sebagai berdaulat. Ini karena sebuah bangsa berada di bawah suatu negara yang mempunyai kekuasaan atas seluruh wilayah dan bangsa tersebut.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat diuraikan bahwa unsur pembentuk bangsa antara lain:

- a. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
- b. Berada dalam suatu wilayah tertentu.
- c. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
- d. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita.
- e. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.

Dari unsur-unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa bangsa merupakan sekelompok manusia yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang mempunyai karakter, identitas atau budaya yang khas, dan bersatu. Selain itu mereka tunduk pula pada aturan tertentu karena persamaan nasib, tujuan atau cita-cita. Pengertian bangsa dan pengertian negara adalah dua hal yang berbeda karena keduanya memiliki unsur-unsur pembentuk yang berbeda.



B. Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan

1. Hakikat Sebuah Negara

Untuk memahami mengenai negara, maka terlebih dahulu akan diawali dengan penelusuran kata negara secara literal. Istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni *state* (bahasa Inggris), *staat* (bahasa Belanda dan Jerman) dan *etat* (Bahasa Prancis). Kata *staat*, *state*, *etat* diambil dari kata bahasa Latin *status* atau *statum* yang berarti keadaan yang tegak dan tetap, atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang tegak dan tetap.

Kata *status* atau *statum* lazim diartikan sebagai *standing* atau *station* (kedudukan). Istilah ini dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia, yang juga sama dengan istilah *status civitatis* atau *status republicae*. Dari pengertian yang terakhir inilah, kata *status* pada abad ke-16 dikaitkan dengan kata negara.

a. Pengertian Negara

Negara berbeda dengan bangsa. Jika bangsa merujuk pada kelompok orang atau persekutuan hidup, sedangkan negara merujuk pada sebuah organisasi sekelompok orang yang berada di dalamnya. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.

Secara terminologi, negara diartikan dengan organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup dalam daerah tertentu dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Pengertian ini mengandung nilai konstitutif dari sebuah negara yang mensyaratkan adanya unsur dalam sebuah negara yakni adanya masyarakat (rakyat), adanya wilayah (negara), dan adanya pemerintahan yang berdaulat.

Berbagai pengertian negara menurut para ahli, adalah sebagai berikut.

1) *Logemann*

Negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan sesuatu masyarakat.

2) *George Jellinek*

Negara adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah berkediaman di wilayah tertentu.

3) *Mr. Kranenburg*

Negara adalah suatu organisasi yang timbul karena kehendak dari suatu golongan atau bangsanya sendiri.

4) *Roger H. Soltan*

Negara didefinisikan dengan alat (*agency*) atau wewenang (*authority*) yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat

5) *Harold J. Laski*

Negara merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa, dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu.

6) *Max Weber*

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

7) *Mac Iver*

Negara diartikan dengan asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang diberikan kekuasaan memaksa.

8) *Prof. Miriam Budiardjo*

Negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya.

Dari beberapa pendapat tentang negara tersebut, dapat dipahami secara sederhana bahwa yang dimaksud dengan negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut warganegara untuk taat pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

b. Sifat Negara

Negara mempunyai sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya dan hanya terdapat pada negara serta tidak terdapat pada asosiasi atau organisasi-organisasi lainnya. Umumnya, menurut Miriam Budiardjo setiap negara mempunyai sifat memaksa, sifat monopoli dan mencakup semua.

1) *Sifat Memaksa*

Agar peraturan perundang-undangan ditaati dan dengan demikian penertiban dalam masyarakat tercapai serta dapat mencegah terjadinya anarki, maka negara memiliki sifat memaksa. Artinya mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Sarana itu adalah polisi, tentara, dan sebagainya. Organisasi atau asosiasi yang lain dari negara juga mempunyai aturan. Akan tetapi, aturan-aturan yang dikeluarkan oleh negara lebih mengikat.

Di dalam masyarakat yang bersifat homogen dan ada konsensus nasional yang kuat mengenai tujuan-tujuan bersama, biasanya sifat paksaannya tidak begitu menonjol. Di negara-negara baru yang kebanyakan belum homogen dan konsensus nasionalnya kurang kuat, seringkali sifat paksaan dipakai seminimal mungkin dan mungkin dipakai upaya persuasi (meyakinkan) terlebih dahulu.

Unsur paksa dapat dilihat misalnya pada ketentuan tentang pajak. Setiap warganegara harus membayar pajak dan orang yang tidak membayar pajak dapat dikenakan sanksi.

2) *Sifat Monopoli*

Negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama. Contoh: menjatuhkan hukuman kepada setiap warga negara yang melanggar peraturan, menjatuhkan hukuman mati, mewajibkan warga negaranya untuk mengangkat senjata kalau negaranya diserang oleh musuh, memungut pajak dan menentukan mata uang yang berlaku dalam wilayahnya, melarang aliran kepercayaan atau aliran politik tertentu yang dinilai bertentangan dengan tujuan masyarakat.

3) Sifat Mencakup Semua

Semua peraturan perundang-undangan (misalnya keharusan membayar pajak) berlaku untuk semua orang tanpa kecuali hal ini memang diperlukan, karena kalau seseorang kalau seseorang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha negara kearah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan pula. Lagipula menjadi warganegara tidak berdasarkan kemauan sendiri (*involuntary membership*) dan hal ini berbeda dengan asosiasi lain dimana keanggotaanya bersifat sukarela.



Berpikir Kritis

Setelah memahami tentang konsep, pengertian, dan sifat negara, lakukan tugas berikut ini!

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan singkat (3-4 halaman) mengenai pendapatmu mengenai sifat-sifat negara (3 sifat) yang tercermin di dalam konstitusi kita (sesuai dengan pasal-pasal didalam batang tubuh UUD 1945). Misalnya sifat Monopoli, ditunjukkan oleh pasal 33 lalu juga sebutkan pasal-pasal lainnya. Jelaskan argumentasi Anda!
2. Anda dapat melengkapinya dengan mencari di berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya.
3. Kumpulkan paper singkat Anda kepada Gurumu untuk dinilai.

c. Unsur-unsur Terbentuknya Negara

Dalam rumusan Konvensi Montevideo (1933) menyatakan bahwa "Negara sebagai suatu pribadi hukum internasional seharusnya memiliki kualifikasi-kualifikasi berikut : (a) penduduk yang menetap; (b) wilayah tertentu; (c) suatu pemerintahan; dan (d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain".

Pendapat Mac Iver dalam buku "*Encyclopedia of Government and Politics*" karangan Mary H dan Mourice K. (1992), suatu negara harus memenuhi 3 (tiga) unsur pokok yaitu : pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu. Ketiga unsur ini oleh Mahfud MD, sebagaimana disebutkan dalam buku "*Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan*" karangan Mansour Fakhri, disebut sebagai unsur konstitutif. Tiga unsur ini perlu ditunjang dengan unsur lain seperti pengakuan dunia Internasional dan adanya konstitusi yang oleh Mahfud disebut dengan unsur deklaratif.

1) Unsur Konstitutif Negara

Unsur konstitutif adalah unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terbentuknya negara. Suatu negara akan kesulitan dalam menyelenggarakan kehidupannya jika masih memiliki masalah dengan salah satu unsur konstitutifnya.

Misalnya, negara Palestina masih menemui masalah berkaitan dengan wilayah negara. Wilayahnya masih menjadi sengketa dengan Israel, meskipun Palestina telah memiliki rakyat dan pemerintahan.

Bangsa Eskimo yang berada di Kutub Utara tidak bisa dikatakan negara sebab tidak memiliki pemerintahan. Unsur konstitutif negara adalah unsur yang menentukan ada atau tidaknya suatu negara. Belum adanya salah satu unsur mengakibatkan belum adanya negara.

Unsur konstitutif negara mencakup adanya wilayah yang meliputi darat, udara, dan perairan (khusus perairan tidak mutlak), rakyat atau masyarakat, dan pemerintahan yang berdaulat.

a) Wilayah tertentu

Wilayah dalam sebuah negara merupakan unsur yang harus ada, karena tidak mungkin ada negara tanpa batas-batas teritorial yang jelas. Secara mendasar, wilayah dalam sebuah negara biasanya mencakup daratan (wilayah darat), perairan (wilayah laut/perairan) dan wilayah udara (wilayah udara).

Daratan (wilayah darat) suatu negara dibatasi oleh wilayah darat atau laut (perairan) negara lain. Perbatasan wilayah sebuah negara biasanya ditentukan berdasarkan perjanjian. Perjanjian internasional yang dibuat antara dua negara disebut perjanjian bilateral (*bi* = dua); perjanjian yang dibuat antara banyak negara disebut perjanjian multilateral (*multi* = banyak). Perbatasan antardua negara dapat berupa: perbatasan alam; seperti sungai, danau, pengunungan atau lembah; perbatasan buatan; seperti pagar tembok, pagar kawat, tiang tembok; perbatasan ilmu pasti yakni dengan menggunakan ukuran garis lintang dan garis bujur pada peta bumi.

Perairan (wilayah laut) menjadi bagian atau termasuk wilayah suatu negara disebut perairan teritorial dari negara yang bersangkutan. Laut teritorial adalah wilayah laut dengan batas 12 mil dari titik ujung terluar pulau-pulau di Indonesia pada saat pasang surut ke arah laut. Lautan yang berada di luar perairan teritorial disebut lautan bebas (*Mare Liberum*).

Disebut dengan lautan bebas, karena wilayah perairan tersebut tidak termasuk wilayah kekuasaan suatu negara sehingga siapapun bebas memanfaatkannya.

Udara yang berada di atas wilayah daratan dan perairan teritorial suatu negara merupakan bagian dari wilayah udara sebuah negara. Mengenai batas ketinggian sebuah wilayah negara tidak memiliki batas yang pasti, asalkan negara yang bersangkutan dapat mempertahankannya.

b) Penduduk yang menetap

Penduduk adalah sekelompok orang yang mendiami daerah tertentu, dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya.

Setiap negara mempunyai penduduk, dan kekuasaan negara menjangkau semua penduduk di dalam wilayahnya. Penduduk dalam suatu negara menunjukkan beberapa ciri khas yang membedakannya dengan penduduk atau bangsa lain. Misalnya, dalam kebudayaannya, nilai politiknya, maupun identitas nasionalnya.

Menurut Austin Renney, penduduk suatu negara digolongkan menjadi dua, yaitu :

- (1) warga negara dan
- (2) orang asing.

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Mereka memberikan kesetiaannya kepada negara negara itu, menerima perlindungan darinya, serta menikmati hak untuk ikut serta dalam proses politik.

Sementara itu, orang asing adalah orang-orang yang untuk sementara atau tetap bertempat tinggal di negara tertentu, tetapi tidak berkedudukan sebagai warga negara. Mereka adalah warga negara lain yang dengan izin pemerintah setempat menetap di negara yang bersangkutan. Perbedaan lainnya, setiap warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus dengan negaranya, meskipun yang bersangkutan telah berdomisili di luar negara selama ia tidak memutuskan kewarganegaraannya. Di lain pihak, orang asing hanya mempunyai hubungan dengan negara di mana ia tinggal sejauh ia masih bertempat tinggal di wilayah negara tersebut.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 3-5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema "Perbandingan hak dan kewajiban antara Warga Negara Indonesia dan Warga Asing di negara Indonesia".
3. Tiap kelompok mungkin saja memilih judul sesuai dengan yang dipilih masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama.
4. Buatlah laporan singkat, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah Gurumu bertindak sebagai Moderator.
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan kelompok Anda kepada guru untuk dinilai.
6. Hasil laporan akan dijilid untuk diserahkan ke perpustakaan sekolah.

c) Pemerintah yang Berdaulat

Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan negara. Oleh karenanya pemerintah seringkali menjadi personifikasi sebuah negara. Pemerintah menegakan hukum dan memberantas kekacauan, mengadakan perdamaian dan menyelaraskan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Pemerintah yang menetapkan, menyatakan dan menjalankan kemauan-kemauan individu yang tergabung dalam organisasi politik yang disebut negara. Pemerintah adalah badan yang mengatur urusan sehari-hari, yang menjalankan kepentingan-kepentingan bersama.

Pemerintah melaksanakan tujuan-tujuan negara dan menjalankan fungsi-fungsi kesejahteraan bersama. Pemerintah suatu negara mempunyai kedaulatan ke luar dan ke dalam. Berdaulat ke luar, artinya pemerintah berkuasa bebas, tidak terikat dan tidak tunduk pada kekuatan lain, mempunyai kedudukan yang sederajat dengan negara-negara lain, sehingga bebas dari campur tangan negara lain. Berdaulat ke dalam, pemerintah memiliki kewenangan tertinggi dalam mengatur organisasi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) *Unsur-unsur Deklaratif Negara*

Unsur Deklaratif adalah unsur yang sifatnya pernyataan dan bersifat melengkapi unsur konstitutif. Meskipun unsur deklaratif bukan merupakan unsur pembentuk (konstitutif), dalam tata pergaulan internasional unsur deklaratif sangat diperlukan. Suatu negara yang baru merdeka sangat bekepentingan untuk terpenuhinya unsur deklaratif, khususnya unsur pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur Deklaratif meliputi adanya tujuan negara, konstitusi, pengakuan dari negara lain baik secara *de jure* maupun secara *de facto*, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa, misalnya PBB.

Pengakuan (*recognition*) terhadap suatu negara adalah perbuatan bebas oleh satu atau lebih negara untuk mengakui eksistensi suatu wilayah tertentu yang dihuni suatu masyarakat manusia yang secara politis terorganisir, tidak terkait kepada negara yang telah lebih dulu ada serta mampu menjalankan kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Dengan tindakan ini, mereka (negara-negara yang memberi pengakuan) menyatakan kehendak untuk memandang wilayah itu sebagai salah satu anggota masyarakat internasional.

Pengakuan suatu negara dari negara lain bukan unsur yang menentukan bagi suatu negara, namun merupakan unsur yang sangat penting dalam hubungan antarnegara. Tidak ada satu negara pun dapat hidup terasing dari negara-negara lain. Alat-alat komunikasi modern kini telah semakin mendorong terciptanya hubungan saling tergantung antar negara-negara di dunia.

Makna pengakuan dari negara lain adalah untuk menjalin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang sejajar sebagai suatu organisasi politik yang merdeka dan berdaulat di tengah keluarga bangsa-bangsa. Dengan begitu, negara tersebut dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lainnya secara aman dan sempurna. Negara tidak khawatir bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada.

Pengakuan suatu negara atas keberadaan negara lain didasarkan pada banyak pertimbangan. Pertimbangan pertama tentu saja karena negara yang bersangkutan secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara. Persyaratan ini ditetapkan oleh hukum internasional, khususnya Konvensi Montevideo 1933. Ciri-ciri pokok sebuah negara sebagai subjek hukum internasional adalah memiliki:

- a) penduduk yang permanen,
- b) wilayah tertentu,
- c) suatu pemerintahan, dan
- d) kemampuan untuk berhubungan dengan negara-negara lain.

Macam pengakuan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengakuan secara *de jure*, artinya pengakuan berdasar hukum. Menurut negara yang mengakui, negara yang diakui tersebut secara formal memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional untuk dapat berpartisipasi aktif dalam tata pergaulan internasional
- 2) Pengakuan secara *de facto*, artinya pengakuan tentang kenyataan mengenai adanya suatu negara. Suatu negara diakui karena memang secara nyata telah memenuhi unsur-unsurnya sebagai negara.

Pengakuan *de facto* tidak sekuat pengakuan *de jure*. Pada umumnya, sebelum memberi pengakuan *de jure*, negara terlebih dulu memberi pengakuan *de facto*. Perbedaan antara pengakuan *de facto* dan *de jure* adalah sebagai berikut.

- 1) Wakil-wakil negara yang diakui secara *de facto* tidak berhak atas kekebalan dan hak istimewa diplomatik.
- 2) Pengakuan *de facto* dapat ditarik kembali.
- 3) Negara yang diakui secara *de jure* dapat mengajukan klaim atas segala barang atau benda yang berada di wilayah negara yang mengakui tersebut.

d. Fungsi Negara

Fungsi negara merupakan gambaran yang dilakukan negara untuk mencapai tujuannya. Fungsi negara dapat dikatakan sebagai tugas negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan dibentuk untuk menjalankan tugas-tugas negara. Pada dasarnya, negara dibentuk agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia, baik selaku pribadi maupun kehidupan berkelompok. Dengan hidup bernegara diharapkan keinginan dan kebutuhan hidup manusia akan makin mudah dan efektif.

Negara mempunyai fungsi pelayanan. Artinya negara dengan alat perlengkapannya berusaha untuk melayani segala keperluan warga negaranya baik yang ada di dalam maupun di luar negeri. Dari konsep pemikiran ini, pemerintah merupakan abdi atau pelayan masyarakat, bukan minta dilayani masyarakat. Ada tiga kelompok fungsi negara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu.
- 2) Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
- 3) Negara menjadi penengah yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat dan menyediakan suatu sistem peradilan bebas dan independen yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.

Menurut Miriam Budiardjo dalam buku *“Dasar-Dasar Ilmu Politik”* (1997), fungsi pokok negara, yaitu :

- 1) Melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah konflik-konflik yang terjadi di masyarakat.
- 2) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.
Fungsi ini dijalankan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang.
- 3) Mengupayakan aspek pertahanan dan keamanan, guna menjaga serangan dari luar dan rongrongan dari dalam negeri. Untuk ini, negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- 4) Menegakkan keadilan bagi segenap rakyatnya melalui badan-badan pengadilan yang telah ada dan diatur dalam konstitusi negara.

Menurut Charles E. Merriem dalam buku *“The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training”* (1961), ada lima fungsi negara, yaitu:

- 1) Menegakkan keadilan
Hal ini dilaksanakan melalui badan-badan peradilan yang ada.
- 2) Perlindungan
Negara mempunyai fungsi perlindungan, yakni memberi perlindungan terhadap warga negaranya, baik yang ada di dalam maupun di luar negeri
- 3) Pertahanan
Guna menjaga keutuhan dan kelangsungan hidup, negara mempunyai fungsi pertahanan. Untuk menghindari segala kemungkinan ancaman serangan dari dalam maupun luar, maka negara dilengkapi dengan alat-alat pertahanan.
- 4) Melaksanakan penertiban
Untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berbagai bentrokan dalam masyarakat, negara harus melaksanakan fungsi penertiban. Dapat dikatakan bahwa negara bertindak sebagai "stabilisator" terhadap berbagai gejolak atau gangguan yang mungkin terjadi.
- 5) Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada masa sekarang fungsi ini dianggap sangat penting terutama bagi negara-negara baru. Pandangan ini di Indonesia tercermin dalam usaha pemerintah untuk melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan.

Mengenai fungsi negara itu, ada banyak teori, sebagai berikut.

1) *Anarkisme*

Anarkisme berasal dari bahasa Yunani (*anarchis*) berarti 'tanpa pemerintah'. Anarkisme merupakan penyangkalan terhadap negara dan pemerintah. Sesungguhnya anarkisme tidak dapat disebut menganut teori tentang fungsi negara. Menurut anarkisme, kodrat manusia adalah baik dan bijaksana. Untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan mengusahakan kesejahteraan masyarakat, manusia tidak perlu negara dan pemerintah. Semua hal itu dapat dicapai sendiri oleh para individu dalam perhimpunan-perhimpunan yang dibentuk secara sukarela. Negara sebagai organisasi tidak diperlukan.

2) *Individualisme*

Secara politis, individualisme adalah paham yang mengajarkan bahwa negara ada untuk individu, bukan untuk negara. Pendek kata individualisme sangat mengagung-agungkan kebebasan individu dalam mengejar kepentingannya. Menurut paham Individualisme, negara mempunyai fungsi memelihara dan mempertahankan keamanan dan ketertiban individu dan masyarakat. Negara dan aparaturnya hanya ditugaskan untuk menjaga agar individu tidak diganggu keamanan dan ketertibannya, dalam hidup, kebebasan, dan miliknya.

3) *Sosialisme*

Sosialisme adalah sebuah gerakan sosial yang menghendaki campur tangan negara yang seluas mungkin dalam bidang perekonomian. Fungsi negara harus diperluas hingga tidak lagi aktivitas sosial yang tidak diselenggarakan oleh negara. Semua aktivitas negara ditujukan untuk mencapai pemenuhan kesejahteraan bersama.

4) *Komunisme*

Komunisme adalah salah satu bentuk sosialisme. Baik komunisme maupun sosialisme bertujuan untuk memperluas fungsi negara dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Bedanya, komunisme membenarkan tercapainya tujuan-tujuan negara dengan jalan revolusioner, sementara sosialisme masih percaya pada cara-cara damai. Komunisme juga lebih ekstrem dalam pelaksanaan programnya.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok diskusi yang terdiri dari 4-5 orang, dengan anggota siswa laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikanlah sebuah tema "Perbandingan antara penerapan paham Sosialisme dibandingkan Komunisme di dalam menjalankan fungsi negara"! Ambillah 2 contoh negara, yang menganut paham Sosialis dan Komunis.

3. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai judul sesuai dengan yang dipilih masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama.
4. Lengkapi bahan diskusi dari berbagai sumber pustaka seperti internet, buku-buku ilmiah, majalah atau koran.
5. Buatlah laporan (1 - 2 halaman), lalu presentasikanlah di depan kelas dihadapan kelompok yang lain. Mintalah Gurumu bertindak sebagai Moderator.
6. Kumpulkanlah hasil pembahasan kelompok Anda kepada guru untuk dinilai!

e. Bentuk Negara

Para pakar mempunyai pandangan yang berbeda mengenai bentuk negara. Namun, selama ini berkembang pendapat yang kuat dan mentradisi bahwa bentuk negara pasti menunjuk pada negara kesatuan atau negara serikat. Oleh karena itu, dalam tulisan ini kedua bentuk negara itulah yang terutama akan di bahas di samping bentuk negara lainnya.

Negara kesatuan ialah negara yang merdeka dan berdaulat di mana di seluruh wilayah negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara ini disebut bersusunan tunggal. Negara kesatuan dapat mengambil bentuk :

- 1) Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, di mana kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi yang ada didaerahnya .
- 2) Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi di mana segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerah tinggal melaksanakan.

Dalam kondisi modern ini jarang ditemui adanya negara kesatuan yang memakai sistem sentralisasi, mengingat makin kompleksnya tugas dari negara dan juga luasnya wilayah negara yang bersangkutan.

Negara serikat, adalah di dalam negara ada negara. Urusan negara dibagi menjadi dua, yaitu yang secara terperinci (*limitatif*) diberikan kepada pemerintah federal (*delegated powers*) dan sisanya menjadi urusan negara bagian.

Perbandingan antara negara kesatuan dengan negara serikat adalah sebagai berikut:

- 1) Negara bagian suatu federasi memiliki *powers constitutif*, yakni wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi, sedangkan dalam negara kesatuan, organisasi bagian-bagian negara secara garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat.
- 2) Dalam negara federasi, wewenang membentuk undang-undang pusat untuk mengatur hal-hal tertentu telah terperinci satu persatu dalam konstitusi federal; sedangkan dalam negara kesatuan wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam rumusan umum, dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat itu.

Selain negara serikat (federasi) dikenal juga serikat negara (konfederasi). G. Jellinek dalam buku *“Allegemeinen Staatsre”* (1993), membedakan federasi dengan konfederasi berdasarkan kriteria "di manakah letak kedaulatan itu". Jika terletak pada gabungannya, maka itu merupakan negara serikat, tetapi jika terletak pada negara-negara bagiannya, maka itu merupakan serikat negara. Sementara itu, Kranenburg dalam buku *“Theories of Comparative Politics”* karangan Ronald HC. (2001) membedakannya berdasarkan kriteria "dapat atau tidaknya pemerintah gabungan itu membuat peraturan-peraturan hukum yang langsung mengikat atau berlaku terhadap warga negara dari negara bagian". Jika ya, maka itu adalah negara serikat; sedangkan jika tidak, maka itu adalah serikat negara. Selain bentuk kenegaraan di atas, bentuk-bentuk kenegaraan lainnya adalah, sebagai berikut :

1) Negara Dominion

Dominion merupakan suatu negara yang pada awalnya merupakan bekas jajahan Inggris, setelah negara tersebut merdeka dan berdaulat tetap mengakui Raja/Ratu Inggris sebagai raja/ratunya sebagai lambang persatuan mereka. Mereka berhak menentukan/mengurus politik dalam dan luar negerinya sendiri, serta bebas keluar dari ikatan bersama itu. Organisasi ini dinamakan juga sebagai British Commonwealth of Nations. Termasuk dalam negara ini adalah Kanada, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, India, dan Malaysia.

2) Negara Protektoral

Negara protektoral merupakan suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Lazimnya yang diserahkan/dimintakan perlindungan itu adalah soal hubungan luar negeri pelindung. Namun ada juga yang selain soal hubungan luar negeri dan pertahanan juga sebagian besar urusan dalam negeri diserahkan kepada negara pelindung (urusan dalam negeri yang penting). Protektoral semacam ini disebut protektoral kolonial. Misalnya: Monaco pernah menjadi protektoral Perancis.

3) Uni (Union)

Negara uni adalah dua negara atau lebih yang masing-masing merdeka dan berdaulat akan tetapi mempunyai satu kepala negara yang sama. Uni dibedakan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu:

(1) Uni riil, yaitu apabila negara-negara itu memiliki alat perlengkapan bersama yang mengurus kepentingan bersama, sesuai kesepakatan yang telah ditentukan terlebih dahulu. seperti Uni Austria-Hongaria tahun 1857-1918, Uni Swedia-Norwegia tahun 1915-1905; dan (2) Uni personal, yaitu apabila hanya kepala negaranya yang sama, sedangkan kepentingan dan alat kelengkapannya berbeda. Seperti, Uni Austria-Hongaria tahun 1918 dan Uni Inggris-Skotlandia tahun 1603-1707.



SEKILAS INFO

Undang - undang Dasar Australia memuat aturan pembagian kekuatan yang dilakukan antara negara bagian dan persemaikmuran (Commonwealth) yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal yang mewakili Ratu Inggris.

f. Tujuan Negara

Setiap negara didirikan tentu mempunyai tujuan. Pada hakikatnya, tujuan setiap negara berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Hal ini disesuaikan dengan pandangan hidup rakyat dan landasan pandangan hidup yang bersumber pada nilai-nilai luhur bangsa tersebut. Setiap negara, tujuan negara dirumuskan dalam konstitusinya atau pada hukum dasar negara tersebut.

Beberapa pendapat para ahli tata negara mengenai tujuan negara adalah sebagai berikut.

1) JJ. Rousseau

Tujuan negara adalah untuk membentuk suatu persamaan serta kebebasan yang diperuntukkan bagi semua warganya.

2) Roger H. Soltau

Tujuan negara adalah membuat suatu kemungkinan serta kesempatan berkembang bagi rakyatnya dan mengembangkan kreativitas sebebaskan mungkin.

3) Harold J. Laski

Tujuan negara adalah membentuk suatu suasana yang baik supaya setiap warga negara mampu meraih cita-cita yang diharapkan.

Perbedaan definisi tujuan negara dari beberapa ahli tata negara di atas, pada hakikatnya dipengaruhi oleh situasi serta latar belakang negara asal para ahli tata negara tersebut. Ideologi resmi dari suatu negara sangat mempengaruhi tujuan negara. Misalnya, tujuan negara komunis adalah menciptakan kemakmuran bersama secara menyeluruh bagi segenap warga negara secara merata dan terciptanya kehidupan masyarakat tanpa kelas (strata). Tujuan negara liberal adalah menciptakan kemerdekaan dan pencapaian kebebasan tiap-tiap individu (warga negara) hingga dapat terpenuhi kesejahteraan hidupnya.



Pengertian, Fungsi, dan Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

1. Memahami Pengertian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Cita-cita bangsa Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea kedua. Penjabaran secara terperinci tentang tujuan negara Indonesia adalah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu:

- Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- Memajukan kesejahteraan umum.
- Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Penjabaran selanjutnya mengenai tujuan negara Indonesia terdapat dalam tujuan pembangunan nasional Indonesia. Penetapan visi, misi, strategi, dan agenda pembangunan nasional untuk tiap lima tahun ke depan akan dituangkan dalam tiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tiap lima tahun sekali.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan. Ketentuan bahwa negara Indonesia berbentuk negara kesatuan dapat kita temukan dalam pasal 1 UUD 1945, yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Ketentuan itu diperkuat oleh pasal 18 UUD 1945 ayat 1, yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Negara kesatuan yang dipilih adalah negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dalam UU disebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam sistem ini, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan tersebut dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya dikatakan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab, dimana pemerintah daerah boleh menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.

Secara teoretis, penerapan asas desentralisasi didasari oleh keinginan menciptakan demokrasi, pemerataan, dan efisiensi. Diasumsikan bahwa desentralisasi akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi masyarakat lokal. Sistem yang demokratis ini diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan pembangunan, terutama di daerah pedesaan. Sedangkan efisiensi dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan masyarakat menjadi lebih dekat.

2. Fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Fungsi mutlak dari setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Melaksanakan penertiban (*law and order*)
Mencapai tujuan bersama dan mencegah bentrokan di dalam masyarakat sehingga terjadi kestabilan
 - b. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Fungsi ini merupakan fungsi yang penting bagi negara-negara baru. Pemerintah Indonesia menerapkan fungsi ini melalui Program Pembangunan Nasional.
 - c. Pertahanan
Fungsi ini untuk menjaga kemungkinan timbulnya serangan dari luar. Negara memfasilitasi angkatan perangnya beserta peralatan pertahanannya untuk menjalankan fungsi ini.
 - d. Menegakkan keadilan
Fungsi ini diharapkan dapat menciptakan *Supremacy of Law* melalui badan-badan peradilan.
- Berdasarkan pemikiran para ahli ketatanegaraan, tugas-tugas pemerintah dalam mengurus rumah tangga negara juga memiliki fungsi reguler dan fungsi *agent of development*.

a. Fungsi Reguler

Pemerintah menjalankan fungsinya berkenaan dengan tugas yang mempunyai dampak langsung yang bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Fungsi reguler yang dimaksud antara lain:

- 1) Negara sebagai *political state*, memelihara ketenangan dan ketertiban serta keamanan dan pertahanan
- 2) Negara sebagai administratif. Fungsi ini menitikberatkan pada kekuatan di tangan rakyat, pemerintah hanya melaksanakan fungsi administrasi berdasarkan pendelegasian yang diberikan rakyat melalui wakil-wakil rakyat.
- 3) Negara sebagai sumber hukum, pemerintah harus bertindak adil terhadap semua warga negaranya tanpa terkecuali
- 4) Negara sebagai diplomatik, yaitu menjalankan hubungan luar negara dan persahabatan dengan negara-negara lain.

b. Fungsi Agent of Development

Negara berfungsi sebagai stabilisator dan inovator. Sebagai stabilisator, pemerintah wajib melaksanakan stabilisator dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya. Stabilitas dalam bidang politik dengan menciptakan suasana politik yang kondusif demi persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengakomodir semua faktor, baik faktor ekonomi maupun ideologis. Stabilitas dalam bidang ekonomi dengan menciptakan perekonomian yang stabil, meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas dalam bidang sosial budaya menciptakan dan memotivasi kepribadian-kepribadian bangsa yang positif sehingga dapat menunjang pembangunan.

Sebagai inovator, negara dapat menciptakan ide-ide yang baru terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembangunan. Pada akhirnya tercipta hal-hal baru yang dibutuhkan masyarakat.



KATA SANG TOKOH

Seorang patriot sejati akan selalu membenci terjadinya ketidakadilan di negaranya sendiri melebihi terjadinya ketidakadilan di negara-negara lainnya.

Clarence Seward Darrow

Sumber: www.infoplease.com

3. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Bangsa Indonesia bercita-cita mewujudkan negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan rumusan yang singkat, negara Indonesia bercita-cita mewujudkan masyarakat Indonesia adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini sesuai dengan amanat dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV. Secara rinci adalah sebagai berikut.

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- b. Memajukan kesejahteraan umum,
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
- d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Adapun visi bangsa Indonesia adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi, serta berdisiplin.

Untuk mewujudkan visi bangsa Indonesia ditetapkan misi sebagai berikut.

- a. Pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang proaktif, mandiri, maju, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- c. Perwujudan politik luar negeri yang berdaulat, bermanfaat, bebas, dan proaktif bagi kepentingan nasional dalam menghadapi perkembangan global.
- d. Perwujudan kesejahteraan rakyat yang ditandai oleh meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermanfaat serta memberi perhatian utama pada tercukupinya kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja.
- e. Perwujudan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu guna memperteguh akhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin, bertanggung jawab, dan berketrampilan, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.
- f. Perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berlandaskan keadilan dan kebenaran.
- g. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlak mulia, toleran, rukun, dan damai.
- h. Penjaminan kondisi aman, damai, tertib, dan ketenteraman masyarakat.
- i. Perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian, dinamis, kreatif, dan berjaya tahan terhadap pengaruh globalisasi.
- j. Perwujudan aparatur negara yang berfungsi melayani masyarakat, profesional, berdaya guna, produktif, transparan, bebas dan korupsi, kolusi dan nepotisme.

- k. Perwujudan otonomi daerah dalam rangka pembangunan daerah dan pemerataan pertumbuhan dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.



D. Memupuk Semangat Kebangsaan

1. Makna Nasionalisme

Nasionalisme dapat dikatakan sebagai sebuah situasi kejiwaan dimana kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara atas nama bangsa. Dengan kata lain, nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya. Loyalitas dan pengabdian ini timbul karena adanya suatu tekad untuk hidup sebagai satu bangsa di bawah satu negara yang sama, terlepas dari perbedaan etnis, rasa, agama, ataupun golongan.

Munculnya nasionalisme terbukti sangat efektif sebagai alat perjuangan bersama merebut kemerdekaan dari cengkeraman kolonial.

Nasionalisme menjadi persyaratan mutlak bagi hidupnya sebuah bangsa. Ideologi nasionalisme membentuk kesadaran para pemeluknya bahwa loyalitas tidak lagi diberikan pada golongan atau kelompok kecil, seperti agama, ras, suku, dan budaya (*primordial*), namun ditujukan kepada komunitas yang dianggap lebih tinggi, yaitu bangsa dan negara. Sebagai kesimpulannya, nasionalisme sebagai paham (ideologi) menjadi *conditio sine quanon* (keadaan yang harus ada) bagi keberadaan negara dan bangsa.

Suatu negara, apabila rakyatnya tidak mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme maupun patriotisme, rakyat tersebut tidak dapat diandalkan untuk membela, berjuang maju, serta tidak dapat diharapkan untuk bekerja demi kemajuan dan kelangsungan bangsanya. Rasa kecintaan pada bangsa dan negara menumbuhkan kekhawatiran jika bangsa dan negaranya rusak atau hancur. Itulah pentingnya semangat nasionalisme dan patriotisme pada diri warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.



Sumber : <http://asil4dworld.files.wordpress.com/2009/06/upacara-ben.jpg>

Gambar 1.4 Penghormatan pada bendera merah putih sebagai bentuk rasa nasionalisme.

Adolf Henken (1988) menyebut nasionalisme sebagai pandangan yang berpusat pada bangsanya. Menurutny, kata nasionalisme mempunyai dua arti, yaitu:

a. Dalam arti sempit

Nasionalisme disini diartikan sebagai perasaan kebangsaan yang tinggi, berlebih-lebihan, sikap yang keterlaluan, sempit, dan sombong. Sikap ini tidak menghargai orang dan bangsa lain seperti semestinya. Apa yang menguntungkan bangsa sendiri begitu saja dianggap benar, meskipun hal itu mungkin menginjak-injak hak dan kepentingan bangsa lain. Dengan demikian, nasionalisme ini justru menceraiberaikan bangsa satu dengan bangsa lainnya karena memandang bangsa lain lebih rendah.

b. Dalam arti luas

Nasionalisme dapat juga menunjuk sikap memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan serta harga diri bangsa dengan tetap menghormati bangsa yang lain karena merasa sebagai bagian dari bangsa yang lain yang ada didunia. Nasionalisme ini berguna untuk membina rasa persatuan antar penduduk negara yang heterogen (karena perbedaan suku, agama, asal usul). Ini juga berfungsi untuk membina rasa identitas, kebersamaan dalam negara serta bermanfaat untuk mengisi kemerdekaan yang sudah diperoleh.

Nasionalisme dalam arti yang kedua itulah yang perlu diwujudkan, sesuai dengan keadaan. Pada masa penjajahan, misalnya, perwujudannya berupa perjuangan mendirikan negara sekaligus berarti menentang penjajahan asing. Sementara, ketika negara telah berdiri, dengan bangsa yang sudah mulai merasa satu, nasionalisme tidak lagi diwujudkan dalam bentuk perjuangan merebut kemerdekaan secara fisik tetapi lebih diwujudkan dalam bentuk mengisi kemerdekaan nasional melalui pembangunan menuju kehidupan yang lebih baik.

Nasionalisme menjadi dasar pembentukan negara kebangsaan. Hubungan nasionalisme dan negara kebangsaan memiliki kaitan yang erat. Lahirnya negara bangsa (*nation state*) merupakan akibat langsung dari gerakan nasionalisme. Negara kebangsaan adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan/nasionalisme. Artinya, adanya tekad masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, rasa, etnik, atau golongannya. Rasa nasionalisme sudah dianggap telah muncul manakala suatu bangsa memiliki cita-cita yang sama untuk mendirikan suatu negara kebangsaan. Nasionalisme merupakan paham kebangsaan, semangat kebangsaan dan kesadaran kebangsaan. Paham nasionalisme akan menjadikan Anda memiliki kesadaran akan adanya bangsa dan negara.

Dalam sejarah perkembangan nasionalisme di Indonesia tersebut terdapat faktor-faktor penting bagi pembentukan nasionalisme Indonesia. Faktor-faktor itu adalah sebagai berikut :

- a. Persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing kurang lebih selama 350 tahun.
- b. Kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke.

- c. Cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sebagai suatu bangsa.
- d. Keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

2. Makna Patriotisme

Patriotisme berasal dari kata *patria*, artinya tanah air. Kata *patria* berubah menjadi kata patriot yang berarti seorang yang mencintai Tanah Air. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, patriotisme adalah sikap dan semangat yang sangat cinta kepada Tanah Air sehingga berani berkorban jika diperlukan oleh negara. Berdasarkan dua pengertian patriotisme tersebut, dapat disimpulkan bahwa patriotisme adalah suatu paham atau aliran tentang kesetiaan dan semangat cinta pada Tanah Air.

Seorang patriotik adalah orang yang cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan negaranya. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme. Jadi patriotisme lahir karena dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Patriotisme juga mengandung pengertian rasa kesatuan sebagai bangsa.

Pada dasarnya, patriotisme berbeda dengan nasionalisme meskipun berdekatan dan umumnya dianggap sama. Patriotisme lahir dari semangat nasionalisme dengan terbentuknya negara.

Sikap patriotisme yang diwujudkan dalam semangat cinta tanah air dapat dilakukan dengan cara berikut ini.

- a. Perbuatan rela berkorban untuk membela dan mempertahankan negara dan bangsa.
- b. Perbuatan untuk mengisi kelangsungan hidup negara dan bangsa.

Perbuatan membela dan mempertahankan negara diwujudkan dalam bentuk kesediaan berjuang untuk menahan dan mengatasi serangan atau ancaman bangsa lain yang akan menghancurkan negara. Selain itu, ancaman negara lain, ancaman dari sekelompok bangsa sendiri, kegiatan yang dapat merugikan negara, dan ancaman alam dapat mengakibatkan kerusakan dan kehancuran negara. Kelangsungan hidup negara dapat diwujudkan dengan kesediaan bekerja sesuai dengan bidang dan spesialisasinya dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa, serta pencapaian tujuan negara.

Sikap patriotisme telah ditunjukkan oleh para leluhur bangsa Indonesia dalam bentuk berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dari pelajaran sejarah, Anda mengetahui bahwa perlawanan tersebut penuh dengan pengorbanan.



Sumber : <http://10ne1985.files.wordpress.com/>

Gambar 1.5 Bung Tomo tengah berpidato secara berapi-api guna menggugah semangat Patriotisme arek-arek Suroboyo dalam mengusir penjajah Belanda.

Ada yang mengorbankan nyawa. Ada yang harus ditangkap penjajah, diadili, dan dipenjarakan. Ada pula yang langsung ditangkap dan diasingkan ke tanah pengasingan. Walaupun demikian, mereka tidak kenal menyerah sehingga berhasil mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan.

Pengembangan semangat kebangsaan atau nasionalisme pada generasi penerus bangsa harus disertai maksud mengembangkan semangat patriotik dalam setiap jiwa generasi muda. Penanaman jiwa patriotisme harus dilandasi oleh semangat kebangsaan atau nasionalisme. Sebaliknya jiwa nasionalisme dalam setiap warga negara perlu dianjurkan dengan semangat patriotik untuk mencintai dan rela berkorban demi kemajuan bangsa.

3. Arti Penting Nasionalisme dan Patriotisme dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara

Nasionalisme Indonesia lahir karena pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang mengalami penjajahan. Penjajahan yang menyebabkan penderitaan, penindasan, dan kemiskinan terhadap bangsa Indonesia. Kesadaran nasional bangsa Indonesia dipengaruhi oleh faktor dari dalam maupun dari luar.

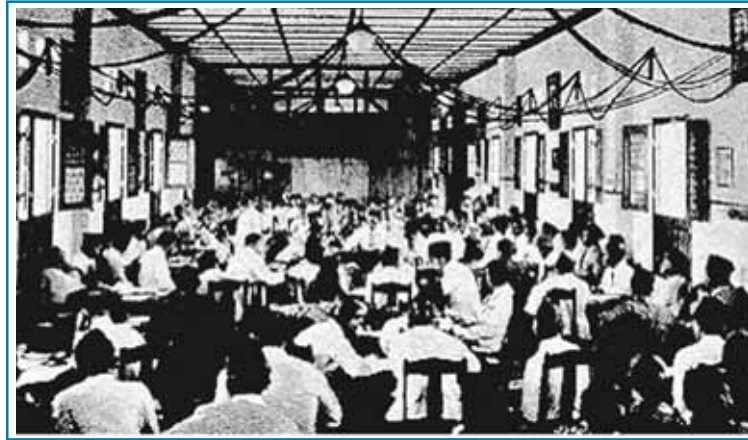
Faktor dari dalam adalah keadaan yang tertindas, terbelakang, dan penderitaan yang terus-menerus sehingga melahirkan keinginan untuk merdeka, bebas, dan maju. Faktor dari luar adalah kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905; dan gerakan kemerdekaan di negara-negara tetangga, seperti Cina, Turki, India, dan Filipina. Peristiwa-peristiwa tersebut memberi kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa orang Asia pun mampu untuk merdeka dan mengalahkan bangsa Eropa.

Selanjutnya, nasionalisme yang tumbuh dalam diri setiap warga negara akan memperkuat tegaknya negara kebangsaan. Gerakan untuk senantiasa mencintai dan membela bangsanya dari ancaman negara lain atau ancaman kehancuran melahirkan patriotisme. Antara nasionalisme dengan patriotisme juga terdapat kajian yang amat erat. Oleh karena itu, nasionalisme dan patriotisme sangat penting bagi kelangsungan hidup negara kebangsaan. Sementara kebangsaan (nasionalisme) di panggung politik internasional tumbuh pada awal abad ke-20 yang ditandai dengan kebangkitan dunia Timur (negara Asia), seperti India, Cina, dan Filipina. Bangkitnya kesadaran kebangsaan di Indonesia ditandai dengan tumbuhnya berbagai organisasi pergerakan.

Perkembangan nasionalisme di Indonesia melalui tahap sebagai berikut.

a. Masa Perintis

Masa perintis adalah masa mula dirintisnya semangat kebangsaan dengan munculnya organisasi-organisasi pergerakan. Masa ini ditandai dengan munculnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. kelahiran Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional.



Sumber : <http://arismerdeka.files.wordpress.com>

Gambar 1.6 Suasana Rapat Budi Utomo, 1908.

b. Masa Penegas

Masa penegas adalah masa mulai ditegaskannya semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia, yang ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Dengan Sumpah Pemuda masyarakat Indonesia yang beraneka ragam tersebut menyatakan diri sebagai satu bangsa yang memiliki satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

c. Masa Pendobrak

Pada masa tersebut semangat dan gerakan nasionalisme Indonesia telah berhasil mendobrak belenggu penjajahan dan menghasilkan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa Indonesia dproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 sejak saat itu bangsa Indonesia menjadi bangsa merdeka, bebas, dan sederajat dengan bangsa lain. Nasionalisme telah mendasari bagi pembentukan negara kebangsaan Indonesia modern.

Semangat kebangsaan ini dibangun dan digelorakan oleh para putra-putri bangsa Indonesia, khususnya yang mendapatkan pendidikan. Para kaum terpelajar ini mulai menyadari bahwa bangsa mereka adalah bangsa jajahan yang harus berjuang meraih kemerdekaan, jika ingin menjadi bangsa merdeka dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain. Mereka berasal dari berbagai daerah dan suku bangsa yang merasa sebagai satu nasib dan penderitaan sehingga bersatu menggalang kekuatan bersama. Misalnya, Soekarno berasal dari Jawa, Mohammad Hatta berasal dari Sumatera, A.A. Maramis dari Sulawesi, dan Tengku Mohammad Hasan dari Aceh.

Suatu negara yang warga negaranya memiliki semangat kebangsaan dan jiwa patriotisme, dapat diandalkan untuk membela, berjuang maju, dan bersedia mengisi kemajuan dan kelangsungan bangsanya. Sebaliknya suatu negara yang warga negaranya tidak memiliki semangat nasionalisme ataupun patriotisme dalam perilakunya tersebut mudah sekali untuk melakukan tindakan yang dapat menghina nama baik bangsa, menjual harga diri bangsa, merendahkan martabat bangsa dan tindakan lain yang berakibat melemahkan kelangsungan dan kewibawaan negara.

Nasionalisme Indonesia tidak bersifat internasionalisme yang bermaksud memperluas wilayah bangsa. Nasionalisme Indonesia tidak bersifat ekspansif karena hal itu tidak sesuai dengan wilayah bangsa yang memiliki. Nasionalisme Indonesia juga tidak bersifat sempit (daerahisme, sukuisme, etnonasionalisme) yang hanya

mementingkan atau mengutamakan kelompok, wilayah, atau golongan tertentu dalam diri bangsa Indonesia. Nasionalisme sempit itu tidak lagi mencerminkan semangat bahwa bangsa ini secara bersama adalah satu nasib dan penderitaan. Di samping itu, nasionalisme Indonesia tidak bersifat mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain (*chauvinisme*). Hal itu dikarenakan bangsa Indonesia menyadari bahwa di luar bangsa Indonesia masih terdapat bangsa-bangsa lain yang memiliki hak hidup sama dan sederajat. Justru keberadaan bangsa-bangsa lain tersebut menyadarkan bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia dan dalam kerangka kerja sama antarbangsa.



KATA SANG TOKOH

Terbukti dalam sedjarah segala jaman, bahwa kebesaran dan kemakmuran suatu bangsa tidak pernah djatuh gratis dari langit. Kebesaran dan kemakmuran selalu kristalisasi keringat!

Ir. Soekarno

Sumber: en.wikipedia.org

4. Peran Warga Negara dalam Memelihara serta Memupuk Semangat Nasionalisme dan Patriotisme

Nasionalisme dan patriotisme merupakan faktor penting dalam keberadaan dan kelangsungan hidup dan negara Republik Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Para pendiri negara atau generasi terdahulu yang berjuang menghasilkan Indonesia merdeka telah memberikan sesuatu yang amat berharga dan penting bagi bangsa.

Semangat kebangsaan pada diri bangsa Indonesia dicerminkan dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia. Dengan demikian, nasionalisme menjadi dasar bagi penyelenggaraan negara. Dengan berpijak pada sila ketiga Pancasila nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan pada diri setiap warga negara Indonesia yang bercirikan, sebagai berikut.

- Senantiasa membangun rasa persaudaraan, solidaritas, kedamaian, dan atikekerasan antarkelompok masyarakat dengan semangat persatuan.
- Memiliki rasa cinta pada tanah air (patriotisme)
- Mengakui dan menghargai sepenuhnya keanekaragaman pada diri bangsa Indonesia.
- Menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah sebagai bagian dari bangsa lain untuk menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.
- Bangga menjadi bangsa dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia.
- Bersedia mempertahankan dan memajukan negara dan nama baik bangsanya.
- Menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri dan golongan atau kelompoknya.

Sesuai dengan nilai-nilai yang sistematis pada dasar negara Pancasila bahwa sila-sila yang terkandung dalam Pancasila adalah saling berkaitan maka nasionalisme Indonesia adalah semangat kebangsaan yang dijiwai oleh nilai ketuhanan yang menjiwai nilai-nilai demokrasi, serta keadilan.

Peranan warga negara dalam meningkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme adalah bersedia melakukan tindakan dan perilaku-perilaku yang dapat membangun rasa memiliki bangsa, rasa kecintaan terhadap bangsa, rasa kebanggaan, rasa menghargai jasa pendahulunya, rasa bersalah bila mengkhianati bangsanya, rasa kebersamaan, sikap membela jika ada bangsa atau orang lain yang merusak nama baik bangsa. Tindakan dan perilaku tersebut dapat diwujudkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, lembaga, organisasi ataupun di tempat lain.

- a. Menghindari tindakan provokatif yang tidak bertanggung jawab.
- b. Aktif memberi usul, saran, tanggapan, dan kritik terhadap penyelenggaraan negara.
- c. Menjalankan dan mempertahankan kegiatan yang bersifat kerukunan di masyarakat, misalnya acara pernikahan, kematian, kelahiran, dan syukuran.
- d. Mengikuti siskamling dan kerja bakti.
- e. Menjaga ketertiban masyarakat dengan mematuhi aturan yang dibuat bersama
- f. Ikut mengawasi jalannya pemerintahan, baik di daerah maupun di tingkat pusat.
- g. Mematuhi hukum dan aturan yang telah disepakati negara
- h. Bersedia membela negara dari ancaman negara lain
- i. Menerima dan menghargai perbedaan antarsuku bangsa, misalnya bertemu dengan siswa dari suku lain.
- j. Mengikuti kegiatan PON, Jambore Nasional, MTQ, pertukaran pelajar, dan misi kesenian.

Saat ini penjajahan sudah tidak ada lagi. Perjuangan nonfisiklah yang harus dilakukan terlebih lagi di era global sekarang ini. Nasionalisme makin perlu untuk dilanjutkan oleh generasi muda agar tidak lupa akan sejarah pengabdian para pendahulu bangsa serta tetap memiliki kesadaran kebangsaan yang tinggi. Nasionalisme harus selalu tertanam dalam diri setiap warga negara sebagai semangat kebangsaan dalam menghadapi setiap tantangan yang sesuai dengan zamannya. Contoh yang populer sekarang ini adalah kegiatan olahraga yang berlangsung di luar negeri. Para atlet yang berhasil akan membawa nama harum bangsa karena telah berjuang menghadapi tantangan dan dapat menciptakan kebanggaan sekaligus telah berkarya nyata untuk kemajuan bangsanya.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 4-5 orang, dengan anggota siswa laki-laki dan perempuan!
2. Lakukan diskusi dengan tema "Sebab-sebab Kegagalan perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908"!
3. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai judul kliping sesuai dengan pilihan masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama.
4. Lengkapi dengan gambar atau sumber berita yang terkait dari internet, buku karya ilmiah, koran, atau majalah ilmu pengetahuan sebagai pelengkap dan rujukan referensi!
5. Buatlah laporan singkat lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah Gurumu bertindak sebagai penilai.



Rangkuman

1. Beberapa pengertian tentang bangsa :
 - a. Bangsa adalah suatu persatuan karakter atau perangai yang timbul karena persamaan nasib (Otto Bauer)
 - b. Bangsa adalah kesatuan jiwa. Jiwa yang mengandung kehendak untuk bersatu, orang-orang merasa diri satu dan mau bersatu (Ernest Renant)
 - c. Bangsa diartikan sebagai buah hasil tenaga hidup dalam sejarah dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku (Hans Kohn)
 - d. Bangsa adalah suatu kesatuan budaya dan satu kesatuan politik (Jalobsen dan Lipman)
2. Bangsa memiliki unsur-unsur sebagai berikut.
 - a. Ada sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu.
 - b. Berada dalam suatu wilayah tertentu.
 - c. Ada kehendak untuk membentuk atau berada di bawah pemerintahan yang dibuatnya sendiri.
 - d. Secara psikologis merasa senasib, sepenanggungan, setujuan, dan secita-cita.
 - e. Ada kesamaan karakter, identitas, budaya, bahasa, dan lain-lain sehingga dapat dibedakan dengan bangsa lainnya.
3. Konsep bangsa memiliki dua pengertian, yaitu bangsa dalam arti sosiologis dan bangsa dalam arti politis.
 - a. Bangsa dalam arti Sosiologis-Antropologis ini diikat oleh ikatan-ikatan, seperti kesatuan ras, tradisi, sejarah, adat istiadat, bahasa, agama atau kepercayaan, dan daerah. Ikatan seperti itu biasa disebut ikatan primordial.

- b. Bangsa dalam pengertian politis adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam.
4. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara merupakan bentuk organisasi dari masyarakat atau kelompok orang yang mempunyai kekuasaan mengatur hubungan, menyelenggarakan ketertiban, dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.
5. Unsur-unsur negara terdiri atas:
 - a. Unsur konstitutif negara, yang terdiri atas wilayah tertentu, penduduk yang menetap, kedaulatan dan pemerintah yang berdaulat.
 - b. Unsur-unsur deklaratif negara yang mencakup adanya tujuan negara, undang-undang dasar, pengakuan dari negara lain secara *de jure* ataupun secara *de facto*, dan masuknya negara dalam perhimpunan bangsa-bangsa
6. Ada tiga kelompok fungsi negara :
 - a. Negara harus memberikan perlindungan kepada para penduduk dalam wilayah tertentu.
 - b. Negara mendukung atau langsung menyediakan berbagai pelayanan kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, ekonomi, dan kebudayaan.
 - c. Negara menjadi wasit yang tidak memihak antara pihak-pihak yang bersengketa di masyarakat dan menyediakan suatu sistem peradilan yang menjamin keadilan dalam hubungan sosial masyarakat.
7. Tujuan Negara Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV:
 - a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
 - b. memajukan kesejahteraan umum,
 - c. mencerdaskan kehidupan bangsa,
 - d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
8. Nasionalisme adalah sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menunjukkan adanya loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.
9. Patriotisme berarti paham tentang kecintaan pada tanah air. Semangat patriotisme berarti semangat untuk mencintai tanah air. Gerakan patriotisme muncul setelah terbentuknya bangsa yang dilandasi nasionalisme.
10. Alat pemersatu suatu bangsa, antara lain, lambang negara, semboyan negara, bahasa pemersatu, bendera negara, lagu kebangsaan, konsepsi wawasan kebangsaan, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan Nasional, dasar falsafah, bentuk negara dan konstitusi (hukum dasar) negara.

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat!

1. Sebagai penunjang unsur persatuan dan kesatuan dalam usaha mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan seluruh wilayah di Indonesia harus ada kesamaan
 - a. tujuan
 - b. taktik dan strategi
 - c. pendapat
 - d. kekuatan perahanan
 - e. pertahanan dan keamanan
2. Dilihat dari aspek kejiwaan, unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa adalah
 - a. memiliki rasa senasib dan sepenanggungan
 - b. terdapat sekelompok manusia yang mempunyai kemauan untuk bersatu
 - c. keberadaannya diakui oleh bangsa lain
 - d. terdapat persamaan identitas, karakter, ataupun budaya
 - e. mendiami pada suatu wilayah tertentu
3. Semangat dan isi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 pada dasarnya adalah penjabaran dari dasar pengamalan nilai Pancasila, terutama sila
 - a. Persatuan Indonesia
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa
 - c. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - e. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
4. Sikap cinta kemerdekaan nasional adalah cermin perwujudan pengamalan Pancasila terutama sila
 - a. Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
 - b. Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab
 - c. Persatuan Indonesia dan Ketuhanan Yang Maha Esa
 - d. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan Persatuan Indonesia
 - e. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

5. Dalam kedudukannya, di samping sebagai makhluk individu, manusia juga bertindak sebagai makhluk sosial. Namun ada satu ideologi yang lebih menitikberatkan manusia sebagai makhluk individu. Ideologi itu disebut
 - a. komunisme
 - b. Pancasila
 - c. individualisme
 - d. liberalisme
 - e. sosialisme
6. Makna yang terkandung dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang akhirnya menjadi semboyan dalam lambang negara Garuda Pancasila mengandung falsafah tentang
 - a. kerukunan antarpemeluk agama
 - b. persatuan berbagai suku bangsa
 - c. satu kesatuan politik
 - d. kerukunan antarsuku bangsa
 - e. persatuan antaragama
7. Pada hakikatnya, tujuan suatu negara adalah
 - a. menciptakan ketertiban masyarakat
 - b. meningkatkan kebutuhan masyarakat
 - c. melindungi wilayah negara
 - d. pemeratakan pendapatan masyarakat
 - e. mengusahakan kesejahteraan umum
8. Jiwa dan semangat nasionalisme, dapat dilihat dalam sikap
 - a. mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri
 - b. terbuka terhadap semua pengaruh dari luar
 - c. mendukung westernisasi
 - d. berlaku sopan terhadap wisatawan asing
 - e. gemar bepergian ke luar negeri
9. Menurut pandangan John Locke, suatu pemerintahan akan mampu terselenggara dengan baik jika
 - a. kekuasaannya terbatas
 - b. kekuasaannya mutlak
 - c. dipimpin seorang raja
 - d. dibentuk berdasarkan kontrak sosial
 - e. pemimpinnya ditunjuk Tuhan

10. Dalam pandangan J.J. Rousseau, suatu kehidupan manusia pada posisi sebelum bernegara (membentuk suatu negara) diposisikan
 - a. bagaikan kehidupan sekelompok semut
 - b. seakan-akan menyerupai taman Firdaus
 - c. bagaikan kehidupan di alam liar/bebas
 - d. seperti kehidupan di alam rimba
 - e. seperti kehidupan serigala
11. Dalam Pandangan Teori Teokrasi, seorang raja atau kaisar dapat memerintah atau berkuasa disebabkan oleh
 - a. mempunyai kelebihan yang diberikan oleh Tuhan
 - b. diberi mandat oleh rakyatnya
 - c. asa usulnya dari dewa
 - d. dipilih oleh wakil rakyat
 - e. mampu melaksanakan perintah Tuhan
12. Suatu negara akan tumbuh dan terbentuk secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan manusia. Ini adalah teori
 - a. ketuhanan
 - b. organis
 - c. historis
 - d. kekuatan
 - e. alamiah
13. Semangat nasionalisme bangsa Indonesia telah mampu mempersatukan mengikat bangsa Indonesia untuk merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Rintisan awal terbentuknya rasa persatuan Indonesia diwujudkan dalam
 - a. Keputusan Kongres Pemuda Indonesia II
 - b. Pembukaan UUD 1945
 - c. Kesepakatan untuk kembali ke UUD 1945
 - d. Sila Persatuan Indonesia
 - e. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
14. Unsur pertama pembentuk negara menurut riwayat pertumbuhannya adalah
 - a. keluarga
 - b. manusia yang bebas
 - c. suku
 - d. rumah tangga
 - e. desa

15. Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa apabila pemerintah itu berdaulat, pada hakikatnya kedaulatan itu berasal dari
 - a. UUD
 - b. rakyat
 - c. suku
 - d. negara
 - e. dewa
16. Ideologi yang mengajarkan campur tangan negara yang seluas mungkin (dominan) dalam bidang perekonomian dalam rangka mencapai tujuan negara adalah ideologi
 - a. Anarkisme
 - b. Fasisme
 - c. Nasionalisme
 - d. Sosialisme
 - e. Individualisme
17. Wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan merupakan
 - a. hal-hal yang terpenting dalam suatu negara
 - b. syarat-syarat terjadinya negara
 - c. unsur-unsur terbentuknya negara
 - d. unsur-unsur suatu bangsa
 - e. karakter suatu negara
18. Aristoteles berpendapat bahwa manusia itu pada hakikatnya adalah *zoon politicon*, artinya
 - a. makhluk yang selalu hidup bermasyarakat
 - b. makhluk yang selalu berpindah-pindah
 - c. merupakan binatang buas bagi manusia lain
 - d. orang yang selalu tidak puas dengan keadaan
 - e. orang yang berakal dan berbudi pekerti
19. Faktor umum yang mendorong manusia untuk hidup secara berkelompok adalah faktor-faktor
 - a. spiritual, intelektual, dan faktor fisik
 - b. rasa kesukuan, ras, dan etnis
 - c. materi, pertahanan, dan kekuasaan
 - d. persamaan nasib, tempat tinggal, dan keturunan
 - e. ingin memperluas pengaruh dan tujuan

20. Berikut ini yang bukan unsur negara menurut Konvensi Montevideo 1933 adalah
- a. wilayah tertentu
 - b. penduduk yang menetap
 - c. kemampuan berhubungan dengan negara lain
 - d. suatu pemerintahan
 - e. mempunyai tujuan

B. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jelas dan tepat!

1. Jelaskan posisi manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks berbangsa dan bernegara!
2. Mengapa negara mempunyai sifat monopoli?
3. Sebutkan 4 cara untuk mengembangkan semangat Nasionalisme dan Patriotisme di kalangan generasi muda sekarang ini!
4. Berdasarkan teori pembentukan suatu negara, Indonesia termasuk ke dalam teori yang mana? Jelaskan jawabanmu! Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan "Separation of Power" dalam suatu negara menurut John Locke?
5. Mengapa bentuk Negara Kesatuan adalah bentuk yang paling cocok untuk negara Indonesia? Jelaskan!

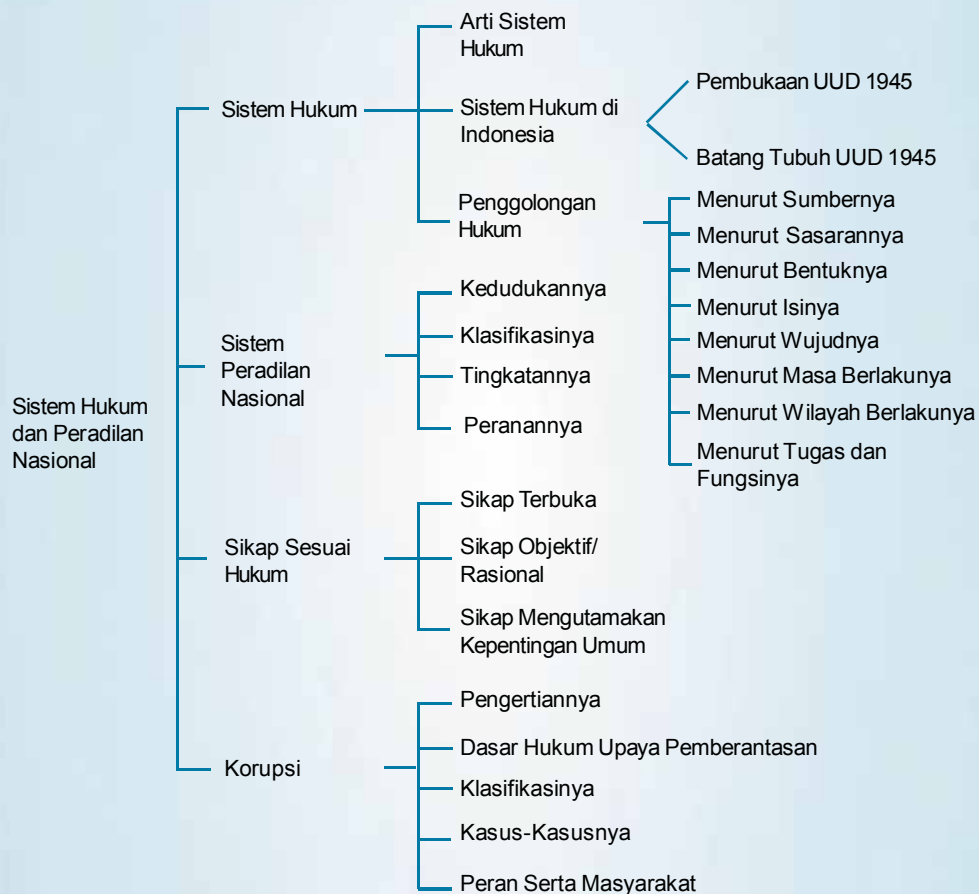
BAB

2

Sistem Hukum dan Peradilan Nasional



PETA KONSEP



Dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, setiap manusia memerlukan berbagai aturan. Aturan tersebut sebagai bentuk jaminan rasa keadilan, ketenteraman, dan keamanan bersama. Seberapa pentingkah aturan itu diperlukan? Untuk menemukan jawabannya, perhatikan ilustrasi di bawah ini!

Suatu hari Anda akan berangkat ke sekolah dengan naik kendaraan umum. Hari itu suasana di jalan raya dalam kondisi ramai karena saat itu memang jam sibuk di jalan raya. Para pengguna jalan raya saat itu adalah anak-anak sekolah yang akan berangkat ke sekolah, para pegawai kantor, para karyawan, para pedagang yang hendak pergi ke pasar, dan masih banyak lagi. Mereka berlalu di jalan raya dalam waktu yang hampir bersamaan, sehingga membuat jalan raya menjadi macet. Kendaraan yang mereka gunakan bermacam-macam. Ada yang naik kendaraan umum, mobil pribadi, kendaraan bermotor, taksi, ojek, dan kendaraan darat lainnya. Beberapa pengguna jalan adalah orang-orang yang mengemudikan kendaraannya dengan santun. Artinya, mereka selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, selalu berada di jalur yang benar, dan tidak mengambil jalan pintas, sehingga lalu lintas menjadi lancar.

Pemandangan itu bertolak belakang ketika Anda melewati sebuah stasiun. Saat itu, pintu palang kereta api yang berada di jalan raya dekat stasiun telah menutup karena akan kereta yang melintas. Anda melihat seorang pengendara kendaraan bermotor berusaha menerobos palang pintu kereta itu. Menurutmu, apakah tindakan seperti itu dibenarkan meskipun dengan alasan takut terlambat sampai di tempat tujuan? Bukankah tindakan seperti itu merupakan pelanggaran lalu lintas, selain sangat berbahaya karena risiko nyawa melayang.

Dari kedua ilustrasi suasana di atas, Anda tentunya akan memilih ilustrasi yang pertama karena sikap-sikap tersebut merupakan cermin tertib dan taat pada aturan. Sedangkan pada ilustrasi kedua merupakan contoh sikap yang tidak patut ditiru. Untuk itu, diperlukan suatu aturan atau kaidah atau hukum yang memaksa demi keamanan bersama.

Pada bab ini Anda diajak belajar tentang sistem hukum dan peradilan yang berlaku di Indonesia dan digunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai bagian warga negara Indonesia, hendaknya Anda memahami sistem hukum dan peradilan ini. Untuk itu, pelajari uraian materi di bawah ini dengan saksama.



A. Hukum di Indonesia

1. Memahami Arti Sistem Hukum

a. Pengertian Sistem

Kata "sistem" yang terdapat dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia (2008)* mengandung arti susunan kesatuan-kesatuan yang masing-masing tidak berdiri sendiri, tetapi berfungsi membentuk kesatuan secara keseluruhan. Pengertian sistem dalam penerapannya, tidak seluruhnya berasal dari suatu disiplin ilmu yang mandiri, karena dapat pula berasal dari pengetahuan, seni, maupun kebiasaan, seperti sistem mata pencaharian, sistem tarian, sistem perkawinan, sistem pemerintahan, sistem hukum.

1) *W. J. S. Poerwadarminta*

Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* karangannya, sistem merupakan sekelompok bagian (alat dan sebagainya), yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud.

2) *Drs. Musanef*

Dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Kepegawaian di Indonesia* (1983), disebutkan bahwa sistem merupakan sekelompok bagian yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi, atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan mendapat gangguan.

3) *Prof. Sumantri*

Sistem merupakan suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur, atau suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan.

b. Pengertian Hukum

Hukum merupakan salah satu dari norma dalam masyarakat, yaitu norma hukum. Norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas.

Hukum sulit didefinisikan karena kompleks dan beragamnya sudut pandang yang mau dikaji. Dalam bukunya yang berjudul "*Inleiding tot de Studie van het Nederlandse*", Prof. Van Apeldoorn mengatakan bahwa "definisi hukum sangat sulit dibuat karena tidak mungkin mengadakan yang sesuai dengan kenyataan". Pengertian hukum menurut para ahli hukum terkemuka berikut ini.

1) *E. Utrecht*

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib kehidupan bermasyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah.

2) *Achmad Ali*

Hukum adalah seperangkat norma tentang apa yang benar dan apa yang salah yang dibuat atau diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik dalam aturan tertulis (peraturan) maupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi bagi pelanggar aturan itu.

3) *Prof. Mr. E. M. Meyers*

Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan dan ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat serta menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.

4) *Leon Duguit*

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat yang harus ditaati oleh masyarakat sebagai jaminan kepentingan bersama dan jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

5) *S. M. Amin, S.H.*

Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban keamanan dalam pergaulan manusia.

6) *J. C. T. Simorangkir, S.H. dan Woerjono Sastropranoto, S.H.*

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, dan pelanggaran terhadapnya mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu hukuman tertentu.

7) *Sudikno Mertokusumo*

Hukum adalah sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama; keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

8) *Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja*

Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai kenyataan dalam masyarakat.

Dari beberapa definisi hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum meliputi beberapa unsur adalah sebagai berikut.

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dan pergaulan hidup masyarakat.
- 2) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- 3) Peraturan-peraturan itu dilakukan oleh badan-badan resmi negara.
- 4) Peraturan itu bersifat memaksa.

Dengan demikian, hukum juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan peraturan yang hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta mempunyai sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa saja yang menaati hukum tersebut.



Sumber : <http://www.primaironline.com>

Gambar 2.1 Hukum seharusnya tegas tidak membedakan para pelaku pelanggaran hukum. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum.

c. Sistem Hukum

Di dalam setiap masyarakat selalu ada sistem hukum, ada masyarakat ada hukum. Sistem hukum merupakan suatu perangkat aturan yang tersusun secara teratur dan berasal dari berbagai pandangan, asas, dan teori para pakar yang memiliki perhatian terhadap jalannya kehidupan bermasyarakat. Sistem hukum tersebut dapat di patuhi dan ditaati oleh setiap warganya.

1) Tujuan Hukum

Dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis mendasarkan pada etika. Isi Hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya. Penganut teori ini salah satunya adalah Geny, yang berpendapat bahwa hukum tidak identik dengan keadilan. Peraturan hukum tidaklah selalu untuk mewujudkan keadilan. Contohnya, peraturan berlalu lintas. Mengendarai mobil di sebelah kiri tidak bisa dikatakan adil karena sesuai aturan, sedangkan berjalan di sebelah kanan dikatakan tidak adil karena bertentangan dengan aturan. Jadi, teori ini tidak sepenuhnya benar.

Menurut teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar. Teori ini juga tidak selalu benar. Penganut teori ini antara lain adalah Jeremy Bentham.

Selanjutnya, muncul Teori Campuran. Menurut teori ini, tujuan pokok dan pertama hukum adalah ketertiban. Kebutuhan akan ketertiban adalah syarat fundamental bagi masyarakat yang teratur. Di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.

Hukum mempunyai tugas-tugas sebagai berikut.

- a) Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat.
- b) Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan di masyarakat.
- c) Menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran dalam masyarakat.

Dengan demikian, hukum merupakan peraturan-peraturan hidup di dalam masyarakat yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mematuhi.

2) Asas Hukum

Pengertian asas hukum banyak dikemukakan para ahli hukum sebagai berikut.

a) Van Eikema Hommes

Dalam bukunya yang berjudul “*The Functions of Law and The Role of Legal Principles*” (1994), ia berpendapat bahwa asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma hukum yang konkret tetapi sebagai dasar umum (petunjuk) bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum. Dengan kata lain asas hukum adalah dasar (petunjuk arah) dalam pembentukan hukum positif.

b) P. Scholten

Dalam bukunya yang berjudul “*Struktur Ilmu Hukum*” (2005), ia berpendapat bahwa asas hukum adalah kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum; tetapi tidak boleh tidak harus ada.



Berpikir Kritis

Setelah mengerti dan memahami tentang Sistem Hukum, lakukan tugas di bawah ini!

1. Buatlah sebuah karangan atau tulisan/ulasan singkat (3 - 4 halaman) mengenai contoh-contoh kejadian/kasus yang termasuk Teori Etis, Teori Utilities dan Teori Campuran (masing-masing teori dilengkapi dengan 2 contoh kasus)!
2. Anda dapat melengkapinya dengan gambar-gambar ataupun berita dari berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya.
3. Kumpulkan tugasmu kepada Guru untuk dinilai!

2. Memahami Hukum di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara yang berdaulat. Negara Indonesia juga negara hukum. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Untuk mewujudkan negara hukum, maka segala penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara didasarkan pada hukum. Oleh karena itu, pembangunan hukum nasional mutlak diperlukan.

Menurut pendapat Prof. R. Djokosutono, S.H., seperti dikutip oleh Charles Himawan (2003) dalam buku “*Hukum sebagai Panglima*”, disebutkan bahwa negara hukum adalah negara yang mendasarkan pada kedaulatan hukum. Sementara itu, Prof. Padmo Wahyono, S.Pd. berpendapat bahwa suatu negara dikatakan negara hukum jika segala tindakan penguasa (negara) dapat di pertanggungjawabkan secara hukum.

Sampai sekarang ini, bangsa Indonesia belum secara keseluruhan memiliki hukum nasional yang dibuat oleh bangsa sendiri. Untuk menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum dan belum dibuat yang baru sesuai dengan UUD 1945 maka Indonesia memberlakukan hukum-hukum warisan kolonial yang tentu saja pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan negara hukum Indonesia.

Selain bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut, terdapat pula indikasi yang cukup kuat bahwa Indonesia adalah negara hukum. Indikasi tersebut, di antaranya sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD 1945

- 1) Alinea pertama : "... kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." Kalimat tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Hal demikian berarti sesuai dengan ciri dan prinsip negara hukum adalah pengakuan adanya HAM.
- 2) Alinea kedua : " ...mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Negara yang merdeka, adil, dan makmur merupakan bagian integral dari cita-cita negara hukum.
- 3) Alinea keempat : "... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu data suatu. Undang-Undang Dasar Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada kemanusiaan yang adil dan beradab... mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Adanya perkataan "adil dan keadilan sosial" merupakan indikasi dari adanya negara hukum karena tujuan hukum adalah menciptakan keadilan.

b. Batang Tubuh UUD 1945

- 1) Pasal 4 ayat (1) : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar."
- 2) Pasal 27 ayat (1) : "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."
- 3) Pasal 28D ayat (1) : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."
- 4) Pasal 28I ayat (1) : "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun".

- 5) Pasal 28I ayat (5) : "Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan".

c. Pembangunan Hukum Nasional

Kaitannya dengan pembentukan hukum di Indonesia, setidaknya kita sadar bahwa hukum dibentuk karena pertimbangan keadilan (*gerechtigkeits*) di samping sebagai kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*). Keadilan ini berkaitan dengan pendistribusian hak dan kewajiban, diantara sekian hak yang dimiliki manusia terdapat hak yang bersifat mendasar yang merupakan anugerah alamiah langsung dari Allah SWT, yaitu hak asasi manusia atau hak kodrati manusia. Semua manusia tanpa pembedaan ras, suku, bangsa, agama, berhak mendapatkan keadilan. Indonesia adalah negara yang sangat heterogen. Dalam membentuk formulasi hukum positif agak berbeda dengan negara-negara yang kulturnya homogen, sehingga penting kiranya sebelum membentuk suatu hukum yang akan mengatur perjalanan masyarakat, haruslah digali filsafat hukum secara komprehensif yang akan mewujudkan keadilan yang nyata bagi seluruh golongan, suku, ras, agama yang ada di Indonesia.

Sekarang ini dalam pembentukan hukum nasional kita dilakukan revisi terhadap KUH Pidana. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia tengah mempersiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan keluarnya kitab undang-undang hukum pidana yang baru, aturan hukum mengenai pidana di Indonesia lebih maju sejalan dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan pada Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi "Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini". Jadi, selama peraturan perundang-undangan yang baru belum ada, maka segala peraturan perundang-undangan yang ada termasuk peraturan perundang-undangan zaman Kolonial dapat diberlakukan. Tentu saja disesuaikan dengan keadaan dan jiwa bangsa Indonesia yang sudah merdeka.

Ketentuan ini bersifat sementara. Artinya, bangsa Indonesia harus segera melakukan pembangunan hukum agar tercipta peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sendiri dari bangsa Indonesia.

Beberapa contoh hukum nasional yang merupakan warisan dari zaman kolonial, antara lain

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini telah dilakukan kodifikasi. Sebagian besar dari aturan-aturan pidana telah disusun dalam suatu kitab undang-undang, yaitu KUH Pidana. Sebagian lagi tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. seperti peraturan lalu lintas, peraturan tentang tindak pidana subversif, dan tindak pidana terorisme. Selain sudah terkodifikasi, hukum pidana kita juga telah diunifikasi, artinya berlaku bagi semua golongan rakyat Indonesia.



Berpikir Kritis

1. Sebagai tugas di rumah, buatlah naskah pidato (minimal 1 halaman kertas ukuran folio) dengan tema "Hukum harus menjadi panglima"!
2. Ketiklah naskah pidato tersebut dengan komputer dan perhatikan penggunaan bahasanya!
3. Kumpulkan pada gurumu agar diberi penilaian!
4. Tiga naskah terbaik akan dibacakan di depan kelas.

3. Memahami Penggolongan Hukum

Untuk lebih dapat memahami sistem hukum Indonesia, diperlukan pengetahuan hukum yang lebih luas tentang sistem hukum di Indonesia. Hukum dapat dibedakan atas beberapa macam menurut cara membedakannya yaitu menurut sumbernya, sasarnya, bentuk, isinya, wujud, waktunya.

a. Menurut Sumber Hukum

Sumber hukum adalah segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yaitu aturan-aturan yang pelanggarananya dikenai sanksi yang tegas dan nyata. Sumber hukum material adalah keyakinan dan perasaan (kesadaran) individu dan pendapat umum yang menentukan isi atau materi (jiwa) hukum.

Isi hukum dapat menjadi peraturan yang berlaku dalam pergaulan manusia, bila diberi bentuk tertentu. "Bentuk" atau "kenyataan" yang oleh karenanya kita dapat menemukan hukum yang berlaku, disebut sebagai sumber hukum formal. Sumber hukum formal adalah perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Macam-macam sumber hukum formal, antara lain undang-undang, traktat, kebiasaan (hukum tidak tertulis), doktrin, dan yurisprudensi.

1) Undang-Undang

Pengertian undang-undang dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu undang-undang dalam arti material dan undang-undang dalam arti formal.

- a) Undang-undang dalam arti material, adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang dilihat dari isinya disebut undang-undang dan mengikat setiap secara umum. Di dalam UUD 1945, dapat kita jumpai beberapa contoh, seperti: Undang-Undang Dasar, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah.
- b) Undang-undang dalam arti formal, adalah setiap keputusan penguasa yang dilihat dari bentuknya dan cara terjadinya dapat disebut undang-undang.

Jadi undang-undang dalam arti formal tidak lain merupakan ketetapan penguasa yang memperoleh sebutan undang-undang karena cara pembentukannya. Misalnya, ketentuan pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (amandemen) yang berbunyi "Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat". Jadi, Undang-Undang yang dibentuk oleh Presiden bersama DPR tersebut dapat diakui sebagai sumber hukum formal, karena dibentuk oleh yang berwenang sehingga derajat peraturan itu sah sebagai undang-undang.



Sumber : <http://www.primaironline.com/>

Gambar 2.2 Pidato Presiden di Sidang Paripurna DPR.

2) *Kebiasaan hukum tidak tertulis*

Kebiasaan merupakan tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal dalam masyarakat atau pergaulan hidup tertentu. Di dalam masyarakat, keberadaan hukum tidak tertulis (kebiasaan) diakui sebagai salah satu norma hukum yang dipatuhi. Kebiasaan merupakan perbuatan yang diulang-ulang terhadap hal yang sama dan kemudian diterima serta diakui oleh masyarakat. Dalam praktik penyelenggaraan negara, hukum tidak tertulis disebut konvensi.



SEKILAS INFO

Hukum dasar tidak tertulis, yang disebut juga dengan konvensi adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Hukum dasar tidak tertulis adalah salah satu hukum dasar negara Republik Indonesia. Hukum dasar RI lainnya adalah hukum dasar tertulis, yang disebut undang-undang dasar. Konvensi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Fungsi konvensi sebagai pelengkap undang-undang dasar dan pengisi kekosongan yang timbul dalam praktik penyelenggaraan negara.

(Sumber : *Ensiklopedi Nasional Indonesia*)

Hukum tidak tertulis dipatuhi, karena adanya kekosongan hukum tertulis yang sangat dibutuhkan masyarakat/negara. Oleh karena itu, hukum tidak tertulis (kebiasaan) sering digunakan oleh para hakim untuk memutuskan perkara yang belum pernah diatur di dalam undang-undang.

Faktor penentu dijadikannya kebiasaan sebagai sumber hukum.

- a) Adanya perbuatan yang dilakukan berulang kali dalam hal yang sama, yang selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya serta berlangsung untuk beberapa waktu lamanya.
- b) Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Maksudnya adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

Keyakinan ini disebut *opinio necessitatis* (pendapat bahwa demikianlah seharusnya). Contoh: dalam hal jual beli atau sewa menyewa terdapat pihak penghubung (makelar) yang selalu mendapat komisi atau persen dari hasil usahanya. Ia menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli. Meskipun hal ini tidak diatur di dalam hukum tertulis, namun dalam kenyataan, praktik pemberian komisi selalu dipatuhi oleh masyarakat.

3) *Yurisprudensi*

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.

Timbulnya yurisprudensi, karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya, sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Untuk itulah hakim membuat atau membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang sedang dihadapinya. Selain itu, bisa juga karena peraturan perundang-undangan belum ada, hakim lalu menggali nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

4) *Perjanjian Internasional*

Perjanjian Internasional adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan. Dalam pelaksanaannya, traktat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a) Traktat bilateral, adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini bersifat tertutup, karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, masalah Perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
- b) Traktat multilateral, adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri (PBB, NATO, Pakta Warsawa, ASEAN, Gerakan Non Blok, dan sebagainya).



Sumber : <http://meisusilo.files.wordpress.com/>

Gambar 2.3 Suasana Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pembuatan traktat, biasanya melalui tahap-tahap berikut ini.

- a) Penetapan isi perjanjian dalam bentuk konsep yang dibuat/disampaikan oleh delegasi negara yang bersangkutan.
- b) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat masing-masing.
- c) Ratifikasi atau pengesahan oleh kepala negara masing-masing sehingga sejak saat itu traktat dinyatakan berlaku di seluruh wilayah negara.
- d) Pengumuman, yaitu penukaran piagam perjanjian.

Setelah diratifikasi oleh DPR dan kepala negara, traktat tersebut menjadi undang-undang dan merupakan sumber hukum formal yang berlaku.

5) *Doktrin*

Doktrin merupakan pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Doktrin bisa menjadi sumber hukum formal apabila digunakan para hakim dalam memutuskan perkara dimana doktrin tersebut menjadi alasan atau dasar hakim dalam memutuskan perkara tersebut, bahkan berpengaruh besar dalam hubungan internasional.

- a) Dalam hukum ketatanegaraan, kita mengenal doktrin, dari Montesquieu, yaitu Trias Politica yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yang terpisah, yakni:

- (1) Kekuasaan eksekutif (kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang)



Sumber : <http://www.rschindler.com/>

Gambar 2.4 Montesquieu, ahli tata negara dan negarawan Perancis abad 18

- (2) Kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang)
- (3) Kekuasaan yudikatif (kekuasaan untuk mengadili pelanggaran undang-undang)
- b) Doktrin yang dikemukakan oleh para ahli hukum (fukaha), seperti Imam Malik, Hanafi, Syafii dan Hambali yang dijadikan pegangan oleh para hakim (qadi) dalam memutuskan perkara.

b. Menurut Sasarannya

- 1) Hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku pada satu golongan tertentu. Contoh: UU Perkawinan diperuntukkan bagi warga negara yang memeluk agama Islam.
- 2) Hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan tanpa kecuali. Contohnya, UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan.
- 3) Hukum antargolongan, yaitu hukum yang mengatur untuk kepentingan tertentu dengan golongan lain. Contohnya, UU No. 2/1958 tentang dwi kewarganegaraan RI-RRC.

c. Menurut Bentuknya

- 1) Hukum tertulis, yaitu hukum yang dapat kita temui dalam bentuk tertulis dan resmi dan dicantumkan dalam berbagai peraturan negara. Contohnya, UUD 1945.
- 2) Hukum tidak tertulis, yaitu kebiasaan-kebiasan yang tumbuh dan terpelihara dalam masyarakat. Hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu (hukum adat). Dalam praktik ketatanegaraan, hukum tidak tertulis disebut konvensi. Contohnya, pidato kenegaraan presiden setiap tanggal 16 Agustus.

d. Menurut Isinya

- 1) Hukum publik, yakni hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang mengatur kepentingan umum. Contohnya, KUHP (hukum pidana) dan hukum tata negara.
- 2) Hukum privat/sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum yang menyangkut pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lain. Contohnya, hukum dagang dan hukum perkawinan.

e. Menurut Wujudnya

- 1) Hukum objektif, yaitu hukum dalam negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu. Contohnya, UU No. 14/92 tentang lalu lintas.
- 2) Hukum subjektif, yakni hukum yang timbul dari hukum objektif yang dihubungkan dengan seseorang tertentu. Contohnya, UU No. 1/74 tentang perkawinan.

f. Menurut Waktu Berlakunya

- 1) Ius Constitutum, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang disebut juga hukum positif.
- 2) Ius Constituendum, yaitu hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang yang sedang diproses oleh DPR bersama Pemerintah.

- 3) Hukum antarwaktu, yaitu hukum yang mengatur suatu peristiwa yang menyangkut hukum yang berlaku saat ini dan hukum yang berlaku pada masa lalu.

g. Menurut Ruang atau Wilayah Berlakunya

- 1) Hukum lokal, yaitu hukum yang hanya berlaku di suatu daerah tertentu. Contohnya, Hukum Adat Batak, Jawa, Dayak, dan Minangkabau.
- 2) Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, Hukum Nasional Indonesia, Malaysia, dan AS.
- 3) Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara atau lebih. Contohnya, hukum perang dan hukum perdata internasional.

h. Menurut Tugas dan Fungsi

Berdasar tugas dan fungsi hukum terbagi atas hukum material dan hukum formal. Hukum yang memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah dan larangan disebut hukum material. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang. Hukum yang mengatur cara bagaimana mempertahankan berlakunya hukum material apabila hukum material dilanggar, misalnya bagaimana cara mengajukan tuntutan, cara hakim mengambil keputusan, disebut hukum acara atau formal.



B. Peradilan Nasional

1. Kedudukan Lembaga Peradilan

Pengadilan atau lembaga peradilan adalah alat perlengkapan negara yang diberi tugas mempertahankan tetap tegaknya hukum nasional. Apabila terjadi pelanggaran hukum atau pelanggaran hak, maka yang bersangkutan dihadapkan ke muka pengadilan. Pengadilan atau badan peradilan adalah suatu lembaga penegakan hukum di Indonesia.

Pengadilan mempunyai tugas menjalankan peradilan dengan seadil-adilnya. Tugas pokok badan-badan peradilan adalah menerima, memeriksa, dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Jadi, memberikan hukumnya perkara pidana atau perdata yang dihadapkan kepadanya. Memberi hukumnya itu dilakukan dengan jalan hakim pengadilan mengadakan putusan dan penetapan hakim.

Lembaga peradilan yang berada di bawah kekuasaan kehakiman merupakan hal yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena merupakan amanat langsung dan konstitusi negara RI, yakni UUD 1945. Peranan lembaga peradilan merupakan bagian integral dalam rangkaian mewujudkan cita-cita dan tujuan RI dalam Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

Peranan lembaga peradilan juga merupakan benteng terakhir untuk mencari keadilan dan sebagai pelaksanaan cita-cita negara hukum, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 pasal 1 ayat (3), yaitu "Indonesia adalah negara hukum." Oleh sebab itu, prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan (pasal 4 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004).

Kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4 Tahun 2004 dan UUD 1945 pasal 24 ayat (1) bahwa "kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia."

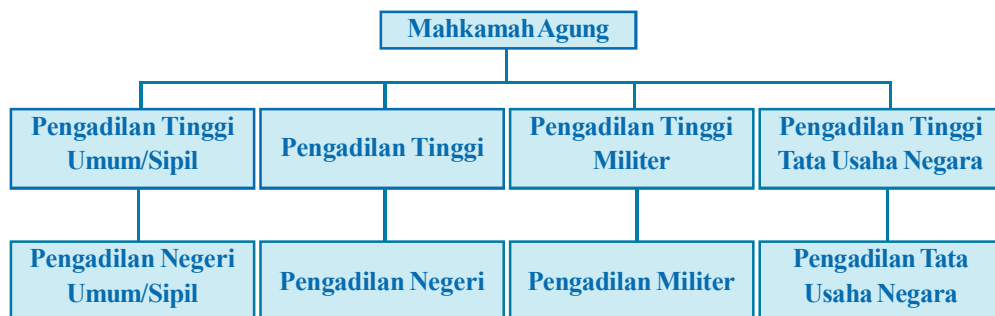
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 pasal 24 ayat (2), bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Jadi, saat ini kekuasaan kehakiman tidak hanya pada Mahkamah Agung (MA).

Sejak tanggal 30 Maret 2004, pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial kekuasaan kehakiman sepenuhnya ada pada Mahkamah Agung untuk lingkungan peradilan umum dan tata usaha negara. Sementara itu, untuk peradilan agama dari militer, berlaku sejak 30 Juni 2004.

2. Jenis Lembaga Peradilan di Indonesia

Pasal 24 UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menjadi ketentuan dasar bagi pengaturan lembaga peradilan di Indonesia. Jadi, pemegang kekuasaan kehakiman di Indonesia ada dua lembaga, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah susunan badan atau lembaga peradilan yang ada di Indonesia.



a. Peradilan Umum

Peradilan umum adalah salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Jika rakyat pada umumnya melakukan suatu pelanggaran atau kejahatan, menurut peraturan dapat dihukum atau dikenakan sanksi dan akan diadili dalam lingkungan peradilan umum.

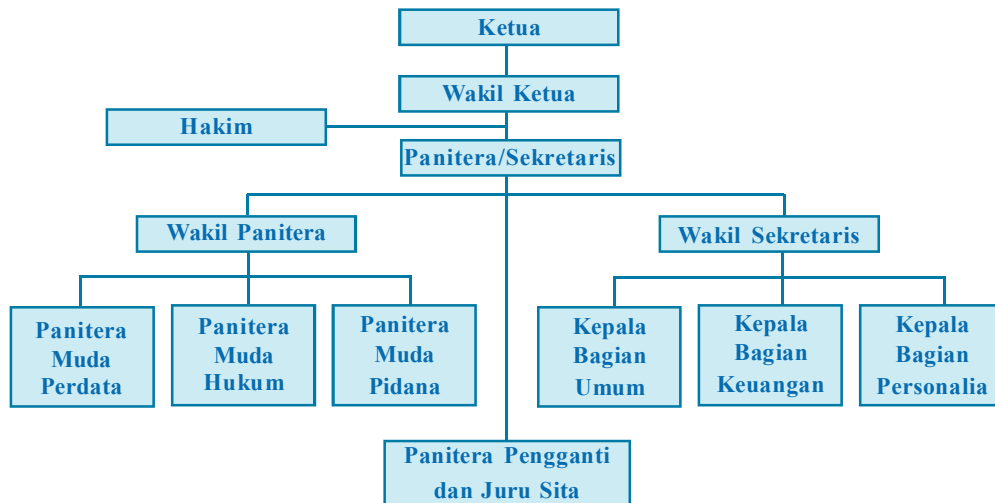
Peradilan umum saat ini diatur berdasarkan UU No. 49 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi.

1) *Pengadilan Negeri*

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan umum yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing). Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang dimaksud Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota, dan daerah hukumnya meliputi kabupaten/kota. Perkara-perkara yang ada diselesaikan oleh hakim dan dibantu oleh panitera. Pada tiap-tiap Pengadilan Negeri ditempatkan pula Kejaksaan Negeri sebagai alat pemerintah yang bertindak sebagai penuntut umum dalam suatu perkara pidana terhadap si pelanggar hukum. Tetapi dalam perkara perdata, Kejaksaan Negeri tidak ikut campur (tangan). Susunan pengadilan negeri terdiri dari :

- pimpinan (ketua dan wakil ketua pengadilan),
- hakim anggota,
- panitera,
- sekretaris, dan
- juru sita.



Sumber : <http://pn.sumenep.go.id/>

Gambar 2.5 Struktur Organisasi pada Pengadilan Negeri

Dalam pengadilan negeri, perkara-perkara diadili oleh seorang hakim yang terdiri dari majelis hakim (satu hakim ketua dan 2 hakim anggota) yang dibantu oleh seorang panitera. Akan tetapi, dalam masalah perkara-perkara ringan yang ancaman hukumannya kurang dari satu tahun (Summier) diadili oleh hakim tunggal. Misalnya, perkara pelanggaran lalu lintas.

Unjuk Kerja

- a. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 3-4 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
- b. Berkunjuglah ke Pengadilan Negeri di kota tempat Anda tinggal. Catatlah struktur Organisasi Pengadilan Negeri tersebut (lengkap dengan nama-nama personalnya), setelah itu carilah data tentang Tupoksi (tugas - pokok - fungsi) dari masing-masing jabatan. Catatlah kasus apa saja yang baru ditangani sekarang ini!
- c. Kumpulkan hasil investigasi kalian kepada Guru untuk dinilai.

2) *Pengadilan Tinggi*

Pengadilan Tinggi adalah pengadilan banding, yaitu pengadilan yang memeriksa kembali perkara yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Tempat kedudukan pengadilan tinggi di ibu kota provinsi. Tiap-tiap pengadilan tinggi dikepalai oleh seorang kepala, disebut ketua pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding.

Pemeriksaan perkara dalam pengadilan tinggi biasanya hanya memeriksa atas dasar pemeriksaan berkas perkara, walaupun tidak menutup kemungkinan menggelar persidangan seperti biasa. Tenggang waktu yang biasa dilakukan untuk mengajukan banding adalah empat belas hari setelah vonis pengadilan negeri.

Tugas dan wewenang pengadilan tinggi yaitu sebagai berikut.

- Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana serta perdata di tingkat banding.
- Mengadili di tingkat pertama dan terakhir serta memiliki kewenangan mengadili antarperadilan negeri di daerah hukumnya.
- Memimpin pengadilan-pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
- Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselenggarakan dengan cara seksama dan wajar.

- Mengawasi perbuatan hakim pengadilan negeri di dalam daerah hukumnya.
- Memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada pengadilan dalam daerah hukumnya.
- Memerintahkan agar mengirim berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.

Wilayah hukum peradilan tinggi meliputi satu wilayah provinsi. Susunan pengadilan : tinggi adalah sebagai berikut.

- Pimpinan (ketua pengadilan dan wakil ketua).
- Hakim anggota.
- Panitera.
- Sekretaris.

3) *Mahkamah Agung*

Mahkamah Agung merupakan badan pengadilan tertinggi di Indonesia, yang berkedudukan di Ibu Kota (Indonesia, Jakarta) atau di tempat yang ditetapkan oleh presiden. Daerah hukum MA meliputi seluruh wilayah Indonesia. MA mempunyai kewajiban utama yaitu melakukan pengawasan tertinggi atas segala tindakan-tindakan pengadilan lain di seluruh Indonesia dan menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya.

Kedudukan MA berdasarkan pada pasal 24 dan 24A Amandemen DUD 1945, tentang kekuasaan kehakiman, yang dituangkan dalam UU No.1 Tahun 2004. Peraturan tentang Mahkamah Agung yang diacur lebih lanjut daldm UU No. 14 Tahun 1985 dan telah diubah , menjadi UU No. 5 Tahun 2004 mempunyai kekuasaan dan kewenangan sebagai berikut.

- Memeriksa dan memutuskan permohonan kasasi dan sengketa tentang kewenangan.
- Mengadili permohonan peninjauan kembali (PK) putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- Memberi pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta ataupun tidak kepada lembaga tinggi negara.
- Memberikan nasihat hukum kepada presiden selaku kepala negara untuk pemberian dan penolakan grasi.
- Menguji secara material hanya terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- Melaksanakan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri dari seorang Wakil Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorang Ketua, dan beberapa orang Ketua Muda. Tiap-tiap bidang dipimpin oleh seorane Ketua Muda yang dibantu oleh beberapa Hakim Anggota Mahkamah Agung, yaitu Hakim Agung.

Tugas atau Fungsi Mahkamah Agung adalah, sebagai berikut :

- Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.
- Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para Hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya.
- Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan.
- Untuk kepentingan negara dan keadilan Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perlu baik dengan surat tersendiri, maupun dengan surat edaran.

Tugas dan kewenangan lain (di luar lingkungan peradilan) dari Mahkamah Agung, adalah sebagai berikut :

- Menyatakan tidak sah semua peraturan perundang - undang dari tingkat yang lebih rendah daripada undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir, semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku,
- Memberikan nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi.
- Bersama Pemerintah, melakukan pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris.
- Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada Lembaga Tinggi Negara yang lain.

Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disahkan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, memiliki wewenang dan kewajiban sebagai berikut:

- Wewenang yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan pemilihan Umum.
- Kewajiban, yaitu memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden.

Hakim Konstitusi diaJukan masing-masing 3 (tiga) orang oleh Mahkamah Agung, 3 (tiga) orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 (tiga) orang oleh Presiden. Masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Wewenang mengawasi, yang meliputi :

- Pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris, tentang peradilan.
- Jalannya peradilan
- Pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang diperlukan.
- Pekerjaan pengadilan dan tingkah laku para hakim di semua lingkungan peradilan

Meminta keterangan dan pertimbangan dari :

- peradilan,
- pengawasan yang dilakukan terhadap penasehat hukum dan notaris tentang peradilan, dan
- pemberian peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipertuka.

Meminta keterangan dan pertimbangan dari :

- pejabat lain yang disertai tugas penuntutan perkara pidana.
- pengadilan di semua lingkungan peradilan,
- jaksa agung

Membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran jalannya peradilan, dan mengatur sendiri administrasi, baik mengenai administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Susunan MA terdiri atas pimpinan (seorang ketua dan dua wakil ketua dan beberapa, orang ketua muda), hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Pimpinan dan hakim MA adalah hakim agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh hakim agung dan diangkat oleh presiden. Hakim agung diangkat oleh presiden dari nama calon yang diajukan oleh Dewan-Perwakilan Rakyat, yaitu dari nama calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial.

Selain MA, berdasarkan UUD 1945 Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kekuasaan kehakiman yang baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di Indonesia menempati urutan ke-78 dari negara-negara di dunia yang mempunyai lembaga sejenis kedudukan MK diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Amandemen UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dengan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota hakim MK terdiri dari 9 orang hakim yang terdiri dari ketua dan wakil ketua serta anggota.

Tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- menguji UU terhadap UUD RI Tahun 1945,
- memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

- memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
- memutuskan pembubaran partai politik

Selain kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran umum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

b. Peradilan Khusus

Disebut Peradilan Khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan Rakyat tertentu. Adapun macam-macam peradilan khusus, yaitu :

1) Peradilan Agama

Peradilan agama adalah peradilan agama Islam. Tugas dan wewenangnya adalah memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidnag hukum perdata tertentu yang diputus berdasar syariat Islam.

Adalah pengadilan yang memeriksa dan memutuskan perkara-perkara yang timbul antara orang-orang Islam, yang berkaitan dengan nikah, rujuk, talak (perceraian), nafkah, waris dan lain-lain. Dalam hal yang dianggap perlu. Keputusan Pegadilan Agama dapat dinyatakan berlaku oleh Pengadilan Negeri.

Peradilan agama diatur berdasarkan UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama dinyatakan bahwa lingkungan pengadilan agama terdiri atas sebagai beriku.

- Pengadilan agama sebagai badan peradilan tingkat pertama yang tempat kedudukannya sama dengan pengadilan negeri.
- Pengadilan tinggi agama sebagai badan peradilan tingkat banding. Tempat kedudukan sama dengan daerah pengadilan tinggi.

Lingkuangan peradilan agama dimulai dari daerah kabupaten / kota, provinsi, sampai di Ibu kota Negara. Peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama, tetapi merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan umum.

2) Peradilan Tata Usaha Negara

Kehadiran Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia tergolong masih sangat baru. Hal itu bisa kita lihat dari keberadaannya berdasarkan UU No. 51 Tahun 2009 dengan Jo UU No. 9 tahun 2004.

Menurut pasal 5 UU No. 4/1986, sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Sementara itu, keputusan tata usaha negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara. Keputusan itu berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan tata usaha negara adalah badan yang berwenang memeriksa dan memutus semua sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama. Sengketa dalam tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara.



Sumber : <http://ptun-mataram.go.id/>

Gambar 2.6 Struktur herarki Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia.

Keputusan tata usaha negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan tata usaha negara yang berisi tindakan hukum badan tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menerbitkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.

Peradilan Tata Usaha Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 1980 Jo UU No. 9 Tahun 2004 sebagai pengganti UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berikut ini merupakan masalah-masalah yang rnenjadi jangkauan peradilan tata usaha negara.

- Bidang sosial, yaitu gugatan atau permohonan terhadsp keputusan administrasi tentang penolakan permohonan suatu izin. Bidang ekonomi, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan perpajakan, merk, agraria, dan sebagainya.
- Bidang *function pubiique*, yaitu gugatan atau permohonan yang berhubungan dengan
- status atau kedudukan seseorang. Misatnya, bidang kepegawaian, pemecatan, pemberhentian hubungan kerja, dan sebagainya.
- Bidang HAM, yaitu gugatan atau permohonan yang berkaitan dengan pencabutan hak milik seseorang, penangkapan, dan penahanan yang tidak sesuai dengan prosedur hukum (sebagaimana diatur dalam KUHAP) mengenai pra - peradilan.

Berdasarkan pasal 6 UU No. 9 Tahun 2004, pengadilan tata usaha negara dilaksanakan oleh badan pengadilan berikut.

- Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota kabupaten/ kota dan daerah hukum yang meliputi kabupaten/kota.
- Pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya yang meliputi provinsi.
- Pengadilan tata usaha negara berpuncak pada Mahkamah Agung.

Hakim pengadilan tata usaha negara diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Ketua dan wakil ketua pengadilan diangkat dan diberhentikan oleh ketua MA.

3) *Peradilan Hak Asasi Manusia (HAM)*

Peradilan HAM dibentuk berdasarkan pada UU No. 26 Tahun 2000 tentang peraditangain untuk mengadili perkara pelanggaran HAM berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan HAM mempunyai perbedaan dengan pengadilan lain. Perbedaan tersebut danya pelanggaran HAM berat, yaitu KOMNAS (Komisi nasional) HAM. Lingkungan pengadilan HAM mempunyai daerah hukum yaitu diatur berasarkan pasal 45 ayat (2) UU No. 26 Tahun 2000, yaitu daerah hukum Pengadilan HAM berada pada pengadilan negeri didaerah berikut.

- Jakarta yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatra Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.
- Surabaya, yang meliputi Provinsi Jawa Tengah, D, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, an Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara dan Irian Jaya.

- Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatra Barat.

Umumnya jumlah hakim dalam sidang pengadilan biasanya berjumlah tiga orang, sedangkan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan HAM berjumlah lima orang, terdiri dari dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*, baik pada pengadilan negeri, pengadilan banding maupun di MA.

Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh presiden selaku kepala negara atas usul ketua MA, sedangkan hakim *ad hoc* MA diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul DPR.

Perkara pelanggaran HAM berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HM. dalam waktu paling lama 180 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan HAM.

4) *Peradilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi)*

Pengadilan tindak pidana korupsi dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004, tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta Keppres No. III/M/2004, tentang Pengangkatan hakim *ad hoc* pengadilan tindak pidana korupsi, yang terdiri dari sembilan hakim.

Pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi merupakan amanat pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka korupsi yang disidik KPK akan diadili oleh pengadilan korupsi dan tetap berbasis di pengadilan negeri.

Berdasarkan Keppres No. III/M/2004, sembilan hakim *ad hoc* tersebut akan terjadi hakim untuk tiga tingkatan, yakni :

- Hakim tingkat Pertama,
- Hakim tingkat banding, dan
- Hakim tingkat kasasi.

Dalam proses pemeriksaan berkas perkara di pengadilan, jumlah hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebanyak lima orang, yaitu terdiri dari dua orang hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan dan tiga orang adalah hakim *ad hoc*, baik pada pengadilan negeri, pengadilan banding, maupun di MA.

5) *Peradilan Militer*

Peradilan militer adalah peradilan yang mengadili anggota-anggota atau TNI yang meliputi angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara.

Sejak POLRI terpisah dari TNI, maka anggota POLRI yang melakukan pelanggaran hukum tidak lagi diadili oleh pengadilan militer, tetapi oleh Pengadilan Umum (Negeri).

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1987 tentang Peradilan Militer dinyatakan bahwa lingkungan peradilan militer meliputi sebagai berikut.

- Pengadilan militer adalah pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat kapten ke bawah.
- Pengadilan militer tinggi ialah sebagai berikut:
 - pengadilan tingkat pertama yang mengadili kejahatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh TNI yang berpangkat mayor ke atas,
 - pengadilan untuk memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.
- Pengadilan militer utama.
- Pengadilan militer pertempuran.



Sumber : <http://www.posmetro-medan.com/>

Gambar 2.7 Suasana sidang terhadap seorang prajurit pada suatu Peradilan militer.

Mengingat bahwa pengadilan tertinggi adalah Mahkamah Agung maka peradilan militer sekarang berpuncak pada Mahkamah Agung. Di samping pengadilan tentara, terdapat juga kejaksaan tentara yang mempunyai daerah kekuasaan sama dengan daerah kekuasaan pengadilan militer yang bersangkutan.

Pengadilan Militer mengadili mereka yang khusus, yaitu sebagai berikut.

- Anggota TNI
- Seseorang yang menurut Undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI.
- Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang.
- Tidak termasuk a) sampai c), tetapi menurut keputusan Mahkamah yang ditetapkan dengan persetujuan menteri hukum dan HAM harus diadili oleh pengadilan militer.

Adapun jenis Peradilan Militer adalah :

a) Peradilan Tentara

Tempat pengadilan tentara serta daerah hukumnya masing-masing ditetapkan oleh menteri kehakiman (menteri hukum dan HAM) serta menteri pertahanan dan keamanan.

Selain tiap-tiap pengadilan tentara ada kejaksaan tentara yang daerah hukumnya sama, tiap-tiap pengadilan tentara mempunyai beberapa hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat kapten yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

Pengadilan tentara mengadili perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran tingkat pertama yang dilakukan oleh anggota TNI yang berpangkat kapten ke bawah.

b) Peradilan Tentara Tinggi

Tempat dan kedudukan pengadilan tentara tinggi ditetapkan oleh menteri kehakiman (menteri hukum dan HAM) serta menteri pertahanan dan keamanan. Daerah hukumnya ditetapkan oleh menteri-menteri tersebut. Selain tiap-tiap pengadilan tentara tinggi, menteri kehakiman (menteri hukum dan HAM) juga menunjuk seorang atau lebih ketua pengganti pada pengadilan tentara tinggi dan seorang atau lebih jaksa pengganti pada kejaksaan tentara tinggi.

Tiap-tiap pengadilan tentara tinggi mempunyai hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat letnan kolonel (letkol) serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Hakim dan perwira tersebut harus berpangkat lebih tinggi daripada pangkat militer terdakwa yang perkaranya harus diadili.

Pengadilan tentara tinggi memutuskan perkara-perkara kejahatan dan pelanggaran, terdakwa yang dilakukan seorang perwira yang berpangkat mayor.

c) Mahkamah Tentara Agung

Mahkamah Tentara Agung berkedudukan di tempat Mahkamah Agung Indonesia dan daerah hukumnya meliputi seluruh negara Republik Indonesia. Selain Mahkamah Tentara Agung, terdapat juga kejaksaan. Tentara Agung yang daerah hukumnya sama.

Ketua, ketua muda, dan hakim Mahkamah Agung karena jabatannya menjadi ketua muda dan hakim MTA. Selain itu, terdapat beberapa hakim perwira yang serendah-rendahnya berpangkat Kolonel serta diangkat dan diberhentikan oleh presiden. MTA tersebut mengadili dalam tingkat pertama dan terakhir perkara kejahatan dan pelanggaran yang berhubungan dengan jabatan sebagai berikut.

- Sekretaris jenderal departemen pertahanan dan keamanan, jika jabatan tersebut dipangku oleh seorang anggota TNI.
- Panglima TNI.
- Kepala staf TNI.

Selain itu, Mahkamah Tentara Agung mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut.

- Melakukan pengawasan atas pengadilan-pengadilan tentara dan pengadilan tentara tinggi.

- Memeriksa dan memutuskan dalam peradilan tingkat kedua mengenai segala hal yang telah diputuskan oleh pengadilan tentara tinggi.
- Memeriksa dan memutuskan dalam peradilan pertama dan terakhir semua perselisihan tentang kekuasaan mengadili.
 - antara semua pengadilan tentara yang tempat kedudukannya tidak sederah hukum suatu pengadilan tentara tinggi,
 - antara suatu pengadilan tentara tinggi dan pengadilan tentara tinggi yang lain,
 - antara suatu pengadilan tentara tinggi dan pengadilan tentara.

3. Tingkatan Lembaga Peradilan

Lembaga peradilan berperan untuk menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Pengadilan sebagai lembaga penegak hukum bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutus setiap perkara yang diajukan kepadanya agar mendapatkan keadilan. Hakim pengadilan tidak boleh menolak perkara yang masuk dengan alasan tidak mampu atau tidak ada hukum yang dapat dipakai untuk menyelesaikannya. Hakim harus menerima setiap perkara yang masuk untuk disidangkan. Jenis perkara yang masuk disesuaikan dengan tugas dan kewenangan dari tiap lembaga peradilan yang ada. Jadi, peranan lembaga peradilan adalah melaksanakan kekuasaan kehakiman di Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan.

a. Pengadilan Tingkat Pertama (Pengadilan Negeri)

Fungsi pengadilan tingkat pertama adalah memeriksa tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan yang diajukan oleh tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan dengan menyebutkan alasan-alasannya. Tugas dan wewenang pengadilan negeri adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Negeri dibentuk oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Mahkamah Agung yang mempunyai kekuasaan hukum pengadilan meliputi satu kabupaten/kota. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, maka pembentukan Pengadilan Umum beserta fungsi dan kewenangannya ada pada Mahkamah Agung.

Hal lain yang menjadi tugas dan kewenangannya, antara lain:

- 1) Menyatakan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyelidikan, atau penghentian tuntutan.
- 2) Tentang ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penvidikan atau penuntutan.
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.

- 4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, Panitera, Sekretaris, dan Juru Sita di daerah hukumnya.
- 5) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
- 6) Memberikan petunjuk, teguran, dan peringatan yang dipandang perlu dengan tidak mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
- 7) Melakukan pengawasan atas pekerjaan notaris di daerah hukumnya, dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, dan Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi jabatan notaris. Ketua Pengadilan Negeri dapat menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, kecuali terhadap tindak pidana yang pemeriksaannya harus didahulukan, yaitu:
 - a) Korupsi,
 - b) Terorisme
 - c) Narkotika/psikotropika,
 - d) Pencucian uang, atau
 - e) Perkara tindak pidana lainnya yang ditentukan oleh undang-undang dan perkara yang terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara.

b. Pengadilan Tingkat Kedua

Pengadilan Tingkat Kedua disebut juga Pengadilan Tinggi yang dibentuk dengan undang-undang. Daerah hukum Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Pengadilan Tinggi, disebut juga sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Fungsi Pengadilan Tingkat Kedua adalah:

- 1) Menjadi pemimpin bagi pengadilan-pengadilan Negeri di dalam daerah hukumnya.
- 2) Mengawasi dan meneliti perbuatan para hakim pengadilan negeri di daerah hukumnya.
- 3) Untuk kepentingan negara dan keadilan, Pengadilan Tinggi dapat memberi peringatan, teguran, dan petunjuk yang dipandang perlu kepada Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya,
- 4) Melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di dalam daerah hukumnya dan menjaga supaya peradilan itu diselesaikan dengan seksama dan sewajarnya.

Wewenang Pengadilan Tingkat Kedua adalah:

- 1) Berwenang untuk memerintahkan pengiriman berkas-berkas perkara dan surat-surat untuk diteliti dan memberi penilaian tentang kecakapan dan kerajinan para hakim.
- 2) Mengadili perkara yang diputus oleh pengadilan negeri dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding.

c. Pengadilan Tingkat Kasasi

Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetaan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan :

- 1) Lupa memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 2) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;
- 3) Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Pengadilan tingkat kasasi, yaitu Mahkamah Agung bertugas untuk memeriksa dan memutus

- 1) In permohonan kasasi
- 2) sengketa tentang kewenangan mengadili ;
- 3) permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum yang pasti

Dalam hal kasasi, yang menjadi wewenang Mahkamah Agung adalah membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua Lingkungan Peradilan karena:

- 1) Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang,
- 2) Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku,
- 3) Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang niengancani kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

4. Peranan Lembaga Peradilan

Agar dapat menerapkan menegakkan hukum dan keadilan, pengadilan memiliki ketentuan sebagai berikut.

- a. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan intangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- b. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- c. Pengadilan memeriksa mengadili dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.
- d. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- e. Peradilan difakukan "demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- f. Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memerhatikan nilai kemanusiaan dan keadilan.
- g. Peradilan dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan.
- h. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang'terbuka untuk umum.
- i. Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil. Profesional, dan berpengalaman di bidang hukum

- j. Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- k. Hakim wajib menggali, mengikuti/ dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.
- l. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- m. Terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- n. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang - undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- o. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum
- p. Tidak seorang pun dapat diharapkan di depgni pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang.
- q. Terhadap putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat kasasi dimintai kasasi kepada Mahkamah guna oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- r. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi
- s. Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- t. Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.



Sikap Positif terhadap Ketentuan Hukum yang Berlaku

Kesadaran hukum masyarakat akan tumbuh apabila setiap individu (orang) selalu berusaha mengerti, memahami, dan menghayati aturan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, kesadaran hukum adalah keyakinan akan kebenaran hukum yang melaksanakan dengan perbuatan patuh pada hukum.

Sikap positif terhadap hukum atau kesadaran hukum harus ditumbuh kembang dalam kehidupan sehari-hari diberbagai lingkungan kehidupan sebagai sebuah budaya.

Jika kesadaran hukum sudah merupakan budaya atau membudaya dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, maka kehidupan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan tujuan hukum dapat tercapai.

Hukum dibuat dengan tujuan menjaga dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, dan sekahgus juga untuk memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh sebab itu, agar kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara dapat berlangsung dengan aman, tenteram dan tertib diperlukan sikap yang mampu mendukung ketentuan hukum yang berlaku. Sikap yang mendukung ketentuan hukum antara lain adalah sikap terbuka, sikap objektif, dan sikap mengutamakan kepentingan umum.

1. Sikap Terbuka

Sikap terbuka merupakan sikap yang secara internal menunjukkan adanya keinginan dari setiap warga negara untuk membuka diri dalam memahami hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Sikap ini sangat penting dalam rangka menghilangkan rasa curiga dan salah paham sehingga dapat memupuk rasa saling percaya dalam membangun persatuan dan kesatuan.

Sikap terbuka dalam memahami ketentuan hukum yang berlaku, dapat mencakup hal-hal berikut :

- a. berupaya selalu jujur dalam memahami ketentuan hukum,
- b. mau mengatakan apa adanya, benar atau salah,
- c. berupaya untuk tidak menutup-nutupi kesalahan.
- d. sanggup menyatakan suatu ketentuan hukum adalah benar atau salah,

2. Sikap Objektif/Rasional

Bersikap objektif atau rasional merupakan sikap yang ditunjukkan oleh seseorang dalam memahami ketentuan-ketentuan hukum dikembalikan pada data, fakta, dan dapat diterima oleh akal sehat. Seseorang yang mengedepankan objektivitas atau rasionalitas, akan memiliki pendirian kuat dan mampu berpikir jernih dalam menghadapi berbagai persoalan sehingga tidak mudah difitnah atau terombang-ambing oleh keadaan. Beberapa contoh sikap objektif yang dapat ditunjukkan antara lain:

- a. mampu memberi penjelasan yang netral dan dapat diterima akal sehat bahwa suatu pelaksanaan ketentuan hukum benar atau salah,
- b. mampu menyatakan/menunjukkan bahwa suatu ketentuan hukum benar atau salah dengan argumentasi yang baik,
- c. menghargai orang lain sesuai dengan kemampuan, keahlian atau profesinya.
- d. sanggup menyatakan ya atau tidak untuk suatu pelaksanaan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya,
- e. sanggup menyatakan kekurangan atau kelemahannya jika orang lain lebih baik.

3. Sikap Mengutamakan Kepentingan Umum

Kepentingan umum atau kepentingan orang lain di mana pun berada pasti didahulukan. Sikap mengutamakan kepentingan umum merupakan sikap seseorang untuk menghargai atau menghormati orang lain yang dirasakan lebih membutuhkan/penting dalam suatu kurun waktu tertentu untuk sesuatu yang lebih besar manfaatnya. Dalam pelaksanaan ketentuan hukum, sikap mengutamakan kepentingan umum dapat dilihat pada beberapa contoh berikut ini:

- a. memberi tempat/pertolongan kepada orang lain yang sangat membutuhkan,
- b. merelakan tanah atau bangunan diambil oleh pemerintah untuk kepentingan sarana jalan atau jembatan,
- c. membayar pajak (bumi dan bangunan, kendaraan, perusahaan, dan lain-lain) tepat pada waktunya.
- d. memberikan jalan kepada orang lain untuk lebih dahulu menyeberang atau melewatinya.
- e. memenuhi tugas yang diberikan oleh atasan atau guru di sekolah sesuai dengan kesepakatan.

Perbuatan yang sesuai dengan hukum harus diawali dengan membiasakan diri untuk hidup tertib dan tidak terbiasa melanggar peraturan atau hukum dengan cara disengaja sekecil apapun perbuatan tersebut. Jika seseorang tidak terbiasa melanggar hukum, maka saat ia melanggar hukum ia akan cemas dan ketakutan. Dengan demikian, dia dapat mengontrol perbuatannya. Adapun ciri-ciri orang yang berperilaku sesuai dengan hukum akan tampak dalam perbuatan berikut.

- a. Disenangi masyarakat.
- b. Tidak menimbulkan kerugian baik bagi diri sendiri maupun orang lain.
- c. Mencerminkan sikap patuh pada hukum.
- d. Menciptakan kesadaran hidup.
- e. Tidak menyinggung perasaan orang lain

Perbuatan yang mencerminkan sikap patuh terhadap hukum, antara lain dapat dilihat di berbagai lingkungan kehidupan.

- a. Lingkungan Keluarga
 - 1) Setiap keluarga memiliki Kartu Keluarga (KK).
 - 2) Setiap warga memiliki KTP bagi yang sudah berusia 17 tahun.
 - 3) Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
 - 4) Seluruh anggota keluarga ditengkapi akta kelahiran.
- b. Lingkungan Sekolah
 - 1) Membayar uang administrasi sekolah tepat waktu.
 - 2) Mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal.
 - 3) Berseragam sekolah sesuai dengan ketentuan.
 - 4) Tidak merusak citra sekolah.
- c. Lingkungan Masyarakat Bangsa dan Negara
 - 1) Menaati undang-undang lalu lintas.
 - 2) Memiliki SIM bagi pengendara motor.

- 3) Mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
- 4) Mematuhi pemerintahan yang sah.

Perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar hukum atau dilarang oleh undang-undang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah perbuatan melanggar hukum yang dikategorikan berat, sedangkan pelanggaran adalah perbuatan kejahatan yang diberi sanksi hukuman dan denda, sedangkan sanksi tindak pelanggaran umumnya berupa denda.



Sumber : <http://hinamagazine.com/>

Gambar 2.8 Razia kelengkapan surat-surat berkendara bermotor oleh polisi adalah demi tegak dan dipatuhinya hukum oleh segenap warga masyarakat.

Dalam beberapa ketentuan pidana diluar KUHP. Seperti perundang-undangan tindak pidana ekonomi, subversi, dan terorisme, ditemukan pula sebagai perbuatan-perbuatan kejahatan atau disebut tindak pidana sehingga dilarang dan diberi ancaman sanksi. Pengklarifikasian tentang kejahatan didasarkan pada perbuatan kejahatan yang umumnya merugikan masyarakat. Ada penggolongan tentang tipe kejahatan, yaitu sebagai berikut.

- a. Kejahatan politik yang meliputi pengkhianatan, spionase, sabotase.
- b. Kejahatan profesional yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai suatu cara hidup seseorang.
- c. Kejahatan perorangan dengan kekerasan, seperti pembunuhan dan perkosaan.
- d. Kejahatan konvensional, antara lain perampokan dan bentuk-bentuk pencurian dengan kekerasan dan pemberatan.
- e. Kejahatan terhadap harta benda yang dilakukan sewaktu-waktu, seperti pencurian kendaraan bermotor.
- f. Kejahatan terhadap ketertiban umum, seperti penyelenggaraan pelacuran.
- g. Kejahatan yang dilakukan dalam pekerjaan dan kedudukan tertentu yang pada umumnya dilakukan oleh orang berkedudukan tinggi.

- h. Kejahatan terorganisir, antara lain pemerasan, pelacuran, perjudian terorganisir, dan pengedaran narkoba.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai jenis tindakan positif terhadap hukum, lakukan kegiatan berikut!

1. Buatlah sebuah kliping, yang memuat berbagai gambar tentang sikap-sikap dan perbuatan positif terhadap pelaksanaan hukum.
2. Berikanlah keterangan gambar dan ulasan singkat di bawah gambar tersebut.
3. Kumpulkan minimal 10 gambar yang tertata pada sebuah kertas karton.
4. Hiasilah karton agar tampak menarik dan indah dipandang.
5. Anda dapat melengkapinya dengan mencari di berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar atau berbagai sumber lainnya. Kumpulkan kepada Gurumu untuk dinilai. Jadikanlah kliping terbaik menjadi hiasan di kelasmu.



D. Korupsi

1. Memahami Arti Korupsi

Istilah korupsi berasal dari perkataan Latin "*coruptio*" atau *corruptus* yang berarti kekuasaan atau kebobrokan. Dalam *Ensiklopedi Indonesia* disebutkan bahwa korupsi (dari Latin *corruption* = penyuapan; dan *corrumpere* = merusak) yaitu gejala bahwa para pejabat badan-badan negara menyalahgunakan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.

Istilah korupsi seringkali diikuti dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). *Transparency Internasional* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan public untuk keuntungan pribadi. Dalam definisi tersebut, terdapat tiga unsure dari pengertian korupsi yaitu :

- a. Menyalahgunakan kekuasaan
- b. Kekuasaan yang dipercayakan (baik di *sector public* maupun swasta), memiliki akses bisnis atau keuntungan materi
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-teman)

Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001, korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri/orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan/perekonomian Negara.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :

- a. Secara melawan hukum;
- b. Memperkaya diri sendiri/orang lain; dan
- c. Dapat merugikan keuangan/perekonomian negara.

2. Dasar Hukum Pemberantasan Korupsi

Dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

- a. Ketetapan MPR No. X/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
- b. UU No. 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. UU No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN.
- d. UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- e. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- f. UU No. 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi (KPK).
- g. UU No. 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- h. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- i. Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia KPK.

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu "Mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi". Misi Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia, yaitu "penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi".

Untuk melaksanakan misi tersebut, maka ditempuh strategi-strategi berikut.

- a. Pembangunan kelembagaan
- b. Penindakan
- c. Pencegahan
- d. Penggalangan keikutsertaan masyarakat

3. Pengklasifikasian Perbuatan Korupsi

Di negara Indonesia sejak Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini telah diupayakan pemberantasan korupsi, namun hingga sekarang ini penyakit "korupsi" masih berkembang cukup subur di segala bidang pemerintahan dan sektor kehidupan. Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.

Namun yang paling menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi semakin apatis dengan semakin meluasnya praktik-praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal maupun nasional.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini hal-hal yang termasuk kedalam klasifikasi korupsi.

- a. Gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, kecuali melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
- b. Melakukan pencurian uang, artinya perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan tersebut sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan pribadi yang sah.
- c. Tindak pidana korupsi, yakni barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- d. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- e. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingati sesuatu kekuasaan atau sesuatu wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu.
- f. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya.

4. Ancaman Pidana bagi Pelaku Korupsi

Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik badan hukum maupun bukan badan hukum.

Ancaman pidana bagi para pelaku korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

5. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Selain membentuk undang-undang pemberantasan korupsi, pemerintah juga membentuk lembaga yang menangani korupsi, yaitu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Pembentukan KPK ini merupakan amanat dari Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Pasal 43 yaitu perlunya dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dapat disingkat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi tersebut dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lembaga lain yang menangani korupsi adalah Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timas Tipikor), Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), dan Komisi Ombudsman Nasional.

WAWASAN KONSTITUSI

Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional) adalah lembaga negara di Indonesia yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 9 September 2008.

Ombudsman Republik Indonesia bermula dari dibentuknya "Komisi Ombudsman Nasional" pada tanggal 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. Peran Komisi Ombudsman Nasional saat itu adalah melakukan pengawasan terhadap pemberian pelayanan publik oleh penyelenggara negara, termasuk BUMN/BUMD, lembaga pengadilan, Badan Pertanahan Nasional, Kepolisian, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Departemen dan Kementerian, Instansi Non Departemen, Perguruan Tinggi Negeri, TNI, dan sebagainya.

Dalam menjalankan kewenangannya KON berpegang pada asas mendengarkan kedua belah pihak (imparsial) serta tidak menerima imbalan apapun baik dari masyarakat yang melapor atau pun instansi yang dilaporkan. KON tidak memiliki kewenangan menuntut maupun menjatuhkan sanksi kepada instansi yang dilaporkan, namun memberikan rekomendasi kepada instansi untuk melakukan *self-correction*. Penyelesaian keluhan oleh KON merupakan salah satu upaya alternatif penyelesaian masalah (*alternative dispute resolution*) di samping cara lainnya yang membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang harus dikeluarkan.

Tugas Ombudsman Republik Indonesia adalah:

1. Menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangannya.
4. Melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan.
6. Membangun jaringan kerja.
7. Melakukan upaya pencegahan Maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
8. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Referensi : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi dapat membentuk perwakilan di daerah provinsi. Komisi Pemberantasan Korupsi bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan.

Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas :

- a. pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri atas lima anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. tim penasihat yang terdiri dari empat anggota;
- c. pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pelaksana tugas.

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi disusun sebagai berikut :

- a. Ketua komisi Pemberantasan merangkap anggota.
- b. Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas empat orang, masing-masing merangkap anggota.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- c. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- d. Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang untuk mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi;
- e. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.
- f. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- g. Tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi.
- h. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- i. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
- j. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.

KPK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya melakukan penindakan dengan tujuan meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Strategi penindakan tersebut dijabarkan dalam sejumlah kegiatan berikut.

- a. Pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara tindak pidana korupsi oleh KP.
- b. Identifikasi kelemahan undang-undang dan konflik antar undang-undang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.
- c. Pengembangan mekanisme, sistem, dan prosedur supervisi oleh KPK atas penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang dilaksanakan oleh kepolisian dan kejaksaan.
- d. Pemetaan aktivitas-aktivitas yang berindikasi tindak pidana korupsi.
- e. Pengembangan sistem dan prosedur peradilan pidana korupsi yang ditangani langsung oleh KPK.

Agar tindak pidana korupsi sedapat mungkin dapat ditekan sehingga visi pemberantasan korupsi sedapat mungkin tercapai, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi, maka diperlukan strategi pencegahan tindak pidana korupsi yang handal sebagai berikut.

- a. Penyusunan sistem pelaporan gratifikasi dan sosialisasi.
- b. Pengkajian dan penyampaian saran perbaikan atas sistem administrasi pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- c. Peningkatan efektivitas sistem pelaporan kekayaan penyelenggaraan negara.
- d. Penelitian dan pengembangan teknik dan metode yang mendukung pemberantasan korupsi.
- e. Penyusunan sistem pelaporan pengaduan masyarakat dan sosialisasi.

Unjuk Kerja

- a. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 4 - 5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
- b. Buatlah sebuah kliping dengan tema "Kasus-kasus yang sudah berhasil ditangani Komisi Ombudsman Republik Indonesia Tahun 2009",
- c. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai kasus (satu kelompok 2 kasus) sesuai dengan pilihan masing-masing kelompok.
- d. Lengkapi dengan gambar atau sumber berita yang terkait dari internet, buku karya ilmiah, koran, atau majalah ilmu pengetahuan sebagai pelengkap dan rujukan referensi!
- e. Buatlah sebuah tulisan singkat yang menyertainya, lalu presentasikanlah di depan kelas di hadapan kelompok yang lain. Mintalah Gurumu bertindak sebagai penilai.

E.

Peran Serta dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi termasuk tindak kejahatan (tindak pidana). Korupsi merupakan suatu pelanggaran hukum menurut ketentuan undang-undang. Korupsi merupakan satu dari istilah KKN, yaitu korupsi, kolusi dan nepotisme. Istilah KKN muncul dan mulai dikenal luas sejak berakhimya pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dianggap banyak melakukan KKN sehingga menyebabkan pemerintahan Orde Baru jatuh. Sejak saat itu sampai sekarang selalu didengung-dengungkan perlunya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme diyakini mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan menciptakan rasa keadilan.

1. Peran Serta Masyarakat

Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, bukan hanya tanggungjawab dari penyelenggara negara itu semata, melainkan juga masyarakat dan semua komponen anak bangsa. Peran serta masyarakat diperlukan untuk melakukan kontrol sosial terhadap praktik penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus di libatkan juga sebagai subjek. Agar pelaksanaan peran serta masyarakat berjalan dengan tertib, maka disusunlah pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Namun dengan demikian, upaya penanggulangan korupsi membutuhkan peran serta bersama masyarakat. Masyarakat dapat berperan serta untuk menanggulangi penyakit ini. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa masyarakat dapat berperan serta membantu upaya cegahan, pengendalian dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk berikut ini.

- a. Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- b. Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hal
 - 1) melaksanakan haknya sebagaimana tersebut di atas;
 - 2) diminta hadir dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang pengadilan sebagai saksi pelapor, saksi, atau saksi ahli, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.
- e. Hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Peran serta masyarakat tersebut akan mendapat penghargaan dari pemerintah. Artinya, pemerintah akan memberikan penghargaan kepada anggota masyarakat yang telah berjasa membantu upaya pencegahan, pemberantasan, atau pengungkapan tindak pidana korupsi. Penghargaan kepada masyarakat yang berjasa dalam tindak pidana korupsi dengan disertai bukti-bukti, diberikan penghargaan baik berupa piagam maupun premi.

Akhirnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dikembangkan melalui Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat diartikan sebagai peran aktif perorangan, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pemberantasan korupsi adalah setiap orang, organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat berhak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum atau komisi mengenai perkara tindak pidana.

Penyampaian tersebut dilakukan secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, kesusilaan, dan kesopanan. Penyampaian informasi tersebut secara tertulis disertai data dan identitas diri dan bukti-bukti permulaan.

2. Wujud Peran Serta Masyarakat

a. Peran Serta Melalui Media

Media seperti koran majalah, radio dan televisi menjadi sarana ampuh untuk ikut serta mencegah dan menanggulangi korupsi. Media dapat memberitakan adanya dugaan kasus korupsi yang terjadi di suatu lembaga pemerintah atau dugaan korupsi oleh seorang pejabat negara. Hasil pemberitaan dapat ditindaklanjuti oleh lembaga berwenang, misal KPK. Warga juga dapat menyampaikan melalui media adanya dugaan korupsi, kejadian korupsi atau hal lain yang berkaitan.

Misalnya, dengan surat pembaca, kotak pos, opini, kolom pembaca, kring telepon, dan lain-lain.

b. Peran Serta Melalui Kegiatan-Kegiatan Langsung

Kegiatan langsung yang dimaksud adalah kegiatan secara langsung dan terbuka oleh sekelompok orang berkaitan dengan upaya penanggulangan korupsi. Misalnya, unjuk rasa mendatangi lembaga pemerintahan yang dituduh melakukan korupsi, demonstrasi ke lembaga ke KPK agar serius menangani suatu kasus korupsi, dan lain-lain.



Sumber : <http://foto.detik.com/>

Gambar 2.9 Masyarakat perlu untuk melakukan penekanan kepada pihak-pihak yang terkait dengan pemberantasan korupsi, jika memang kinerja yang dilakukan kurang maksimal.

Sekarang ini banyak sekali lembaga swadaya masyarakat (LSM yang berkecimpung di bidang penanggulangan korupsi. Mereka secara aktif dan rajin melakukan kegiatan-kegiatan yang berintikan upaya menanggulangi korupsi, seperti melaporkan adanya tindak pidana korupsi oleh seorang pejabat, memberikan masukan dan kritik terhadap penggunaan anggaran suatu departemen, laporan dugaan korupsi suatu departemen, dan lain-lain.

Contoh lembaga swadaya masyarakat tersebut adalah :

1) *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Indonesia Corruption Watch atau disingkat ICW adalah sebuah organisasi non pemerintah (NGO) yang mempunyai misi untuk mengawasi dan melaporkan kepada publik mengenai aksi korupsi yang terjadi di Indonesia. ICW adalah lembaga nirlaba yang terdiri dari sekumpulan orang yang memiliki komitmen untuk memberantas korupsi melalui usaha - usaha pemberdayaan rakyat untuk terlibat/berpartisipasi aktif melakukan perlawanan terhadap praktek korupsi. ICW lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1998 di tengah-tengah gerakan reformasi yang menghendaki pemerintahan pasca-Soeharto yang demokratis bersih, dan bebas korupsi.

2) *Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI)*

Adalah sebuah organisasi internasional yang bertujuan memerangi korupsi politik. Organisasi yang didirikan di Jerman sebagai organisasi nirlaba sekarang menjadi organisasi non-pemerintah yang bergerak menuju organisasi yang berstruktur demokratik.

Berikut ini berbagai macam gerakan atau organisasi anti korupsi yang mempunyai misi membebaskan negeri Indonesia dari korupsi.

- AJI (Aliansi Jurnalis Indonesia)
- BERANTAS (Perhimpunan Rakyat Jakarta untuk Pemberantasan Korupsi).
- CIBA (*Civil Education and Budget Transparency Advication*)
- GOWA (*Government Watch*)
- ILEW (*Indonesian Law Enforcement Watch*).
- IPW (*Indonesia Procurement Watch*).
- JW (*Judicial Watch*)



Teropong Kasus

KPK Jalin Kerja Sama Pemberantasan Korupsi dengan Australia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI memperluas kerja sama internasionalnya dalam pemberantasan korupsi dengan tiga lembaga pemerintah federal Australia, di KBRI Canberra, Senin(27/7/09). Perluasan kerja sama dalam pemberantasan korupsi dengan Australia disepakati dengan penandatangan Nota Kesepahaman (MoU) oleh Wakil Ketua KPK bidang Pencegahan Mochammad Jasin dan para pejabat terkait dari Departemen Kejaksaan Agung, Komisi Integritas Penegakan Hukum, dan Komisi Pelayanan Publik Australia yang tidak memiliki KPK.

Penandatanganan MoU yang berlangsung di kantor Departemen Kejaksaan Agung itu turut disaksikan Duta Besar RI untuk Australia dan Vanuatu Primo Alui Joelianto, serta segenap pejabat KBRI Canberra dan instansi terkait Australia. Nota kesepahaman yang berlaku selama enam tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari kedua pihak itu membuka jalan bagi kerja sama pengembangan dan peningkatan kapasitas institusi.

MoU itu juga menyepakati kerjasama di bidang pencegahan, intelijen yudisial, pelacakan dan pemulihan aset, penyelidikan, evaluasi perundang-undangan serta pembuatan undang-undang yang relevan. Dalam sambutannya, Dubes Primo menyambut baik penandatanganan MoU yang menandakan hubungan kedua negara yang semakin baik dan meningkat di di berbagai bidang. Ia juga memandang MoU ini sebagai suatu terobosan karena di tingkat pemerintah federal, Australia baru pertama kali menyepakati kerjasama pemberantasan korupsi dengan lembaga anti korupsi negara lain. Penandatanganan MoU kerjasama pemberantasan korupsi ini juga merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Lombok yang berlaku sejak Februari 2008. (Ant/OL-01)

Sumber: Media Indonesia Online

<http://www.mediaindonesia.com/read/2009/07/>

Setelah membaca berita di atas, bagaimanakah tanggapan Anda tentang usaha yang dilakukan oleh KPK yang bekerja sama dengan pihak Australia tersebut? Tuliskan jawaban Anda dalam sebuah tulisan singkat (1-2 halaman) dan kumpulkanlah kepada gurumu untuk dinilai!



Rangkuman

1. Sistem hukum merupakan satu kesatuan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu, misalnya Indonesia, yang harus dipatuhi dan ditaati oleh warga negara Indonesia.
2. Ciri-ciri hukum yang berlaku secara umum adalah:
 - a. adanya perintah dan larangan,
 - b. perintah dan larangan tersebut harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap orang.
3. Tujuan hukum adalah memberikan perlindungan terhadap kepentingan individu dan masyarakat secara seimbang untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, aman, damai, dan tenteram.
4. Sumber hukum terdiri atas:
 - a. sumber hukum material (keyakinan hukum individu dan pendapat umum),
 - b. sumber hukum formal, yang dibagi menjadi undang-undang, traktat, kebiasaan, doktrin, dan yurisprudensi.
5. Pada hakikatnya, sistem hukum di Indonesia meliputi komponen hukum nasional yang terdiri atas struktur lembaga hukum, materi hukum, dan budaya hukum.

6. Dalam kaitannya dengan budaya hukum di masyarakat, kesadaran hukum terbentuk atas empat aspek, yaitu:
 - a. pengetahuan hukum masyarakat,
 - b. pemahaman terhadap kaidah-kaidah hukum,
 - c. sikap terhadap norma hukum,
 - d. perilaku hukum.
7. Penggolongan hukum dapat dibedakan berdasarkan sumbernya, sasarannya, bentuknya, isinya, wujudnya, masa belakunya, ruang atau wilayah berlakunya, serta tugas dan fungsinya.
8. Terwujudnya kesadaran atau budaya sadar hukum merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Budaya sadar hukum ini perlu ditumbuhkembangkan melalui kebiasaan mematuhi norma-norma yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar.
9. Korupsi merupakan contoh perilaku yang mencerminkan ketidakjujuran dan penyelewengan. Di Indonesia, perilaku korupsi sudah bisa dikatakan budaya karena sudah ada sejak zaman Orde Lama (sekitar tahun 1960-an).
10. Upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui upaya pencegahan (preventif) dan upaya penindakan (kuratif). Selain itu, peran serta masyarakat juga sangat diperlukan, misalnya:
 - a. kontrol sosial dari masyarakat bersama media massa,
 - b. kontrol sosial dari media massa,
 - c. kontrol sosial dari organisasi masyarakat, misalnya *Indonesian Corruption Watch* (ICW), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK), dan sebagainya,
 - d. kontrol sosial oleh lembaga negara, misalnya dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan UU No. 20 Tahun 2001.

UJI KOMPETENSI

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Pelanggaran terhadap norma moral sanksinya berupa penyesalan diri. Sanksi ini berasal dari
 - a. dirinya sendiri
 - b. orang lain
 - c. masyarakat
 - d. Tuhan
 - e. negara

2. Dalam negara hukum, sebaiknya tindakan-tindakan negara selain mempertimbangkan landasan hukumnya juga
 - a. kegunaannya
 - b. kepentingannya
 - c. kepastiannya
 - d. hasilnya
 - e. subjeknya
3. Keistimewaan norma hukum dibandingkan dengan norma-norma lainnya terletak pada
 - a. sifatnya memaksa (imperatif) dengan sanksi ancaman hukuman
 - b. dibuat oleh masyarakat yang membutuhkan ketertiban
 - c. materi norma yang bersifat mengatur kehidupan dalam masyarakat
 - d. selalu dibutuhkan dalam mengatur kehidupan bermasyarakat
 - e. bersumber dari suatu lingkungan masyarakat sekitar
4. Norma berlaku dalam kehidupan
 - a. seseorang
 - b. kelompok
 - c. pribadi
 - d. individu
 - e. dirinya sendiri
5. Ketentuan yang diatur dalam hukum pidana adalah tentang
 - a. melakukan pelanggaran
 - b. korupsi dan penggelapan
 - c. kejahatan kemanusiaan
 - d. pelanggaran administrasi
 - e. kejahatan dan pelanggaran
6. Hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan negara yang menyangkut kepentingan umum disebut
 - a. hukum antar golongan
 - b. hukum nasional
 - c. hukum material
 - d. hukum publik
 - e. hukum formal
7. Penjelasan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum, terdapat di dalam
 - a. Batang Tubuh UUD 1945
 - b. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
 - c. Pembukaan UUD 1945
 - d. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945
 - e. Penjelasan UUD 1945
8. Menurut Van Kant, Hukum Dagang merupakan tambahan hukum perdata yang bersifat khusus atau
 - a. *isu soli*
 - b. *private rechts*
 - c. *lex naturalis*
 - d. *lex specialis*
 - e. *ius sanguinis*

9. Berikut ini yang termasuk tujuan norma hukum adalah
 - a. memberikan kepastian hukum, seperti penyelewengan terhadap hukum pidana dikenakan pidana
 - b. membalas dendam seseorang, karena ia melakukan kejahatan kemanusiaan
 - c. melarang atau menyuruh subjek hukum untuk berperilaku sesuatu dengan baik
 - d. menjamin ketertiban umum dan ketenangan atau keadilan intern pribadi
 - e. memberikan kesetaraan hukum seperti seseorang dipidana penjara sesuai aturan hukum yang berlaku
10. Pelanggaran terhadap norma hukum, sanksinya bersifat
 - a. nyata
 - b. yuridis
 - c. memaksa
 - d. tertulis
 - e. hukum
11. Salah satu hal yang membedakan hukum publik dengan hukum privat adalah
 - a. landasan hukum
 - b. prosesnya
 - c. sanksinya
 - d. saat berlakunya
 - e. fungsinya
12. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Pernyataan tersebut adalah bunyi pasal
 - a. 23 ayat (2)
 - b. 24 ayat (2)
 - c. 23 ayat (1)
 - d. 23 ayat (3)
 - e. 24 ayat (1)
13. Norma hukum yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) UU No. 8/1981 termasuk ke dalam hukum
 - a. pidana formal
 - b. publik formal
 - c. perdata formal
 - d. perdata material
 - e. pidana material
14. Negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah negara hukum dalam arti
 - a. positif
 - b. induktif
 - c. formal
 - d. material
 - e. deduktif
15. Aturan hukum bersifat memaksa agar
 - a. menjadi pedoman hidup masyarakat
 - b. lembaga hukum sewenang-wenang
 - c. dipatuhi oleh anggota masyarakat
 - d. masyarakat merasa takut terhadap hukum
 - e. lembaga hukum berwibawa

16. Pemeriksaan di tingkat banding di Pengadilan Tinggi dapat terjadi apabila
 - a. terdakwa diputus hukuman seumur hidup
 - b. terdakwa atau penuntut hukum tidak mau menerima putusan hakim pengadilan negeri
 - c. terdakwa dijatuhi hukuman mati
 - d. terdakwa dihukum karena korupsi
 - e. pengadilan negeri tidak serius dalam memutuskan perkara
17. Seseorang yang mampu menjaga nama baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku berarti telah melaksanakan kebersihan dalam bidang
 - a. sosial
 - b. kesusilaan
 - c. hukum
 - d. keagamaan
 - e. kemasyarakatan
18. Patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti
 - a. memahami tata tertib masyarakat
 - b. mematuhi aturan negara lain
 - c. mematuhi hukum yang berlaku
 - d. menghayati setiap undang-undang
 - e. membuat hukum masing-masing
19. Pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh Mahkamah Agung terhadap putusan hakim di bawahnya dinamakan
 - a. grasi
 - b. amnesti
 - c. banding
 - d. kasasi
 - e. *judicial review*
20. Peraturan hukum yang mengatur cara pelaksanaan alat perlengkapan negara disebut
 - a. Hukum Pidana
 - b. Hukum Tata Negara
 - c. Hukum Administrasi Negara
 - d. Hukum Acara
 - e. Hukum Perdata

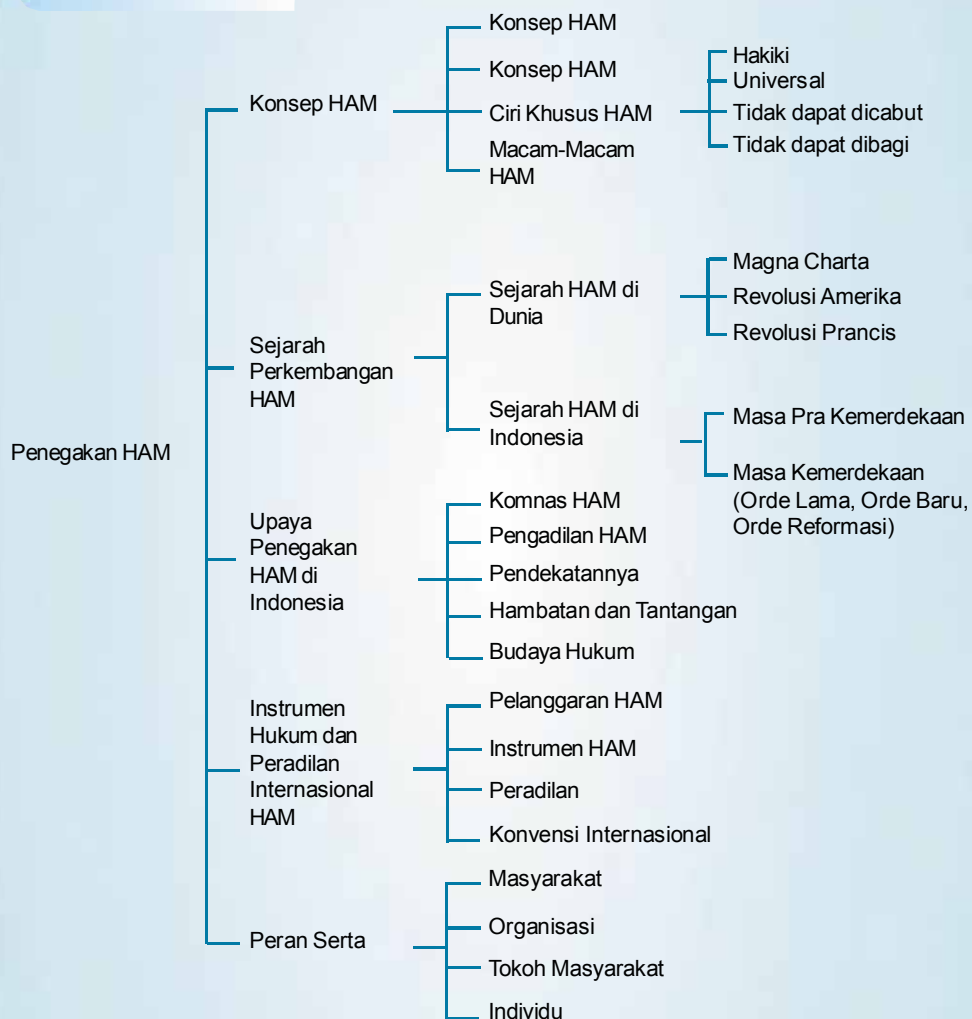
B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan benar!

1. Sebutkan faktor-faktor penyebab adanya gejala korupsi tumbuh subur di dalam suatu negara!
2. Apakah yang dimaksud dengan yurisprudensi? Mengapa keputusan hakim terdahulu dijadikan landasan hukum bagi hakim dalam memutuskan suatu perkara? Jelaskan jawaban Anda!
3. Mengapa suatu perkara dilanjutkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK)? Hal apa sajakah yang menyebabkan seseorang melakukan proses kasasi di MA?
4. Jelaskan sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP!
5. Jelaskan lingkungan peradilan berdasarkan UU kekuasaan kehakiman!

BAB 3

Penegakan Hak Asasi Manusia

PETA KONSEP



Pada bab ini Anda diajak belajar tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Tahukah Anda yang dimaksud dengan HAM? HAM merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sejak ia lahir hingga meninggal. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk hidup, hak untuk berusaha, hak untuk beragama, hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk memperoleh kemerdekaan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan sebagainya. Pada setiap HAM, terkandung martabat kemanusiaan, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi agar harga diri dan nilai-nilai kemanusiaan dapat terjaga dengan baik.

Bentuk penjajahan terhadap bangsa Indonesia sesungguhnya merupakan awal munculnya pelanggaran terhadap HAM. Untuk itu, berbagai bentuk perjuangan untuk merdeka dari penjajahan merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Seiring perkembangan gagasan demokrasi yang mendunia, persoalan terhadap HAM menjadi sorotan utama di masyarakat dan pemerintah. Bahkan organisasi internasional, seperti PBB, pun peduli terhadap upaya penghormatan dan penegakan masalah HAM ini. Bentuk kepedulian ini ditunjukkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa, baik cetak maupun elektronik. Oleh karenanya, masalah HAM adalah masalah bersama yang memerlukan partisipasi aktif untuk menghargainya demi kehidupan manusia yang lebih beradab.



KATA - KATA SANG TOKOH

"Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini tidak perlu disangsikan lagi, bahwa semua manusia diciptakan sama; bahwa mereka dikaruniai Penciptanya hak-hak yang tidak bisa dicabut; bahwa hak-hak itu di antaranya adalah hak untuk Hidup, hak atas Kebebasan, dan hak untuk mengejar Kebahagiaan". (*"We hold these truths to be self-evident.-that all men are created equal; that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights; that among these are Life, Liberty, and the pursuit of Happiness"*) .

Thomas Jefferson

Sumber: www.meisusilofile.wordpress

A.

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Konsep tentang HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) muncul dari keyakinan manusia itu sendiri bahwasanya semua manusia selaku makhluk ciptaan Tuhan adalah sama dan sederajat. Manusia dilahirkan bebas dan memiliki martabat serta hak-hak yang sama. Atas dasar itulah manusia harus diperlakukan secara sama adil dan beradab.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAM bersifat universal, artinya berlaku untuk semua manusia tanpa membedakan berdasarkan atas ras, agama, suku dan bangsa (etnis). Masyarakat di seluruh dunia mengakui bahwa HAM harus ditegakkan demi menjamin martabat manusia seutuhnya. Hal itu tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Namun demikian, penegakan atas HAM tidaklah mudah, banyak sekali menghadapi tantangan, seperti masih adanya berbagai tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh negara ataupun masyarakat. Tindakan pelanggaran atas HAM merupakan kejahatan yang perlu dicegah dan diatasi oleh masyarakat, bangsa ataupun masyarakat dunia.



Sumber : <http://images.google.co.id/>

Gambar 3.1 Piagam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicetak dan disebarluaskan oleh PBB.

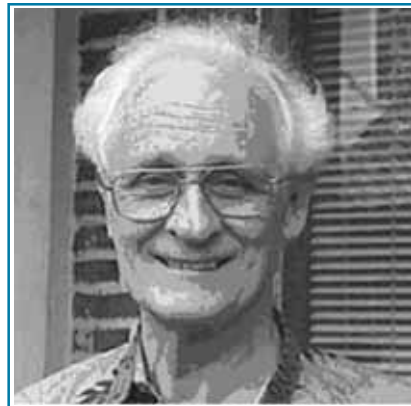
HAM pada dasarnya adalah bersitat kodrati. Hak tersebut merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang pasti memilikinya: siapa pun orangnya, dimana pun ia berada, bagaimana pun keadaannya. Dasar keberadaan HAM adalah kodrat seseorang sebagai manusia. Dengan demikian, HAM seseorang tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Diakui atau tidak oleh pihak lain, setiap orang tetap saja memiliki HAM. HAM juga tidak dapat dihilangkan oleh pihak lain manapun. Pihak lain hanya dapat tidak mengakui atau melanggar HAM. Akan tetapi meskipun tidak diakui atau dilanggar, HAM itu tetap ada.

HAM sebelum dan sesudah lahir mendapatkan perhatian dan penghormatan yang sama. Penghormatan HAM sebelum seseorang lahir misalnya, bayi dalam kandungan seorang ibu diperlakukan sama dalam mendapatkan hak hidupnya, sehingga pemaksaan lahir lewat aborsi tanpa alasan yang tepat merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Lebih jauh lagi bila hal ini berhubungan dengan hak warisan yang terkait dengan orang tuanya, secara hukum ternyata juga mendapat perlindungan dan jaminan hukum yang sama dengan manusia setelah lahir. Begitu pula orang yang sudah meninggal dunia masih menjadi kewajiban asasi bagi yang hidup untuk menghormatinya secara layak. Meskipun secara sosial-psikologis lebih tertuju pada rasa dan ikatan emosional terhadap keluarga atau ahli warisnya (yang masih hidup).

Perlu diingat, ada berbagai versi definisi mengenai HAM. Satu sama sama lain seringkali berbeda. Masing-masing definisi berikut menekankan segi-segi tertentu dari HAM.

- a. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 1 butir 1 UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia).
- b. HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne).
- c. HAM dan kebebasan-kebebasan fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta kapasitas-kapasitas manusia (David Beetham & Kevin Boyle).
- d. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan karena hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Manusia memilikinya karena ia manusia (Franz Magnis-Suseno).
- e. HAM adalah hak hukum yang dimiliki setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki ataupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan. Hak asasi merupakan hak hukum, ini berarti bahwa hak-hak tersebut merupakan hukum. Hak asasi manusia dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional di banyak negara di dunia (C. de Rover).
- f. HAM adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah (Austin-Ranney).



Sumber : <http://images.google.co.id/>

Gambar 3.2 Dr.Franz Magnis Suseno

3. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia

Dibandingkan dengan hak-hak yang lain, hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, terutama karena asasinya. Ciri khusus hak asasi manusia adalah sebagai berikut.

- a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.

- b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Memang persamaan adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
- c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan.
- d. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.



Sumber : <http://assets.babycenter.com>

Gambar 3.3 Bayi juga mempunyai hak asasi yang dibawanya sejak ia lahir.

Dalam kenyataannya hak asasi manusia dapat dijabarkan dalam berbagai aspek kehidupan. Di lain pihak terdapat pula kewajiban-kewajiban asasi. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial akan sering terjadi perbenturan kepentingan antara seseorang dengan yang lain. Maka secara praktiknya, hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Karena akan terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia itu sendiri (hak asasi orang lain).

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 3 - 4 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Diskusikanlah sebuah tema "Upaya Penegakan HAM di Indonesia selama satu tahun terakhir"!
3. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai judul sesuai dengan yang dipilih masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama.
4. Buatlah laporan singkat, lalu presentasikanlah di depan kelas! Mintalah Gurumu bertindak sebagai moderator!
5. Kumpulkanlah hasil pembahasan kelompok Anda kepada guru untuk dinilai!

4. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)

Pengakuan dan jaminan hak asasi manusia dinyatakan dalam Piagam PBB atau *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Sedunia Hak Asasi Manusia) yang terdiri atas 30 pasal. Deklarasi itu diterima oleh negara anggota pada tanggal 10 Desember 1948. Tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia Sedunia.

Dalam Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi, serta kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Hak asasi Manusia menurut Piagam PBB adalah :

- a. hak untuk hidup,
- b. hak untuk kemerdekaan hidup,
- c. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum,
- d. hak berpikirdan mengeluarkan pendapat,
- e. hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran,
- f. hak menganut aliran kepercayaan atau agama,
- g. hak untuk memperoleh pekerjaan,
- h. hak memiliki sesuatu,
- i. hak untuk memperoleh nama baik.

Cakupan HAM amat luas, seluas kehidupan manusia. Karena itu, ada bermacam-macam HAM. Namun, secara umum HAM dibedakan menjadi dua macam. Perbedaan dua macam HAM ini didasarkan pada dua instrumen HAM internasional. Kedua instrumen itu adalah Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights/ICESCR*).

Adapun kedua macam HAM itu adalah:

- a. Hak sipil dan politik, antara lain
 - 1) hak untuk hidup;
 - 2) hak atas kebebasan dan persamaan;
 - 3) hak atas kesamaan di muka badan badan peradilan;
 - 4) hak atas berpikir, mempunyai konsiensi dan beragama;
 - 5) hak mempunyai pendapat tanpa mengalami gangguan;
 - 6) hak kebebasan berkumpul secara damai;
 - 7) hak untuk berserikat.
- b. Hak ekonomi, sosial, dan budaya, antara lain
 - 1) hak atas pekerjaan;
 - 2) hak untuk membentuk serikat pekerja;
 - 3) hak atas pensiun;
 - 4) hak atas hidup yang layak;
 - 5) hak atas, pendidikan.

Patut diingat bahwa ICCPR dan ICESCR bersama dengan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) merupakan instrumen utama HAM internasional. Ketiga instrumen tersebut secara bersama-sama sering disebut *International Bill of Human Rights*.

Dengan berlakunya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dua naskah perjanjian di atas, hak asasi manusia makin berkembang dan diterima oleh banyak negara. Konvensi internasional tentang hak asasi manusia banyak dibuat, baik secara internasional maupun oleh negara-negara dalam satu wilayah regional.

Sementara itu, secara umum hak asasi manusia terdiri atas (enam) macam, yakni sebagai berikut.

- a. Hak asasi pribadi (*personal rights*).
- b. Hak asasi ekonomi (*poverty rights*).
- c. Hak asasi politik (*political rights*).
- d. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan (*rights of legal equality*).
- e. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and cultural rights*).
- f. Hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan (*procedural rights*).

Demikianlah macam-macam hak asasi manusia seperti yang dicantumkan dalam konstitusi negara dan peraturan perundang-undangan kita. Di samping itu, dimuat pula kewajiban dasar manusia, yaitu sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang ada di wilayah negara Indonesia wajib patuh pada peraturan perundang-undangan, hukum tidak tertulis, dan hukum internasional (mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara Indonesia).
- b. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- c. Setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- d. Setiap hak asasi seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik.
- e. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang.



Sumber : <http://images.google.co.id/>

Gambar 3.4 Hak menentukan pilihan dan aspirasi dalam PEMILU merupakan Hak Asasi Politik (*Political Right*) bagi semua warga negara.



Berpikir Kritis

Setelah memahami berbagai macam HAM, lakukanlah kegiatan di bawah ini!

1. Buatlah sebuah kliping mengenai berbagai contoh perbuatan atau aktivitas manusia yang berkaitan dengan HAM! (masing-masing jenis HAM dilengkapi dengan 3 contoh tindakan).
2. Anda dapat memilih aneka macam kegiatan, misalnya hak asasi politik: rakyat memilih partai politik dan memilih presiden dalam PEMILU, rakyat dibebaskan menjadi anggota partai politik secara bebas dan tanpa tekanan.
3. Lengkapi dengan berita, gambar, atau yang lain dari berbagai sumber seperti internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar atau berbagai sumber lainnya. Kumpulkan kepada Gurumu untuk dinilai!



B. Sejarah Perkembangan HAM

1. Sejarah Perkembangan HAM di Dunia

Sejarah hak asasi manusia bermula dari dunia Barat (Eropa). Pada abad ke-17 seorang filsuf Inggris, John Locke merumuskan adanya hak alamiah (*natural rights*) yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada saat itu hak masih terbatas pada bidang sipil (pribadi) dan politik. Ada tiga peristiwa penting di dunia Barat yang menandai sejarah perkembangan hak asasi manusia, yaitu Magna Charta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis.

a. Magna Charta (1215)

Magna Charta adalah piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris.

b. Revolusi Amerika (1776)

Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris. Revolusi ini menghasilkan *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan) dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776.

c. Revolusi Prancis (1789)

Revolusi Prancis, yaitu pemberontakan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri (Louis) yang lelah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Revolusi Prancis menghasilkan *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* (Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara). Pernyataan ini memuat tiga hal, yaitu hak atas kebebasan (*liberty*), kesamaan (*equality*) dan persaudaraan (*fraternite*).

Hak asasi manusia telah meliputi berbagai bidang kehidupan manusia dan tidak lagi menjadi milik negara Barat saja, tetapi sudah diakui seluruh dunia dan bersifat universal. Hak asasi manusia sekarang ini telah menjadi isu kontemporer di dunia. Pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah universal dan harus diperjuangkan bersama dicanangkan dalam *Declaration Universal of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi) oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948.

Bunyi Pasal 1 deklarasi tersebut dengan tegas menyatakan, "Sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan kehendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan".

Deklarasi tersebut melambangkan komitmen, moral dunia internasional pada hak asasi manusia. Deklarasi universal ini menjadi pedoman dan sekaligus standar minimum yang dicita-citakan umat manusia untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan damai. Berawal dari deklarasi universal tersebut negara-negara yang tergabung dalam berbagai organisasi dan kelompok regional mulai merumuskan bersama hak asasi manusia sebagai komitmen



Sumber : <http://www.asbarez.com/>

Gambar 3.5 Suasana Deklarasi Universal Hak Asasi oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948, di forum PBB.

mereka dalam menegakkan hak asasi manusia. Setiap negara juga mulai menunjukkan jaminan hak asasi manusia dalam konstitusi atau undang-undang dasarnya.

d. *African Charter on Human and Peoples Rights*

Afrika (Banjul) Manusia dan Piagam Hak Masyarakat, 27 Juni 1981, OAU. Negara-negara Afrika anggota Organisasi Persatuan Afrika, pihak dalam konvensi ini berjudul “*Piagam Afrika Manusia dan Hak Rakyat*”. Dalam konferensi ini, semua negara Afrika secara tegas berkomitmen untuk memberantas segala bentuk kolonialisme dari Afrika, untuk mengkoordinasikan dan mengintensifkan kerjasama dan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Afrika. Selain itu, juga meningkatkan kerja sama internasional harus memerhatikan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Semua negara Afrika sadar bahwa untuk mencapai pembebasan total Afrika, orang-orang masih berjuang untuk menghilangkan kolonialisme, neokolonialisme, apartheid, dan Zionisme. Selain itu, untuk membongkar pangkalan militer asing yang agresif dan segala bentuk diskriminasi, khususnya pada kelompok etnis ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik.

e. *Declaration on The Rights to Development*

(Deklarasi Hak atas Pembangunan) pada tahun 1986 oleh negara Dunia Ketiga. Deklarasi ini menegaskan bahwa manusia adalah subjek utama proses pembangunan dan kebijakan pembangunan sehingga manusia sebagai peserta utama dan penerima manfaat pembangunan. Upaya di tingkat internasional untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia harus disertai dengan upaya untuk membangun tata ekonomi baru internasional. Ditegaskan bahwa ada hubungan erat antara perlucutan senjata dan pembangunan. Kemajuan di bidang perlucutan senjata jauh akan mempromosikan kemajuan di bidang pengembangan.

Sumber daya dirilis melalui langkah-langkah perlucutan senjata harus dialokasikan untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kesejahteraan semua masyarakat, khususnya, orang-orang dari negara-negara berkembang, serta pengakuan hak untuk pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Kesetaraan kesempatan untuk pembangunan adalah hak prerogatif kedua negara dan individu yang membentuk negara.

f. *Cairo Declaration on Human Right in Islam*

Deklarasi Kairo tentang Hak Asasi Manusia dalam Islam merupakan deklarasi dari negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam di Kairo pada tahun 1990 yang memberikan gambaran umum pada Islam tentang hak asasi manusia dan menegaskan Islam syariah sebagai satu-satunya sumber. Deklarasi ini menyatakan tujuannya untuk menjadi pedoman umum bagi negara anggota OKI di bidang hak asasi manusia. Deklarasi ini sebagai respon Islam pada pasca-Perang Dunia II PBB dari tahun 1948.

g. *Bangkok Declaration*

Deklarasi Bangkok diadopsi pada pertemuan negara-negara Asia pada tahun 1993. Dalam konferensi ini, pemerintah negara-negara Asia telah menegaskan kembali komitmennya terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Mereka menyatakan pandangannya saling ketergantungan dan dapat dibagi hak asasi manusia dan menekankan perlunya universalitas, objektivitas, dan nonselektivitas hak asasi manusia.

h. Deklarasi PBB (Deklarasi Wina) Tahun 1993

Deklarasi ini merupakan deklarasi universal yang ditandatangani oleh semua negara anggota PBB di ibu kota Austria, yaitu Wina. Oleh karenanya, dikenal dengan Deklarasi Wina. Hasilnya adalah mendeklarasikan hak asasi generasi ketiga, yaitu hak pembangunan. Deklarasi ini sesungguhnya adalah re-evaluasi tahap dua dari Deklarasi HAM, yaitu bentuk evaluasi serta penyesuaian yang disetujui semua anggota PBB, termasuk Indonesia.

2. Sejarah Penegakkan HAM di Indonesia

Latar belakang perlunya penegakan hak asasi manusia adalah sepanjang sejarah kehidupan manusia ternyata tidak semua orang memiliki penghargaan yang sama terhadap sesamanya. Manusia dengan teganya merusak, mengganggu, mencelakakan, dan membunuh manusia lainnya. Bangsa yang satu dengan semena-mena menguasai dan menjajah bangsa lain. Hak asasi manusia dibutuhkan untuk melindungi harkat dan martabat kemanusiaan yang sebenarnya sama antarumat manusia. Kerusuhan, kekerasan, dan peperangan adalah tanda dari tindakan sewenang-wenang antarsesama manusia dengan saling menghargai harkat dan martabatnya.

a. Pada masa Pra-Kemerdekaan

Meskipun HAM telah dikenal sejak lama, pemikiran modern tentang HAM di Indonesia baru muncul pada abad ke-19. Raden Ajeng Kartini adalah orang Indonesia pertama yang secara jelas mengungkapkan pemikiran mengenai HAM. Pemikiran itu diungkapkan dalam surat-surat yang ditulisnya 40 tahun sebelum Proklamasi Kemerdekaan.

b. Pada Masa Kemerdekaan

1) Pada Masa Orde Lama

Gagasan mengenai perlunya HAM selanjutnya berkembang dalam Sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Mohammad Hatta, Mohammad Hatta, Mohammad Sukiman merupakan tokoh yang gigih membela agar HAM diatur secara luas dalam UUD 1945. Akan tetapi, upaya mereka kurang berhasil. HAM hanya sedikit diatur dalam UUD 1945. Sementara itu, Konstitusi RIS dan UUDS 1950 sesungguhnya mengatur HAM secara menyeluruh. Namun kedua konstitusi itu hanya berlaku sebentar saja.



Sumber : <http://4.bp.blogspot.com/>

Gambar 3.6 Suasana Sidang BPUPKI tahun 1945.

2) Pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, intensitas pelanggaran HAM mencapai puncaknya. Ini terjadi terutama karena HAM dianggap sebagai paham liberal (Barat) yang bertentangan dengan budaya timur dan Pancasila. Karena itu, HAM hanya diakui secara sangat minimal. Pada tahun 1993 dibentuk Komisi Hak Asasi Manusia. Namun, karena kondisi politik, Komisi tersebut tidak bisa berfungsi dengan baik. Berbagai pelanggaran HAM terus terjadi, bahkan disinyalir terjadi pula berbagai pelanggaran HAM berat. Hal itu akhirnya mendorong munculnya gerakan reformasi untuk mengakhiri kekuasaan Orde Baru.

3) Pada Masa Reformasi

Di Indonesia, masalah penegakan hak asasi manusia telah menjadi tekad dan komitmen yang kuat dari segenap komponen bangsa terutama pada era reformasi sekarang ini. Kemajuan itu, misalnya, berupa membaiknya iklim kebebasan dan lahirnya berbagai dokumen HAM yang lebih baik. Beberapa dokumen itu, antara lain: UUD 1945 hasil amandemen, Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Demikian pula muncul lembaga Peradilan HAM.

Pada tahun 2005 pemerintah juga meratifikasi dua instrumen sangat penting dalam penegakan HAM, yaitu: Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) menjadi Undang-Undang No. 11 tahun 2005, dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menjadi Undang-Undang No. 12 tahun 2005.



Upaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM

Pelanggaran hak asasi manusia oleh masyarakat atau warga negara dapat dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang terhadap seseorang, sedangkan pelanggaran dapat dilakukan lembaga publik terhadap aparat negara atau pemerintah. Pelanggaran hak asasi manusia ini menghasilkan kasus-kasus, seperti kekerasan massal, perkelahian antarkelompok masyarakat, aksi penjarahan dan pembakaran, perusakan, teror, ancaman, perilaku anarki, dan konflik antarkelompok bangsa. Pada umumnya pelanggaran hak asasi manusia tidak kalah keras dan kejamnya atau bahkan lebih membahayakan kehidupan berbangsa daripada pelanggaran dari pihak penyelenggara negara. Pelanggaran oleh masyarakat mudah meluas dan meningkat sehingga makin sulit penyelesaiannya.

Salah satu kebijakan dalam bidang hukum adalah meningkatkan pemahaman dan penyadaran, serta meningkatkan perlindungan, penghormatan, dan penegakan hak asasi manusia dalam seluruh aspek kehidupan. Pembentukan lembaga penegakan hak asasi manusia, antara lain, sebagai berikut.

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Posisi Komnas HAM kedudukan dan fungsinya dikuatkan berdasar UU No. 39 Tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia. Komnas HAM dapat membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran (KPP) HAM untuk kasus-kasus tertentu.

Komnas HAM pertama kali dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tanggal 7 Juni 1993. Pembentukan tersebut dilakukan atas rekomendasi Lokakarya I Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan oleh Departemen Luar Negeri RI dengan sponsor Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Keberadaan Komnas HAM semakin diperkuat dengan lahirnya UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam UU tersebut keberadaan Komnas HAM diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 99. Tujuan dari pembentukan Komnas HAM adalah :

- a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan
- b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna mengembangkan pribadi manusia Indonesia seutuhnya, dan memampukannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Guna mewujudkan tujuan tersebut, Komnas HAM melaksanakan empat macam fungsi, yaitu: pengkajian, penelitian, penyuluhan dan mediasi tentang hak asasi manusia. Keempat fungsi tersebut selanjutnya dirinci menjadi 22 tugas dan kewenangan. Tugas dan kewenangan tersebut dapat dibaca lebih lanjut dalam UU No. 39 Tahun 1999 pasal 89.

Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Indonesia. Komnas HAM beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang profesional, berdedikasi, dan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, menghormati hak asasi manusia, dan kewajiban dasar manusia.

2. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM dibentuk berdasar Undang-Undang No. 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM sebagai pengadilan khusus yang berada di bawah lingkungan peradilan umum dan berkedudukan ditingkat kabupaten/kota.

Pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkup Peradilan Umum. Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pengadilan HAM berkedudukan diwilayah Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Pengadilan HAM khusus mengadili pelanggaran HAM berat. Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran HAM berat adalah kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (ps.7).

a. Genosida

Genosida adalah usaha sistematis untuk menghabisi suatu kaum atau suku bangsa oleh suku bangsa lain. Genosida adalah tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang paling mengerikan dan membahayakan bagi kehidupan suatu bangsa.

Misalnya ketika Hitler menjadi penguasa Jerman hendak menghilangkan hak hidup bangsa Yahudi pada Perang Dunia II. Ribuan orang Yahudi mati di kamp-kamp konsentrasi.



Sumber : <http://www.martinfrost.ws>

Gambar 3.7 Pada PD II, Warga Yahudi adalah sasaran program Genocide oleh pihak NAZI Jerman.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu kekelompok lain.

b. kejahatan Kemanusiaan

Kejahatan kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Contoh: Kekejaman Polpot saat memerintah sebagai Presiden Kamboja (1975 - 1979), kekejaman Tentara Serbia Bosnia terhadap penduduk sipil Bosnia di tahun 1990-an dalam perang Balkan. Serangan Kejahatan Kemanusiaan tersebut menimbulkan:

- 1) pembunuhan,
- 2) pemusnahan,
- 3) perbudakan,
- 4) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa,
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik orang lain secara sewenang-wenang sehingga melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional.
- 6) Penyiksaan
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara.
- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional.
- 9) Penghilangan orang secara paksa.
- 10) Kejahatan Apartheid, yaitu sistem politik yang diskriminatif terhadap manusia atas dasar perbedaan ras, agama, dan suku bangsa .

c. Pengadilan Ad Hoc HAM

Pengadilan Ad Hoc HAM. yaitu pengadilan khusus untuk kasus-kasus HAM yang terjadi sebelum diberlakukannya Undang-Undang No. 2A Tahun 2000.

d. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yaitu penjelasan kasus HAM di luar pengadilan HAM.

Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya tindakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara. baik yang disengaja atau tidak disengaja, kelalaian dengan cara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, maupun mencabul hak asasi manusia. Korban pelanggaran itu akan dijamin dalam undang-undang dan mendapat penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pelanggaran terhadap hak asasi manusia dapat dilakukan oleh dua pihak yaitu:

- a. pihak negara dalam hal ini aparat negara atau pemerintah (*state actors*),
- b. pihak masyarakat atau warga negara (*non state actors*).

3. Pendekatan dalam Upaya Penegakan HAM

Upaya penegakan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu: pencegahan dan penindakan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Sedangkan penindakan pada dasarnya adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

a. Penegakan melalui Pencegahan

Penegakan HAM melalui pencegahan antara lain dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Penciptaan perundang-undangan HAM yang semakin lengkap, termasuk di dalamnya ratifikasi berbagai instrument HAM internasional.
- 2) Penciptaan lembaga-lembaga pemantau dan pengawas pelaksanaan HAM. Lembaga ini bisa merupakan lembaga negara yang bersifat independen (misalnya Komnas HAM) maupun lembaga-lembaga yang dibentuk atas inisiatif masyarakat (berbagai organisasi non-pemerintah/LSM yang bergerak dalam bidang pemantauan HAM/*human rights watch*)
- 3) Penciptaan perundang-undangan dan pembentukan lembaga peradilan HAM
- 4) Pelaksanaan pendidikan HAM kepada masyarakat melalui pendidikan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Dalam hal ini, media massa cetak maupun elektronik serta organisasi nonpemerintah/LSM yang bergerak dalam penyadaran masyarakat memiliki peran yang amat besar.

b. Penegakan melalui Penindakan

Adapun penegakan HAM melalui penindakan antara lain dilakukan dalam bentuk upaya-upaya sebagai berikut.

- 1) Pelayanan, konsultasi, pendampingan, dan advokasi bagi masyarakat yang menghadapi kasus HAM. Dalam hal ini, lembaga-lembaga bantuan hukum serta organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang advokasi masyarakat memainkan peran penting.

- 2) Penerimaan pengaduan dari korban pelanggaran HAM. Dalam hal ini Komnas HAM, lembaga-lembaga bantuan hukum, dan LSM HAM memiliki peran penting.
- 3) Investigasi, yaitu pencarian data, informasi, dan fakta yang berkaitan dengan peristiwa dalam masyarakat yang patut diduga merupakan pelanggaran HAM. Investigasi ini merupakan tugas Komnas HAM. Namun, pada umumnya LSM HAM maupun media massa juga melakukannya secara independen.
- 4) Penyelesaian perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Komnas HAM bertugas dan berwenang melakukan proses ini.
- 5) Penyelesaian perkara pelanggaran HAM berat melalui proses peradilan di pengadilan HAM. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida (menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama dengan cara-cara tertentu) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (serangan yang meluas dan sistematis yang ditujukan secara langsung kepada penduduk sipil).
- 6) Penanganan Pelanggaran HAM di Indonesia
Di Indonesia pernah terjadi sebagai Kasus-kasus pelanggaran HAM. Dari beberapa kasus tersebut, ada yang sudah dipersidangkan di pengadilan. Dibawah ini kasus disampaikan beberapa contoh peristiwa/kasus serta upaya-upaya penanganannya.

a) Kasus Tanjung Priok (1984)

Kasus Tanjung Priok terjadi pada tanggal 12 September 1984. Menurut catatan media massa, korban yang jatuh sebanyak 79 orang. Korban tersebut terdiri 54 orang yang mengalami luka-luka, dan 24 orang meninggal. Menurut laporan Komnas HAM, dalam kasus Tanjung Priok telah terjadi pelanggaran HAM berat berupa: pembunuhan secara kilat, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penghilangan orang secara paksa. Proses persidangan sudah dilangsungkan. Namun hingga kini, para pelaku dibebaskan.



Sumber : <http://images.google.co.id/>

Gambar 3.8 Elemen-elemen masyarakat menuntut penuntasan pelanggaran HAM berat yaitu Kasus Tanjung Priok.(1984).

b) Kasus Marsinah (1993)

Marsinah adalah karyawan PT CPS. Ia adalah seorang aktivis buruh. Mayat Marsinah ditemukan tanggal 9 Mei 1993 di Dusun Jegong, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Diduga keras, ia tewas dibunuh akibat keterlibatannya dalam demonstrasi buruh di PT CPS tanggal 3 dan 4 Mei 1993. Tanggal 30 September 1993 dibentuk Tim Terpadu untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah.

Tim tersebut menangkap, memeriksa, dan mengajukan 10 orang yang diduga terlibat dalam pembunuhan Marsinah. Persidangan berlangsung sejak persidangan tingkat pertama, banding, dan kasasi. Dalam persidangan kasasi di Mahkamah Agung, semua terdakwa ternyata dibebaskan dari segala dakwaan, alias bebas murni. Putusan tersebut menimbulkan ketidakpuasan meluas di kalangan masyarakat.



Sumber :

<http://www.antarajatim.com>

Gambar 3.9 Marsinah, aktivis buruh yang akhirnya terbunuh.

c) Kasus Tri Sakti /Semanggi I & Semanggi I & II (1998)

Peristiwa Semanggi adalah peristiwa meninggalnya empat orang mahasiswa yang sedang berunjuk rasa menentang pelaksanaan Sidang Istimewa MPR 1998.

Pada tanggal 18 November 1998 ribuan mahasiswa bersama masyarakat menuju kompleks Gedung MPR/DPR. Petang hari sampai malam suasana makin tegang karena aparat kepolisian dan militer berhadapan dengan mahasiswa. Di kawasan Semanggi terjadilah aksi keributan dan penentangan. Empat orang mahasiswa tertembak dalam keributan tersebut. Peristiwa Semanggi adalah contoh bagaimana negara berhadapan dengan rakyat, terutama saat terjadinya demonstrasi atau unjuk rasa. Hal itu merupakan kesulitan negara saat harus mengendalikan rakyatnya sehingga tidak bertindak anarki. Disisi lain harus pula menghargai dan menegakkan hak asasi manusia.



Sumber : <http://dinatropika.files.wordpress.com/>

Gambar 3.10 Gerakan Reformasi segenap mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat pada tahun 1998 berujung runtuhnya masa Orde Baru, dan mulailah Orde Reformasi.

d) Kasus Kerusuhan Timor-Timor Pasca Jajak Pendapat (Referendum) 1999

Timor Leste akhirnya resmi berpisah dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia setelah hasil jajak pendapat dimenangkan oleh kelompok yang menolak otonomi khusus pada bulan Agustus 1999. Namun, hasil itu menimbulkan reaksi bagi masyarakat yang prointegrasi sehingga terjadi kerusuhan massal dan pembakaran besar-besaran di wilayah tersebut.

Termasuk di dalamnya pembumihangusan kota Dili. Menurut temuan KPP HAM, dalam kasus Timor-Timur telah terjadi pelanggaran HAM berat.

Pelanggaran HAM berat tersebut meliputi: pembunuhan massal dan sistematis, penganiayaan dan penyiksaan, penghilangan paksa, kekerasan berdasarkan gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumihangusan. Sejumlah tersangka kasus Timor-Timur telah diajukan ke Pengadilan HAM. Tetapi, ternyata proses hukum dan hukuman yang dijatuhkan tidak mencerminkan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akibatnya, banyak warga masyarakat merasa tidak puas, termasuk masyarakat internasional.

e) Kasus Pembunuhan Theys Hiyo E Luay (2001)

Theys Hiyo Eluay adalah Ketua Umum Presidium Dewan Papua (PDP). Theys meninggal secara tidak wajar pada tanggal 11 November 2001. Dia meninggal dalam mobil yang ditumpangnya setelah menghadiri peringatan acara Sumpah Pemuda. Sopir mobil itu dikabarkan melarikan diri. Saat itu Theys masih menghadapi proses pengadilan sehubungan dengan tuduhan tindak pidana makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mendirikan negara merdeka Papua. Berita-berita menyebutkan bahwa meninggalnya Theys ada kaitannya dengan kegiatan politik yang dilakukannya.

f) Kasus Pembunuhan Munir

Aktivis HAM dan pendiri KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) dan Imparsial, Munir (39 thn) meninggal di atas pesawat Garuda dengan nomor GA-974 ketika sedang menuju Amsterdam untuk melanjutkan kuliah pasca-sarjana (7 September 2004). Sesuai dengan rasa nasionalnya, pemerintah Belanda melakukan otopsi atas jenazah almarhum. Pihak keluarga almarhum mendapat informasi dari media Belanda bahwa hasil otopsi Munir oleh Institut Forensik Belanda (NFI) membuktikan bahwa beliau meninggal akibat racun arsenik dengan jumlah dosis yang fatal. Sejumlah organisasi HAM Indonesia akan membawa kasus Munir ke Komisi HAM PBB dalam sidangnya yang ke-16 di Jenewa, Swiss 14 Maret-22 April 2005 mengingat Munir sudah menjadi tokoh HAM internasional.

4. Hambatan dan Tantangan Penegakkan HAM di Indonesia

a. Hambatan

Dalam menegakkan pelaksanaan HAM di Tanah Air, banyak sekali berbagai hambatan, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri.

1) *Hambatan dari Luar negeri*

Hambatan yang berasal dari luar negeri antara lain, pengaruh ideologi Liberalisme. Liberalisme berasal dari kata *liberal* yang berarti berpendirian bebas. Liberalisme adalah suatu paham yang melihat manusia sebagai makhluk bebas. Artinya, manusia memiliki kemauan bebas dan merdeka serta harus diberikan kesempatan untuk memajukan diri sendiri dengan merdeka pula.

Kaum liberal berkehendak membatasi hak negara untuk mencampuri urusan ekonomi, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Mereka juga menuntut hak kemerdekaan menulis, menyampaikan pikiran, memeluk agama, dan menentang rasialisme. Mereka menuntut perdagangan bebas, persamaan hak bagi wanita, dan hak asasi manusia lainnya.

Dalam bidang politik, kebebasan individu atau partai sangat ditonjolkan, sehingga dikenal adanya partai oposisi dan mosi tidak percaya kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Apabila hak itu digunakan untuk memenuhi batas minimum pemerintah di parlemen, pemerintah yang berkuasa akan jatuh. Akibat lebih lanjut adalah pemerintah menjadi tidak stabil dan program pembangunan tidak berjalan. Akhirnya upaya untuk meningkatkan kemakmuran rakyat akan terhambat.

Paham Liberalisme dilaksanakan di Eropa Barat, Amerika Serikat dan beberapa negara di Asia. Paham ini menghendaki hal-hal berikut.

- a) Kekuasaan mutlak mayoritas atas minoritas sehingga dapat terjadi diktator mayoritas terhadap minoritas.
- b) Lebih mengutamakan pemungutan suara mayoritas dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, kelompok kecil pendapatnya tidak akan dipertimbangkan dalam pengambilan putusan sehingga bisa menimbulkan rasa frustrasi.

2) Hambatan dari Dalam Negeri

Hambatan dari dalam negeri adalah sebagai berikut.

- a) Keadaan geografis Indonesia yang luas
- b) Wilayah Indonesia yang luas dengan jumlah penduduk yang menyebar di seluruh Nusantara menjadi kendala dalam komunikasi dan sosialisasi produk hukum dan perundang-undangan. Suatu produk hukum tertentu yang berskala nasional memerlukan sosialisasi dalam waktu yang relatif lama. Hal ini sangat diperlukan, sebab penyebaran tingkat kualitas pendidikan dan kemajuan sosial budaya di Indonesia sangat bervariasi. Pengaruhnya adalah masalah di wilayah tertentu di Indonesia dapat menjadi masalah di wilayah yang lain.

Menurut Prof. Baharuddin Lopa, S.H. dalam buku “Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum” (2001), disebutkan bahwa ada 4 (empat) macam pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

- a) Masih kentalnya budaya *ewuh pekewuh*, yang membuka peluang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sehingga penegakannya, (*enforcement*) terganggu.
- b) Adanya kecenderungan pada pihak-pihak tertentu, terutama yang memiliki kewenangan dan kekuasaan, saling tidak mampu mengekang.
- c) *Law enforcement* masih lemah dan seringkali bersifat diskriminatif.
- d) Adanya kebiasaan bahwa pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan, masih sering menyalahgunakannya.

b. Tantangan

Tantangan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah makin banyaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Kasus pelanggaran hak asasi manusia sebagian telah diselesaikan, sedangkan yang lainnya masih dapat diselesaikan. Terlebih di era Reformasi ini kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia banyak sekali kita dengar dan lihat. misalnya melalui pemberitaan di media, baik yang dilakukan oleh pihak penyelenggara negara maupun oleh masyarakat.

Beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia selama kurun waktu periode Reformasi, antara lain penculikan, penganiayaan, dan penghilangan para aktivis, penembakan mati mahasiswa-mahasiswa Universitas Trisakti. Selain itu, kerusuhan 13-15 Mei 1998 pembunuhan ulama-ulama di Jawa Timur dan sejumlah peristiwa kekerasan Timor Leste. Dari beberapa kasus tersebut masih menyisakan perlunya penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di tempat tersebut.

Meskipun banyak kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia bukan berarti masalah penegakan hak asasi manusia dikatakan lemah atau tidak ada penegakan hukum. Terbukti sekarang ini banyak pelaku-pelaku pelanggaran hukum menghadapi tuntutan hukum. Memang tidak mesti bahwa orang yang disangka pelaku pelanggaran hak asasi manusia akan dijatuhi hukuman. Hanya putusan pengadilan yang menyatakan bahwa mereka memang terbukti bersalah dan patut dijatuhi hukuman.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa ada tantangan utama dalam penegakan HAM di Indonesia.

- 1) Budaya kekerasan seringkali masih menjadi pilihan berbagai kelompok masyarakat dalam menyelesaikan persoalan yang ada di antara mereka.
- 2) Di satu sisi, belum ada pemerintahan yang memiliki komitmen, kuat terhadap upaya penegakan HAM dan mampu melaksanakan kebijakan HAM secara efektif, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
- 3) Masih ada pihak-pihak yang berusaha menghidupkan kekerasan dan diskriminasi sistematis terhadap kaum perempuan ataupun kelompok masyarakat yang dianggap minoritas.
- 4) Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada aparat pemerintah dan lembaga-lembaga penegak hukum.
- 5) Terjadinya komersialisasi media massa yang berakibat pada semakin minimnya keterlibatan media massa dalam pemuatan laporan investigatif mengenai HAM dan pembentukan opini untuk mempromosikan HAM.
- 6) Di sisi lain, masih lemahnya kekuatan masyarakat (*civil society*) yang mampu menekan pemerintah secara demokratis, sehingga pemerintah bersedia bersikap lebih peduli dan serius dalam menjalankan agenda penegakan HAM.

- 7) Budaya feodal dan korupsi menyebabkan aparat penegak hukum tidak mampu bersikap tegas dalam menindak berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pejabat atau tokoh masyarakat.
- 8) Ada sebagian warga masyarakat dan aparat pemerintah yang masih berpandangan bahwa HAM merupakan produk budaya Barat yang individualistik karena itu tidak sesuai dengan budaya Indonesia.
- 9) Desentralisasi yang tidak diikuti dengan menguatnya profesionalitas birokrasi dan kontrol masyarakat di daerah potensial memunculkan berbagai pelanggaran HAM pada tingkat lokal.
- 10) Berbagai ketidakadilan pada masa lalu telah menyebabkan luka batin dan dendam antarkelompok masyarakat tanpa terjadi rekonsiliasi sejati.
- 11) Dalam beberapa tahun terakhir perhatian masyarakat dan media massa lebih terarah pada persoalan korupsi, terorisme, dan pemulihan ekonomi daripada penanganan kasus-kasus HAM.

Unjuk Kerja

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 3-4 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Buatlah sebuah drama tema "Kekerasan di dalam masyarakat sebagai bentuk pelanggaran HAM",
3. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai judul drama sesuai dengan yang dipilih masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama,
4. Buatlah sebuah skenario, lalu peragakanlah di depan kelas dihadapan kelompok yang lain. Mintalah Gurumu bertindak sebagai penilai.

D.

Instrumen Hukum dan Peradilan Internasional HAM

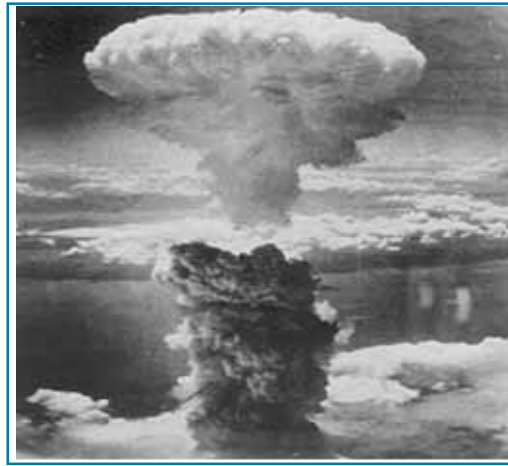
1. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional

Fakta menunjukkan bahwa selama abad ke-20, dengan Perang Dunia I dan II, jutaan orang yang terdiri atas anak-anak, perempuan, dan laki-laki telah menjadi korban kekejaman yang tidak dapat dibayangkan, yang sangat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan. Kekejaman berat yang sangat serius telah menjadi keprihatinan seluruh masyarakat internasional dan telah mengancam perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan dunia.

Anehnya, sampai menjelang akhir abad ke-20, masih saja ada orang yang diduga kuat sebagai pelanggar hak asasi manusia berat, sama sekali masih bebas dan tidak tersentuh pengadilan. Apa sebabnya? Antara lain bahwa sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Kalaupun ada, dulu penjahat perang dalam kasus PD I dan PD II, secara individu, mereka yang diduga kuat dan didukung sejumlah bukti, didakwa melakukan kejahatan kemanusiaan (humanity crimes),

kejahatan perang (war crimes), diadili dalam suatu pengadilan internasional yang dibentuk khusus di negara tertentu yang bersifat sementara (pengadilan ad hoc).

Seperti Mahkamah Nurrenberg dan Tokyo pasca PD II, atau yang dibentuk untuk mengadili penjahat perang di Yugoslavia (1993), di Rwanda (1994), dan sebagainya. Setelah selesainya pelaksanaan pengadilan ad hoc ini terus dibubarkan. Banyak terjadi bahwa pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan yang dinilai oleh masyarakat internasional serius, (seperti Polpot di Kamboja, Idi Amin di Uganda, dan sebagainya), ternyata luput dari pertanggungjawaban individual atas segala kejahatan yang mereka lakukan, baik di depan sidang Pengadilan Nasional maupun di depan Mahkamah Pidana Internasional.



Sumber : <http://www.chemistrydaily.com>

Gambar 3.11 Pemboman kota Hiroshima & Nagasaki (1945), menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Unjuk Kerja

1. Buatlah kelompok kerja yang terdiri dari 4 - 5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan.
2. Lakukan suatu survey (penelitian) dengan mengumpulkan berbagai data atau berita tentang pelanggaran HAM yang sangat luar biasa pada Perang Bosnia (1993) dan Perang Etnis di Rwanda (1994).
3. Buatlah suatu tabel sebagai berikut.

Materi Ulasan	Perang Bosnia (1993)	Perang Rwanda (1994)
a. Sejarah dan alasan Pemicu Konflik b. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelanggaran HAM c. Kejadian/peristiwa pelanggaran HAM d. Upaya penyelesaian konflik e. Upaya penegakan hukum terhadap para tokoh yang dianggap paling bertanggung jawab atas pelanggaran HAM		

4. Tiap kelompok mungkin saja terdiri dari berbagai judul sesuai dengan yang dipilih masing-masing kelompok, namun dari segi tema adalah sama
5. Mengumpulkan dari berbagai sumber yang terpercaya (berita mass media, majalah ataupun dari data/berita internet).
6. Buatlah sebuah ringkasan, lalu presentasikanlah di depan kelas dihadapan kelompok yang lain.
7. Mintalah Gurumu bertindak sebagai moderator.
8. Kumpulkanlah hasil pembahasan kelompok Anda kepada guru untuk dinilai.

2. Instrumen HAM Internasional

Selain berbagai peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas, perlindungan HAM juga dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai instrumen HAM internasional. Sampai sekarang, ada begitu banyak instrumen hukum HAM internasional. Beberapa instrumen hukum HAM internasional itu adalah sebagai berikut.

a. Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan adalah Praktik Umum yang diterima sebagai hukum. Hukum kebiasaan ini menjadi salah satu sumber hukum yang digunakan oleh Mahkamah Internasional dalam menyelesaikan berbagai sengketa internasional. Hukum kebiasaan internasional mengenai HAM meliputi antara lain larangan pembantaian massal, larangan perbudakan dan perdagangan manusia, larangan penyiksaan, larangan diskriminasi, dan larangan terhadap berbagai tindakan pembunuhan dan sewenang-wenang.

b. Piagam PBB

Ketentuan mengenai HAM dalam piagam PBB misalnya terdapat dalam ketentuan-ketentuan berikut:

- 1) Pasal 1, yang menyatakan: "Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional ...dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa maupun agama..."
- 2) Pasal 55, yang menyatakan: "...Perserikatan Bangsa-Bangsa akan menggalakkan (a) standar hidup yang lebih tinggi, pekerjaan penuh, kemajuan ekonomi dan kemajuan serta perkembangan sosial; (b) pemecahan masalah-masalah ekonomi, sosial dan, kesehatan internasional dan masalah-masalah terkait lainnya; budaya internasional dan kerja sama pendidikan; dan (c) penghormatan universal dan pematuhan hak-hak asasi dan kebebasan dasar manusia bagi semua tanpa perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa, dan agama".
- 3) Pasal 56 yang menyatakan: "Semua anggota berjanji kepada diri mereka sendiri untuk melakukan tindakan secara bersama atau sendiri-sendiri dalam bekerja sama dengan organisasi untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam pasal 55".

c. *The International Bill of Human Rights*

The International Bill of Human Rights adalah istilah yang digunakan untuk menunjuk tiga instrumen utama HAM beserta dengan protokol opsinya. Ketiga instrumen utama yang dimaksud tersebut meliputi:

- 1) Pernyataan Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights*---UDHR);
- 2) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights*---ICCPR);
- 3) Kovenan Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*---ICESCR);
- 4) Protokol opsi pertama pada ICCPR. Kini, UDHR merupakan instrumen HAM terpenting. Semua instrumen internasional HAM merujuk pada UDHR. Bahkan, banyak konstitusi di berbagai negara merujuk pada UDHR.

d. Traktat-traktat pada Bidang Khusus HAM

Masyarakat internasional terus memajukan instrumen dalam bidang-bidang khusus yang berkenaan dengan HAM. Ada berbagai traktat khusus. Traktat-traktat tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara yang menjadi pesertanya. Adapun traktat-traktat khusus yang terpenting adalah: Konvensi tentang Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida; Konvensi tentang Status Pengungsi; Protokol mengenai Status Pengungsi; Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Ras; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi mengenai Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya; Konvensi mengenai Perlakuan dan Penghukuman terhadap Manusia atau yang Merendahkan Martabat; Konvensi mengenai Hak-hak Anak; Protokol Opsional pada ICCPR yang bertujuan penghapusan hukuman mati.

Untuk lebih mengefektifkan implementasi berbagai ketentuan mengenai HAM tersebut, maka PBB membentuk organ pelengkap yaitu Komisi Hak Asasi Manusia (*The Commission on Human Rights/CHR*). Komisi ini merupakan badan yang sangat penting dalam kaitannya dengan upaya pemajuan dan penegakan HAM. Badan tersebut melakukan studi, misi pencarian fakta, mempersiapkan berbagai rancangan konvensi dan deklarasi, membahas berbagai pelanggaran HAM dalam sidang-sidang umum atau khusus PBB serta memperbaiki prosedur penanganan HAM. Di samping itu, untuk memantau pelaksanaan traktat-traktat Khusus, telah dibentuk 6 komite untuk mengawasi pelaksanaan traktat-traktat tersebut di masing-masing negara peserta traktat. Keenam komite tersebut adalah:

- 1) *ICCPR Human Rights Committee*, mengawasi pelaksanaan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR);
- 2) *Committee on Economic, Social and Cultural Rights*, mengawasi pelaksanaan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (CESCR);
- 3) *Committee on the Elimination of Racial Discrimination*, mengawasi pelaksanaan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination* (CERD);
- 4) *Committee on the Elimination of Discrimination against Women*, mengawasi pelaksanaan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW);
- 5) *Committee Against Torture*, mengawasi pelaksanaan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (CAT); dan
- 6) *Committee on the Rights of Child*, mengawasi pelaksanaan *Convention on the Rights of the Child* (CRC).

Sejauh ini, Indonesia telah meratifikasi sejumlah instrumen hukum HAM internasional. Melalui ratifikasi tersebut, maka instrumen hukum HAM internasional tersebut menjadi hukum positif (dalam bentuk peraturan perundang-undangan) yang berlaku di Indonesia. Adapun peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi tersebut meliputi, antara lain:

- 1) Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949. Telah diratifikasi dengan UU No. 59 Tahun 1958.
- 2) Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan (*Convention of Political Rights of Women*). Telah diratifikasi dengan UU No. 68 tahun 1958.
- 3) Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah diratifikasi dengan UU No. 7 tahun 1984.
- 4) Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Telah diratifikasi dengan Kepres No. 36 tahun 1990.
- 5) Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Perdagangan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*). Telah ditandatangani pada tanggal 24 September 2001.
- 6) Protokol Tambahan Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata (*Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of the Children in Armed Conflict*). Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
- 7) Konvensi Pelarangan, Pengembangan, Produksi, dan Penyimpanan Senjata Biologis dan Penyimpanannya serta Pemusnahannya (*Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxic Weapons and on Their Destruction*). Telah diratifikasi dengan Kepres No. 58 tahun 1991.
- 8) Konvensi Internasional terhadap Anti-Apartheid dalam Olahraga (*International Convention against Apartheid in Sports*). Telah diratifikasi dengan UU No. 48 tahun 1993.
- 9) Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruet, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*). Telah diratifikasi dengan UU No. 5 tahun 1998.
- 10) Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 87, 1998 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi (*International Lab our Organization Convention No. 87,1998 Concerning Freedom Association and Protection on the Rights to Organise*). Telah diratifikasi dengan UU No. 83 tahun 1998.
- 11) Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of Racial Discrimination*). Telah diratifikasi dengan UU No. 29 Tahun 1999.

- 12) Protokol Tambahan Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of Discrimination against Women*). Telah ditandatangani pada Maret 2000.
- 13) Konvensi Internasional untuk Penghentian Pembiayaan Terorisme (*International Convention for the Suppression of the Financing Terrorism*). Telah ditandatangani pada 24 September 2001.
- 14) Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*The International Covenant on Economics, Social and Cultural Rights/ICESCR*). Telah Diratifikasi menjadi UU No. 11 Tahun 2005.
- 15) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*The International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR*). Telah diratifikasi menjadi UU No. 12 Tahun 2005.

Demikianlah, berbagai peraturan perundang-undangan hasil ratifikasi tersebut melengkapi peraturan perundang-undangan mengenai HAM produk bangsa Indonesia sendiri. Kesemuanya itu menjadi rujukan upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia. Lebih dari itu, ratifikasi tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berusaha melakukan penegakan HAM sesuai dengan standar internasional. Kenyataan tersebut tentu patut kita syukuri, dengan cara lebih sering dalam melakukan penegakan HAM.

3. Peradilan Terhadap Pelanggar HAM Internasional

Selama ini tampak adanya pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara. Kebetulan penguasa di negara tersebut tidak mempedulikan. Untuk menciptakan keadilan maupun melindungi hak asasi manusia, maka seakan-akan tidak ada upaya hukum yang efektif dilakukan agar segera pelanggaran atau kejahatan kemanusiaan.

Dengan adanya pelanggaran hak asasi manusia maka dapat dibentuk pengadilan internasional untuk menangani kasus tersebut. Pengadilan internasional atas kasus pelanggaran berat hak asasi manusia akan dibentuk di suatu negara, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut.

- a. Berlangsung konflik yang terus-menerus.
- b. Mengancam perdamaian internasional ataupun regional,
- c. Pemerintah negara yang bersangkutan tidak berdaya dan tidak sanggup menciptakan pengadilan yang objektif.

Pembentukan pengadilan internasional harus mendapat persetujuan Dewan Keamanan PBB. Lembaga yang berada dalam struktur organisasi PBB yang menangani persoalan sengketa dan tindakan kejahatan internasional adalah sebagai berikut.

a. Mahkamah Internasional (MI)

Mahkamah Internasional (MI) yang berkedudukan di Den Haag. MI merupakan organisasi langsung dari PBB. MI berwenang memutus perkara hukum yang dipersengketakan antar negara dan memberi pertimbangan hukum atas berbagai kasus yang dilimpahkan kepadanya.

b. Mahkamah Militer Internasional

Mahkamah Militer Internasional yang terbentuk pada tahun 1945 bertugas mengadili para pelaku kejahatan perang, misalnya kasus kejahatan Perang Dunia II.

c. Mahkamah Pidana Internasional

Mahkamah tersebut disahkan dengan Diplomatik PBB di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 dan disetujui oleh 120 negara (ada 7 negara menentang pembentukan tersebut dan 21 abstain. Negara yang menentang antara lain Amerika Serikat, Cina, dan Irak). Mahkamah Internasional bersifat permanen guna mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan perang (*crime of war*), dan kejahatan genosida (*crime of genocide*). Mahkamah ini berkedudukan di Hague.

Mahkamah Internasional hanya mengadili perbuatan yang terjadi sesudah diberlakukannya Statuta Roma. Meskipun memiliki hubungan formal, Mahkamah ini tidak menjadi bagian dari organisasi PBB. Sebab, pembentukannya didasarkan pada perjanjian multilateral, bukan oleh PBB. Namun demikian, Dewan Keamanan PBB mempunyai peranan penting dalam Mahkamah tersebut. Dewan Keamanan bisa memprakarsai suatu penyelidikan terhadap sebuah kejahatan yang menjadi kewenangan Mahkamah tersebut.

Mahkamah Internasional terdiri atas 18 hakim yang bertugas selama 9 tahun. Hakim-hakim tersebut tidak boleh dipilih kembali. Pengangkatan para hakim dipilih oleh minimal 2/3 anggota yang telah meratifikasi Statuta Roma.

Prinsip yang mendasari bekerjanya Mahkamah Internasional adalah Mahkamah Internasional merupakan pelengkap bagi yurisdiksi pidana nasional (bukan pengganti). Itu berarti, Mahkamah mendahulukan sistem peradilan nasional. Apabila sistem peradilan nasional tidak mampu atau tidak bersedia melakukan proses hukum terhadap suatu kejahatan, barulah berlaku yurisdiksi Mahkamah Internasional. Intinya, Mahkamah Internasional ada untuk mendorong terselenggaranya sistem peradilan nasional yang independen dan efektif. Sehingga, hukum nasional suatu negara tidak bisa berjalan ala kadarnya demi melindungi pelaku tindak kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan perang (*crime of war*) dan kejahatan genocida (*crime of genocide*).

d. Pengadilan Internasional Khusus

Pengadilan internasional khusus yang dibentuk PBB untuk menangani tindakan pelanggaran berat hak asasi manusia, antara lain sebagai berikut.

- 1) International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) dibentuk pada tahun 1993. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang etnik di negara bekas Yugoslavia.

Contoh mengenai pelaksanaan peradilan di Mahkamah Internasional adalah pengadilan terhadap Slobodan Milosevic dan Ratko Mladic.

Keduanya adalah pemimpin Serbia yang dianggap paling bertanggung jawab dalam pembersihan etnik (*ethnic cleansing*) terhadap orang-orang Kroasia dan Bosnia-Herzegovina yang hendak memisahkan diri dari Yugoslavia. Peradilan tersebut dilaksanakan berdasarkan resolusi 808 Dewan Keamanan PBB Februari 1993 yang menetapkan pembentukan pengadilan internasional untuk mengadili para penjahat perang dan pelanggaran hak asasi manusia di bekas negara Yugoslavia.



Sumber : <http://news.bbc.co.uk/>

Gambar 3.12 Pengadilan ICYT terhadap Slobodan Milosevic (mantan Presiden Serbia) di Mahkamah Internasional terkait dukungannya terhadap pembersihan muslim Bosnia oleh etnis Serbia-Bosnia selama perang saudara Balkan (1993).

- 2) International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan tahun 1994. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat peperangan antar suku Hutu dan suku Tutsi di Rwanda, Afrika.



Sumber : <http://www.pulitzer.org>

Gambar 3.13 Pembentukan laskar-laskar rakyat dalam perang etnis di Rwanda

4. Dampak Atas Sanksi Pelanggaran HAM

Apabila suatu negara, misalnya Indonesia, telah dinyatakan sebagai negara yang termasuk tinggi dalam tingkat pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini akan mengakibatkan kesan buruk dan mencoreng citra baik Indonesia di dunia internasional. Dalam jangka pendek dan jangka panjang, Indonesia akan dikucilkan dari kerja sama internasional. Hal ini dapat mengakibatkan masalah yang beruntun dan saling mempengaruhi secara kompleks, di antaranya adalah sebagai berikut

a. Memperbesar Pengangguran

Angka pengangguran akan semakin besar apabila suatu negara mulai ditinggalkan oleh penanam modal asing yang banyak memiliki perusahaan di negeri kita. Dengan ditutupnya perusahaan sebagai tempat bekerja tenaga kerja Indonesia berarti menghilangkan pekerjaan dan menambah jumlah angka pengangguran di Indonesia.

b. Memperlemah Daya Beli Masyarakat

Akibat dari pengangguran adalah masyarakat tidak mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup atau daya belinya semakin rendah, bahkan terjadi krisis ekonomi. Jika hal ini terjadi dalam waktu yang lama dan meluas di seluruh wilayah negara maka akan menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

c. Memperbesar Jumlah Anggota Masyarakat Miskin

Pengangguran yang semakin meluas dan membengkak mengakibatkan jumlah masyarakat miskin semakin besar. Apabila pemerintah/bersama rakyat tidak bekerja sama mengatasinya, kondisi ekonomi akan merosot lebih parah.

d. Memperkecil Income/Pendapatan Nasional

Salah satu ukuran kemajuan suatu negara adalah tingkat pendapatan per kapita. Apabila tingkat pendapatan per kapitanya rendah, berarti satu indikasi bahwa penduduk di negara itu dalam kondisi perekonomian yang kurang atau tidak mengalami kemakmuran. Meskipun hal ini sangat tergantung dengan masalah pemerataan ekonomi di negara tersebut.

Ada negara yang pendapatan ekonominya relatif rendah namun cukup baik pemerataannya, seluruh rakyat tetap dapat bertahan dalam kondisi ekonomi yang cukup. Lain halnya dengan pendapatan suatu negara yang termasuk tinggi, namun dalam pendistribusian kemakmurannya tidak merata, maka akan terdapat sebagian anggota masyarakat yang menderita kemiskinan dan sebagian lainnya merasakan kemakmuran yang berlebih. Apalagi terhadap negara yang pendapatan per kapitanya rendah masih ditambah dengan distribusi yang tidak merata, tentu akan terasa lebih parah kemiskinannya.

e. Merosotnya Tingkat Kehidupan Masyarakat

Kesulitan ekonomi sebagai akibat besarnya angka pengangguran dapat menimbulkan kemerosotan mutu kehidupan masyarakat. Dampak yang luas akan terasa di berbagai bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, keamanan, dan sebagainya.

f. Kesulitan Memperoleh Bantuan dan Mitra Kerja Negara Asing

Citra dan kondisi yang buruk suatu negara dapat menimbulkan kesulitan yang semakin besar. Tidak semua negara mampu memulihkan krisis ekonomi pada saat sekarang dalam waktu yang singkat. Biasanya krisis yang semula berasal dari satu bidang ekonomi akan merembet atau berkembang ke bidang yang lain. Negara atau pihak lain biasanya akan sedikit yang berminat untuk menjadi mitra kerja sama. Kalaupun ada yang bersedia, biasanya berasal dari negara atau pihak yang sudah kuat, dan itu pun dengan berbagai ikatan persyaratan yang tidak selalu menguntungkan. Jadilah suatu negara menjadi jajahan bentuk baru dari negara kuat dan kaya.

Demikianlah uraian mengenai akibat tidak ditegakkan upaya perlindungan hak asasi manusia. Anda selaku bangsa Indonesia yang mencintai keadilan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia senantiasa menginginkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera.

Kondisi itu hanya akan terwujud dalam negara yang memiliki stabilitas nasional yang mantap, penegakan hukum, serta perlindungan hak asasi manusia secara nyata dalam semua tingkatan masyarakat. Partisipasi seluruh warga negara sangat penting artinya dalam menegakkan supremasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia.



KATA SANG TOKOH

Prinsip merupakan hukum alam yang tidak dapat dilanggar. Kita tidak mungkin melanggar hukum tersebut, kita hanya dapat menghancurkan diri kita karena melanggar hukum-hukum itu.

Cecil de Mille

Sumber: www.asbare2.com

E.

Peran Serta dalam Penegakan HAM

1. Peran Serta Masyarakat

Pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum dan penegakan hak asasi manusia belum cukup efektif untuk ditaatinya. Masyarakat masih memerlukan pelaksanaan dalam kenyataan, apakah benar-benar sesuai dengan perasaan keadilan dan hati nurani masyarakat atau tidak. Jika pelaksanaan suatu aturan hukum belum atau tidak sesuai dengan perasaan hukum yang dimilikinya, maka mereka belum tentu mendukungnya.

Oleh karena itu, dalam sebuah negara dan masyarakat yang demokratis sekaligus menghargai nilai-nilai kemanusiaan, sesuatu kebijakan pemerintah tidak selalu cepat implementasinya. Perlu perencanaan dan pengkajian apakah melanggar hak asasi manusia atau tidak. Sebab, umumnya sesuatu langkah kebijakan akan menimbulkan sejumlah kerugian bagi pihak-pihak tertentu.

Bagaimana kerugian itu dapat diminimalisir sementara manfaat dan keuntungan bisa diraih secara lebih maksimal bagi banyak orang.

Ini merupakan salah satu tanda kemajuan peradaban dalam masyarakat tersebut, sebab di antara tanda masyarakat beradab adalah menghargai hak asasi manusia. Ingat, main hakim sendiri merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut hukum di samping besar kemungkinan melanggar hak asasi manusia. Apalagi biasanya pelaku main hakim sendiri didorong oleh rasa emosionalitas yang tinggi dan dapat melakukan kekeliruan serta merugikan korban.

Pemberitaan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga tidak lepas dari peran media massa dalam meliput berbagai peristiwa yang menyangkut masalah hak asasi manusia.

2. Peran Serta Organisasi

Di Indonesia ada berbagai organisasi sukarela yang bergerak dalam penegakan HAM, antara lain KontraS, Imparsial, YLBHI, PBHI, ELSAM.

Peran serta organisasi adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara aktif dalam organisasi-organisasi sukarela (*voluntary organization*) yang bergerak dalam upaya penegakan HAM. Organisasi tersebut umumnya disebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan organisasi semacam itu amat penting. Hal itu setidaknya karena upaya-upaya individual saja tidak mencukupi, diperlukan upaya-upaya bersama warga masyarakat.

- a. Program kampanye. Program ini disusun untuk membentuk dan membantu perkembangan opini publik melalui seminar, konferensi, debat publik, lobi, dan program media massa.
- b. Program pengembangan informasi dan dokumentasi. Program ini dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan dan memproses informasi yang terkait dengan pelanggaran HAM, dan menyebarluaskan informasi tersebut melalui jejaring kerja dan masyarakat luas termasuk melalui publikasi ELSAM.
- c. Program pelayanan hukum. Program ini dirancang untuk memberikan pelayanan hukum kepada korban pelanggaran HAM, terutama kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- d. Program pelayanan hukum. Program ini merancang pendidikan dan pelatihan HAM di daerah dan jejaring kerja yang menjadi prioritas ELSAM. Selain itu, pelatihan HAM juga diberikan untuk mahasiswa, praktisi hukum, dan aktivis pembela HAM.
- e. Program penanganan segera dan investigasi pelanggaran HAM.

Selain Komnas HAM dan ELSAM, masih banyak lembaga lain yang bergerak dalam upaya perlindungan HAM di Indonesia. Ada yang bergerak di tingkat lokal, nasional, ataupun internasional. Lembaga-lembaga semacam itu amat penting karena merupakan motor penggerak penegakan HAM di Indonesia.

3. Peran Serta Tokoh Masyarakat

Tokoh atau pemimpin dalam masyarakat akan menjadi simbol kebaikan masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, semakin berkualitas kepemimpinannya. Seterusnya, semakin berkualitas kepemimpinan seorang tokoh atau pemimpin akan semakin dipercaya dan ditaati oleh warganya. Apalagi dalam tatanan masyarakat yang masih berkultur kepemimpinan paternalistik di mana figur dan perilaku pemimpin dan tokoh masyarakat masih menjadi acuan masyarakatnya. Masyarakat menjadikan ia sebagai sosok penting dalam meningkatkan kesadaran hukum dan penghargaan serta perlindungan hak asasi manusia di masyarakatnya.

Demikianlah pentingnya kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia di masyarakat. Masyarakat yang baik akan melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta menegakkan hak asasi manusia karena kesadarannya dan bukan keterpaksaan.

4. Peran Serta Individual

Peran serta individual yang dimaksud di sini adalah kesediaan untuk melibatkan diri secara sukarela dalam proses penegakan HAM. Peran serta individual ini amat diperlukan. Sebab, penegakan HAM tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Masyarakat harus ikut serta menegakkan HAM. Bahkan bisa dikatakan, maju-mundurnya penegakan HAM sangat bergantung pada tingkat peran serta masyarakat. Semakin masyarakat aktif berpartisipasi dalam penegakan HAM, kondisi HAM semakin baik. Sebaliknya, semakin pasif kondisi HAM semakin memburuk.

Pemberitaan mengenai hak asasi manusia di Indonesia juga tidak lepas dari peran media massa dalam meliput berbagai peristiwa yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Karena itu, setiap warga negara yang baik akan berupaya berpartisipasi dalam penegakan HAM. Partisipasi tersebut bisa dilakukan dalam berbagai bentuk pilihan tindakan, antara lain:

- a. Berperilaku sesuai nilai-nilai HAM di mana pun berada, yaitu menghargai dan solider kepada sesama.
- b. Berusaha memahami berbagai instrumen HAM, dan pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat berusaha membagikan hasil pemahaman tersebut kepada teman, sahabat, atau warga masyarakat di sekitar lingkungan kita.
- c. Mengamati dan mendiskusikan berbagai perkembangan kebijakan HAM dan peristiwa pelanggaran HAM, terutama yang terjadi di lingkungan sekitar kita.
- d. Melibatkan diri dalam kelompok minat yang bertujuan untuk melakukan studi, penyadaran, kampanye, konsultasi, dan advokasi HAM.
- e. Turut-serta membangun opini publik melalui media massa mengenai wacana dan kasus HAM (misalnya menulis surat pembaca, menulis opini, membuat berita, mengikuti pooling, membuat spanduk, membuat stiker, dan sebagainya).

- f. Bersedia menyatakan solidaritas dalam bentuk tindakan nyata untuk membantu korban pelanggaran HAM, terutama yang berada di lingkungan sekitar kita.

Persoalannya adalah bagaimana menggugah kesadaran masyarakat untuk menghargai hak asasi manusia di masyarakatnya sendiri. Apabila kesadaran hukum dan penghargaan hak asasi manusia semakin tinggi maka masyarakat semakin maju dan berkualitas.



Rangkuman

1. Hak ialah kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak itu bisa dimiliki seseorang karena berbagai sebab.
2. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No.39 1999).
3. Ciri khusus hak asasi manusia adalah sebagai berikut.
 - a. Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
 - b. Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya.
 - c. Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan;
 - d. Tak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.
4. ICCPR dan ICESCR bersama dengan Pernyataan Sedunia tentang Hak Asasi Manusia (*The Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) merupakan instrumen utama HAM internasional. Ketiga instrumen tersebut secara bersama-sama disebut International Bill of Human Rights.
5. Magna Charta adalah piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Isinya adalah raja memberi jaminan beberapa hak kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan.
6. Pengakuan bahwa hak asasi manusia adalah universal dan harus diperjuangkan bersama yang dicanangkan dalam *Declaration Universal of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi) oleh PBB pada tanggal 10 Desember tahun 1948.

7. Pengakuan dan penghormatan HAM didalam Konstitusi Republik Indonesia sebetulnya sudah ada di dalam Pembukaan ataupun Batang Tubuh UUD 1945.
8. Posisi Komnas HAM kedudukan dan fungsinya dikuatkan berdasar UU No. 39 Tahun 1999 sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dan berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
9. Upaya penegakan HAM umumnya dilakukan dengan dua pendekatan sekaligus, yaitu: pencegahan dan penindakan. Pencegahan adalah upaya untuk menciptakan kondisi yang semakin kondusif bagi penghormatan HAM. Upaya ini dilakukan melalui berbagai cara persuasif. Sedangkan penindakan pada dasarnya adalah upaya untuk menangani kasus pelanggaran HAM berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
10. Mahkamah Internasional (MI) berkedudukan di Den Haag. MI merupakan organisasi langsung dari PBB. MI berwenang memutus perkara hukum yang dipersengketakan antarnegara dan memberi pertimbangan hukum atas berbagai kasus yang dilimpahkan kepadanya.
11. Mahkamah Militer Internasional yang terbentuk pada tahun 1945 bertugas mengadili para pelaku kejahatan perang, misalnya kasus kejahatan Perang Dunia II.
12. Mahkamah Internasional bersifat permanen guna mengadili pelaku kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*), kejahatan agresi (*crime of aggression*), kejahatan perang (*crime of war*), dan kejahatan genosida (*crime of genocide*). Mahkamah ini berkedudukan di Hague.
13. International Criminal Tribunal for Yugoslavia (ICTY) dibentuk pada tahun 1993. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat perang etnik di negara bekas Yugoslavia.
14. International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR) dibentuk oleh Dewan Keamanan tahun 1994. Pengadilan ini dibentuk untuk mengadili kasus pelanggaran HAM akibat peperangan antar suku Hutu dan suku Tutsi di Rwanda, Afrika.

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai sifat yang universal, tetapi di dalam pelaksanaannya pada tiap negara adalah berbeda-beda. Pelaksanaan HAM di Indonesia berpijak dari
 - a. empat kebebasan dari Franklin D. Roosevelt
 - b. hak asasi pribadi dan ekonomi
 - c. hak asasi dan sosial kebudayaan
 - d. pernyataan sedunia tentang hak-hak manusia,
 - e. keseimbangan antara hak dan kewajiban
2. Pada peristiwa Timor Timur, Indonesia telah menunjukkan kesungguhan dalam mengadili orang yang diduga melakukan kejahatan berat dengan cara
 - a. menahan dan memeriksa secara intensif para tersangka dalam kasus Timor Timur
 - b. mengumumkan bahwa semua yang terlibat akan dikenai hukuman berat
 - c. menyelenggarakan proses pemeriksaan dan pengadilan secara benar dan transparan
 - d. melibatkan para pakar dan ahli hukum internasional yang telah berpengalaman
 - e. meminta ganti rugi kepada pemerintah Timor Timur
3. Proses penegakan HAM pada setiap negara dipengaruhi oleh
 - a. komitmen negara pada piagam PBB
 - b. usia kemerdekaan/berdirinya negara
 - c. corak pandangan hidup masyarakat
 - d. besar kecilnya paksaan negara lain
 - e. kemajuan sosial ekonomi masyarakat
4. Penerapan paham liberalisme dalam bidang ekonomi berakibat
 - a. yang kaya menjadi miskin, yang miskin semakin miskin
 - b. terhapusnya jurang pemisah antara kaya dan miskin
 - c. baik yang kaya maupun miskin tetap hidup sejahtera
 - d. yang miskin menjadi kaya, yang kaya semakin kaya
 - e. yang kaya makin kaya, yang miskin tetap miskin

5. Secara universal, pada diri manusia memiliki hasrat untuk
 - a. menuntut penghargaan dari orang lain
 - b. menghambat kesuksesan orang lain
 - c. menghargai orang yang menghormatinya
 - d. menghargai hak asasi manusia
 - e. menghindari pelaksanaan kewajiban
6. Selaku anggota PBB, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk
 - a. membantu negara-negara bekas terjajah
 - b. memperlakukan negara-negara bekas penjajah
 - c. mengakui seluruh konsep hak asasi manusia negara Amerika
 - d. mengakui dan menghormati Piagam Hak Asasi Manusia sedunia
 - e. membantu secara militer untuk mempertahankan negara yang diserang agresor
7. Masyarakat yang baik, melaksanakan kewajiban hukum dan menghargai serta menegakkan hak asasi manusia karena
 - a. menyadari bahwa konsekuensi pelanggaran hukum cukup berat
 - b. memiliki pengetahuan hukum yang memadai
 - c. mempunyai keinginan untuk dihargai dan dipuji
 - d. memiliki kesadaran dan bukan karena keterpaksaan
 - e. merasa takut kalau mendapatkan sanksi yang berat
8. Salah satu kerugian apabila suatu negara kehilangan kepercayaan luar negeri adalah
 - a. tidak dianggap layak sebagai negara yang berdaulat
 - b. keengganan calon investor asing menanamkan modalnya
 - c. dipanggilnya para korps diplomatik asing pulang ke negaranya
 - d. ketaatan rakyat kepada pemerintah berkurang
 - e. akan dianggap sebagai negara sarang teroris
9. Jaminan hak asasi manusia tentang pendidikan di Indonesia tertuang dalam UUD 1945
 - a. Pasal 32 UUD 1945
 - b. Pasal 33 UUD 1945
 - c. Pasal 34 UUD 1945
 - d. Pasal 30 UUD 1945
 - e. Pasal 31 UUD 1945

10. Tantangan bagi penegakan hak asasi manusia adalah adanya pelanggaran hak asasi manusia yang dapat dilakukan oleh
 - a. negara
 - b. masyarakat, individu, dan negara
 - c. individu dan negara
 - d. individu
 - e. warga masyarakat
11. Yang dimaksud dengan instrumen HAM adalah
 - a. lembaga peradilan HAM
 - b. ketentuan konstitusi tentang HAM
 - c. aparat penegak HAM
 - d. perangkat hukum HAM
 - e. hakim HAM
12. Dalam suatu peradilan nasional, Mahkamah Internasional berkedudukan sebagai lembaga yang
 - a. melengkapi
 - b. mengawasi
 - c. menindaklanjuti
 - d. membawahi
 - e. mengatasi
13. Jaminan hak asasi manusia di Indonesia tertuang dalam UUD 1945....
 - a. Pasal 28A dan I UUD 1945
 - b. Pasal 28 A - 28 J UUD 1945
 - c. Pasal 28 UUD 1945
 - d. Pasal 28 dan 28A UUD 1945
 - e. Pasal 28 A UUD 1945
14. Penyelidikan atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh
 - a. Petugas Palang Merah Internasional
 - b. Komisi yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat
 - c. Hakim Agung di Mahkamah Agung
 - d. Pejabat dari Polisi Internasional (Interpol)
 - e. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

15. UUD 1945 menyebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib serta dalam usaha pembelaan negara. Hal ini terdapat dalam Pasal
- 28 ayat (2)
 - 27 ayat (2)
 - 27 ayat (3)
 - 30 ayat (1)
 - 30 ayat (2)
16. Di antara faktor penghambat upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah
- banyaknya warga masyarakat berpikiran maju
 - masih berlakunya sistem hukum kaum penjajah
 - kurangnya perangkat penegakan hukum pemerintah
 - kesadaran hukum sebagian masyarakat rendah
 - pengetahuan hukum masyarakat yang rendah
17. Indonesia berpartisipasi aktif dalam upaya penegakan hak asasi manusia dengan cara
- berencana untuk meratifikasi berbagai konvensi internasional
 - membentuk pengadilan HAM berdasarkan undang-undang
 - menggabungkan diri dalam pakta pertahanan bersama
 - memperhatikan berbagai pelanggaran hak asasi manusia
 - mengakui keberadaan dan hak hidup negara lain
18. Hak asasi manusia wajib dijunjung tinggi oleh semua orang sehingga penggunaannya
- harus hati-hati agar tidak merugikan diri sendiri
 - perlu dijamin oleh aturan negara
 - dapat bebas sesuai dengan kebutuhan
 - tidak bebas sebab harus dikaitkan dengan ajaran agama
 - bebas dari pengawasan pemerintah
19. Peristiwa kejahatan berat yang berskala internasional penanganannya menjadi tanggung jawab
- Pemerintah negara pihak yang menjadi korban
 - Mahkamah Agung Internasional
 - Pemerintah negara-negara di dunia dan Dewan Keamanan PBB
 - Pemerintah negara tempat peristiwa
 - Dewan Keamanan PBB saja

20. Contoh sikap menghormati pelaksanaan hak asasi manusia yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila antara lain....
- a. cinta Tanah Air dan bangsa
 - b. saling mencintai sesama
 - c. kerja keras dan terpaksa
 - d. menikmati hasil karya orang lain
 - e. melakukan musyawarah untuk mufakat

B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat

1. Hak Asasi Manusia tidak dapat dilaksanakan secara mutlak. Mengapa demikian? Jelaskan jawaban Anda!
2. Mengapa ideologi Komunisme dan Liberalisme merupakan hambatan dalam pelaksanaan HAM di Indonesia? Jelaskan dan berikanlah contoh!
3. Apa perlunya partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat dalam upaya penegakan HAM di suatu negara?
4. Apakah konsekuensi terhadap Indonesia atas keputusan konferensi dunia mengenai HAM (1993) tentang perlunya masyarakat di seluruh dunia melaksanakan HAM secara global?
5. Salah satu hambatan pelaksanaan HAM di dalam negeri adalah masih berlakunya hukum kolonial hingga kini di Indonesia. Sebutkan 2 contoh untuk memperkuat alasan Anda!

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 1

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Suatu perjanjian antar individu untuk mendirikan suatu negara, dalam pandangan suatu negara, dalam pandangan John Loclee, disebut dengan istilah
 - a. pactum objectionis
 - b. particular will
 - c. general will
 - d. pactum subjectionis
 - e. particular interest
2. Jika teori Ketuhanan dijelaskan maka, salah satu akibat yang akan terjadi adalah
 - a. negara yang terbentuk akan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa
 - b. terciptanya suatu pemerintah yang demokratis
 - c. memunculkan suatu kekuasaan absolute
 - d. terciptanya suatu pemerintahan yang bersih
 - e. mampu menciptakan masyarakat sama rata sama rasa
3. Ernest Renan berpendapat bahwa, suatu bangsa dapat terjadi oleh karena adanya
 - a. persatuan nasib
 - b. komunitas politik
 - c. kepentingan bersama
 - d. persamaan agama
 - e. kehendak untuk bersatu
4. Norma disebut juga
 - a. ketentuan
 - b. kaidah
 - c. kelakuan
 - d. ketrampilan
 - e. ketertiban
5. Suatu sumber hukum yang asalnya dari suatu keyakinan/kesadaran individu dan pendapat umum, adalah
 - a. traktat
 - b. kebiasaan
 - c. material
 - d. formal
 - e. konvensi
6. Suatu contoh perilaku yang menunjukkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan negara, adalah
 - a. pedagang kaki lima berjualan disembarang tempat
 - b. tukang becak menggunakan helm saat mengendarai becaknya
 - c. murid SMA mengendarai kendaraan bermotor tanpa dilengkapi SIM
 - d. berhenti saat lampu traffic light menyala merah
 - e. melakukan tawar menawar dengan petugas kepolisian saat ditilang

7. Hukum yang berlaku bagi suatu negara tertentu, tempat atau negara tertentu dan untuk bangsa atau masyarakat tertentu disebut dengan hukum
 - a. privat
 - b. publik
 - c. pisitif
 - d. formal
 - e. material
8. Perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan seorang oknum penegak hukum dapat dinilai
 - a. menciptakan ketakutan warga
 - b. dianggap sesuatu yang umum (wajar)
 - c. menciptakan suatu citra buruk penegakan hukum
 - d. menimbulkan suatu kecemburuan sosial
 - e. menciptakan suatu citra organisasi penegak hukum
9. Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 144 berisi
 - a. pelaksanaan embargo ekonomi atas pemerintahan presiden Saddam Husein di Irak
 - b. pelanggaran gencatan senjata oleh Israel
 - c. pelanggaran wilayah Senegal oleh Amerika Serikat
 - d. hubungan Kuba dan Amerika Serikat
 - e. mengutuk sistem apartheid dan pembunuhan di Afrika Selatan
10. Untuk kasus pelanggaran HAM berat di Negara Rwanda maka dibentuklah Mahkamah Pengadilan Internasional HAM, yaitu
 - a. ICTI
 - b. ICTY
 - c. ICTR
 - d. ICTF
 - e. ICTT
11. Orang yang melakukan tindakan penipuan ataupun kecurangan dalam urusan perjanjian jual-beli barang, maka digolongkan pelanggaran terhadap
 - a. Hukum Pdana
 - b. Hukum Perdata
 - c. Hukum Acara Pidana
 - d. Hukum Administrasi Negara
 - e. Hukuim Dagang
12. Jika dalam suatu negara, warga negaranya selalu menjadi warga negara yang sadar hokum, maka akan tercipta
 - a. kemauan hidup individu
 - b. kekuatan hukum
 - c. kepastian hukum
 - d. kesadaran akan hidup bersama
 - e. kejujuran dan kebenaran akan tegaknya hukum

13. Seorang ahli tata negara yang mengemukakan bahwa sistem adalah sekelompok bagian yang bekerja sama untuk melakukan suatu maksud adalah
 - a. Drs. Musanef
 - b. Prof. Sumantri
 - c. Prof. Wahyuditah
 - d. Soerjono Sukanto
 - e. W. J. S. Poerwadarminta
14. Usaha mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi adalah merupakan hak bagi
 - a. para pihak supaya hak asasinya dapat terlindungi
 - b. jaksa supaya tuntutan hukumannya sesuai yang diajukan
 - c. terdakwa supaya dapat terlepas dari segala sanksi hukum
 - d. pihak-pihak yang belum puas atas putusan hakim
 - e. hakim supaya isi putusannya lebih melindungi hak asasi
15. Tindak kejahatan yang tergolong pelanggaran HAM berat adalah
 - a. pembunuhan karakter seseorang
 - b. pencemaran nama baik seseorang
 - c. kejahatan genodine
 - d. kejahatan mengedarkan narkoba
 - e. pemalsuan dokumen Negara
16. Kasus pelanggaran HAM berat di Timor Leste dilakukan oleh
 - a. International Tribunal for Timor Leste
 - b. Komisi Rekonsiliasi Indonesia - Timor Leste
 - c. Komnas HAM
 - d. Mahkamah Internasional
 - e. Pengadilan Ad Hoc HAM
17. Sanksi Internasional pada suatu negara yang nyata-nyata melanggar HAM yang masih menjadi kontroversi adalah
 - a. dilakukannya pengurangan tingkat kerja sama bilateral
 - b. pelaksanaan operasi militer atas nama PBB
 - c. pemutusan hubungan diplomatic
 - d. pencatutan hak sebagai anggota PBB
 - e. pemberlakuan Embargo Ekonomi
18. Negara yang menganut paham liberalisme, tujuan negara yang dipentingkan adalah mewujudkan ...
 - a. kemakmuran rakyat
 - b. pemerataan
 - c. kejayaan negara
 - d. keadilan
 - e. kebebasan dan kemerdekaan tiap-tiap individu

19. Salah satu sifat norma hukum sifatnya memaksa artinya siapa saja yang melanggar hukum akan mendapat
- hukuman mati atau penjara seumur hidup
 - denda
 - hukum kurungan
 - dipaksa mematuhi dan mentaati hukum lewat alat-alat negara
 - hukuman pokok dan tambahan
20. Suatu istilah Homo Homini Lupus, yang dikemukakan Thomas Hobbes, memiliki arti
- siapa yang kuat selalu merawat yang lemah
 - manusia satu merupakan sahabat bagi manusia lain
 - jika keadaan tidak aman, maka manusia akan cenderung berkumpul
 - manusia yang satu merupakan srigala bagi manusia yang lain
 - kehidupan manusia pada hakikatnya adalah berkelompok seperti kehidupan binatang
21. Suatu negara pada hakikatnya adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli pada penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah. Ini adalah definisi negara menurut
- Max Weber
 - Harold J. Laski
 - Miriam Budiardjo
 - Roger H. Soltau
 - Robert M. Mac Iver
22. Seseorang yang mempunyai kedudukan resmi sebagai anggota penuh dalam suatu negara, disebut dengan
- manusia
 - penduduk
 - bangsa
 - orang asing
 - warga negara
23. Suatu negara yang keterbentukannya oleh karena hasil perjanjian, misalnya
- Pakisatan
 - Republik Rakyat Cina
 - Republik Indonesia Serikat
 - Australia
 - USA
24. Definisi bangsa menurut Otto Bauer adalah suatu persatuan perangai yang muncul karena
- kesamaan agama
 - persatuan nasib
 - kehendak bersama
 - kehendak untuk bersatu
 - suatu perjanjian bersama

25. Suatu negara ideal yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik menurut Thomas Hobbes ialah
- a. Republik Presidensial
 - b. Monarki Absolut
 - c. Republik Parlementer
 - d. Monarki Konstitusional
 - e. Demokrasi Parlementer
26. Unsur yang sangat menentukan ada atau tidaknya negara disebut dengan unsur
- a. diplomatif
 - b. konsultatif
 - c. deklaratif
 - d. konstitutif
 - e. deklarasi
27. Bangsa ialah suatu persekutuan hidup dari suatu masyarakat yang berdiri sendiri, dan setiap anggota persekutuan hidup merasa satu kesatuan bahasa, agama, ras, dan adapt istiadat, hal ini adalah merupakan pengertian bangsa
- a. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b. menurut Otto Baner
 - c. secara politis-historis
 - d. secara sosiologis-antropologis
 - e. menurut Ernest Renant
28. Walaupun tidak saling mengenal, anggota-anggota bangsa adalah selalu memandang satu dengan yang lainnya sebagai satu saudara. Hal ini menampakkan bahwa bangsa itu mempunyai ciri
- a. komunitas politik yang dibayangkan
 - b. adanya suatu solidaritas
 - c. batas-batas wilayah yang kongkrit
 - d. suatu pemerintahan yang berdaulat penuh
 - e. mempunyai keharmonisan
29. Di dalam pelaksanaan acara pidana di pengadilan tugas seorang pengacara (penasihat hukum) adalah
- a. menghindarkan kesewenang-wenangan dari jaksa ataupun hakim
 - b. melengkapi prosedur dalam hokum acara pidana
 - c. membantu meringankan terdakwa dari tuntutan hukuman berat
 - d. meringankan hukuman bagi terdakwa dalam putusan hakim
 - e. membantu hakim didalam usaha mencari suatu keadilan yang hakiki
30. Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi atas
- a. hukum tertulis dan tidak tertulis
 - b. hukum positif dan hukum negatif
 - c. hukum formal dan informal
 - d. hukum internasional dan nasional
 - e. hukum perdata dan publik

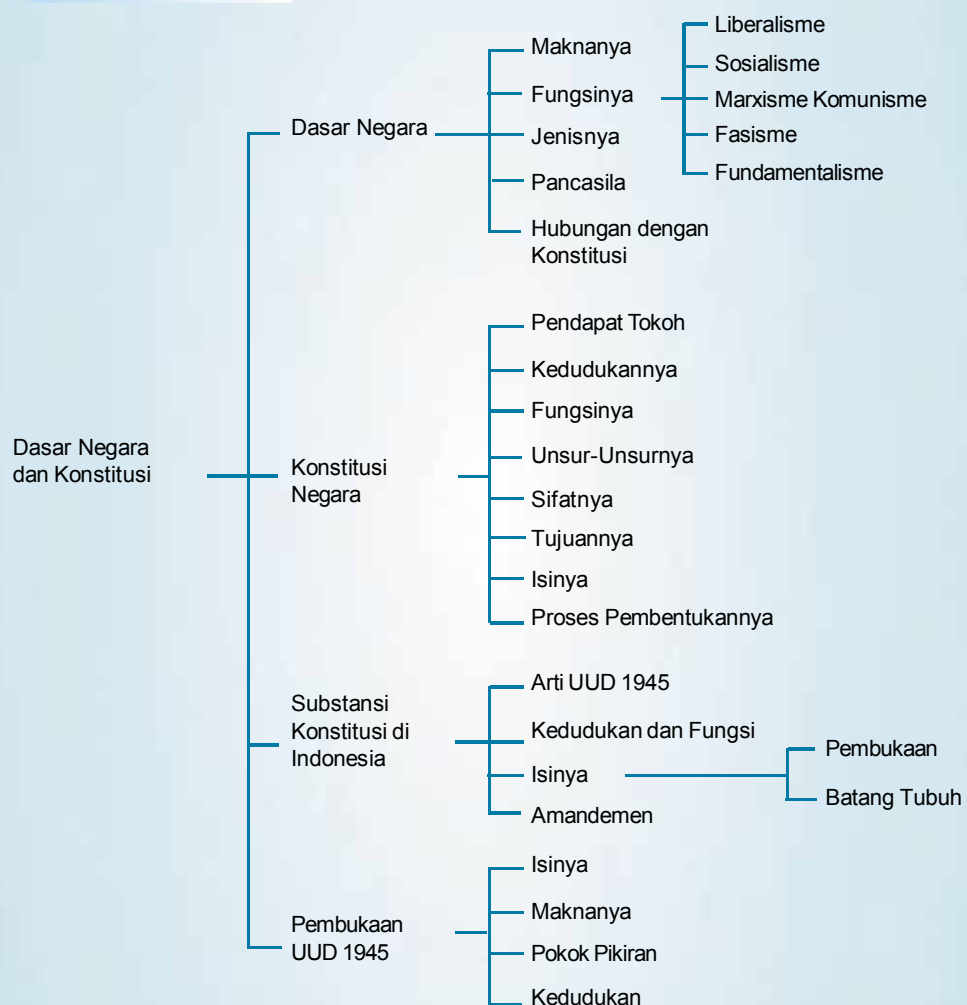
B. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar!

1. Gambarkan sebuah skema yang menerangkan tentang penggolongan hukum secara benar serta berikanlah penjelasannya secara singkat!
2. Jelaskan tentang apa yang disebut dengan istilah korupsi, kolusi dan nepotisme!
3. Jika para penanam modal asing, tidak lagi tertarik untuk mengembangkan usaha bisnisnya di Indonesia, apakah dampak-dampak ekonomi dan politik yang akan terjadi di Indonesia? Jelaskan!
4. Dalam Pembukaan UUD 1945, sebenarnya telah terkandung tujuan nasional dan tujuan internasional Bangsa Indonesia, Apa sajakah itu? Jelaskan!
5. Apakah perbedaan dan persamaan antara hak dan hak asasi manusia? Jelaskan dan berikanlah contoh agar jawabanmu semakin jelas!
6. Mengapa para tokoh atau pemimpin masyarakat adalah terjadinya faktor vital dalam melakukan sosialisasi penegakan HAM? Jelaskan dan berikanlah contoh-contoh kongkrit!
7. Sebutkanlah upaya-upaya yang sudah dilaksanakan baik oleh masyarakat ataupun pemerinath dalam memperkecil dampak korupsi di Indonesia!
8. Bagaimanakah asal mula terbentuknya suatu negara menurut ajaran Teori kekuatan atau kekuasaan? Jelaskan dan berikan contohnya!
9. Apakah persamaan dan perbedaan teori pemisahan kekuasaan menurut pendapat Montesquien dan John Locke!
10. Apakah maksud dari Mahkamah Internasional HAM adalah suatu pelengkap peradilan nasional? Jelaskan dan berikanlah contohnya!
11. Menurut kalian, apakah penerapan teori Teokrasi masih bias diterapkan? Jelaskan jawaban kalian, dan berikanlah contohnya!
12. Mengapa ajaran Komunisme tidak bias diterapkan di Indonesia? Jelaskan dan berikanlah contohnya!
13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan hak asasi demokrasi?
14. Mengapa bentuk dan pelaksanaan HAM di tiap-tiap negara adalah berbeda-beda? Jelaskan dan berikanlah contoh!
15. Mengapa sebaiknya HAM tercantum dalam konstitusi suatu negara? Jelaskan dan berikanlah contoh!

BAB 4

Keterkaitan Antara Dasar Negara dan Konstitusi

PETA KONSEP



Anda sekarang telah memasuki semester 2. Bagaimana dengan nilai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada semester 1 yang lalu? Semoga nilai yang Anda dapatkan bagus. Saat ini awal semester ke-2, pada bab ini Anda diajak mempelajari tentang konstitusi dan dasar negara Indonesia, serta bagaimana hubungan keduanya. Untuk itu, terlebih dahulu cobalah memahami uraian pendahuluan di bawah ini.

Setiap negara yang merdeka dan berdaulat, tentu memiliki alat kelengkapan negara. Salah satunya adalah dibuatnya konstitusi yang dijadikan sebagai dasar negara. Dasar negara ini berkedudukan sebagai norma tertinggi dalam pembentukan tata hukum dan perundangan negara. Jadi, dasar negara merupakan filsafat negara yang berkedudukan sebagai sumber segala sumber hukum dalam suatu negara.

Betapa besar arti penting dasar negara dan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Oleh karenanya, sebagai warga negara yang merupakan salah satu unsur dari suatu negara, tentu memiliki hak dan kewajiban untuk memahami dasar negara dan konstitusi tersebut dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.

Tentu Anda telah memahami bahwa dasar negara yang dianut oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila, sedangkan konstutsi bangsa Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Keduanya dijadikan landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa, Anda dituntut menaati dan melaksanakan segala aturan di dalamnya.



KATA SANG TOKOH

Bagi suatu bangsa yang baru lahir kembali milik yang paling berharga adalah "kemerdekaan" dan "kedaulatan".

Mohammad Hatta

Sumber: www.primaonline.com

A.

Dasar Negara

Dasar negara yang dimiliki oleh setiap negara yang merdeka, tentu tidak sama antara negara yang satu dengan negara lain. Hal ini dipengaruhi oleh nilai-nilai yang ada dalam lingkungan sosial negara tersebut sekaligus budaya yang melingkupinya. Meskipun demikian, beberapa negara memiliki pandangan yang sama tentang arti sebuah dasar negara tersebut. Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian makna dasar negara berikut ini.

1. Makna Dasar Negara

Istilah dasar negara Republik Indonesia memiliki makna sama dengan istilah yang ada di negara-negara lain, seperti Jerman (*Weltanschauung*), Belanda (*Philosophis che grondslag*), dan Inggris (*Ideology*).

Makna dasar negara adalah ajaran yang merupakan gagasan pemikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara yang menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara, serta mengembangkan kehidupan suatu negara.

Di Indonesia, istilah-istilah tersebut diterjemahkan sebagai ideologi. Ada beberapa pendapat mengenai ideologi, seperti pendapat Adolf Heuken yang menyatakan bahwa "ideologi adalah konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka itu". Dengan demikian ideologi adalah konsensus tentang nilai-nilai dasar suatu masyarakat yang bernegara. Berikut ini beberapa contoh ideologi yang ada di negara-negara lain.

- a. RRC dan Korea Utara memiliki ideologi komunisme/maoisme.
- b. Negara-negara Eropa Timur dan Rusia (dahulu Uni Sovyet) memiliki ideologi sosialisme dan komunisme stalinisme.
- c. Eropa Barat dan Amerika Serikat memiliki ideologi liberalisme.
- d. Indonesia memiliki ideologi Pancasila.

Berdasarkan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008) kata "dasar" memiliki arti "asal yang pertama". Jadi, jika dikaitkan dengan kata "negara" maka menjadi dasar negara, yang berarti suatu pedoman untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya, dasar negara sama dengan ideologi negara dan filsafat kenegaraan atau pandangan dasar kenegaraan.

2. Fungsi Dasar Negara

Keadaan yang ideal atau seimbang pada setiap aspek kehidupan sangat diharapkan oleh negara atau setiap bangsa di dunia. Oleh karena itu, dasar negara atau ideologi negara memiliki fungsi sebagai berikut.

a. Dasar untuk berdirinya kedaulatan negara

Semua negara yang akan berdiri serta berdaulat harus memenuhi syarat konstitutif serta persyaratan deklaratif. Dasar negara merupakan salah satu pernyataan paling mendasar bagi pedoman penyelenggaraan kehidupan bernegara.

b. Dasar kegiatan dalam penyelenggaraan negara

Penyelenggaraan negara dipusatkan kepada dasar negara guna mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional pada pelaksanaan kegiatan ketatanegaraan suatu negara.

c. Dasar dan sumber hukum nasional

Dasar negara mempunyai kedudukan penting karena merupakan suatu norma dasar untuk negara yang bersangkutan. Selain itu, dasar negara menjadi sumber bagi perundangan negara serta norma tertinggi pada suatu negara, sehingga hukum yang berlaku menjadi dasar dari semua kegiatan negara.

d. Dasar bagi hubungan antarwarga negara

Dasar negara harus dijadikan dasar pada semua aktivitas warga negara. Kebebasan individu diharapkan tidak merusak semangat kerja sama antarwarga. Begitu pula sebaliknya, kebebasan antarwarga tidak boleh merusak kerja sama individu.

3. Memahami Berbagai Jenis Dasar Negara

Setiap negara mempunyai ideologi berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai hal di antaranya sejarah perjalanan bangsa, keadaan sosial masyarakat, dan kebudayaan. Berbagai jenis dasar negara/ideologi negara tersebut adalah sebagai berikut.

a. Liberalisme

Liberalisme merupakan paham kebebasan, yang mengakui hak-hak individual yang dilindungi oleh campur tangan negara serta badan-badan yang lain. Paham ini mempunyai pandangan tentang pengertian manusia sebagai makhluk bebas serta rasional yang menciptakan pemerintahan harus berdasar pada persetujuan masyarakat.

b. Sosialisme

Sosialisme merupakan sebuah ideologi yang mempunyai pandangan adanya persamaan serta kesamaan dalam menjalani kehidupan. Persamaan sosialis ialah konsekuensi logis dari keprihatinan terhadap suatu kemiskinan.

c. Marxisme-Komunisme

Paham ini merupakan sisi lain dari sosialisme. Ajaran Kark Marx tentang Marxisme selanjutnya diteruskan Lenin, Stalin, serta Mao Tze Dong.



Sumber : <http://economistsview.typepad.com>

Gambar 4.1 Karl Marx (kiri) seorang filsuf dan ekonom asal Jerman, yang melahirkan paham Marxisme, yang selanjutnya dikembangkan menjadi ideologi Komunisme oleh Lenin (tengah) di Rusia dan Mao Tse Tung (kanan) di China.

Paham ini mempunyai pandangan pada kepentingan bersama dalam mencapai suatu tujuan, meskipun dengan cara menghalalkan semua jalan. Ajaran komunisme tidak mengenal adanya Tuhan, tetapi mendasarkan pada hukum materialisme.

Dengan demikian, kebebasan beragama serta kebebasan individu menjadi tertindas. Nilai-nilai yang terkandung di dalam komunisme adalah sebagai berikut.

- 1) Monoisme, yaitu suatu prinsip atau pandangan yang menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat.
- 2) Kekerasan, yaitu cara yang sah untuk mencapai suatu tujuan.
- 3) Alat produksi harus ditangan negara dan hak milik perseorangan tidak diakui.
- 4) Campur tangan negara terhadap kehidupan rakyat tidak dibatasi dan negara melarang penduduknya beragama.

d. Fasisme

Sistem yang dianut paham ini adalah sistem kediktatoran yang disamakan dengan otoritarian. Kekerasan serta hal-hal mengerikan ialah bentuk-bentuk praktik dari ajaran fasisme. Pada paham ini lebih menekankan secara khusus dan ketergantungan kepada pimpinan yang kharismatik .



A

B

C

Sumber :

<http://img.slate.com/media>

<http://www.philadelphia-reflections.com>

<http://www.solarnavigator.net>

Gambar 4.2 Para tokoh/negarawan penganut Fasisme, (A) Adolf Hitler (Jerman), (B) Benito Mussolini (Italia), dan (C) Hideki Tojo (Jepang)

e. Fundamentalisme

Sebuah sistem politik dalam negara yang menetapkan agama sebagai ideologi.



Berpikir Kritis

Setelah memahami bermacam-macam dasar negara atau ideologi, coba lakukan kegiatan di bawah ini!

1. Buatlah ringkasan sebanyak 3-5 halaman tentang dasar negara atau ideologi yang dipakai suatu negara. Pilihlah negara-negara di wilayah Asia Tenggara selain negara Indonesia!

2. Isi ringkasan meliputi pengertian ideologi yang dianutnya, tokoh pencetus ideologi tersebut, penerapan ideologi tersebut dalam berbagai bidang kehidupan negara tersebut (politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan keamanannya).
3. Anda dapat mencari berbagai sumber dari internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau berbagai sumber lainnya. Jangan lupa sebutkan sumbernya dengan jelas! Kumpulkan pada guru untuk diberi komentar dan penilaian.

4. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia

Anda telah mempelajari berbagai jenis dasar negara yang dianut oleh negara-negara di dunia ini. Dasar negara yang dipilih oleh suatu negara disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, sosial, serta nasionalisme sebagai perwujudan cita-cita serta tujuan negara tersebut. Pancasila dipilih oleh bangsa Indonesia sebagai ideologi sekaligus dijadikan dasar negara. Ideologi ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia sendiri, yang tertuang dalam berbagai asas berikut ini.

- a. Asas gotong royong, yang merupakan bentuk kerja sama untuk kepentingan bersama dan hasilnya dinikmati bersama.
- b. Asas kekeluargaan, yaitu asas yang mengajarkan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat.
- c. Asas musyawarah, yaitu sebuah keputusan yang didasarkan pada kepentingan bersama atau rakyat.
- d. Asas kebersamaan hidup, yaitu asas yang mengajarkan bahwa setiap orang tidak dapat hidup sendiri melainkan harus hidup bersama orang lain serta membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, setiap manusia secara bersama-sama menjunjung tinggi asas kekeluargaan serta gotong royong.
- e. Asas Bhinneka Tunggal Ika, yaitu asas yang mengajarkan adanya persatuan dan sikap toleransi kehidupan antarsuku bangsa, antaretnis, antargolongan, dan antarumat beragama yang berbeda-beda.
- f. Asas keseimbangan dan keselarasan, yaitu sebuah keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani, keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat, serta keseimbangan antara kehidupan pribadi dan alam sekitarnya.

SEMANGAT KEBANGSAAN

PANCASILA

"Sesuatu" itu kami namakan "Pancasila", ya "Pancasila" atau lima sendi negara kami. Lima Sendi/Dasar tidaklah langsung berpangkal pada Manifesto komunis ataupun *Declaration of Independence*.

Declaration of Independence memang, gagasan-gagasan dan cita-cita itu mungkin sudah ada sejak berabad-abad telah terkandung dalam bangsa kami. Dan memang tidak mengherankan bahwa paham-paham mengenai kekuatan yang besar dan kejantanan itu telah timbul dalam bangsa kami selama dua ribu tahun peradaban kami dan selama berabad-abad kejayaan bangsa sebelum imperialisme menenggelamkan kami pada suatu saat kelemahan Nasional.

Ir. Soekarno

(Cuplikan Pidato Presiden Pertama RI Ir. Soekarno dalam Pidato Pembukaan KTT Non Blok yang pertama (1960) di Beograd, Yugoslavia)

Sumber : *Membangun Dunia Kembali (To Build The World a New)*, 30 September 1960.

Berdasarkan Ideologi Pancasila, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai sifat pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Keadaan ini haruslah benar-benar selaras serta seimbang. Dasar Negara Pancasila ialah prinsip pengarah (guiding principle) yang menjadi dasar, arah dan tujuan pada penyelenggaraan serta pengembangan kelangsungan kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia.

Jika dilihat dan ditinjau dari aspek yuridis konstitusional, dasar negara yang berasaskan Pancasila mempunyai kedudukan sebagai norma objektif serta norma tertinggi juga menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dituangkan pada ketetapan MPR ialah TAP. MPRS No. XX/MPRS/1966. Pancasila selain sebagai ideologi negara dan dasar negara juga merupakan gambaran filsafat kehidupan bangsa Indonesia yang mempunyai arti serta makna bahwa pada setiap aspek kehidupan berbangsa serta bernegara haruslah didasari pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yaitu Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, serta Keadilan.

Peranan Pancasila sebagai dasar negara antara lain:

- Mempersatukan bangsa Indonesia yang mempunyai keanekaragaman suku bangsa, serta memelihara kerukunan antarumat beragama.
- Mengarahkan serta membimbing mengarah pada cita-cita serta tujuan bangsa.
- Memberikan motivasi serta pengembangan juga memelihara identitas diri bangsa Indonesia.
- Memberikan pandangan terhadap sebuah kenyataan yang ada di kritis terhadap perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila.

Fungsi serta kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Sebagai dasar negara

Inilah sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (*philosophische grondslag*) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membelanya, dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan. Negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia (kemanusiaan yang adil dan beradab), agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraannya lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (keadilan sosial).

Kedudukan Pancasila sebagai Dasar Negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah Negara yang fundamental atau mendasar, sehingga sifatnya tetap, kuat dan tidak dapat diubah oleh siapa pun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna yaitu:

- 1) Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat;
- 2) Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasional; yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4; dan
- 3) Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktivitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.

Pandangan tersebut melukiskan Pancasila secara integral (utuh dan menyeluruh) sehingga merupakan penopang yang kokoh terhadap negara yang didirikan di atasnya, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia.

b. Kepribadian bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai asas dan kepribadian bangsa. Oleh karenanya, seluruh perilaku, sikap, dan kepribadian adalah pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila. Perilaku, sikap, dan kepribadian yang tidak sesuai dengan Pancasila berarti bukan perilaku, sikap, dan kepribadian masyarakat Indonesia.

Walaupun nama atau kata Pancasila diperkenalkan kembali pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Bung Karno, tetapi jiwa Pancasila telah ada sejak berabad-abad lamanya dalam kehidupan. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya.

Guna mewujudkan identitas yang khas, masyarakat Indonesia hendaknya berupaya sungguh-sungguh dalam mengarahkan akal pikiran dan kecenderungan dengan satu arah yang dibangun di atas satu asas, yaitu Pancasila. “Azas tunggal” yang digunakan dalam pembentukan identitas merupakan hal yang penting diperhatikan.

Mengembangkan identitas ini bisa dilakukan dengan cara membakar semangat masyarakat untuk serius dan sungguh-sungguh dalam mengisi pemikirannya dengan nilai-nilai Pancasila, serta mengamalkannya dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

c. Pandangan Hidup

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa atau *way of life* mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri, yaitu:

- 1) Nilai dan jiwa Ketuhanan/keagamaan
- 2) Nilai dan jiwa kemanusiaan
- 3) Nilai dan jiwa persatuan
- 4) Nilai dan jiwa kerakyatan dan demokrasi
- 5) Nilai dan jiwa keadilan sosial

d. Perjanjian Luhur Bangsa Indonesia

Ketika bangkit untuk hidup sendiri sebagai bangsa yang merdeka, bangsa Indonesia telah sepakat untuk menjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara. Kesepakatan itu terwujud pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan disahkannya Pancasila sebagai Dasar Negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang mewakili seluruh bangsa Indonesia.

Diskusi Ilmiah

1. Bagilah teman-teman di kelasmu menjadi 4 kelompok. Usahakan masing-masing kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan dengan jumlah seimbang.
2. Berdiskusilah dengan tema "Alasan Pemilihan Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara bagi Bangsa dan Negara Indonesia"!
3. Tiap kelompok dipersilakan menentukan judul yang berbeda dengan kelompok lain, tetapi tema tetap sama.
4. Tulislah hasil diskusi kelompokmu, lalu sampaikan di depan kelas secara bergiliran dengan kelompok lain! Mintalah kelompok lain memberikan komentarnya! Bapak/Ibu Guru akan bertindak sebagai Moderator.

5. Hubungan Dasar Negara dengan Konstitusi

Pancasila ialah dasar negara Republik Indonesia, yang juga sebagai norma tertinggi. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut juga sebagai norma dasar, norma pertama, norma fundamental negara atau pokok kaidah negara yang fundamental serta cita hukum, dapat juga menjadi sumber pembentukan konstitusi. sehingga dasar negara menjadi sumber konstitusi.

Konstitusi yang merupakan norma hukum di bawah dasar negara yang bersumber serta didasarkan pada sebuah dasar negara meliputi hukum dasar tertulis atau UUD serta hukum dasar tidak tertulis yaitu konvensi. Penjabaran serta penjelasan dasar negara pada aturan hukum yang awal dilakukan melewati konstitusi.

Pancasila sebagai dasar negara dihubungkan dengan konstitusi UUD 1945 bisa dilihat pada Pembukaan UUD 1945 serta Batang Tubuh UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 merupakan suasana batin negara yang mengandung asas kerohanian negara, asas politik negara, asas tujuan negara serta hukum pada Undang-Undang, yang tertuang pada pokok-pokok pemikiran di bawah ini.

- a. Persatuan yang merupakan perwujudan pada sila ke-3 Pancasila (Persatuan Indonesia) memiliki makna bahwasanya negara melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia. Negara mengatasi segala persoalan dari berbagai macam paham golongan ataupun paham perseorangan.
- b. Keadilan sosial yang merupakan wujud dari sila ke-5 Pancasila (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) mempunyai pengertian bahwasannya negara bertujuan mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat guna mewujudkan negara yang merdeka, berdaulat, adil, serta kemajuan dalam hal kesejahteraan umum.
- c. Kedaulatan rakyat ialah wujud dari sila ke-4 Pancasila (Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan) mempunyai arti bahwa negara berkedaulatan rakyat didasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Negara memiliki sistem pemerintahan demokrasi Pancasila.
- d. Ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar Kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan wujud dari sila ke-1 Pancasila (Ketuhanan Yang Maha Esa) dan sila ke-2 Pancasila (Kemanusiaan yang adil dan beradab) memuat pengertian bahwa negara menjunjung tinggi semua agama serta kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta wajib bagi pemerintah serta penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti luhur serta teguh dalam memegang cita-cita moral rakyat yang luhur.

Dengan memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila yang selanjutnya dijabarkan atau dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 melalui pasal-pasal sebagai berikut :

- a. Sila Pertama : Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan pokok pikiran yang keempat dijabarkan dalam Pasal 29 Ayat 1 dan ayat 2, serta amandemen kedua UUD 1945 Pasal 28E ayat 1 dan Pasal 28I ayat 1
- b. Sila Kedua : Kemanusiaan yang adil dan beradab yang merupakan pokok pikiran yang keempat dijabarkan dalam Pasal 27 Ayat 1,2, Pasal 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34.
- c. Sila ketiga : Persatuan Indonesia yang merupakan pokok pikiran yang pertama dijabarkan dalam Pasal 1 ayat 1, Pasal 18, 18A dan 18B, pasal 35b, Pasal 36A, 36B, 36C dan 36D.

- d. Sila Keempat : Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang merupakan pokok pikiran yang ketiga dijabarkan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 25.
- e. Sila Kelima : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang merupakan pokok pikiran kedua dijabarkan dalam Pasal 33 dan 34.

Unjuk Kerja

Setelah memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan perwujudan dari sila-sila dalam Pancasila, lakukan kegiatan di bawah ini!

1. Bentuklah kelompok drama dalam kelasmu! Usahakan setiap kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan dengan jumlah seimbang.
2. Bersama kelompokmu, susunlah sebuah teks drama dengan tema cerita "Rasa Bela Bangsa di Kalangan Generasi Penerus"! Boleh menggunakan judul yang berbeda-beda, tetapi tema tetap sama.
3. Berdasarkan teks drama yang telah kamu susun bersama kelompokmu, coba peragakan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan komentarnya!
4. Serahkan naskah drama hasil tulisan kelompokmu kepada guru agar dinilai! Naskah drama terbaik akan diserahkan ke perpustakaan sekolah.

B. Konstitusi Negara

1. Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu *constituer* artinya "membentuk". Penggunaan istilah konstitusi apabila ditinjau dari ketatanegaraan mempunyai arti pembentukan suatu negara atau menyusun serta menyatakan suatu negara. Dalam bahasa Belanda, konstitusi dikenal dengan istilah *gronwet* yang berarti Undang-Undang Dasar.

Pada kenyataannya, konstitusi tidak dapat dirumuskan secara pasti karena setiap para ahli tata negara membuat sebuah perumusan dengan cara pandang masing-masing. Ada penyamaan istilah konstitusi dengan UUD, tetapi ada juga yang membedakan antara konstitusi dengan UUD.

Berikut ini beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang konstitusi.

a. KC. Wheare

Konstitusi ialah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur pemerintahan negara.

b. Herman Heller

Tokoh ini membagi konstitusi menjadi tiga pengertian berikut ini.

- 1) Konstitusi yang bersifat politik sosiologis, yaitu konstitusi yang mencerminkan kehidupan politik masyarakat.
- 2) Konstitusi yang bersifat yuridis, yaitu konstitusi merupakan kesatuan kaidah yang hidup di dalam masyarakat.
- 3) Konstitusi yang bersifat politis, yaitu konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang.

c. CF. Strong

Menurut CF. Strong, konstitusi merupakan kumpulan asas yang didasarkan pada kekuatan pemerintah, hak-hak yang diperintah, serta hubungan-hubungan antara keduanya yang diatur.

d. ECS. Wade

Konstitusi adalah naskah yang menerangkan tugas-tugas pokok serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan di suatu negara.

e. Sri Soemantri

Konstitusi merupakan naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara.



Sumber : <http://www.tempo.co.id>

Gambar 4.3 Prof. Dr. Sri Soemantri, pakar hukum tata negara di Indonesia.

Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas, sebagai berikut.

a. Dalam arti sempit

Maksudnya, undang-undang dasar adalah suatu dokumen yang berisi aturan serta ketentuan yang mempunyai sifat pokok dari ketatanegaraan suatu bangsa.

b. Dalam arti luas

Maksudnya, keseluruhan atauran serta ketentuan dasar (hukum dasar, baik tertulis maupun tidak tertulis) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara.

2. Kedudukan Konstitusi

Kedudukan konstitusi dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara sangatlah penting. Hal ini karena konstitusi menjadi ukuran kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mengetahui aturan-aturan pokok bagi penyelenggaraan negara maupun masyarakat dalam ketatanegaraan. Berikut ini uraian kedudukan konstitusi tersebut.

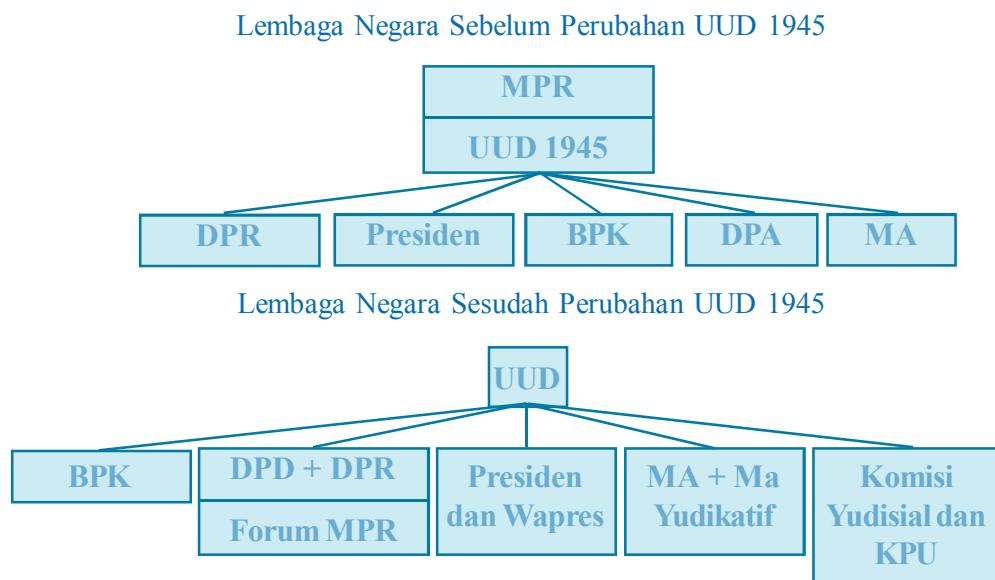
a. Sebagai hukum dasar

Sebagai hukum dasar, konstitusi memuat aturan-aturan pokok mengenai penyelenggaraan negara yaitu badan-badan/lembaga pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan.

b. Sebagai hukum tertinggi

Sebagai hukum tertinggi, konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum suatu negara. Oleh karenanya, aturan yang ada di bawah konstitusi tidak boleh bertentangan dan harus sesuai dengan aturan pada konstitusi.

**Bagan Perbandingan Sistem Ketatanegaraan
Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945**



Sumber : <http://2.bp.blogspot.com/>

Gambar 4.4 Kedudukan UUD 1945 sebelum amendemen dan setelah amendemen.

3. Jenis-Jenis Konstitusi

Konstitusi dapat dibedakan menjadi dua jenis berikut ini.

a. Konstitusi Tidak Tertulis

Konstitusi tidak tertulis biasa disebut dengan konvensi. Konvensi merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.

b. Konstitusi Tertulis

Konstitusi tertulis ini dikenal dengan Undang-Undang Dasar (UUD). UUD merupakan naskah yang menjelaskan kerangka serta tugas-tugas pokok dari badan pemerintahan serta menentukan cara kerja dari badan-badan pemerintahan tersebut.

4. Unsur-Unsur Konstitusi

Unsur-unsur yang termuat di dalam konstitusi adalah sebagai berikut.

- a. Konstitusi sebagai perwujudan kontak sosial, yang merupakan perjanjian dari kesepakatan antara warga negara dengan pemerintah.
- b. Konstitusi sebagai penjamin hak asasi manusia, yang merupakan penentu hak dan kewajiban warga negara dan badan-badan pemerintah.
- c. Konstitusi sebagai forma regiments, yang merupakan kerangka pembangunan pemerintah.

5. Sifat Konstitusi

Menurut pendapat dari C.F Strong, sebuah konstitusi bisa bersifat kaku maupun supel.

a. Konstitusi yang bersifat supel (*Flexible*)

Dalam hal ini, konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang sama dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

b. Konstitusi yang bersifat kaku (*Rigid*)

Dalam hal ini, konstitusi dapat diubah melalui prosedur yang berbeda dengan prosedur membuat undang-undang pada negara yang bersangkutan.

6. Tujuan Konstitusi

Secara umum, konstitusi mempunyai sebuah tujuan guna memberikan batasan kekuasaan penyelenggaraan negara agar tidak dapat berbuat sewenang-wenang dan menjamin hak-hak warga negara. Tujuan konstitusi ini merupakan sebuah ide yang disebut konstitusionalisme. Makna konstitusionalisme ialah ide yang memandang bahwa suatu pemerintah pada hakikatnya adalah suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat.

Di negara Indonesia memiliki UUD sebagai suatu dokumen yang mempunyai makna khas serta merupakan salah satu atribut lambang kemerdekaan. Pada umumnya, negara-negara yang memuat ajaran-ajaran (paham) komunisme menolak konstitusionalisme. Hal ini disebabkan negara berfungsi ganda, yaitu:

- a. Sebagai arah tercapainya masyarakat komunis serta merupakan pencatatan formal,
- b. UUD memberikan kerangka dan dasar hukum untuk masyarakat yang dicita-citakan.



KATA SANG TOKOH

"Tidak penting apa pun agama atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang itu tidak pernah bertanya apa agamamu."

Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid)

Sumber: en.wikipedia.org

7. Isi Konstitusi

Isi sebuah konstitusi pada umumnya berisi hal-hal seperti di bawah ini.

- a. Gagasan politik, moral, dan keagamaan serta perjuangan bangsa. Contoh: pernyataan konstitusi Jepang 1947 dan Pembukaan UUD Republik Indonesia 1945.
- b. Ketentuan hak-hak asasi manusia, yang mengandung aturan-aturan yang menjamin serta melindungi hak asasi manusia bagi warga negara.
- c. Ketentuan organisasi negara, yang mengandung ketentuan-ketentuan pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, serta yudikatif, bahkan dengan badan-badan negara yang lain.
- d. Ketentuan prosedur mengubah Undang-Undang Dasar, yang mengandung peraturan prosedur serta syarat dalam mengubah konstitusi pada suatu negara.

8. Pembentukan Konstitusi

Proses pembentukan sebuah konstitusi maupun sebuah undang-undang dasar di setiap negara mempunyai perbedaan. Ada yang sengaja dibentuk, ada yang secara revolusi, dan ada pula yang merupakan pemberian dari penguasa maupun dengan cara evolusi.

- a. Konstitusi yang pembuatannya sengaja dibentuk yaitu Pembuatan UUD setelah negara tersebut berdiri.
- b. Konstitusi yang pembentukannya secara revolusi, yaitu setelah pemerintahan yang baru terbentuk dari hasil revolusi membuat UUD dengan mendapat persetujuan rakyat atau dengan cara permusyawaratan.
- c. Konstitusi yang pembentukannya secara evolusi, dalam hal pembuatan UUD didasarkan karena adanya perubahan secara perlahan-lahan, sehingga UUD yang lama tidak berlaku lagi.
- d. Konstitusi yang pembentukannya secara pemberian dari penguasa, biasanya seorang raja yang memberikan UUD kepada rakyatnya atau seorang raja mendapat tekanan dan dikhawatirkan akan timbul revolusi, maka UUD dapat dibuat untuk membatasi kekuasaan raja.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi dalam kelasmu. Masing-masing kelompok terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan.
2. Tema diskusi yaitu "Hubungan antara dasar negara dan konstitusi dalam suatu negara". Pilihlah contoh kasus pada suatu negara (selain Indonesia) dan tiap kelompok sebaiknya tidak membahas suatu negara yang sama.
3. Tulislah hasil diskusi bersama kelompokmu, lalu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas. Mintalah kelompok lain memberikan komentarnya! Guru sebagai fasilitator dan moderator.
4. Kumpulkanlah hasil pembahasan bersama kelompokmu kepada guru untuk diberi penilaian.



Substansi Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Konstitusi merupakan peraturan dasar negara yang berisi ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber perundang-undangan lainnya. Negara Indonesia memiliki dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusi tidak tertulis, seperti hukum adat, bermusyawarah untuk mencapai suatu

mufakat, dan pidato negara oleh presiden. Di bawah ini adalah uraian mengenai konstitusi tertulis yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945.



KATA SANG TOKOH

Tinggi rendahnya tingkat kemajuan suatu masyarakat, ditetapkan oleh tinggi rendahnya tingkat kedudukan perempuan di dalam masyarakat itu.

Charles Fourier

Sumber: 1985.files.wordpress

1. Memahami Arti Undang-Undang Dasar 1945

Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 pasal, 27 pasal, 65 ayat, 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta Penjelasan. Setelah dilakukan 4 kali perubahan, UUD 1945 memiliki 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan Peralihan dan 2 pasal Aturan Tambahan.

2. Kedudukan dan Fungsi Undang-Undang Dasar 1945

- UUD 1945 memiliki kekuatan yang mengikat terhadap pemerintah, lembaga-lembaga/badan-badan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara Indonesia, dan penduduk.
- UUD 1945 memuat aturan-aturan dasar (memuat hukum dasar).
- UUD 1945 merupakan hukum tertinggi.

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 pasal 7, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti UU
 - 3) Peraturan Pemerintah
 - 4) Peraturan Presiden
 - 5) Peraturan Daerah.
- UUD 1945 merupakan sumber hukum

Semua peraturan perundangan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

3. Isi Undang-Undang Dasar 1945

Garis besar isi dari UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pembukaan UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 terdiri atas 4 alinea yang memuat tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.

b. Batang Tubuh UUD 1945

Batang Tubuh UUD 1945 terdiri atas 16 Bab, 37 Pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.

- 1) Bab I, Pasal 1 mengenai bentuk dan kedaulatan
- 2) Bab II, Pasal 2-4 mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3) Bab III, Pasal 4-16 mengenai kekuasaan pemerintahan negara
- 4) Bab V, Pasal 17 mengenai kementerian negara
- 5) Bab VI, Pasal 18 -18B mengenai pemerintah daerah
- 6) Bab VII, Pasal 19-22B mengenai Dewan Perwakilan Rakyat
- 7) Bab VIIA, Pasal 22C-22D mengenai Dewan Perwakilan Daerah
- 8) Bab VIIB, Pasal 22E mengenai Pemilu
- 9) Bab VII, Pasal 23-23D mengenai keuangan
- 10) Bab VIIIA, Pasal 23E-23G mengenai Badan Pemeriksaan Keuangan
- 11) Bab IX, Pasal 24-25 mengenai kekuasaan kehakiman
- 12) Bab IXA, pasal 25A mengenai wilayah negara
- 13) Bab X, Pasal 26-28 mengenai warga negara dan penduduk
- 14) Bab XA, Pasal 28A-28j mengenai hak asasi manusia
- 15) Bab XI, Pasal 29 mengenai Agama
- 16) Bab XII, Pasal 30 mengenai pertahanan dan keamanan
- 17) Bab XIII, Pasal 31-32 mengenai pendidikan dan kebudayaan
- 18) Bab XIV, pasal 33-34 mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial
- 19) Bab XV, Pasal 35-36c mengenai bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan.
- 20) Bab XVI, Pasal 37 mengenai perubahan Undang-Undang Dasar.

4. Amendemen Undang-Undang Dasar 1945

Amendemen merupakan suatu perubahan yang bertujuan memperkuat fungsi dan kedudukan UUD 1945 dengan mengakomodasi dari aspirasi politik untuk mencapai tujuan negara, sebagaimana dirumuskan dalam UUD 1945. Untuk melakukan perubahan dalam UUD 1945, sesuai dengan yang dimuat pada pasal 37 kewenangan tersebut diberikan kepada MPR.

Pada era Reformasi, banyak tuntutan akan adanya perubahan UUD 1945, yang hingga saat ini mengalami 4 kali amendemen, yaitu:

- a. Sidang Umum MPR Tahun 1999 merupakan Amendemen I dan disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999.
- b. Sidang Umum MPR Tahun 2000 merupakan Amendemen II dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000.
- c. Sidang Umum MPR Tahun 2001 merupakan Amendemen III dan disahkan pada tanggal 10 November 2001.
- d. Sidang Umum MPR Tahun 2002 merupakan Amendemen IV dan disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002.

Alasan diadakan amendemen terhadap UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. UUD 1945 membentuk struktur ketatanegaraan yang bertumpu pada MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang melaksanakan kedaulatan rakyat, sehingga berakibat tidak terdapat *check and balance* antar lembaga negara.
- b. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada presiden.
- c. UUD 1945 memiliki pasal-pasal yang dapat menimbulkan multitafsir.
- d. UUD 1945 dalam hal kesejahteraan sosial tidak tercapai dan berakibat munculnya monopoli, oligoli, serta monopsoni.

Berdasarkan beberapa alasan tersebut, dilakukannya Amendemen UUD 1945 dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal berikut ini.

- a. Memperkuat dan menegaskan kembali peran kekuasaan pada badan legislatif.
- b. Pembatasan terhadap kekuasaan badan eksekutif (presiden).
- c. Adanya pembaharuan pada badan-badan negara.
- d. Menegaskan kembali hak dan kewajiban warga negara dan negara serta hak asasi manusia bagi bangsa Indonesia.
- e. Menegaskan adanya otonomi daerah.



Berpikir Kritis

Setelah memahami tentang Konstitusi Negara Republik Indonesia, lakukan kegiatan berikut ini!

1. Buatlah tulisan sebanyak 2-3 halaman mengenai alasan perlunya mengamendemen UUD 1945!
2. Sistematika meliputi latar belakang perlunya mengamendemen UUD 1945, sejarah singkat proses amendemen tersebut, pasal-pasal yang telah diamendemen, konsekuensi logis setelah diamendemen (dalam aplikasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara)!
3. Carilah data-data untuk melengkapi tulisanmu dari berbagai sumber, misalnya internet, buku pengetahuan, majalah, surat kabar atau sumber-sumber lainnya. Jangan lupa sebutkan sumbernya dengan jelas!
4. Setelah itu kumpulkan kepada Guru pengajar untuk dinilai.

D.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945

1. Isi dan Makna Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang penting pada UUD 1945. Hal ini karena di dalamnya terkandung tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Untuk dapat memahami lebih mengenai tujuan dan cita-cita Pembukaan UUD 1945, coba camkan isi teks Pembukaan UUD 1945 berikut ini.



KATA SANG TOKOH

Janganlah tergesa-gesa meniru cara modern atau cara Eropa (Barat), jangan juga terikat oleh rasa konservatif atau rasa sempit, tetapi cocokkanlah semua barang dengan kodratnya.

Ki Hajar Dewantoro
Sumber: en.wikipedia.org

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PEMBUKAAN

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut.

a. Pokok Pikiran I

"Negara" yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam "Pembukaan" ini diterima paham tentang negara persatuan, yaitu negara yang melindungi segenap bangsa. Jadi, negara mengatasi segala paham golongan dan perseorangan. Menurut pengertian "pembukaan" tersebut, negara menghendaki persatuan yang meliputi segenap bangsa Indonesia.

b. Pokok Pikiran II

Negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam pokok pikiran kedua ini negara hendak mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Negara memiliki kewajiban kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

c. Pokok Pikiran III

Pokok pikiran ketiga yang terkandung dalam "pembukaan" ialah negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu, sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Pokok pikiran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia.

d. Pokok Pikiran IV

Pokok pikiran keempat yang terkandung dalam "Pembukaan" ialah negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar itu harus mengandung isi yang mewajibkan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur.

Pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945 tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam pasal-pasal yang terdapat pada Batang Tubuh UUD 1945.



KATA SANG TOKOH

Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.

Sun Yat Sen

Sumber: putrafile.wordpress.com



Berpikir Kritis

Setelah memahami makna Konstitusi, selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini!

1. Susunlah karangan singkat sebanyak 2-3 halaman mengenai pendapatmu sebagai generasi penerus dalam memahami isi dari Pembukaan UUD 1945 yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara!
2. Lengkapi tulisanmu dengan data dari berbagai sumber, misalnya internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau sumber-sumber lainnya. Jangan lupa cantumkan sumber datanya secara lengkap!
3. Kumpulkan hasil tulisanmu kepada guru untuk diberi nilai. Sepuluh tulisan terbaik akan dijadikan kliping untuk diserahkan ke perpustakaan sekolah.

3. Kedudukan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pada Pembukaan UUD 1945 berisi tentang hukum dasar bernegara dan cita-cita serta melahirkan hukum negara yang dilandasi tujuan negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Oleh sebab itu, kedudukan Pembukaan UUD 1945 menjadi lebih tinggi daripada Batang Tubuh UUD 1945, walaupun pada pengesahannya menjadi satu kesatuan.

Kedudukan Pembukaan UUD 1945 dalam negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari Pembukaan UUD 1945.

Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia. Hal ini termuat pada alinea ketiga dari Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan tentang tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan sehubungan dengan pernyataan kemerdekaan itu, yaitu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

- b. Pembukaan UUD 1945 sebagai tertib hukum tertinggi di negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 memuat Pancasila yang merupakan norma dasar yang menjadi dasar bagi penyusunan tertib hukum di Indonesia. Dengan demikian Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan sebagai tertib hukum tertinggi, sedangkan pasal-pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945 dan peraturan-peraturan hukum di bawahnya berlaku dan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.

- c. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan yang kuat dan tetap.

Pembukaan UUD 1945 memuat cita-cita hukum dan terkandung pokok-pokok kaidah negara yang fundamental. Oleh karenanya, Pembukaan UUD 1945 tidak dapat diubah, meskipun pada Batang Tubuh UUD 1945 mengalami perubahan (amendemen). Hal ini merupakan kesepakatan dari MPR untuk tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 dengan alasan berikut ini.

"Pembukaan UUD 1945 memuat dasar filosofis dan dasar normatif yang mendasari seluruh pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan UUD 1945 mengandung staatsidee berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tujuan (haluan) negara, serta dasar negara yang harus tetap dipertahankan".



Berpikir Kritis

Setelah memahami pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, selanjutnya lakukan kegiatan berikut ini.

1. Susunlah karangan singkat sebanyak 2-3 halaman yang berupa pendapatmu tentang berbagai usaha yang dilakukan oleh negara dalam menjabarkan dan melaksanakan pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945!
2. Anda dapat melengkapinya melalui berbagai sumber berita/peristiwa seperti internet, buku pengetahuan, majalah ilmiah (jurnal), artikel, surat kabar, dan sumber-sumber lainnya. Jangan lupa cantumkan sumber datanya secara lengkap!
3. Serahkan kepada gurumu untuk diberi penilaian. Sepuluh tulisan terbaik akan dijadikan kliping dan diserahkan ke perpustakaan sekolahmu!

Unjuk Kerja

1. Buatlah kelompok kerja yang berjumlah 4-5 orang, yang terdiri atas siswa laki-laki dan perempuan!
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekitar sekolahmu mengenai usaha pemerintah dalam menegakkan hukum di Indonesia.
3. Dari hasil jajak pendapat tersebut, berilah ulasan (komentar) serta kesimpulannya!
4. Salah satu wakil kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan kelas! (Guru akan menentukan waktu pelaksanaan presentasi)

5. Sikap Positif terhadap Konstitusi Negara

Sehari setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan bahwa UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia. Dengan demikian segala penyelenggaraan negara berdasarkan atas konstitusi. Meskipun demikian, di Indonesia telah mengalami berbagai konstitusi dengan masa berlaku sebagai berikut.

- a. Pada tahun 1945-1949
Pada periode ini konstitusi yang berlaku adalah UUD 1945.
- b. Pada tahun 1949-1950
Pada periode ini konstitusi yang berlaku adalah UUD RIS. Konstitusi ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar antara Indonesia dan Belanda.
- c. Pada tahun 1950-1959
Pada periode ini konstitusi yang berlaku adalah UUD 1950. Konstitusi ini bersifat sementara karena dibuat setelah Indonesia menjadi negara kesatuan .
- d. Pada tahun 1959-sekarang (ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno). Pada periode ini UUD 1945 diberlakukan kembali.



Sumber : <http://swaramuslim.com>

Gambar 4.4 Peristiwa pembacaan Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Negara, Jakarta.

UUD 1945 tidak hanya berisi pasal-pasal yang terkandung di dalam suatu naskah. Akan tetapi, harus benar-benar dilaksanakan dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara, terutama para pemegang kekuasaan yaitu MPR, DPR, Presiden, Kementerian Negara, MA, BPK, Mahkamah Konstitusi, serta pemegang kekuasaan di daerah. Demikian juga warga negara wajib bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945.

Hal-hal yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara antara lain sebagai berikut.

a. Pemahaman terhadap Pancasila dan UUD 1945

Makna dari Pancasila dan UUD 1945 harus dapat dipahami dengan baik oleh setiap warga negara, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga fungsinya dapat dijalankan setiap warga negara yang memiliki ketaatan hukum yang berlaku, baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

2. Makna dalam Pembukaan UUD 1945

Pada kutipan Pembukaan UUD 1945 di atas, terdiri atas 4 alinea. Masing-masing alinea memiliki makna yang berbeda-beda. Secara prinsip memang mempunyai makna sebagai cita-cita dan tujuan dari terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.

- a. Alinea Pertama, terkandung makna sebagai berikut.
 - 1) Adanya pengakuan bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi hak kodrat dari setiap bangsa untuk merdeka.
 - 2) Adanya suatu keinginan bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan.
 - 3) Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia siap membantu bangsa-bangsa lain untuk merdeka.
 - 4) Adanya pernyataan bahwa bangsa Indonesia tidak menyetujui adanya penjajahan di atas dunia karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
- b. Alinea Kedua, terkandung sebagai berikut.
 - 1) Perjuangan bangsa Indonesia telah sampai pada saat yang tepat, yaitu kemerdekaan.
 - 2) Kemerdekaan bukan merupakan akhir perjuangan bangsa Indonesia, melainkan sebagai jembatan untuk menuju terwujudnya cita-cita bangsa yaitu suatu keadaan masyarakat yang adil dan makmur.
 - 3) Bangsa Indonesia menghargai dan menghormati para pahlawan bangsa yang telah mengantarkannya ke depan pintu gerbang kemerdekaan.
- c. Alinea Ketiga, mengandung makna sebagai berikut.
 - 1) Adanya pengakuan religius yaitu bahwa kemerdekaan yang diperoleh merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa.
 - 2) Adanya pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
 - 3) Kemerdekaan bangsa Indonesia dimotivasi oleh keinginan yang luhur untuk menjadi suatu bangsa yang bebas dari penjajahan.
- d. Alinea Keempat, terkandung makna sebagai berikut.
 - 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
 - 2) Memajukan kesejahteraan umum
 - 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
 - 4) Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi
 - 5) Dasar negara, yaitu Pancasila

2. Pokok Pikiran Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Pokok-pokok pikiran pada Pembukaan UUD 1945 meliputi suasana kebatinan dari UUD Negara Indonesia. Pokok-pokok pikiran ini mewujudkan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum tertulis (undang-undang) maupun hukum yang tidak tertulis.

b. Adanya kesadaran untuk menaati hukum

Demi mewujudkan kehidupan yang aman, tertib, dan adil, maka setiap warga negara baik penyelenggara negara (pemegang kekuasaan) maupun rakyat yang dipimpin wajib menaati segala peraturan.

c. Adanya kesadaran terhadap segala perbedaan

Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa, agama, adat istiadat, maupun bahasa yang harus diterima sebagai suatu kekayaan suku bangsa. Oleh karenanya, setiap warga negara tidak perlu mempertentangkan hal tersebut di dalam melaksanakan aturan-aturan yang terdapat di dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

d. Memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945

Sebagai warga negara Indonesia, perlu memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan hasil karya dari bangsa sendiri, sehingga akan menghasilkan suatu penghormatan dan ketaatan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

e. Berperan aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945

Usaha untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945 dapat dilakukan dengan tunduk dan patuh terhadap UUD 1945 serta memberikan solusi terhadap penyalahgunaan Pancasila dan UUD 1945 yang dapat mengakibatkan kerugian bagi bangsa Indonesia.

PROFIL TOKOH

Gus Dur, Bapak Demokrasi-Pluralisme

Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur lahir di Jombang, Jawa Timur, pada 7 September 1940. Gus Dur adalah putra pertama dari enam bersaudara dari keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah K.H. Hasyim Asyari, pendiri Nahdlatul Ulama (NU).

Pada tanggal 19 Oktober 1999, MPR menolak pidato pertanggungjawaban Habibie dan ia mundur dari pemilihan presiden. Pada tanggal 20 Oktober 1999, MPR kembali berkumpul dan mulai memilih presiden baru. Abdurrahman Wahid kemudian terpilih sebagai Presiden Indonesia ke-4.

Selama hidupnya, Gus Dur mengabdikan dirinya demi bangsa. Itu terwujud dalam pikiran dan tindakannya hampir dalam sisi dimensi eksistensinya. Gus Dur lahir dan besar di tengah suasana keislaman tradisional yang mewataki NU, tetapi di kepalanya berkobar pemikiran modern. Bahkan dia dituduh terlalu liberal dalam pikiran tentang keagamaan. Pada masa Orde Baru, ketika militer sangat ditakuti, Gus Dur pasang badan melawan dwi fungsi ABRI. Sikap itu diperlihatkan ketika menjadi Presiden dia tanpa ragu mencabut Dwi Fungsi ABRI dan memisahkan POLRI dengan TNI.

Selain usaha perdamaian dalam wadah NKRI, Gus Dur disebut sebagai pionir dalam mereformasi militer agar keluar dari ruang politik. Di bidang pluralisme, Gus Dur menjadi Bapak "Tionghoa" Indonesia. Dialah tokoh nasional yang berani membela orang Tionghoa untuk mendapat hak yang sama sebagai warga negara. Pada tanggal 10 Maret 2004, beberapa tokoh Tionghoa Semarang memberikan penghargaan KH. Abdurrahman Wahid sebagai "Bapak Tionghoa". Hal ini tidak lepas dari jasa Gus Dur mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina (Imlek) menjadi hari libur opsional yang kemudian diperjuangkan menjadi Hari Libur Nasional. Tindakan ini diikuti dengan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Atas jasa Gus Dur pula akhirnya pemerintah mengesahkan Konghucu sebagai agama resmi ke-6 di Indonesia.



Selain berani membela hak minoritas etnis Tionghoa, Gus Dur juga merupakan pemimpin tertinggi Indonesia pertama yang menyatakan permintaan maaf kepada para keluarga PKI yang mati dan disiksa (antara 500.000 hingga 800.000 jiwa) dalam gerakan pembersihan PKI oleh pemerintahan Orde Baru. Dalam hal ini, Gus Dur memang seorang tokoh pahlawan anti diskriminasi. Dia menjadi inspirator pemuka agama-agama untuk melihat kemajemukan suku, agama, dan ras di Indonesia sebagai bagian dari kekayaan bangsa yang harus dipelihara dan disatukan sebagai kekuatan pembangunan bangsa yang besar.

Dua skandal "Buloggate" dan "Brunaigate" menjadi senjata bagi para musuh politik Gus Dur untuk menjatuhkan jabatan kepresidenannya. Pada tanggal 20 Juli, Amien Rais menyatakan bahwa Sidang Istimewa MPR akan dimajukan pada tanggal 23 Juli. TNI menurunkan 40.000 tentara di Jakarta dan juga menurunkan tank yang menunjuk ke arah Istana Negara sebagai bentuk penunjukan kekuatan. Gus Dur kemudian mengumumkan pemberlakuan dekrit yang berisi pembubaran MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun, dan membekukan Partai Golkar sebagai bentuk perlawanan terhadap Sidang Istimewa MPR. Namun dekrit tersebut tidak memperoleh dukungan. Akhirnya, pada tanggal 23 Juli, MPR secara resmi memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati Sukarnoputri.

Itulah akhir perjalanan Gus Dur menjadi Presiden selama 20 bulan. Selama 20 bulan memimpin, setidaknya Gus Dur telah membantu memimpin bangsa untuk berjalan menuju proses reformasi yang lebih baik. Pemikiran dan kebijakannya yang tetap mempertahankan NKRI dalam wadah kemajuan berdemokrasi sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila merupakan jasa yang tidak terlupakan.

Dalam keterbatasan fisik dan kesehatannya, Gus Dur terus mengabdikan diri untuk masyarakat dan bangsa meski harus duduk di kursi roda. Meninggalnya Gus Dur pada tanggal 30 Desember 2009 ini membuat masyarakat kehilangan sosok guru bangsa. Seorang tokoh bangsa yang berani berbicara apa adanya atas nama keadilan dan kebenaran dalam kemajemukan hidup di Nusantara.

Sumber : *Wikipedia.com*



Rangkuman

1. Dasar negara disebut juga ideologi negara, yaitu pedoman untuk mengatur kehidupan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan suatu negara yang mencakup berbagai aspek kehidupan.
2. Fungsi dasar negara bagi setiap bangsa di dunia ini antara lain:
 - a. sebagai syarat berdirinya suatu negara dalam rangka penyelenggaraan negara,
 - b. sebagai dasar dan sumber hukum nasional,
 - c. sebagai dasar bagi hubungan antarwarga negara.
3. Di dunia ini terdapat berbagai jenis dasar negara (ideologi negara), yaitu liberalisme, sosialisme, marxisme-komunisme, fasisme, dan fundamentalisme.
4. Ideologi negara Indonesia adalah Pancasila, yang berkedudukan sebagai dasar negara, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, serta perjanjian luhur bangsa Indonesia.
5. Hubungan dasar negara dengan konstitusi dapat dilihat pada pokok-pokok pikiran UUD 1945 yang merupakan perwujudan sila-sila dalam Pancasila, yang selanjutnya dijelaskan dalam pasal-pasal yang termuat pada batang tubuh UUD 1945.
6. Konstitusi merupakan keseluruhan aturan dan ketentuan dasar yang meliputi hukum dasar tertulis dan hukum dasar tidak tertulis untuk mengatur suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara.
7. Konstitusi negara Indonesia adalah UUD 1945 yang memiliki kedudukan sebagai sumber hukum, hukum tertinggi, dan hukum dasar.
8. Pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang penting yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pernyataan kemerdekaan Indonesia, tertib hukum tertinggi di negara Indonesia, serta memiliki kedudukan yang kuat dan tetap.
9. Sikap positif terhadap konstitusi perlu untuk dilaksanakan bagi setiap warga negara agar memiliki perilaku konstitusional.
10. Setiap warga negara perlu mengembangkan sikap positif, sehingga dapat memahami Pancasila dan UUD 1945 dengan benar, mentaati hukum, menyadari adanya perbedaan yang ada di negara Republik Indonesia, memiliki kebanggaan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta ikut aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

A. Pilihlah jawaban yang paling benar!

1. Larangan tegas untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan UUD 1945 termuat dalam Pasal 37 ayat 5 UUD 1945, yang mengatur tentang
 - a. Pemerintah Daerah
 - b. Amandemen UUD 1945
 - c. bentuk negara kesatuan
 - d. Pemerintah Pusat
 - e. dasar negara Pancasila
2. Pada dasarnya, fungsi pokok konstitusi adalah
 - a. membatasi kekuatan pemerintah
 - b. memberi kesempatan bagi para praktisi politik
 - c. memberi peluang kepada kekuasaan legislatif
 - d. menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum
 - e. membatasi ruang gerak rakyat
3. Keseluruhan sistem ketatanegaraan pada suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur dalam pemerintahan negara disebut Konstitusi.
Pernyataan di atas merupakan pendapat

a. CF. Strong	d. ECS. Wade
b. Sri Soemantri	e. Herman Heller
c. KC. Wheare	
4. Sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila.
Pernyataan di atas sesuai dengan ketetapan MPR, yaitu
 - a. TAP MPRS No. XX/MPRS/1966
 - b. TAP MPR No. II /MPR/2000
 - c. TAP MPR No. IV/MPR/2000
 - d. TAP MPR No. IV/MPR/1999
 - e. TAP MPRS No. III/MPR/2000
5. Bagi negara kesatuan Republik Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan kedudukan sebagai berikut, *kecuali*
 - a. perjanjian luhur bangsa Indonesia
 - b. lambang negara
 - c. kepribadian bangsa Indonesia
 - d. pandangan hidup
 - e. dasar negara
6. Salah satu contoh peraturan yang tidak tertulis atau konvensi, yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan dalam suatu negara disebut
 - a. pengambilan keputusan dengan suara terbanyak
 - b. pengangkatan walikota oleh gubernur
 - c. presiden berasal dari suku terbesar di Indonesia
 - d. pidato presiden dalam pelantikan para menteri
 - e. pemilihan gubernur

7. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
Berdasarkan Pembukaan UUD 1945, pernyataan tersebut merupakan pokok pikiran
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. pertama dan kedua
8. Tujuan negara, sistem pemerintah, dan bentuk negara termuat dalam Pembukaan UUD 1945, hal tersebut tercantum pada alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. kelima
9. Negara tidak boleh ikut campur dalam urusan pribadi, ekonomi, dan agama warganya.
Pernyataan tersebut sesuai untuk sistem negara
 - a. Komunis
 - b. Federal
 - c. Sosialis
 - d. Liberal
 - e. Demokrasi
10. Pemerintahan ... merupakan kebalikan dari pemerintahan totalliter.
 - a. kekuasaan belaka
 - b. konstitusional
 - c. demokrasi
 - d. feodal
 - e. absolut
11. Sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan yang ada merupakan prinsip-prinsip dasar dalam suatu negara, yaitu
 - a. dasar negara
 - b. Undang-Undang
 - c. Konstitusi
 - d. Undang-Undang Dasar
 - e. hukum tata negara
12. Arti Pancasila dalam penyelenggaraan ketatanegaraan disebut
 - a. orientasi pembangunan
 - b. dasar moral bangsa
 - c. pedoman dasar
 - d. dasar negara
 - e. pandangan hidup
13. Istilah "dasar negara" dalam bahasa Jerman adalah
 - a. *weltanschauung*
 - b. *gronwet*
 - c. *ideologi*
 - d. *ideology*
 - e. *philosophische grondslag*
14. Ideologi yang menyatakan pandangan tentang adanya persamaan dan kesamaan dalam menjalani hidup disebut
 - a. Sosialisme
 - b. Fundamentalisme
 - c. Marxisme-Komunisme
 - d. Komunisme
 - e. Liberalisme
15. Sifat pokok yang dimiliki suatu konstitusi sebagai hukum dasar bagi negara Indonesia adalah
 - a. mudah menyesuaikan
 - b. rigid dan mutlak
 - c. luwes dan praktis
 - d. fleksibel dan rigid
 - e. selalu mengutamakan perkembangan

16. Pembatasan kekuasaan Pemerintah melalui hukum dasar yang tertulis dikemukakan oleh suatu paham, yaitu
 - a. konstitusionalisme
 - b. positivisme
 - c. negara federal
 - d. absolutisme
 - e. sosialisme
17. Jika dilihat dari proses terjadinya, Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat merupakan
 - a. perjanjian luhur
 - b. kepribadian bangsa
 - c. pandangan hidup
 - d. pedoman hidup bangsa
 - e. dasar filsafat negara
18. Pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 pada dasarnya merupakan sila-sila Pancasila.
Berdasarkan pernyataan di atas, sila kelima diwujudkan dalam
 - a. pokok pikiran pertama
 - b. pokok pikiran kedua
 - c. pokok pikiran ketiga
 - d. pokok pikiran keempat
 - e. pokok pikiran kelima
19. UUD 1945 sebagai konstitusi mempunyai hubungan dengan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu
 - a. konstitusi dan dasar negara adalah sama
 - b. konstitusi merupakan penjabaran dari dasar negara
 - c. konstitusi merupakan sumber bagi dasar negara
 - d. dasar negara tidak ada hubungan dengan konstitusi
 - e. dasar negara merupakan penjabaran dari konstitusi
20. Pembukaan UUD 1945 memuat adanya pengakuan religius mengenai Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang tercantum pada alinea
 - a. pertama
 - b. kedua
 - c. ketiga
 - d. keempat
 - e. kelima

B. Jawablah dengan tepat!

1. Pembukaan UUD 1945 memiliki kedudukan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Jelaskan pernyataan di atas menurut pendapat Anda!
2. Tunjukkan dan jelaskan kedudukan serta fungsi Pancasila bagi kehidupan berbangsa dan bernegara!
3. Mengapa Anda perlu memiliki sikap positif dan ikut aktif dalam menegakkan Pancasila dan UUD 1945? Jelaskan alasan Anda!
4. Tunjukkan alasan-alasan dalam Amendemen UUD 1945!
5. Jelaskan hubungan antara konstitusi UUD 1945 dan Pancasila!

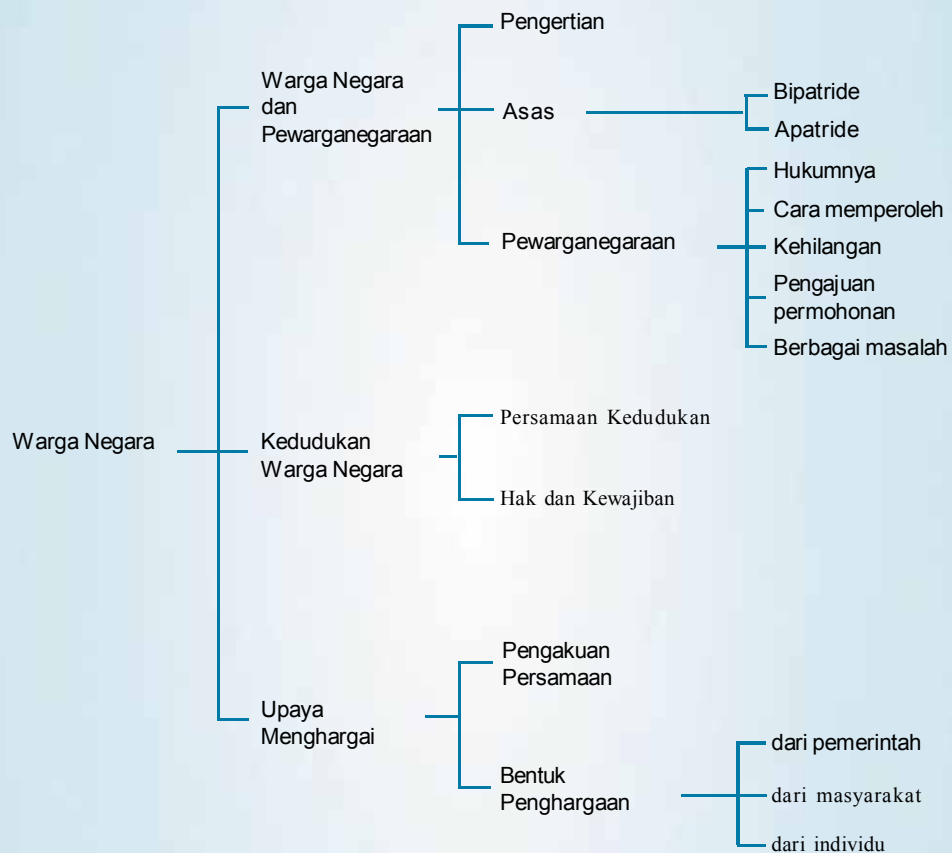
BAB

5

Warga Negara



PETA KONSEP



Ketika memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus, sebagai warga negara, apakah Anda merasa hak-hak sebagai manusia sudah dilindungi oleh negara? Pernahkah di benak Anda muncul pertanyaan seperti itu? Sebagai warga negara yang mendiami suatu negara, tentu mempunyai hak-hak yang perlu dilindungi. Salah satu hak sebagai warga negara adalah memiliki status kewarganegaraan. Semua masalah yang menyangkut urusan warga negara disebut masalah kewarganegaraan, yang telah diatur oleh setiap negara. Aturan status kewarganegaraan ini diatur sesuai hukum yang berlaku di setiap negara. Hal ini untuk memperkecil adanya permasalahan-permasalahan mengenai kewarganegaraan antarnegara. Apabila muncul permasalahan kewarganegaraan antara negara yang satu dengan negara yang lain, diadakan suatu perjanjian tersendiri di antara negara yang bersangkutan.

Di Indonesia, persoalan kewarganegaraan diatur secara khusus dalam UU Kewarganegaraan No. 12 tahun 2006, yang mengatur mengenai status kewarganegaraan seseorang. Di dalam negara kesatuan Republik Indonesia, status kewarganegaraan seseorang sangat penting karena menimbulkan hak serta kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara Indonesia, memberikan pengertian melalui sila-silanya bahwa semua warga negara Indonesia diperlakukan sama di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini pun tertuang dalam pasal-pasal UUD 1945 mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia.



KATA SANG TOKOH

Negara konstitusional sama seperti makanan setiap hari, seperti air untuk minum dan udara untuk napas. Hal terbaik yang berkaitan dengan demokrasi adalah satu-satunya sistem yang mampu menjamin negara konstitusional.

Gustav Radbruch

Sumber: en.wikipedia.org



A. Kedudukan Warga Negara dan Pewarganegaraan di Indonesia

1. Pengertian Warga Negara

Salah satu syarat berdirinya suatu negara adalah adanya rakyat atau penduduk. Semua orang yang bertempat tinggal atau mendiami wilayah suatu negara yang tunduk terhadap peraturan dari kekuasaan negara disebut rakyat atau penduduk. Awalnya, jika seseorang masih memiliki hubungan pertalian darah dari satu keturunan yang berasal dari satu nenek moyang seseorang bisa dikatakan sebagai penduduk atau rakyat pada suatu negara. Namun, dalam perkembangannya banyak pula orang-orang yang berasal dari nenek moyang yang berbeda.

Dr. Soepomo menyatakan bahwa penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara.

Sah artinya tidak bertentangan dengan segala ketentuan tentang masuk serta mendirikan tempat tinggal secara tetap di dalam negara tersebut.

Berdasarkan pengertian rakyat atau penduduk tersebut, seseorang bisa dikatakan penduduk atau bukan penduduk apabila didasarkan pada hubungannya dengan suatu wilayah tertentu.

- a. Disebut bukan (non) penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami wilayah negara untuk sementara waktu (dalam jangka yang pendek), misalnya para wisatawan.
- b. Disebut penduduk apabila bertempat tinggal atau mendiami suatu wilayah negara dalam jangka waktu yang cukup lama. Penduduk yang mempunyai status kewarganegaraan dari wilayah negara yang bersangkutan disebut warga negara, sedangkan yang menetap disebabkan oleh suatu pekerjaan disebut warga negara asing.

Seseorang dapat disebut warga negara dan bukan (non) warga negara dengan didasarkan pada hubungannya dengan kekuasaan pemerintah negara tersebut.

- a. Disebut bukan (non) warga negara jika seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dan tunduk pada kekuasaan pemerintah negara tersebut. Contohnya, duta besar.
- b. Disebut warga negara jika seseorang berdasarkan hukum merupakan anggota dari wilayah negara yang bersangkutan dengan memiliki status kewarganegaraan asli maupun keturunan asing.

a. Arti Warga Negara

Warga negara merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, "citizen" yang memiliki arti bahwa warga negara adalah sesama penduduk serta orang setanah air. Pada zaman dahulu, istilah warga negara disebut dengan hamba atau kawula negara.

Istilah ini memberi kesan bahwa warga hanya menjadi milik negara atau sebagai objek dari negara sehingga warga harus tunduk pada perintah kekuasaan negara. Berikut ini pengertian warga negara menurut beberapa ahli.

- 1) Austin Ranney dalam buku "*A Study of The General Election*" (1983); menyatakan bahwa warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.
- 2) A.S. Hikam dalam buku "*Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*" (2000) menyatakan bahwa warga negara merupakan anggota dari komunitas yang membentuk negara itu sendiri.
- 3) Koerniatmanto dalam buku "*Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja*" (2003) menyatakan bahwa warga negara adalah anggota negara.

Kesimpulannya, warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota suatu negara. Dengan demikian, mereka memiliki hubungan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negara tersebut.

b. Asas Kewarganegaraan

Semua warga yang sah serta berdaulat mempunyai hak menentukan kewarganegaraannya. Oleh karena itu, dikenal asas kewarganegaraan berikut ini.

- 1) Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran
Penentuan sebuah kewarganegaraan berdasarkan kelahiran terbagi menjadi dua.
 - a) Asas Ius Soli (asas tempat/daerah kelahiran)
Asas Ius Soli merupakan asas yang menetapkan seseorang memiliki kewarganegaraan menurut tempat/daerah orang tersebut dilahirkan. Contoh: di negara Inggris menganut asas Ius Soli. Seseorang berkewarganegaraan B melahirkan anak di negara Inggris. Secara otomatis anak tersebut menjadi warga negara Inggris
 - b) Asas Ius Sanguinis (asas hubungan darah/keturunan)
Asas Ius Sanguinis adalah asas yang menetapkan seseorang memiliki kewarganegaraan menurut kewarganegaraan orang tuanya. Contoh: di negara RRC yang menganut asas Ius Sanguinis. Seseorang berkewarganegaraan RRC melahirkan anak di negeri A, sehingga anak tersebut menjadi warga negara RRC.
- 2) Asas Kewarganegaraan Berdasarkan Perkawinan
 - a) Asas Persamaan Hukum
Asas persamaan hukum adalah asas yang memiliki pengertian bahwa suami istri merupakan keluarga yang memiliki ikatan kesatuan yang tidak boleh terpecah. Keluarga merupakan inti dari masyarakat sehingga status kewarganegaraan suami istri harus sama.
 - b) Asas Persamaan Derajat
Asas persamaan derajat adalah asas yang memiliki pengertian bahwa dalam suatu perkawinan tidak menyebabkan salah satu pihak tunduk secara hukum terhadap yang lain. Keduanya memiliki hak yang sama untuk menentukan status kewarganegaraan sendiri. Dengan demikian, mereka tetap memiliki kewarganegaraan masing-masing sebagaimana sebelum terjadi perkawinan.

Status kewarganegaraan yang berlainan pada setiap negara dapat menimbulkan masalah bagi kewarganegaraan seseorang. Masalah tersebut adalah:

a. Bipatride

Bipatride adalah seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda. Contohnya, seseorang anak yang lahir di negara Amerika Serikat yang menganut asas Ius Soli dan merupakan anak dari orang tua yang berkewarganegaraan China yang menganut asas Ius Sanguinis. Anak tersebut memperoleh dua kewarganegaraan, yaitu menjadi warga negara Amerika Serikat karena lahir di wilayah Amerika Serikat dan menjadi warga negara China karena orang tuanya berkewarganegaraan China.

b. Apatride

Apatride adalah seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Contohnya, seseorang anak yang lahir di negara China yang menganut asas Ius Sanguinis. Anak tersebut lahir dari orang tua yang berkewarganegaraan Amerika Serikat yang menganut asas Ius Soli. Dengan demikian, anak tersebut tidak memperoleh kewarganegaraan dari negara China karena bukan keturunan orang China dan juga tidak berkewarganegaraan AS karena tidak lahir di wilayah Amerika Serikat.

Berkaitan dengan apatride dan bipatride, maka di dalam suatu negara menggunakan sistem berikut ini.

a. Stelsel Pasif

Stelsel pasif adalah seseorang yang secara otomatis menjadi warga negara tanpa harus melakukan tindakan hukum tertentu. Jadi, seseorang bisa menggunakan hak untuk memiliki status menjadi warga negara.

b. Stelsel Aktif

Stelsel aktif adalah untuk memiliki status kewarganegaraan, seseorang perlu tindakan hukum tertentu secara aktif. Jadi, seseorang bisa menggunakan hak opsi untuk memiliki status sebagai warga negara.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi sebanyak 3-4 orang dengan anggota laki-laki dan perempuan!
2. Berdiskusilah dengan tema "Hubungan antara bipatride, hak repudiasi, dan stelsel pasif!"
3. Setiap kelompok boleh menentukan judul yang berlainan sepanjang tema tetap sama!
4. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas. Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan!
5. Kumpulkanlah hasil diskusi kelompok Anda beserta tanggapan dari kelompok lain kepada guru Anda untuk diberi penilaian!

2. Pewarganegaraan di Indonesia

Warga negara Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 Pasal 26. Dalam pasal tersebut terkandung ketentuan sebagai berikut.

- a. Yang disebut sebagai warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli serta orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara Indonesia.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia serta orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara serta penduduk diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan isi Pasal 26 UUD 1945, warga negara Indonesia ialah orang Indonesia dengan pengertian bahwa orang-orang pada zaman pemerintahan Belanda termasuk golongan bumi putera. Selain Pasal 26 UUD 1945, pengertian warga negara Indonesia juga dimuat dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 yang isinya sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah serta ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia serta ibu warga negara asing.

3. Hukum Kewarganegaraan Indonesia

Peraturan-peraturan kewarganegaraan yang pernah berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Indishe Staatregeling (IS) Tahun 1927

Peraturan ini berlaku pada zaman Belanda. Isinya mengatur pembagian golongan-golongan penduduk Indonesia sebagai berikut.

- 1) Kaula negara Belanda bukan orang Belanda, tetapi juga bukan bumi putera (*Uittheemse ordersertaen niet Nederlanders*), misalnya orang-orang Timur Asing.
- 2) Kaula negara Belanda orang Belanda (*Ondersertaen Nederlanders*)
- 3) Kaula negara Belanda bukan Orang Belanda, tetapi termasuk bumi putera (*Inheemsche Ondersertaen niet Nederlanders*)

b. Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1946

Undang-Undang ini menyebutkan bahwa penduduk negara adalah mereka yang bertempat tinggal di Indonesia selama satu tahun berturut-turut. Seseorang yang menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang ini adalah:

- 1) Penduduk asli dalam daerah Republik Indonesia, termasuk anak - anak dari penduduk asli tersebut.
- 2) Istri seorang warga negara Indonesia
- 3) Keturunan dari seorang warga negara yang menikah dengan wanita warga negara asing.
- 4) Anak-anak yang lahir dalam wilayah Republik Indonesia, tetapi oleh orang tuanya tidak diakui dengan cara yang sah.
- 5) Anak-anak yang lahir di wilayah Republik Indonesia serta tidak diketahui orang tuanya.
- 6) Anak-anak yang lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya, yang berkewarganegaraan Indonesia, meninggal.
- 7) Orang bukan penduduk asli yang paling akhir telah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut serta telah berumur 21 tahun atau telah kawin. Jika keberatan menjadi warganegara Indonesia, ia boleh menolak dengan keterangan, bahwa ia telah menjadi warga negara dari negara lain.
- 8) Masuk menjadi warga negara Indonesia dengan jalan pewarga- negaraan (naturalisasi).

c. Persetujuan Kewarganegaraan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) Tahun 1949

Menurut persetujuan pembagian warganegara antara Indonesia dan Belanda dalam Konferensi Meja Bundar (1949), kewarganegaraan Indonesia diatur sebagai berikut.

- 1) Penduduk asli Indonesia yaitu mereka yang termasuk golongan "Bumi Putera", yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia. Apabila mereka lahir di luar Indonesia dan bertempat tinggal di negeri Belanda atau di luar daerah peserta Uni (Indonesia-Belanda), mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.



Sumber : <http://belajarsejarah.com>

- 2) Orang Indonesia, kaula negara Belanda, yang bertempat tinggal di Suriname atau Antillen (koloni Belanda). Jika lahir di luar Kerajaan Belanda, mereka berhak memilih kewarganegaraan Belanda dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949. Jika lahir di wilayah Kerajaan Belanda, mereka memperoleh kewarganegaraan Belanda. Mereka juga berhak memilih kewarganegaraan Republik Indonesia dalam waktu dua tahun setelah tanggal 27 Desember 1949.
- 3) Orang Cina dan Arab yang lahir di Indonesia atau sedikit-dikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah Republik Indonesia, dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 2 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia (hak repudiasi = hak menolak kewarganegaraan).
- 4) Orang Belanda yang dilahirkan di wilayah Republik Indonesia sedikit-dikitnya bertempat tinggal enam bulan di wilayah Indonesia serta dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember menyatakan memilih warga negara Indonesia (hak opsi = hak untuk memilih sesuatu kewarganegaraan).
- 5) Orang asing (bukan orang Belanda) yang lahir di Indonesia dan bertempat tinggal di wilayah Indonesia dalam waktu dua tahun sesudah tanggal 27 Desember 1949 tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.
- 6) Undang-Undang RI No. 62 Tahun 1958
Menurut pasal 1 dari Undang-undang No. 62 Th. 1958, maka warga negara Indonesia adalah:
 - a) Mereka yang telah menjadi warga negara berdasarkan UU/Peraturan/Perjanjian, yang terlebih dahulu berlaku (berlaku surut) atau perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 sudah menjadi warga negara Indonesia, itulah warga negara Indonesia. Dengan demikian setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia menurut UU No. 3 tahun 1946, maupun Persetujuan, KMB perihal ataupun menurut peraturan-peraturan lain, tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

Gambar 5.1 Suasana sidang dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda pada tahun 1949.

- b) Mereka yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam UU itu. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
 - (1) pada waktu lahir mempunyai hubungan kekeluargaan dengan seorang warga negara Indonesia (misalnya: sang ayah seorang warga negara Indonesia),
 - (2) lahir dalam waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan sang ayah sewaktu meninggal dunia sebagai warga negara Indonesia,
 - (3) lahir dalam wilayah Indonesia selama orang tuanya tidak diketahui;

4. Cara Memeroleh Kewarganegaraan Indonesia

a. Menurut UU No. 62 Tahun 1958

Cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menurut UU No. 62 Tahun 1958.

1) Melalui Kelahiran

Kelahiran seseorang bisa menjadikan warga negara Indonesia, baik kelahiran berdasarkan keturunan maupun kelahiran di dalam wilayah/negara Republik Indonesia. Dasar ini dipergunakan untuk mencegah timbulnya aptride. Di dalam undang-undang ini menganggap bahwa adanya hubungan hukum kekeluargaan apabila anak tersebut lahir di dalam suatu perkawinan yang sah atau diakui sah oleh ayahnya. Akan tetapi, bila hubungan hukum kekeluargaan antara anak serta ayah terpisah, kewarganegaraan ayahnya yang menentukan kewarganegaraan bagi anak.

Contoh:

- (1) Karena di dalam wilayah
Apabila anak yang dilahirkan di dalam wilayah Republik Indonesia, selama kedua orang tuanya tidak diketahui, anak itu menjadi warga negara Indonesia.
- (2) Karena keturunan
Apabila anak yang dilahirkan dalam 30 hari setelah ayahnya meninggal dunia dan ayahnya pada waktu meninggal dunia berkewarganegaraan Indonesia, anak itu menjadi warga negara Indonesia.

2) Melalui Pengangkatan

Pengangkatan status anak dari orang asing dan benar-benar diperlakukan sebagai anaknya sendiri, maka anak tersebut bisa menjadi warga negara Indonesia. Pemberian sebuah kewarganegaraan Indonesia terhadap anak tersebut dibatasi pada anak yang berumur 5 tahun dan dinyatakan sah oleh Pengadilan Negeri dari tempat tinggal orang tua yang mengangkat anak itu.

3) Melalui Permohonan

Anak yang lahir di luar perkawinan dari seorang ibu berkewarganegaraan Indonesia maupun anak yang lahir dalam perkawinan sah, tetapi ketika terjadi perceraian orang tuanya dan anak tersebut hak asuhnya diserahkan pada ibunya yang berkewarganegaraan Indonesia.

Sedangkan kewarganegaraan anak tersebut menurut ayahnya yang berkewarganegaraan asing, boleh mengajukan permohonan kepada Menteri Kehakiman untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Apabila setelah memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia orang tersebut tidak memiliki kewarganegaraan lain atau pada saat mengajukan permohonan orang tersebut menyampaikan pula surat pernyataan untuk menanggalkan kewarganegaraan lain yang mungkin dimilikinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara asalnya atau sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian penyelesaian dwi kewarganegaraan antara Indonesia dan negara yang bersangkutan.

4) *Melalui Pewarganegaraan (Naturalisasi)*

Negara Republik Indonesia memberikan kesempatan kepada orang asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia, dengan cara pewarganegaraan/naturalisasi agar pemberian pewarganegaraan tersebut tidak bertentangan dengan tujuan pemberian pewarganegaraan, maka diadakan syarat tertentu. Syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon pewarganegaraan adalah sebagai berikut.

- Sudah berumur 21 tahun
- Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, perlu membuat persetujuan dari istrinya.
- Lahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia yang paling akhir sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut.
- Dapat berbahasa Indonesia serta mempunyai pengetahuan sejarah Indonesia dan tidak pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan yang merugikan negara Indonesia.
- Bersedia membayar sejumlah uang kepada Kas Negeri atau bergantung pada penghasilan setiap bulan.
- Dalam keadaan sehat rohaniyah serta jasmaniah.
- Mempunyai mata pencaharian yang tetap.
- Tidak mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia.

Permohonan pewarganegaraan itu dapat dilakukan sebagai berikut.

- Permohonan ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai bukti-bukti tentang umur, persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dan lain-lain.
- Permohonan diajukan secara tertulis serta bermaterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan Republik Indonesia tempat tinggal pemohon.

Pengajuan dengan cara pewarganegaraan (naturalisasi) ini, seorang asing tersebut mengajukan permohonannya kepada Menteri Kehakiman. Menteri Kehakiman mengumumkan pewarganegaraan itu dengan menempatkan keputusannya dalam Berita Negara. Jika permohonan itu ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan itu.

Menteri Kehakiman dapat mengabulkan ataupun menolak permohonan kewarganegaraan itu. Jika permohonan diterima, pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji setia di depan Pengadilan Negeri.

5) *Akibat dari perkawinan*

Pemerintah Republik Indonesia memiliki pendirian bahwa dalam suatu perkawinan seharusnya kedua pasangan suami istri memiliki kewarganegaraan yang sama. Meskipun yang menentukan kesatuan kewarganegaraan tersebut adalah suami, tetapi bila seorang perempuan warga negara Indonesia yang menikah dengan warga (orang) asing kehilangan kewarganegaraan Indonesia, bila dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila ia dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia itu menjadi tanpa kewarganegaraan. Demikian pula jika seorang perempuan asing yang menikah dengan seorang laki-laki warga negara Indonesia tidak selalu memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Hal untuk mencegah timbulnya kelebihan kewarganegaraan.

6) *Karena turut ayah dan ibunya*

Anak yang belum berumur 18 tahun serta belum kawin turut ayahnya. Jika ia tidak memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya dan turut ibunya, dapat dikatakan anak yang belum dewasa. Oleh sebab itu, kewarganegaraan seorang anak menurut kewarganegaraan ayahnya yang memiliki hukum kekeluargaan dengan ayahnya. Begitu juga kehilangan kewarganegaraan Indonesia seorang ayah berlaku pula bagi anaknya yang memiliki hukum kekeluargaan dengan ayah, kecuali jika dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia anak tersebut menjadi tanpa kewarganegaraan.

7) *Karena pernyataan*

Apabila seorang perempuan asing dalam waktu satu tahun setelah perkawinannya berlangsung menyatakan keterangan untuk itu. Sebaliknya, jika seorang perempuan asing tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia masih memiliki kewarganegaraan lain, dan keterangan itu tidak boleh dinyatakan, seorang perempuan asing yang kawin dengan seorang laki-laki kewarganegaraan Indonesia memperoleh kewarganegaraan Indonesia.

WAWASAN KONSTITUSI

Masalah Kewarganegaraan Karena Perkawinan Campuran

Pada era globalisasi ini, teknologi informasi dan transportasi berkembang dengan pesat. Hal ini menyebabkan hubungan antarbangsa menjadi sangat mudah. Batas-batas negara sudah tidak lagi mempersulit hubungan antara bangsa karena kecanggihan teknologi informasi dan transportasi yang membuat jarak wilayah yang jauh menjadi dekat.

Hubungan antarbangsa pun berkembang sedemikian pesat dan mencakup berbagai macam segi kehidupan, seperti perdagangan, perekonomian, hingga masalah perkawinan. Teknologi informasi dan transportasi saat ini telah menafikan batas-batas negara dan perbedaan antarbangsa.

Salah satu dampaknya adalah timbul perkawinan antara subjek hukum yang berbeda kewarganegaraan. Oleh Undang-Undang Perkawinan Indonesia, perkawinan semacam ini didefinisikan sebagai perkawinan campuran dan diatur dalam pasal 57 sampai 62. Pada praktiknya, perkawinan semacam ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, terutama masalah kewarganegaraan anak yang lahir dari perkawinan campuran. Dalam UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan telah diatur bahwa Indonesia menganut asas *ius sanguinis* dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Artinya, status kewarganegaraan seorang anak yang lahir dari perkawinan campuran ditentukan berdasarkan keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah (*patrilineal*) dari anak yang lahir tersebut.

Ketentuan ini dapat menimbulkan kendala terhadap penentuan kewarganegaraan anak, terutama bila ayahnya seorang warga negara asing yang negara asalnya tidak menganut asas *ius sanguinis* melainkan menganut asas *ius soli*. Anak tersebut akan terancam tidak memiliki kewarganegaraan. Hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak-hak anak tersebut mengingat anak tidak ada jaminan perlindungan hukum dan bertentangan dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain masalah kewarganegaraan, ada pula kendala-kendala lain yang menyangkut perkawinan campuran, yaitu masalah perwalian anak apabila perkawinan campuran putus, *child abduction* sampai pada masalah perlindungan hukum bagi anak yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Sumber : <http://one.indoskripsi.com/node/8743>

b. Menurut UU No. 12 Tahun 2006

Menurut UU No. 12 Tahun 2006 cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut.

1) Melalui Kelahiran

Seorang yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena kelahiran dengan ketentuan sebagai berikut.

- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.

- Anak yang lahir dari perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal dan ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan sah serta ayahnya warga negara Indonesia.
- Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Indonesia selama ayah serta ibunya tidak diketahui.
- Anak dari warga negara Indonesia yang belum berusia 5 (lima) tahun diangkat secara sah sebagai anak oleh warga negara asing berdasarkan penetapan pengadilan tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.
- Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Indonesia dari seorang ayah serta ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- Anak warga negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai warga negara Indonesia.

2) Melalui Pengangkatan

Pengangkatan anak dari orang asing bisa dilakukan dengan syarat sebagai berikut.

- Anak tersebut diangkat oleh warga negara Indonesia.
- Pada waktu pengangkatan anak tersebut masih di bawah umur 5 tahun.
- Membiasakan penetapan pengadilan.

Selanjutnya, anak tersebut telah sah menjadi warga negara Indonesia.

3) Melalui Permohonan

Melalui permohonan yang diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia pada kertas bermaterai seseorang bisa membisakan kewarganegaraan Indonesia. Melalui menteri, permohonan tersebut dapat diajukan kepada Presiden.

Melalui keputusan presiden permohonan tersebut dapat dikabulkan serta selanjutnya mengucapkan sumpah di depan Pejabat yang berwenang. Syarat seorang dalam menbisakan kewarganegaraan melalui permohonan antara lain :

- telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh puluh) tahun tidak berturut-turut;
- sehat jasmani dan rohani;
- dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila serta UUD 1945,
- tidak pernah dijatuhi pisertaa karena melakukan tindak pisertaa yang diancam dengan pisertaa penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- jika dengan memperoleh kewarganegaraan Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
- membayar uang pewarganegaraan ke kas negara.

4) *Karena Pemberian Kewarganegaraan*

Sorang warga asing dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan cara pemberian oleh pemerintah Indonesia, dalam hal ini presiden setelah melalui sebuah pertimbangan dari DPR. Pemberian status kewarganegaraan kepada orang asing ini dikarenakan orang tersebut telah berjasa memberikan kemajuan bagi bangsa Indonesia, seperti kemajuan dalam teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, olahraga, dan kemanusiaan.

Selain berjasa terhadap kemajuan negara Indonesia, orang asing tersebut ada juga yang diberikan kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara. Pada umumnya, orang tersebut telah ikut memberikan sesuatu yang luar biasa bagi kedaulatan negara serta kemajuan pada bidang perekonomian. Pemberian kewarganegaraan ini tidak berlaku jika dengan pemberian ini menyebabkan orang asing tersebut memiliki dua kewarganegaraan.

5) *Karena Perkawinan*

Seseorang dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena perkawinan dengan cara berikut ini.

- Menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan pejabat.
- Warga negara asing yang kawin secara sah dengan waga negara Indonesia.

Pernyataan ini dilakukan oleh sesorang bila sudah bertempat tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun tidak berturut-turut. Pernyataan di atas tidak berlaku jika seseorang tersebut menjadi bipatride (memiliki dua kewarganegaraan).

6) *Karena Turut Ayah dan Ibu*

Seorang anak bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia apabila memenuhi syarat berikut ini.

- Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.
- Anak warga negara asing yang belum berusia 5 (lima) tahun yang diangkat Warga Negara Indonesia memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia.

5 Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia

a. Menurut UU No. 62 Tahun 1958

Kehilangan kewarganegaraan menurut UU No. 62 Tahun 1958. Selain dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia, setiap warga negara juga dapat mengalami kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia. Hal ini didasarkan pada UU No. 62 Tahun 1958. Isi dari undang-undang tersebut adalah alasan bagi seseorang kehilangan kewarganegaraan Indonesia karena hal-hal di bawah ini.

- Kawin dengan seorang laki-laki asing.
- Putusnya perkawinan seorang wanita asing dengan laki-laki warga negara Indonesia.
- Anak seorang orang tua yang kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- Memperoleh kewarganegaraan lain karena kemauannya sendiri.
Maksudnya jika orang pada waktu memperoleh kewarganegaraan lain itu berada dalam wilayah Republik Indonesia maka kewarganegaraan Indonesiannya baru dianggap hilang bila menteri kehakiman dengan persetujuan Dewan menteri (Presiden) atas kehendak sendiri atau atas permohonan orang menyatakan hilang.
- Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain.
- Diakui oleh orang asing sebagai anaknya, yaitu jika anak tersebut belum berumur 18 tahun dan belum kawin serta dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Diangkat anak secara sah oleh seorang asing.
Jika anak tersebut belum berumur 5 tahun dan dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Menteri Kehakiman dengan persetujuan Dewan Menteri (presiden). Jika orang tersebut telah berumur 21 tahun, bertempat tinggal di luar negeri serta dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- Masuk dalam dinas asing tanpa izin terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman RI.
- Mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.

- Turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- Mempunyai paspor dari negara asing.
- Bertempat tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dengan tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia, kecuali jika ia ada dalam dinas negara Indonesia.

b. Menurut UU No. 12 Tahun 2006

Kehilangan kewarganegaraan Indonesia menurut UU No 12 Tahun 2006 adalah karena hal-hal di bawah ini.

- Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan memberi kesempatan untuk itu.
- Dinyatakan hilang kewarganegaraan oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun, bertempat tinggal di luar negeri, serta dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraannya.
- Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
- Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya bisa dijabat oleh warga negara Indonesia.
- Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing .
- Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang bisa diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya.
- Bertempat tinggal di luar wilayah negara Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah serta dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir serta genap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, meskipun perwakilan Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

6. Cara Mengajukan Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia

a. Menurut UU No. 62 Tahun 1958

- 1) Permohonan disampaikan secara tertulis dan dibubuhi materai kepada Menteri Kehakiman melalui pengadilan negeri setempat atau perwakilan Indonesia dari tempat tinggal pemohon.

- 2) Permohonan tersebut harus ditulis dalam bahasa Indonesia serta disertai bukti-bukti mengenai persyaratan permohonan tersebut, kecuali syarat kecakapan bahasa Indonesia serta pengetahuan sejarah Indonesia.
- 3) Pengadilan negeri atau perwakilan Indonesia memeriksa bukti-bukti tersebut serta dilanjutkan dengan menguji pemohon mengenai kecakapan bahasa Indonesia serta pengetahuan nsejarah Indonesia.
- 4) Menteri Kehakiman mengabulkan atau menolak permohonan itu dengan persetujuan Dewan Menteri (sesuai dengan UUD 1945 oleh Presiden).
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman (presiden) yang memberikan pewarganegaraan mulai berlaku pada hari pemohon mengucapkan sumpah atau janji di hadapan pengadilan negeri atau perwakilan Indonesia dari tempat tinggalnya serta berlaku surut hingga hari serta tanggal keputusan Menteri Kehakiman (presiden) tersebut.
- 6) Setelah pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia, Menteri Kehakiman mengumumkan kewarganegaraan itu dalam berita acara.

b. Menurut UU No. 12 Tahun 2006

- 1) Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan tersebut disampaikan kepada Pejabat.
- 2) Menteri meneruskan permohonan yang disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima.
- 3) Permohonan pewarganegaraan dikenai biaya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Presiden mengabulkan atau menolak permohonan pewarganegaraan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri serta diberitahukan kepada pemohon diterima lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.
- 5) Penolakan permohonan pewarganegaraan harus disertai alasan serta diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak permohonan diterima oleh Menteri.
- 6) Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan pewarganegaraan berlaku efektif terhitung sejak tanggal pemohon mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.
- 7) Paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirim kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyataka janji setia.
- 8) Setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan ternyata pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah, Keputusan Presiden tersebut batal demi hukum.

- 9) Jika pemohon tidak bisa mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan sebagai akibat kelalaian Pejabat, pemohon bisa mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan Pejabat lain yang ditunjukkan Menteri.
- 10) Pengucapan sumpah atau janji setia dilakukan di hadapan Pejabat. Pejabat tersebut membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 11) Paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji, setiap Pejabat menyampaikan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia kepada Menteri. Sumpah dan pernyataan janji tersebut berbunyi, "Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, serta setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan membelanya dengan sungguh-sungguh dan akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus serta ikhlas".
- 12) Setelah mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia, pemohon wajib menyerahkan dokumen atau surat-surat keimigrasian atas namanya ke Kantor Imigrasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia.
- 13) Salinan Keputusan Presiden tentang pewarganegaraan serta berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari Pejabat tersebut menjadi bukti sah Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi seseorang yang memperoleh kewarganegaraan.
- 14) Menteri mengumumkan nama orang yang telah memperoleh kewarganegaraan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

7. Berbagai Masalah Kewarganegaraan

Asas *ius soli* atau *ius sanguinis* dapat dipilih oleh setiap negara yang berdaulat berdasarkan asas kewarganegaraan yang akan diadopsinya. Tidak adanya ketentuan dalam mempergunakan asas tersebut dapat menimbulkan dua kemungkinan dalam kewarganegaraan, yaitu seseorang bisa menjadi *apatride* atau *bipatride*.

Negara Indonesia pernah mengalami masalah dalam hal pewarganegaraan bagi warga negara Indonesia keturunan China. Peraturan kewarganegaraan China yang menggunakan asas *ius sanguinis*, sedangkan di Indonesia yang menggunakan dasar *ius soli*. Hal ini telah menimbulkan persoalan *dwi kewarganegaraan* di Indonesia, khususnya bagi warga negara Indonesia keturunan China.

Dwi Kewarganegaraan menimbulkan kesulitan bagi negara Indonesia dan China karena jumlah penduduk Indonesia keturunan China pada waktu itu kurang lebih 2 juta. Dengan masalah tersebut, baik Indonesia maupun China, sepakat bahwa persoalan ini harus diselesaikan dengan baik.

Persamaan derajat dari kedua bangsa, saling memberi manfaat, serta tidak campur tangan dalam politik dalam negeri masing-masing negara merupakan prinsip yang digunakan sebagai dasar penyelesaian. Pada tanggal 22 April 1955 diadakan kesepakatan, yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri masing-masing negara. Dari Indonesia diwakili Sunarjo, S.H. dan dari China diwakili Chou En Lai. Apada akhirnya, persetujuan dalam masalah dwi kewarganegaraan tercapai. Di Indonesia, hasil dari persetujuan tersebut ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 1958 berisi sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang mempunyai dwi kewarganegaraan wajib menentukan pilihannya, yaitu melepaskan kewarganegaraan China dan menjadi warga negara Indonesia atau tetap menjadi warga negara China dengan kehilangan kewarganegaraan Indonesia.
- b. Kewajiban memilih itu hanya dibebankan kepada orang dewasa (telah berumur 18 tahun atau pernah atau telah kawin).
- c. Pemilihan kewarganegaraan itu dilakukan dengan menyatakan kepada petugas-petugas negara kewarganegaraan yang hendak dipilihnya, baik secara tertulis maupun lisan, dengan disertai surat-surat keterangan tentang diri serta keluarganya.
- d. Anak-anak yang belum dewasa menyatakan pilihannya dalam waktu satu tahun setelah mereka menjadi dewasa.

Bagi dwi kewarganegaraan yang tidak menyatakan pilihannya dalam waktu 2 tahun berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a. Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan China jika ayahnya keturunan Cina.
- b. Ia dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia jika ayahnya keturunan Indonesia.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi sebanyak 3-5 orang dengan anggota anak laki-laki dan perempuan!
2. Tema diskusi adalah "Hubungan perbedaan antara UU Kewarganegaraan No. 62 Tahun 1958 dan UU No. 12 Tahun 2006". Bandingkan isi kedua undang-undang tersebut, dari segi kelebihan dan kekurangannya!
3. Tiap kelompok boleh menggunakan judul yang berbeda, sepanjang tema tetap sama.
4. Tulislah hasil diskusi kelompok Anda dan salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas. Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan! Mintalah Gurumu bertindak sebagai Moderator.
5. Kumpulkanlah hasil diskusi kelompok Anda disertai tanggapan dan komentar dari kelompok lain!



B. Persamaan Kedudukan Warga Negara dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

1. Persamaan Kedudukan Warga Negara

Pada dasarnya, keinginan berperilaku bebas sesuai dengan hasrat kemauannya, selalu dimiliki oleh manusia. Faktanya, mereka terikat oleh keterbatasan serta tanggung jawab kepada keluarga, lingkungan, masyarakat, maupun kepada negara. Begitu juga dengan dirimu, bukan? Sebagai pelajar tentu kamu terikat oleh tanggung jawab kepada keluarga maupun lingkungan sekolah.

Ciri khas dari bangsa Indonesia adalah memiliki budaya yang beranekaragam. Keberagaman suku bangsa, agama, golongan, akan menciptakan masyarakat dalam negara yang aman, tenteram, serta teratur sehingga dari disadari oleh setiap warga negara Indonesia. Warga negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negara.

Oleh karenanya, negara hendaknya menerapkan prinsip persamaan derajat, harkat, serta martabat bagi setiap warga negaranya sehingga terwujud rasa keadilan serta persamaan kedudukan bagi setiap warga negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap warga negara memiliki hubungan khusus dengan negaranya sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan antara warga negara dengan penyelenggara negara. Begitu pula antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Oleh karena itu, persamaan kedudukan warga negara itu sangat penting, sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

a. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Sebelum hak dan kebebasan dasar diakui secara sah, setiap manusia dijadikan alat oleh pihak yang berkuasa. Segala tindakan dan pikirannya hanya untuk kepentingan pihak yang berkuasa (pemerintah). Oleh sebab itu, setiap hak dasar dan kebebasannya diperjuangkan oleh rakyat. Hak-hak dasar tersebut meliputi hak-hak dalam lingkungan ekonomi, politik, budaya, sosial, hukum, dan pendidikan, serta kebebasan rohani maupun kebebasan pribadi. Sebagai negara demokrasi, negara Indonesia mengakui prinsip tersebut. Hak-hak serta kebebasan-kebebasan tiap warga negara, bahkan orang asing, dijamin oleh Negara Republik Indonesia, asalkan tidak melampaui batas kewajaran. Dalam arti, kepentingan rakyat banyak, batas keselamatan negara, batas kepribadian bangsa, batas kesusilaan, serta batas pertanggungjawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Persamaan kedudukan warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan secara kultural di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui kebudayaan masyarakat setempat, persamaan kedudukan itu telah ada, yang pada dasarnya memiliki kesamaan, seperti ramah tamah, gotong royong, rela berkorban, dan sebagainya.

b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945

Hak dan kewajiban timbul adanya persamaan kedudukan warga negara Indonesia dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum yang memberikan keleluasaan/ kebebasan kepada orang untuk melakukannya disebut dengan hak.

Berdasarkan pengertian ini, hak dibedakan atas hak asasi manusia serta hak warga negara. Hak yang bersifat mendasar dan melekat pada diri manusia sejak lahir serta keberadaannya dijamin oleh negara disebut dengan hak asasi manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh negara, dengan demikian bersifat universal, tetapi diatur dalam konstitusi. Hak yang ditentukan dalam konstitusi negara sehingga hak warga negara hanya berlaku pada negara yang bersangkutan disebut dengan hak warga negara. Contohnya, hak warga negara Filipina berbeda dengan hak warga negara Indonesia.

Kewajiban adalah suatu pembatasan yang timbul dalam hubungan antara manusia dengan sesamanya, manusia dengan kelompoknya (masyarakat), maupun manusia dengan negara. Kewajiban negara merupakan hak bagi setiap warga negara. Contohnya, negara berkewajiban menjamin kebebasan dalam beragama. Kewajiban warga negara merupakan hak negara.

Contohnya, setiap warga negara berkewajiban membela negara. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia diatur dalam UUD 1945, yaitu pada Pasal 27 ayat 1 yang berbunyi, "... segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum serta pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya". Pasal ini merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Selain hak warga negara Indonesia, ada pula kewajiban warga negara Indonesia untuk menjunjung hukum serta pemerintah tanpa perbedaan.

Hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang tercantum pada UUD 1945 adalah sebagai berikut.

1) *Hak Warga Negara Indonesia*

Di dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan kemerdekaan, kesejahteraan, serta pendidikan. Selain itu, dalam Batang Tubuh UUD 1945 juga dijelaskan sebagai berikut.

- (a) Pasal 27 ayat (1), "Setiap warga negara untuk memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan". Artinya, setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- (b) Pasal 27 ayat (2) mengenai hak atas pekerjaan dan penghidupan. Bunyi pasal tersebut adalah, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan serta penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".



Sumber : <http://gemilangsales.files.wordpress.com>

Gambar 5.2 Demonstrasi para buruh yang dijamin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat 2

- (c) Pasal 27 (3) mengenai hak dalam pembelaan negara. Bunyi pasal tersebut adalah, "Setiap warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- (d) Pasal 28A sampai dengan 28 ayat 1- 2, mengenai hak asasi manusia. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah:
- Pasal 28A, "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup serta kehidupannya.
- Pasal 28B:
- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
 - (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.
- Pasal 28C
- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berhak mendapatkan pendidikan serta memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan serta teknologi, seni, serta budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya serta demi kesejahteraan umat manusia.
 - (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, serta negaranya.
- Pasal 28D
- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
 - (2) Setiap orang berhak untuk bekerja sama mendapatkan imbalan serta perlakuan yang adil serta layak dalam hubungan kerja.
 - (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.
- Pasal 28 E
- (1) Setiap orang bebas memeluk agama serta beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan serta pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, serta meninggalkannya, serta berhak kembali.
 - (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran serta sikap sesuai dengan hati nuraninya.
 - (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat.
- Pasal 28 F
- Setiap orang berhak untuk berkomunikasi serta memperoleh informasi untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, serta menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, serta harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman serta perlindungan dari ancaman ketakutan berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir serta batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik serta sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan serta perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan serta manfaat yang sama guna mencapai persamaan serta keadilan.
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi serta hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28 I

- a. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran serta hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut ialah hak asasi manusia yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun.
- b. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun serta berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Pasal 30 (1), yaitu membahas hak atas pertahanan serta keamanan negara. Bunyi pasal tersebut adalah, "Tiap-tiap warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara".

Pasal 31 (1), yaitu mengenai hak atas pendidikan. Bunyi pasal tersebut adalah "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

2) *Kewajiban Warga Negara Indonesia*

Kewajiban setiap warga negara tercantum dalam pasal-pasal berikut ini.

- a) Pasal 23 A mengenai kewajiban membayar pajak. Bunyi pasal tersebut adalah "Pajak serta pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang".
- b) Pasal 27 (1) mengenai kewajiban menaati hukum serta pemerintah. Bunyi pasal tersebut adalah "Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum serta pemerintahan serta wajib menjunjung hukum serta pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

- c) Pasal 27 (3) mengenai kewajiban dalam membela negara. Bunyi pasal tersebut adalah "Setiap warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara".
- d) Pasal 28 J (1 - 2), mengenai kewajiban menghormati hak asasi manusia.
Pasal 28 J
Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara. Dalam menjalankan hak serta kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak serta kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, serta ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.
Pasal 30 (1)
Mengenai kewajiban dalam pertahanan serta keamanan negara, bunyi pasal tersebut yaitu : Tiap - tiap warga negara berhak serta wajib ikut serta dalam usaha pertahanan serta keamanan negara.
Pasal 31 (2),
Mengenai kewajiban untuk mengikuti pendidikan, bunyi pasal tersebut yaitu :
"Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar serta pemerintah wajib membiayainya."

Negara, sebagai pihak penyelenggara negara, juga memiliki kewajiban terhadap warga negaranya. Adapun kewajiban negara tersebut tercantum dalam UUD 1945.

a. Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat

Berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi serta keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b. Pada pasal-pasal yang Terdapat dalam Batang Tubuh UUD 1945

- 1) Pasal 23 (1), mengenai keuangan. Bunyi pasal tersebut adalah "Aggaran pendapatan serta belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang serta dilaksanakan.
- 2) Pasal 22 E (1), mengenai Pemilu. Bunyi pasal tersebut adalah "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun."

- 3) Pasal 29 ayat 1 serta 2, mengenai kewajiban pemerintah dalam hal agama serta kepercayaan. Bunyi pasal tersebut adalah:
- Ayat (1): "Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa".
 - Ayat (2): "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing serta untuk beribadat menurut agama serta kepercayaannya itu".
- 4) Pasal 31 ayat 3 sampai dengan ayat 5, mengenai pendidikan. Bunyi pasal tersebut adalah:
- Ayat (3): "Pemerintah mengusahakan serta menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan serta ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang."
 - Ayat (4): "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional."
 - Ayat (5): "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan serta teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama serta persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia."



Sumber : <http://www.sman2lubukpakam.sch.id/>

Gambar 5.3 Pemerintah wajib menyediakan fasilitas pendidikan bagi setiap warga negara.

- 5) Pasal 32 ayat 1 serta 2 mengenai kebudayaan. Bunyi pasal tersebut adalah:
- Ayat (1): "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara serta mengembangkan nilai-nilai budayanya.
- Ayat (2): "Negara menghormati serta memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional."
- 6) Pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat 5 mengenai perekonomian yang ditujukan bagi kemakmuran rakyat. Bunyi pasal tersebut adalah:
- Ayat (1): "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan."

- Ayat (2): "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara."
 - Ayat (3): "Bumi serta air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat."
 - Ayat (4): "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."
 - Ayat (5): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang."
- 7) Pasal 34 ayat 1 sampai dengan ayat 4, mengenai jaminan keadilan sosial. Bunyi pasal-pasal tersebut adalah:
- Ayat (1): "Fakir miskin serta anak terlantar dipelihara oleh negara."
 - Ayat (2): "Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat serta memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan."
 - Ayat (3): "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan serta fasilitas pelayanan umum yang layak."
 - Ayat (4): "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam Undang-Undang."

2. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Aturan mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tercantum dalam UUD 1945 bersifat singkat dan secara garis besar. Aturan lengkap serta terperinci diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya, hak serta kewajiban warga negara Indonesia pada bidang pendidikan diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003. Berikut ini uraian mengenai hak tersebut dalam berbagai bidang kehidupan bernegara.:

- a. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang hukum antara lain:
 - memiliki hak di dalam pengadilan untuk mengajukan banding, kasasi, dan grasi,
 - memiliki hak untuk didampingi pembela (pengacara) dalam pemeriksaan di kepolisian dan di pengadilan,
 - memiliki hak untuk mendapatkan informasi di bidang hukum,
 - memiliki hak untuk ikut berperan aktif menegakkan keadilan di bidang hukum.
 Sedangkan kewajiban warga negara adalah menaati hukum, baik di luar pengadilan maupun di dalam ruang pengadilan.
- b. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam bidang Pemerintahan, antara lain:
 - hak untuk mendapatkan informasi dari pemerintah,
 - hak untuk ikut berperan aktif dalam pemerintahan.
 Sedangkan kewajiban warga negara adalah menaati segala peraturan yang dibuat oleh pemerintah.



Berpikir Kritis

1. Tugas ini dikerjakan secara individu.
2. Susunlah kliping mengenai artikel persamaan hak dan kewajiban warga negara dengan melakukan telaah berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Tulislah ulasan mengenai segala sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban warga negara!
3. Carilah sumber dari televisi, koran, majalah, maupun internet! Jangan lupa cantumkan sumber datanya secara lengkap!
4. Jika perlu, sertakan gambar-gambar yang mendukung dengan menyebutkan sumbernya!
5. Waktu yang diberikan adalah 2 minggu. Selanjutnya, kumpulkan pada guru Anda untuk diberi penilaian! Guru akan mengambil sepuluh hasil kliping terbaik untuk diserahkan ke perpustakaan sekolah.



C. Upaya Menghargai Persamaan Kedudukan Warga Negara

Bangsa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan wawasan Nusantara yang senantiasa bergelora untuk kepentingan keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Sejarah pun telah mencatat bahwa nilai-nilai luhur budaya bangsa sangat menjunjung tinggi keberagaman bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Oleh karenanya, setiap warga negara Indonesia berupaya melakukan tindakan yang menghargai persamaan kedudukan warga negara berdasarkan faktor ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku bangsa.

1. Pengakuan Persamaan Kedudukan Warga Negara

Adanya persamaan kedudukan bagi setiap warga negara telah diakui di beberapa negara. Pada dasarnya, hak-hak dan kebebasan dasar dimiliki oleh setiap manusia. Bukti-bukti adanya sejarah perkembangan adanya pengakuan hak-hak dan kebebasan dasar manusia dapat diketahui sebagai berikut.

- a. Magna Charta (tahun 1215)
- b. Habeas Corpus Act (tahun 1679)
- c. Bill of Right (tahun 1689)
- d. The Declaration of Independence of America (tahun 1776)
- e. La Declaration des droits de l'homme et du citoyen (tahun 1789)
- f. The Four Freedoms of FD. Roosevelt (tahun 1941)

Menurut Harold J. Laski, bahwa prinsip persamaan kedudukan warga negara memiliki dua dimensi sebagai berikut.

- a. Tidak adanya keistimewaan khusus.
- b. Kesempatan yang sama diberikan kepada setiap orang.

Ada dua alasan utama pentingnya prinsip persamaan kedudukan warga negara, yaitu:

- a. Secara intrinsik, semua manusia diciptakan sama dan dikaruniai oleh sang Pencipta dengan hak-hak asasi.
- b. Setiap orang dewasa yang tunduk pada hukum suatu negara seharusnya dianggap cukup memenuhi syarat untuk dapat berpartisipasi didalam proses demokratis pemerintahan suatu negara.

Kemunculan demokrasi dikarenakan adanya suatu keinginan manusia untuk diperlakukan sama tanpa adanya penindasan dan perbedaan satu sama lain. Oleh sebab itu, bagi sebagian besar negara yang menganut demokrasi, persamaan merupakan suatu fondasi. Kedudukan warga negara Indonesia, baik asli maupun warga negara Indonesia keturunan (orang asing) diakui dan dijamin oleh negara Indonesia. Hal ini merupakan perwujudan sebuah negara yang berlandaskan Pancasila dan menganut sistem demokrasi serta sesuai dengan Pancasila sila kedua, "kemanusiaan yang adil dan beradab". Artinya, bahwa manusia memiliki harkat dan martabat sama. Selain itu, juga dijelaskan dalam UUD 1945 Pasal 27 (1) yang berbunyi, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Persamaan kedudukan itu meliputi berbagai bidang, baik bidang hukum dan pemerintahan, ekonomi, politik, pendidikan, serta sosial dan budaya. Hal ini memiliki arti bahwa persamaan kedudukan warga negara ini meliputi hak dan kewajibannya sebagai anggota dari negara Indonesia.

Dalam ketatanegaraan Indonesia, prinsip persamaan kedudukan bagi warga negara Indonesia diatur dalam konstitusi UUD 1945 Pasal 27 (1). Bentuk-bentuk persamaan kedudukan warga negara meliputi berbagai bidang kehidupan.

a. Dalam bidang hukum dan pemerintahan

Persamaan kedudukan warga negara dalam bidang hukum dan pemerintahan adalah setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama dan mendapatkan perlakuan yang adil oleh negara melalui aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang hukum, antara lain, adalah:

- 1) Setiap orang memiliki hak untuk tidak dituntut kedua kalinya dalam kasus yang sama (dalam hukum pidana).
- 2) Setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sama tanpa pandang bulu.
- 3) Setiap orang berhak untuk tidak bersalah sebelum adanya suatu keputusan dari hakim yang tetap.
- 4) Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 5) Setiap orang berhak mendapatkan bantuan hukum apabila berstatus sebagai tersangka/terdakwa.

Persamaan ini tercantum pada UU 1945 Pasal 28 D ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini antara lain:

- 1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 mengenai KUHAP
- 3) Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum.

Persamaan kedudukan di bidang pemerintah adalah bahwa warga negara diperlakukan sama oleh pemerintah. Artinya, diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pemerintahan antara lain, adalah:

- 1) Setiap orang berhak untuk menjadi pegawai negeri.
- 2) Setiap orang berhak untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.
- 3) Setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dari pemerintah.



Sumber : <http://www.detikfinance.com/>

Gambar 5.4 Menjadi Pegawai Negeri (PNS) merupakan hak setiap warga negara.

Persamaan kedudukan pada bidang pemerintahan ini tercantum dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 3 yang berbunyi, "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

b. Dalam bidang politik

Persamaan kedudukan dimiliki setiap warga negara Indonesia dalam bidang politik, antara lain, dalam hal berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tertulis. Persamaan kedudukan dalam bidang politik ini tercantum pada UUD 1945 Pasal 28 yang berbunyi, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang".

Berikut ini contoh persamaan kedudukan dalam bidang politik.

- 1) Setiap orang yang telah memenuhi persyaratan tertentu memiliki hak untuk memilih dan dipilih
- 2) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan partai politik
- 3) Setiap orang berhak mengikuti kampanye dalam pemilu sesuai dengan aspirasinya.



Sumber : <http://doniismanto.files.wordpress.com>

Gambar 5.5 Mengikuti kegiatan kampanye partai politik merupakan hak setiap warga negara

- 4) Setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya baik tertulis maupun lisan dalam sistem politik berupa dukungan atau penolakan terhadap suatu kebijakan tertentu dari pemerintah.
- 5) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Persamaan kedudukan dalam bidang politik ini tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini.

- 1) Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.
- 2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 mengenai partai politik
- 3) Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD, dan DPD.
- 4) Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

c. Dalam bidang ekonomi

Setiap warga negara diperlakukan sama dalam berbagai kegiatan ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk menjalankan kegiatan ekonomi demi kesejahteraan hidupnya.

Sesuai dengan pasal 33 ayat 4 bahwa warga Negara Indonesia menganut demokrasi ekonomi yang tujuan utamanya untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini sektor-sektor perekonomian yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara agar tidak terjadi monopoli di satu pihak. Meskipun demikian pihak swasta juga dapat ikut berperan dalam kegiatan perekonomian.

Di bawah ini merupakan contoh persamaan kedudukan dalam bidang ekonomi antara lain yaitu :

- 1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama mengenai akses sumber modal, bahan baku, teknologi.
- 2) Setiap orang memiliki hak yang sama dalam mengembangkan bisnis
- 3) Setiap orang berhak untuk mencari dan memperoleh pekerjaan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai akses mengenai perizinan dalam mendirikan perseroan terbatas (PT), usaha perbankan, Koperasi
- 4) Setiap orang berhak untuk mendapatkan informasi pasar

d. Dalam bidang keagamaan

Setiap warga negara diperlakukan sama dan dijamin oleh negara untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinan yang diyakininya. Dengan demikian semua warga negara Indonesia mendapatkan kesempatan yang sama dalam menjalankan aktivitas beragamanya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945, yaitu:

- 1) Pasal 28E ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraannya, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali".
- 2) Pasal 28E ayat 2 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

- 3) Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang keagamaan, antara lain, adalah:

- 1) Setiap orang berhak untuk menjalankan aktivitas keagamaannya/ kepercayaannya misal merayakan hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam, merayakan hari Natal bagi umat Kristen dan Katolik, merayakan hari raya Nyepi bagi umat Hindu, serta merayakan hari Waisak bagi umat Budha.
- 2) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.

e. Dalam bidang pendidikan

Kesempatan setiap warga Negara Indonesia dalam bidang pendidikan diperoleh dengan tanpa membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan adanya kesempatan yang sama, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya melalui pendidikan dan pengetahuan yang hingga akhirnya akan tercapai kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Persamaan kedudukan dalam pendidikan serta pemerintah pun memiliki kewajiban terhadap warga negaranya mengenai pentingnya suatu pendidikan bagi kesejahteraan bersama, hal ini telah ditegaskan dalam UUD 1945 yaitu pada pasal-pasal berikut ini.

- 1) Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
- 2) Pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang berbunyi:
 - a) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
 - b) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
 - c) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.
 - d) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
 - e) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pendidikan, antara lain, adalah:

- a) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah.

- b) Setiap orang berhak untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan misalnya dalam memilih dan mengembangkan bakat.
- c) Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh segala informasi mengenai pendidikan.

f. Dalam bidang sosial dan budaya

Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh jaminan sosial, yang meliputi kesehatan dan kesejahteraan. Demikian pula dalam bidang budaya, bahwa warga negara berhak untuk menjalankan aktivitas kebudayaannya dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri.

Persamaan kedudukan dalam bidang sosial budaya ini tercantum dalam UUD 1945 pada:

- 1) Pasal 28 C ayat 1 yang berbunyi "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia".
- 2) Pasal 28F yang berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
- 3) Pasal 28H ayat 1 yang berbunyi, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".
- 4) Pasal 28 H ayat 3 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat". Pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat".

Pemerintah pun memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga negara dalam bidang sosial budaya, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pada:

- 1) Pasal 32 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:
 - a) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.
 - b) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
- 2) Pasal 34 ayat 1 sampai dengan 3 yang berbunyi:
 - a) Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.
 - b) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
 - c) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang sosial budaya, antara lain, adalah:

- 1) Setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas umum dari pemerintah seperti listrik, air bersih, dan telepon.
- 2) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan penghidupan yang layak.
- 3) Setiap orang memiliki persamaan dalam memperoleh jaminan sosial.
- 4) Setiap orang berhak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, Puskesmas, asuransi kesehatan (Askes), dan kartu kesehatan bagi yang tidak mampu.
- 5) Setiap orang berhak untuk melakukan aktivitasnya dalam lingkungan sosialnya .
- 6) Setiap orang berhak untuk melakukan kegiatan yang berhubungan dengan kebudayaan, misalnya pada masyarakat Jawa mengenal istilah mitoni (upacara 7 bulanan bagi wanita hamil).
- 7) Setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan dalam hal bencana alam.
- 8) Setiap orang berhak memperoleh santunan bagi fakir miskin dan anak terlantar.
- 9) Setiap orang berhak untuk mengembangkan kebudayaannya.
- 10) Setiap orang berhak untuk menikmati hasil dari kebudayaan, misalnya melihat pertunjukan seni tari tradisional.

g. Dalam bidang pertahanan dan keamanan

Setiap warga negara berhak ikut serta dalam pertahanan negara serta memiliki kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Hal ini tercantum pada UUD 1945 pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- 1) "Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara".
- 2) "Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung". Serta tercantum pula pada pasal 27 ayat 3 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara". Selain tercantum dalam UUD 1945, keikutsertaan warga negara Indonesia dalam upaya bela negara diatur pula dalam UU No. 3 Tahun 2002.

Contoh persamaan kedudukan dalam bidang pertahanan dan keamanan, antara lain, adalah:

- 1) Setiap orang memiliki hak untuk memperoleh kesempatan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Negara Indonesia.
- 2) Setiap orang berhak untuk ikut serta dalam upaya bela negara.
- 3) Setiap orang memiliki kewajiban yang sama untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungannya.

2. Bentuk-Bentuk Penghargaan terhadap Persamaan Kedudukan Warga Negara

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan budaya serta memiliki wilayah yang terpisah-pisah. Hal ini berakibat Indonesia rentan terhadap berbagai risiko yang timbul, seperti konflik-konflik secara vertikal maupun horizontal. Konflik-konflik tersebut pada umumnya muncul karena adanya diskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu tindakan yang tidak adil karena adanya karakteristik tertentu, seperti agama, suku bangsa, status sosial ekonomi, pendidikan, gender, maupun keadaan fisik. Oleh karenanya, UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan telah mengatur persamaan kedudukan warga negara yang berupa hak-hak serta kewajiban-kewajiban warga negara. Akan tetapi, masih terdapat berbagai pelanggaran yang berupa diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari.

Demi menciptakan persamaan kedudukan di antara semua warga negara, perlu diadakan upaya-upaya dari pihak pemerintah, masyarakat, maupun individu.

a. Upaya dari Pemerintah

Pemerintah memberikan contoh keteladanan dalam kepemimpinan untuk menegakkan prinsip persamaan ini dengan pembuatan peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum secara konsisten dan adil sesuai dengan UUD 1945 dan peraturan perundangan-undangan.

b. Upaya dari Masyarakat

Dalam hubungan sosial, masyarakat harus menumbuhkan suatu sikap untuk bersedia menerima adanya kesetaraan berbagai kebudayaan. Di dalam masyarakat terdapat beraneka ragam budaya yang secara konsisten memperlakukan individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang memiliki identitas yang berbeda, seperti agama, suku bangsa, gender, golongan/status sosial ekonomi, dan budaya tanpa adanya diskriminasi.

c. Upaya dari Individu

Setiap orang perlu belajar dan melatih diri menumbuhkan sikap peduli dan memiliki solidaritas terhadap orang (individu) atau kelompok yang mendapatkan perlakuan secara diskriminatif.

Terciptanya persamaan kedudukan bagi setiap warga negara akan terwujud melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak. Pada kenyataannya, masih banyak hambatan yang menjadi penghalang terciptanya prinsip persamaan tersebut. Hambatan-hambatan yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari, seperti praktik KKN, masih banyak sikap diskriminatif dari para penegak hukum terutama pada orang-orang yang memiliki status sosial, ekonomi dan politik yang lemah, adanya individu atau sekelompok orang yang lemah, adanya individu atau sekelompok orang yang merasa dirinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kondisi seperti inilah yang harus diperbaiki dan dilakukan upaya-upaya seperti di atas. Tujuannya, untuk menciptakan masyarakat yang aman dan sejahtera. Sebagai warga negara yang baik, Anda wajib menegakkan prinsip persamaan kedudukan.

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi yang terdiri atas 4-5 orang dengan anggota laki-laki dan perempuan!
2. Berdiskusilah mengenai kasus-kasus di wilayah konflik di Indonesia, sebagaimana tercantum pada tabel di atas dan buatlah ulasan singkat!
3. Setiap kelompok boleh memilih wilayah konflik yang berlainan, tetapi tetap mengacu pada tema "Penyelesaian Konflik Horizontal di Masyarakat sebagai Landasan Kokoh bagi Persatuan Nasional".
4. Salah satu wakil kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas dan bergantian dengan kelompok lain. Mintalah kelompok lain memberikan tanggapannya!
5. Serahkan hasil diskusi kelompok Anda beserta tanggapan dari kelompok lain kepada guru untuk dinilai!



Rangkuman

1. Penduduk dan atau rakyat suatu negara terdiri dari warga negara dan warga asing. Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara. Setiap warga negara dilindungi hak-haknya oleh negara tanpa membedakan ras, agama, gender, budaya, dan suku.
2. Asas-asas kewarganegaraan dalam menentukan status kewarganegaraan seseorang adalah asas *Ius Sanguinis* (keturunan) dan asas *Ius Soli* (tempat lahir).
3. Masalah kewarganegaraan adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan (*apatride*) maupun kondisi seseorang yang memiliki kewarganegaraan ganda (*bipatride*).
4. Status kewarganegaraan seseorang diperoleh melalui proses kelahiran, pengangkatan, permohonan, pewarganegaraan, perkawinan, turut ayah dan atau ibu, serta pernyataan.
5. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia tercantum dalam UUD 1945 Pasal 27 sampai dengan Pasal 34.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

7. Persamaan kedudukan warga negara Indonesia meliputi berbagai aspek kehidupan, antara lain, dalam bidang hukum dan pemerintahan, politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Persamaan merupakan perwujudan kehidupan di dalam masyarakat yang saling menghormati dan menghargai orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
8. Untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara di Indonesia, ada sejumlah peluang dan hambatannya. Untuk itu, perlu upaya sepanjang hayat yang bisa dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara melalui gerakan antidiskriminasi.

○ UJI KOMPETENSI ○

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Salah satu contoh kewajiban warga negara adalah menaati peraturan lalu lintas. Hal tersebut merupakan kewajiban dalam bidang
 - a. pertahanan
 - b. budaya
 - c. ekonomi
 - d. hukum
 - e. sosial
2. Status penduduk dan bukan penduduk dibedakan berdasarkan hubungan seseorang dengan
 - a. hukum
 - b. pemerintah
 - c. kekuasaan
 - d. wilayah
 - e. sosial budaya
3. Naturalisasi Istimewa dari Presiden diberikan kepada warga negara asing karena jasa-jasanya. Hal ini harus mendapat persetujuan dari
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. Kejaksaan Agung
 - d. DPD
 - e. MA
4. Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku saat ini adalah
 - a. UU No. 12 Tahun 2006
 - b. UUD No. 11 Tahun 2006
 - c. UU No. 17 Tahun 2006
 - d. UU No. 20 Tahun 2006
 - e. UU No. 22 Tahun 2006

5. Bukan penduduk adalah mereka yang berada di dalam negara ...
 - a. memiliki pekerjaan selamanya
 - b. memiliki pekerjaan tetap
 - c. untuk selama-lamanya
 - d. untuk sementara waktu
 - e. sesuai keinginan
6. Berikut ini bukan penduduk pada suatu wilayah suatu negara, *kecuali*....
 - a. sukarelawan negara lain
 - b. wisatawan asing
 - c. atlet luar negeri yang sedang bertanding
 - d. duta besar negara asing
 - e. duta wisata
7. "Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara". Pendapat ini dikemukakan oleh
 - a. Austin Ranney
 - b. AS. Hikam
 - c. Undang-Undang No. 62 Tahun 1958
 - d. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006
 - e. Koerniatmanto
8. Kewajiban dan hak setiap warga negara dalam rangka pembelaan negara tercantum dalam UUD 1945
 - a. Pasal 21
 - b. Pasal 27
 - c. Pasal 28
 - d. Pasal 29
 - e. Pasal 30
9. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan disebut
 - a. Ius Soli
 - b. Stelsel aktif
 - c. Reputasi
 - d. Ius Sanguinis
 - e. Ius Gentium
10. Kewarganegaraan seseorang yang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya tanpa mengindahkan kewarganegaraan orang tuanya disebut asas ...
 - a. Repudiasi
 - b. Ius Soli
 - c. Ganda
 - d. Ius Sanguinis
 - e. Repudiasi
11. Contoh negara yang menganut asas ius sanguinis adalah
 - a. Jepang
 - b. Amerika Serikat
 - c. RRC
 - d. Indonesia
 - e. Prancis

12. Pemerolehan kewarganegaraan seseorang bukan karena pemberlakuan asas ius sanguinis dan ius soli dinamakan
- a. pengajuan warga negara
 - b. pernyataan menjadi warga negara
 - c. pewarganegaraan
 - d. proses hukum warga negara
 - e. permohonan warga negara
13. Pengelolaan penduduk menurut Indische Staats Regeling tahun 1927, berikut ini termasuk golongan timur asing bukan China, *kecuali*
- a. orang Mesir
 - b. orang Pakistan
 - c. orang Arab
 - d. orang India
 - e. orang Inggris
14. Seorang warga negara China menganut asas ius sanguinis dan memiliki anak di Amerika Serikat yang menganut asas ius soli, maka status kewarganegaraan anak itu adalah
- a. apatride
 - b. memperoleh satu kewarganegaraan
 - c. memperoleh dengan permohonan
 - d. bipatride
 - e. pengajuan warga negara
15. Cara mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi adalah dengan permohonan tertulis dan bermeterai lengkap ditujukan kepada
- a. Kedutaan Besar RI
 - b. Presiden
 - c. Menteri Luar Negeri
 - d. Menteri Dalam Negeri
 - e. Menteri Kehakiman
16. Hak yang sekaligus menjadi kewajiban bagi warga negara Indonesia menurut UUD 1945, terdapat pada
- a. Pasal 27 ayat 1
 - b. Pasal 26
 - c. Pasal 30
 - d. Pasal 27 ayat 2
 - e. Pasal 28
17. Di dalam bidang hukum, setiap warga negara Indonesia mendapatkan perlindungan hak asasi yang sama karena
- a. setiap warga negara berhak untuk membela diri di depan pengadilan serta didampingi pembela
 - b. setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pejabat pemerintah
 - c. setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk membela negara.
 - d. setiap warga negara yang dianggap bersalah diajukan ke pengadilan
 - e. setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan.

18. Berikut ini termasuk kewajiban negara terhadap warga negaranya, *kecuali*...
- menaati aturan hukum
 - memberikan jaminan hak asasi warga negara
 - memberikan pendidikan pada warga negaranya
 - memberikan kebebasan dalam bentuk memeluk agama/kepercayaan
 - memberikan jaminan mengenai sistem hukum yang adil
19. Hak-hak warga negara pada pasal 28 UUD 1945 merupakan hak dalam bidang
- pertahanan
 - ekonomi
 - sosial
 - hukum
 - politik
20. Prinsip nondiskriminasi dalam UUD 1945 tercantum pada
- Pasal 28 A
 - Pasal 28 C
 - Pasal 28 E
 - Pasal 28 F
 - Pasal 28 I

B. Jawablah pertanyaan berikut dengan jelas dan benar!

- Status kewarganegaraan seorang keturunan bangsa A (yang menganut asas ius sanguinis) yang lahir di negara B (yang menganut ius soli). Bagaimana status orang tersebut? Jelaskan jawabanmu!
- Apakah arti penting status kewarganegaraan bagi seseorang? Jelaskan!
- UU No. 62 Tahun 1958 dan UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan tentang perolehan kewarganegaraan Indonesia bagi seseorang karena perkawinan. Jelaskan caranya!
- Dalam mewujudkan persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai upaya. Jelaskan upaya tersebut!
- Tiap-tiap WNI memiliki hak dasar yang diatur menurut UUD 1945. Jelaskan hak-hak tersebut!

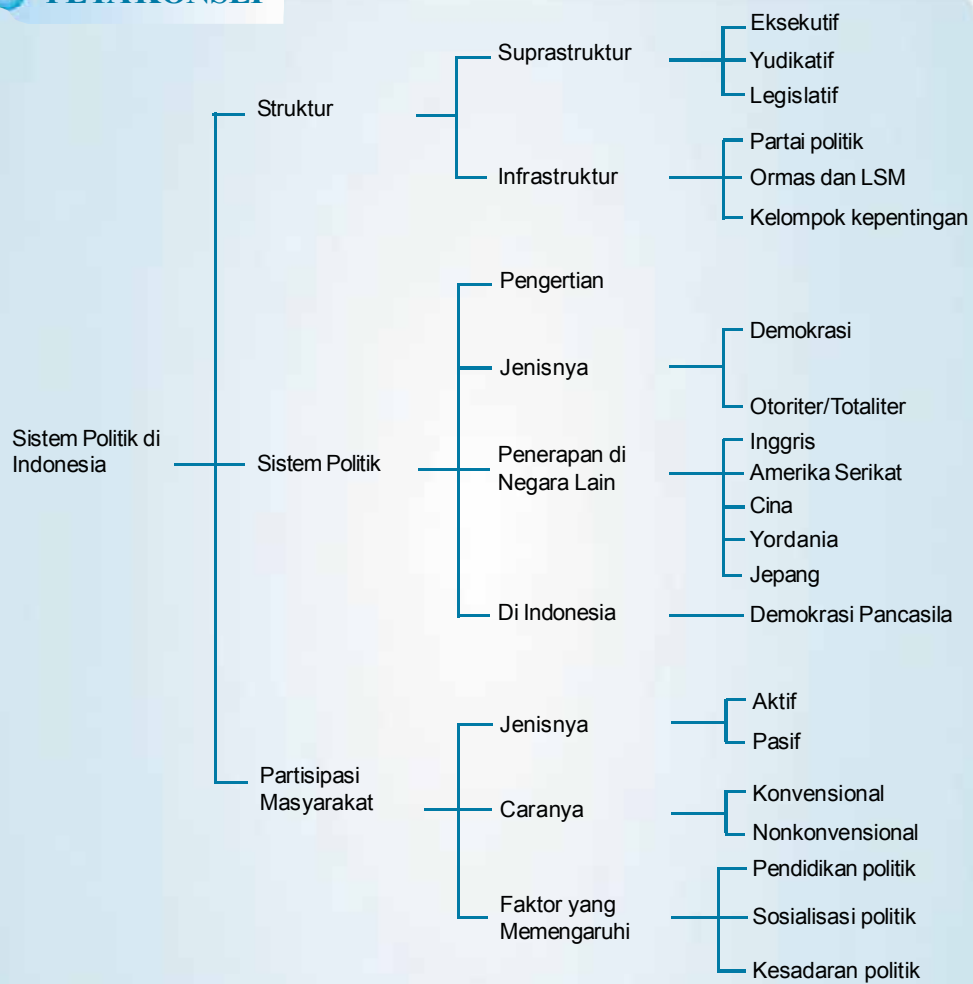
BAB

6

Sistem Politik di Indonesia



PETA KONSEP



Dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat suatu hubungan yang dilakukan antarmanusia sehingga berpengaruh terhadap segala aspek kehidupan. Hubungan antarmanusia tersebut di antaranya hubungan politik dalam satu kesatuan sistem. Dalam sistem politik inilah manusia membentuk hubungan yang mengarah pada suatu masyarakat politik. Peran masyarakat sangat diperlukan dalam sistem politik di Indonesia untuk mengembangkan lembaga-lembaga politik yang ada di daerah maupun di pusat.

Pembahasan tentang sistem politik berarti pembahasan tentang negara yang, biasanya, lebih menekankan pada unsur-unsur pembentuk negara, tujuan, fungsi, bentuk, dan sebagainya. Pembahasan negara sebagai sistem politik ini lebih menekankan pada dimensi dalam kehidupan bernegara. Kegiatan kehidupan bernegara ini dapat dilihat sebagai rangkaian kegiatan manusia dalam bidang politik yang terkait satu sama lain sehingga membentuk sistem.



KATA SANG TOKOH

"Kebebasan adalah ketika rakyat bisa berbicara, sedangkan demokrasi adalah pemerintah mendengarkan."

*Alastair Farrugia
Sumber: Prana.org*

A.

Suprastruktur dan Infrastruktur Politik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (2008), politik adalah (1) pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, seperti tentang sistem pemerintahan, dasar negara; (2) segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain; (3) cara bertindak dalam menghadapi atau menangani suatu masalah. Pada suatu negara, struktur politik merupakan pelebagaan hubungan organisasi antara komponen yang membentuk politik serta berhubungan dengan alokasi nilai yang mempunyai sifat-sifat otoritatif yang dipengaruhi distribusi serta penerapan kekuasaan. Suatu permasalahan politik dapat dibahas melalui bermacam-macam pendekatan, antara lain, struktur politik, kekuasaan, komunikasi politik, pendidikan politik, konstitusi, sosialisasi politik, serta pemikiran dan kebudayaan politik.

Pada sistem politik demokratis terdapat sebuah struktur politik yang terstruktur menjadi subsistem suprastruktur politik serta subsistem infrastruktur politik. Suprastruktur politik berhubungan dengan suasana kehidupan politik negara yang dijadikan sebagai mesin politik resmi pada tiap-tiap negara. Suprastruktur inilah yang menjadi penggerak politik formal.

Pada masa lalu di negara yang berstruktur kerajaan, suprastruktur politik ini dikendalikan oleh keluarga kerajaan. Pada masa sekarang, di negara yang menganut sistem demokrasi, suprastruktur dikendalikan oleh pada tokoh elit politik yang memegang kekuasaan negara. Tahukah Anda yang dimaksud dengan infrastruktur politik? Segala sesuatu yang berhubungan dengan suasana kehidupan politik masyarakat, itulah yang disebut infrastruktur.

Komponen infrastruktur berhubungan dengan masyarakat yang berjumlah sangat besar, tetapi dengan sukarela bersedia untuk diperintah serta diatur. Untuk menyalurkan aspirasi politik serta bermacam-macam kepentingan masyarakat, dibentuklah partai politik, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

1. Memahami Suprastruktur Politik

Suprastruktur politik merupakan lembaga politik yang dibuat oleh negara untuk melakukan tugas (kekuasaan) negara. Suprastruktur politik yang menganut ajaran Trias Politika, dibagi menjadi tiga.

a. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk melakukan peraturan perundang-undangan.

b. Kekuasaan Yudikatif

Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan untuk mempertahankan peraturan perundang-undangan.

c. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk menyusun dan membentuk peraturan perundang-undangan.

Sistem ketatanegaraan di Indonesia juga menganut ajaran Trias Politika, dalam pengertian pembagian kekuasaan. Hal ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945, yaitu Bab III tentang kekuasaan Pemerintahan Negara, Bab VII tentang DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan Bab IX tentang kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan Legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan Eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu para menteri, sedangkan kekuasaan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung, lembaga peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi.

Suprastruktur politik menurut sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 tidak menganut sistem negara mana pun. Akan tetapi, merupakan sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia. Adapun suprastruktur politik menurut UUD 1945 sebelum amandemen adalah sebagai berikut.

- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- Presiden
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Dewan Pertimbangan Agung (DPA)
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)



KATA SANG TOKOH

"Semua hak demokratis tak berarti bila warga negara tidak mempunyai pengetahuan dan keterampilan untuk menjalankan hak-hak mereka dan mempunyai sifat-sifat pribadi yang dituntut bagi pelaksanaannya secara bertanggung jawab."

Ralf Dahrendorf

Sumber: en.wikipedia.org

f. Mahkamah Agung (MA)

Lembaga negara ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu lembaga tertinggi negara yang dipegang oleh MPR serta lembaga-lembaga tinggi negara yang meliputi Presiden, DPR, DPA, BPK, dan MA. Suprastruktur politik berdasarkan Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi (MK)
- h. Komisi Yudisial

Sebelum ada perubahan, pada amandemen UUD 1945 tidak mengenal adanya lembaga tertinggi negara. Lembaga negara tersebut mempunyai posisi yang setara. Secara institusional, lembaga negara adalah lembaga kenegaraan yang berdiri sendiri dan tidak menjadi bagian dari yang lain. Meskipun demikian, di dalam menjalankan tugas (wewenang), lembaga negara tersebut saling terkait. Oleh karenanya, di dalam UUD 1945 tidak didasarkan pada pemisahan kekuasaan secara materiil, tetapi pemisahan kekuasaan secara formal. Berikut ini lembaga negara yang termasuk suprastruktur politik di Indonesia.

a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga tertinggi negara yang anggotanya terdiri atas anggota DPR yang berjumlah 550 orang serta anggota DPD yang berjumlah 128 orang. DPR mewakili rakyat dari partai politik peserta pemilu serta DPD merupakan wakil daerah provinsi. DPR maupun DPD dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.



Sumber : <http://putrajeumpa.files.wordpress.com>

Gambar 6.1 Presiden SBY dan Ketua MPR sesaat setelah pelantikan Presiden oleh MPR RI periode 2009 - 2014.

Ketentuan mengenai lembaga MPR ini tertuang dalam UUD 1945 Bab II Pasal 2 dan Pasal 3 berikut ini.
Pasal 2:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat serta anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3:

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar.

Tugas dan wewenang MPR diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mengubah dan menetapkan UUD.
- 2) Melantik Presiden serta Wakil Presiden berdasarkan hasil Pemilu dalam sidang paripurna MPR.
- 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR.
- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.
- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dari dua paket calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama serta kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari.
- 7) Menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR.

b. Presiden dan Wakil Presiden

Presiden dan wakil presiden adalah lembaga tinggi negara. Presiden dan Wakil Presiden memegang kekuasaan Eksekutif.

Sejak tahun 2004, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pemilihan secara langsung diharapkan agar kekuasaan Eksekutif mempunyai kekuasaan tersendiri sehingga dapat menyusun pemerintahan yang kuat serta program mandiri yang ditawarkan langsung kepada rakyat pemilih tanpa harus tergantung kepada lembaga legislatif.

Ketentuan mengenai Presiden dan Wakil Presiden ini termuat di dalam UUD 1945 Bab III Pasal 4 hingga Pasal 16. Kekuasan Presiden di dalam menyelenggarakan kehidupan negara sehari-harinya memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan adalah sebagai berikut.
 - a) Membentuk kabinet dengan mengangkat menteri-menteri serta memberhentikan menteri-menteri.
 - b) Membentuk dewan pertimbangan untuk memberikan nasihat serta pertimbangan kepada presiden.
 - c) Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang.
 - d) Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR.
- 2) Kekuasaan presiden sebagai kepala negara adalah sebagai berikut.
 - a) Memegang kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
 - b) Memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi
 - c) Memberi tanda jasa dan tanda kehormatan



Sumber : <http://www.mediacreative.co.id/>

Gambar 6.2 Pemberian tanda kehormatan kepada orang yang dianggap berjasa kepada negara merupakan satu kewenangan presiden.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR merupakan lembaga tinggi negara dan berfungsi sebagai pemegang kekuasaan legislatif seperti yang termuat dalam UUD 1945 Bab VII Pasal 19 sampai Pasal 22B. DPR memiliki fungsi sebagai berikut.

- 1) Fungsi Legislatif, yaitu membentuk undang-undang.
- 2) Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan.
- 3) Fungsi Anggaran, yaitu menetapkan anggaran dan pendapatan belanja negara.

Berdasarkan fungsinya, DPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut.

- 1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.
- 3) Menerima dan membahas usulan rancangan undang-undang yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu serta mengikutsertakannya dalam pembahasan.
- 4) Memerhatikan pertimbangan DPD atas Rancangan Undang-Undang APBN serta rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- 5) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta kebijakan pemerintah.

- 6) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- 7) Menetapkan APBN bersama dengan memerhatikan pertimbangan DPD.
- 8) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.
- 9) Memberikan pertimbangan kepada presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, serta memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan .
- 10) Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas serta mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau pembentukan undang-undang.
- 11) Memberikan persetujuan kepada presiden atas pengangkatan serta pemberhentian anggota Komisi Yudisial.
- 12) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.
- 13) Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi serta mengajukannya kepada presiden untuk ditetapkan.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga tinggi negara. Dalam UUD 1945 Pasal 2 dinyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, serta diatur lebih lanjut dengan undang-undang."

Kedudukan DPD tidak setara dengan DPR. Secara implisit, kedudukan DPD berada di bawah DPR serta Presiden. Dengan demikian, tugas dan wewenang DPD adalah sebagai berikut.

- 1) Mengajukan RUU kepada DPR yang berkaitan dengan hal-hal berikut ini.
 - a) Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
 - b) Otonomi daerah
 - c) Perimbangan keuangan pusat dan daerah
 - d) Hubungan pusat dan daerah
 - e) Pengelolaan sumber daya alam serta sumber daya ekonomi lainnya.
- 2) Melakukan pembahasan terhadap RUU yang diajukannya dan memberi pertimbangan kepada DPR atas RAPBN yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, serta agama.
- 3) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Prinsip ketidaksetaraan kedudukan DPD diatur dalam UUD 1945 Pasal 22C Ayat (3) jo ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2003, bahwa jumlah seluruh anggota DPD tidak melebihi sepertiga jumlah anggota DPR. Apabila dipandang baik dari sudut kelembagaan maupun keanggotaan, DPD merupakan komponen ketatanegaraan yang baru. Selain itu, sehubungan dengan kepentingan masing-masing daerah yang tidak akan sama akan menimbulkan ketidaksamaan pada visi masing-masing anggota DPD. Pada akhirnya mereka akan berjuang sendiri-sendiri untuk kepentingan daerahnya..

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga tinggi negara. Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. Ketentuan mengenai BPK tercantum dalam UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23E sampai 23 G. Adapun tugas dan kewenangan BPK adalah sebagai berikut.

- 1) Memeriksa semua pelaksanaan keuangan negara.
- 2) Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara.

Hasil dari tugas BPK tersebut diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai kewenangannya.



KATA SANG TOKOH

"Demokrasi tidak menjamin kesamaan kondisi, demokrasi hanya menjamin kesamaan kesempatan."

Irving Kristol

Sumber: awang5.files.wordpress.com

f. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah lembaga tinggi negara pemegang kekuasaan yudikatif dan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh MA beserta lembaga-lembaga peradilan yang berada di bawahnya, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, serta Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan mengenai MA tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 24A. Menurut UUD 1945, syarat bagi calon Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Calon Hakim Agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya ditetapkan sebagai Hakim Agung oleh Presiden.

Tugas dan kewenangan MA adalah sebagai berikut.

- 1) Mengadili pada tingkat kasasi.
- 2) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.
- 3) Memiliki wewenang lain yaitu memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.

g. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah lembaga tinggi negara yang mempunyai kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini disebut juga kekuasaan yudikatif, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi ini tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24C. Tugas dan wewenang dari MK ini adalah sebagai berikut.

- 1) Menguji suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945.
- 2) Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- 5) Memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh presiden serta/atau wakil presiden menurut UUD 1945.

Anggota Mahkamah Konstitusi atas 9 orang anggota Hakim Konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang oleh DPR, serta 3 orang oleh Presiden. Ketua serta wakil ketua Mahkamah Konstitusi di antara Hakim Konstitusi itu dipilih melalui suatu pemilihan.



Sumber : <http://feriamsari.files.wordpress.com>

Gambar 6.3 Kesembilan Hakim Mahkamah Konstitusi sedang bersidang.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial bukan merupakan kekuasaan kehakiman (kekuasaan yudikatif), tetapi merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki hubungan dengan masalah kehakiman. Komisi Yudisial memiliki tugas (fungsi) untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka (independent) melalui pencalonan Hakim Agung serta pengawasan terhadap hakim yang terbuka dan menegakkan kehormatan serta keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim.

Ketentuan mengenai Komisi Yudisial tercantum dalam UUD 1945 Bab IX Pasal 24B, yaitu sebagai berikut.

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri. Lembaga ini berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat serta diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

- (4) Susunan, kedudukan, serta keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Diskusi Ilmiah

1. Buatlah kelompok diskusi yang berjumlah 3- 4 orang dengan anggota laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
"Segala bentuk sistem otoritarianisme bertentangan dengan ideologi Pancasila dan Hak Asasi Manusia."
3. Untuk memudahkan jalannya diskusi, carilah artikel atau berita tentang negara yang menganut Sistem Otoritarian. Diskusikan bersama kelompok Anda mengenai alasan pemakaian sistem pemerintahan tersebut, bagaimana penerapannya di negara tersebut, dan berbagai dampak yang ditimbulkan!
4. Tulislah hasil diskusi bersama kelompok Anda! Salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas dan mintalah kelompok lain menanggapi! Guru Anda akan bertindak sebagai moderator.
5. Kumpulkanlah hasil diskusi beserta catatan tanggapan dari kelompok lain, lalu serahkan kepada guru untuk diberi penilaian!

2. Memahami Infrastruktur Politik

Di masyarakat juga terdapat suatu lembaga politik. Lembaga politik yang ada di masyarakat ini disebut dengan infrastruktur. Lembaga ini meliputi partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan. Dalam masyarakat, infrastruktur politik ini memiliki peran (fungsi) sebagai berikut.

- a. Komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik asosiasi, institusi atau pikiran intra golongan maupun sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor pemerintahan.
- b. Pendidikan politik untuk meningkatkan pengetahuan politik masyarakat agar mereka dapat berperan maksimal dalam sistem politik. Hal ini sesuai dengan paham demokrasi, bahwa masyarakat (warga negara) harus mampu menjalankan partisipasi politik.
- c. Melakukan seleksi pemimpin dengan cara menyelenggarakan pemilihan pemimpin atau calon pemimpin bagi masyarakat.
- d. Agregasi kepentingan merupakan penyertaan segala aspirasi serta pendapat masyarakat kepada pemegang kekuasaan yang berwenang supaya tuntutan/dukungan menjadi perhatian dan bagian dari suatu keputusan politik.

- e. Mempertemukan beragam kepentingan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pendapat, kepentingan, dan peran serta yang berbeda dalam lingkungan serta kondisi masyarakat untuk dapat ditampung dalam suatu aspirasi yang sama.

Untuk mengetahui komponen-komponen infrastruktur, coba Anda perhatikan uraian di bawah ini.

a. Partai Politik (*Political Party*)

Pada awalnya, partai politik muncul di negara-negara Eropa Barat. Partai politik dianggap sebagai manifestasi sistem politik yang sudah modern dan sedang dalam proses memodernisasikan diri. Dewasa ini, di negara baru pun, partai politik sudah menjadi lembaga politik yang biasa dijumpai. Berikut ini definisi partai politik menurut beberapa ahli.

1) *R.H. Soltou*

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir, bertindak sebagai suatu kesatuan politik yang memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, menguasai pemerintahan, serta melaksanakan kebijaksanaan umum.

2) *Carl J. Friedrich*

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya. Berdasarkan penguasaan ini, anggota partai mendapatkan kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

3) *Sigmund Neumann*

No	Partai Politik	Perolehan Suara	Kursi Parlemen	
			Perhitungan 1	Revisi
1	Demokrat	20,85%	148	150
2	Golkar	14,45%	108	107
3	PDIP	14,03%	93	95
4	PKS	7,88%	59	57
5	PAN	6,01%	42	43
6	PPP	5,32%	39	37
7	PKB	4,94%	26	27
8	Gerindra	4,46%	30	26
9	Hanura	3,77%	15	18
	Jumlah	100%	560	560

Sumber : KPU tgl 9 Mei 2009

Sumber : <http://politikana.com>

Gambar 6.4 Sembilan partai politik yang berhasil lolos dari Electoral Treshold, sehingga ditetapkan KPU berhak mempunyai kursi di DPR RI (periode 2009 - 2014).

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda.

Dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi, partai politik memiliki beberapa fungsi sebagai berikut.

- 1) Partai sebagai sarana rekrutmen politik.
- 2) Partai sebagai sarana sosialisasi politik.
- 3) Partai sebagai sarana pengatur konflik.
- 4) Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Sistem kepartaian pada suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut.

1) *Sistem Multipartai*

Sistem multipartai ini muncul karena adanya keanekaragaman dalam komposisi masyarakat negara tersebut, yaitu keragaman ras, agama, suku bangsa, kebudayaan, maupun ideologi yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Dengan demikian, pola multipartai lebih mencer-

minkan keanekaragaman budaya dan politik. Negara-negara penganut sistem multipartai, antara lain, Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan, Belanda, Perancis, Jepang, Thailand, dan Swedia.

2) *Sistem Partai Tunggal*

Sistem partai tunggal artinya hanya ada satu-satunya partai dalam negara tersebut. Beberapa negara yang menganut sistem partai tunggal, antara lain, Pantai Gading, Guinea, Kuba, Korea Utara, Mali, RRC, Uni Soviet (sekarang sudah tidak ada).

3) *Sistem Dwi Partai*

Sistem dwi partai adalah negara yang menganut dua partai atau beberapa partai, tetapi dengan peranan jaminan dari dua partai. Dalam sistem ini, partai-partai dibagi dalam partai yang berkuasa (memenangkan pemilu) dan partai oposisi (kalah dalam pemilu). Contoh: Amerika Serikat dengan Partai Republik yang beroposisi dengan Partai Demokrat..

Berkembangnya partai politik di Indonesia dimulai sejak zaman Belanda sebagai suatu manifestasi bangkitnya kesadaran nasional. Pola kepartaian pada masa itu menunjukkan keanekaragaman. Ada yang bertujuan sosial, seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah. Ada yang menganut asas politik berdasarkan agama, seperti Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Katolik, dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo). Ada juga partai-partai yang mendasarkan diri pada suatu ideologi tertentu, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang berasaskan Nasionalis dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berasaskan Komunis. Pada masa penjajahan Jepang, kegiatan partai politik tidak diperbolehkan, hanya golongan Islam yang diperbolehkan dengan membentuk Partai Masyumi.



KATA SANG TOKOH

"Kemampuan manusia untuk mewujudkan keadilan membuat demokrasi mungkin dibutuhkan, tetapi kecenderungan manusia untuk bertindak tidak adil membuat demokrasi mutlak dibutuhkan."

Reinhold Niebuhr
Sumber: www.derungs.org

Sejak kemerdekaan Republik Indonesia sampai saat ini terdapat berbagai perkembangan partai politik di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1) *Pada Masa Demokrasi Liberal (1945 - 1959)*

Pada masa ini ditandai adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Peranan partai-partai politik sangat dominan dalam menentukan arah tujuan negara melalui badan perwakilan. Masa ini diakhiri dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959.

2) *Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959 - 1966)*

Pada masa ini ditandai dengan adanya persaingan (rivalitas) dua kubu, yaitu antara Soekarno (Presiden RI) yang didukung oleh partai-partai berhaluan Nasionalis, PKI yang didukung oleh partai-partai berhaluan sosialis dengan pihak Militer (yang dimotori oleh TNI AD). Saat itu partai politik memiliki posisi tawar (bargaining position) yang lemah sehingga kurang menunjukkan aset yang berarti dalam pencatutan politik di Indonesia. Periode ini diakhiri dengan Pemberontakan G 30 S / PKI pada tanggal 30 September 1965.

3) *Pada Masa Orde Baru (1966 - 1998)*

Pada masa ini adalah masa pemerintahan Soeharto (Presiden RI kedua), yang melakukan "pembenahan" dalam sistem politik, antara lain, jumlah partai politik dengan menyederhanakan partai politik (Fusi) menjadi tiga, yaitu :

- a) PPP (Partai Persatuan Pembangunan) berdasarkan ideologi Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Partai Islam.
- b) Golkar (Golongan Karya) berdasarkan karya serta keadilan sosial.
- c) PDI (Partai Demokrasi Indonesia) berdasarkan demokrasi, nasionalis dan keadilan, yaitu Parkindo, Partai Katolik, PNI, Murba, dan PKI.

Dengan demikian kedudukan partai politik lemah, karena adanya kontrol yang ketat dari lembaga eksekutif. Hal ini berdampak pada lembaga perwakilan yang penuh dengan intervensi dari kekuasaan eksekutif.

4) *Masa Reformasi (1998 - Sekarang)*

Pada masa ini merupakan masa setelah jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Reformasi membawa perubahan dalam sistem politik. Dengan demikian juga terdapat perubahan dalam kedudukan partai politik. Partai politik diberi kesempatan untuk hidup kembali serta mengikuti pemilu yang pertama setelah masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1999 dengan diikuti oleh banyak partai politik.



Sumber : <http://politikana.com>

Gambar 6.5 Memasuki masa Reformasi, "Eforia Politik" melanda Indonesia, hal ini ditandai dengan adanya 48 partai politik peserta Pemilu tahun 1999.

Hal ini juga dapat dilihat pada lembaga DPR yang beranggotakan Partai Politik yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian pula Presiden serta Wakil Presiden juga diusung dari partai politik serta dipilih langsung oleh rakyat (sejak PEMILU 2004).

b. Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat disebut Civil Society adalah organisasi yang dibuat oleh masyarakat dan memiliki sifat mandiri yang tidak tergantung pada siapa pun sehingga memiliki kebebasan. Anggota dari Organisasi Kemasyarakatan (ormas) serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) bersifat sukarela. Kegiatan dari Organisasi Kemasyarakatan serta Lembaga Swadaya Masyarakat bermacam-macam. Ada yang bergerak pada bidang HAM, Gender (masalah persamaan hak perempuan), politik, pemberantasan KKN, agama, dan sebagainya.

Sejak masa akhir Orde Baru hingga memasuki masa Reformasi banyak bermunculan LSM serta Ormas, yang memberikan peran serta yang baik bagi pemerintah, yaitu sebagai pengontrol guna membatasi penyalahgunaan dalam kewenangan oleh penyelenggara negara serta peran yang baik pula bagi masyarakat untuk melindungi hak-hak pribadi serta memberikan pendidikan kewarganegaraan.

Unjuk Kerja

Setelah memahami tentang berbagai infrastruktur politik, lakukan kegiatan di bawah ini!

1. Lakukan kunjungan dan wawancara terhadap pengurus LSM tersebut! Isi wawancara meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasinya, sasaran dan tujuannya, bidang yang digelutinya, serta program-programnya yang telah dan akan dilaksanakannya.
2. Berikanlah ulasan singkat menurut pendapat Anda!
3. Ketiklah dengan rapi hasil kerja Anda, lalu serahkan kepada guru untuk dinilai!

c. Kelompok Kepentingan (*Interest Group*)

Kelompok kepentingan adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan, sikap, dan kepercayaan yang sama untuk mengorganisasikan diri dalam melindungi serta memperjuangkan kepentingan atau tuntutan kelompok itu. Kegiatan dari kelompok kepentingan ini berhubungan dengan yang lebih terbatas melalui sasaran yang monolitik serta intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Kelompok kepentingan, dalam hal tertentu, seringkali mencari dukungan maupun melakukan negosiasi dengan partai politik dengan tujuan ikut memperjuangkan kepentingan yang ingin dicapai oleh kelompok tersebut.

Kelompok kepentingan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Kepentingan yang sama yang menyatukan orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu.
- 2) Kumpulan orang yang terorganisasi atas nama satu atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan.
- 3) Setiap aktivitas yang dilakukan akan mengatasnamakan masyarakat mengingat fungsinya sebagai artikulator kepentingan dalam masyarakat.
- 4) Aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk mendapat jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik.
- 5) Setiap aktivitas kelompok kepentingan selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.
- 6) Adanya berbagai variasi kelompok kepentingan yang bergantung pada karakteristik organisasi dari kelompok kepentingan.

Kelompok-kelompok kepentingan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa golongan berikut ini.

1) *Kelompok Non Asosiasional*

Kelompok non asosiasional adalah kelompok kepentingan yang mempunyai kegiatan bersifat temporer (kadang kala). Kelompok ini jarang yang terorganisir secara rapi sehingga hanya berwujud kelompok keluarga, regional, dan status.

2) *Kelompok Anomik*

Kelompok anomik adalah kelompok kepentingan yang terbentuk di antara unsur-unsur di dalam masyarakat secara spontan (bersifat seketika). Oleh sebab itu, kelompok anomik tidak memiliki nilai serta norma yang mengatur.

Kelompok ini sering overlap

(tumpang tindih) dengan bentuk seperti kerusuhan, demonstrasi, dan tindak kekerasan politik. Kelompok ini juga dapat terbentuk tidak spontan, melainkan direncanakan oleh kelompok kepentingan.

3) *Kelompok Institusional*

Kelompok institusional adalah kelompok yang bersifat formal serta memiliki fungsi sosial atau politik. Kelompok ini menyatakan kepentingannya sendiri ataupun mewakili kepentingan kelompok lain dalam masyarakat.



KATA SANG TOKOH

"Setiap orang yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakannya merupakan kebenaran abadi! Mereka cenderung melakukannya sampai batas mengizinkan."

Montesquieu

Sumber: mycityblogging.com

4) *Kelompok Asosiasional*

Kelompok asosiasional adalah kelompok yang meliputi serikat buruh, paguyuban etnik, dan persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok agama, perkumpulan usahawan, dan sebagainya.

Dalam aktivitasnya, kelompok ini memiliki ciri khas menyatakan suatu kepentingan dari suatu kelompok khusus, menggunakan tenaga profesional, dan memiliki prosedur teratur untuk memutuskan kepentingan serta tuntutan. Pada masa Orde Baru, kelompok kepentingan tidak memiliki keleluasaan karena para pemegang kekuasaan negara atau pemerintah cukup kuat mengendalikan politik. Akibatnya dalam kehidupan politik warga negara menjadi terhambat proses kedewasaannya. Hal ini berbeda dengan masa sekarang. Ketika reformasi, kehidupan politik berkembang dengan leluasa, sehingga partisipasi anggota masyarakat dapat tumbuh dengan baik ke arah positif.

5) *Kelompok Penekan*

Kelompok penekan adalah institusi politik yang dipergunakan oleh masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dengan tujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kelompok penekan memiliki kedudukan yang dapat memaksa pihak yang ada di dalam pemerintahan untuk melakukan sesuatu ke arah yang diinginkan. Beberapa cara yang digunakan, antara lain, dengan propaganda dan persuasi.

Dalam kehidupan politik, kelompok penekan bisa muncul lebih dominan dari partai politik. Pada saat peranan (fungsi) dari partai politik tidak dapat diharapkan dalam mengangkat suatu isu sentral yang diperjuangkan. Dalam kondisi seperti itu, kelompok penekan ini dapat menciptakan suatu gambaran yang baik kepada masyarakat. Contohnya, menampilkan program aksi sosial, aktivitas rekreatif, olahraga, kepemudaan, aksi untuk menumbuhkan kesadaran politik masyarakat, serta kegiatan menerbitkan laporan pada media massa. Kelompok penekan memiliki orientasi yang bersifat dari bawah ke atas, sedangkan kelompok kepentingan memiliki orientasi yang bersifat dari atas ke bawah.

d. Media Massa

Media massa adalah sarana komunikasi yang memiliki peranan untuk memberitahu kepada masyarakat tentang ide, buah pikiran, perasaan seseorang/sekelompok warga, kejadian/peristiwa yang disampaikan secara tertulis, seperti surat kabar dan majalah maupun lisan, seperti radio, televisi, dan internet.



Sumber : <http://photoprana.files.wordpress.com>

Gambar 6.6 Talk show di radio sebagai wahana masyarakat untuk mengungkapkan ide, pikiran, atau gagasan.

b. Pengertian politik

Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu *polis* yang memiliki arti "negara kota". Politik adalah kegiatan suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan dari sistem itu serta melaksanakan tujuan-tujuan itu. Pengertian ini dikemukakan oleh Prof. Miriam Budiardjo.

Adapun pengertian politik dari beberapa ahli adalah sebagai berikut.

1) Ramlah Surbakti

Tokoh ini memberikan lima hal pengertian politik sebagai berikut.

- a) Politik adalah usaha-usaha warga negara untuk membicarakan serta mewujudkan kebaikan bersama.
- b) Politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan.
- c) Politik adalah segala hal yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat.
- d) Politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan pelaksanaan kebijakan umum.
- e) Politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

2) Austin Ranney

Dalam bukunya "*A Study of The General Election*" (1993), tokoh ini memberikan pengertian politik sebagai proses pembuatan kebijakan pemerintahan (disebut sebagai *public policy* atau kebijakan umum)

3) Harold D. Laswell

Dalam bukunya "*On Political Sociology*" (1996), tokoh ini memberikan pengertian bahwa politik itu menyangkut proses penentuan *who get what, when, and how* (siapa mendapat apa, kapan, serta bagaimana)

Setelah Anda memahami tentang pengertian sistem dan pengertian politik menurut beberapa ahli, berikut ini merupakan pengertian sistem politik menurut para ahlinya.

1) Robert A. Dahl

Dalam bukunya "*On Political Equality*" (2006), Robert A Dahl mengatakan bahwa sistem politik adalah pola yang tetap dari hubungan antara manusia serta melibatkan sesuatu yang luas serta berarti tentang kekuasaan, aturan-aturan, dan kewenangan.

2) Drs. Sukarna

Dalam bukunya "*Sistem Politik Indonesia*" (1990), ia mengatakan bahwa sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, dan lain-lain yang membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu dengan negara serta hubungan negara dengan negara.

3) Rusdi Kartaprawira

Dalam bukunya "*Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar*" (2004), ia mengatakan bahwa sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungannya satu sama lain yang menunjukkan suatu proses tetap.

Berdasarkan uraian di atas, sistem politik menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu dalam masyarakat. Fungsi tersebut adalah membuat keputusan-keputusan kebijaksanaan yang mengikat tentang alokasi dari nilai materiil maupun non materiil. Keputusan kebijakan ini diarahkan untuk tercapainya tujuan masyarakat. Dengan sistem politik, tujuan masyarakat dirumuskan untuk dilaksanakan oleh keputusan-keputusan kebijaksanaan.

Dalam suatu sistem politik yang konkret, terjadi adanya input dan output. Input adalah tuntutan dan aspirasi masyarakat serta dukungan dari masyarakat, sedangkan output adalah keputusan serta kebijaksanaan dari pemerintah yang bersifat mengikat. Dalam sistem politik ini membahas peran lembaga negara, yaitu legislatif, eksekutif, serta yudikatif. Selain itu, juga lembaga-lembaga yang terdapat dalam masyarakat, yaitu partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok penekan, organisasi masyarakat, dan pers.

2. Macam-macam Sistem Politik

Setiap sistem politik memiliki cara sendiri-sendiri. Dengan demikian, suatu sistem politik memiliki banyak klasifikasi yang diperkenalkan oleh para ahli, yaitu sebagai berikut.

a. Almond Powel

Dalam bukunya *“Comparative Politics: System, Process, and Policy”*, tokoh ini membagi sistem politik dalam tiga kategori.

- 1) Sistem primitif yang intermittent
Sistem ini mencerminkan adanya suatu kebudayaan yang samar-samar dan bersifat agama.
- 2) Sistem tradisional dengan struktur-struktur bersifat pemerintahan politik yang berbeda-beda dan suatu kebudayaan subjek.
- 3) Sistem modern dimana struktur-struktur politik yang berbeda-beda berkembang serta mencerminkan aktivitas budaya politik partisipan.

b. Samuel Huntington

Dalam bukunya *“The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order”*, tokoh ini membagi sistem politik dengan bertolak ukur pada pemegang kekuasaan negara dan hasil dari penggunaan kekuasaan tersebut.

- 1) Sistem Politik Demokrasi
Pihak yang berkuasa terdiri dari banyak orang serta kekuasaan negara tersebut terbatas pada bidang-bidang tertentu dan sebagian masyarakat memiliki kebebasan untuk mengatur kehidupannya sendiri.
- 2) Sistem Politik Nondemokrasi
Pihak yang berkuasa terdiri dari beberapa orang atau kelompok orang serta kekuasaan negara meliputi seluruh aspek kehidupan negara dan masyarakat. Sistem politik ini meliputi monarkhi absolut, kediktatoran/otoriter, rezim militer, rezim komunis.

c. Fred W. Riggs

Dalam bukunya *“A Critique of Red W. Rigg’s Politic of Public Administration”*, tokoh ini membagi sistem politik dengan bertolak ukur pada empat institusi utama dalam sistem politik, yaitu eksekutif, birokrasi, legislatif, serta partai politik. Berdasarkan hal tersebut, sistem politik dibagi menjadi enam, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Sistem Politik Asepali*
Sistem politik yang tidak memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian.
- 2) *Sistem Politik Prosepali*
Sistem politik yang tidak memiliki birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif.
- 3) *Sistem Politik Ortosepali*
Sistem politik yang tidak memiliki legislatif dan sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif serta birokrasi.
- 4) *Sistem Politik Heterosepali*
Sistem politik yang tidak memiliki sistem kepartaian, tetapi memiliki eksekutif, birokrasi, dan legislatif.
- 5) *Sistem Politik Metasepali*
Sistem politik yang dimiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, serta sistem kepartaian.
- 6) *Sistem Politik Suprasepali*
Sistem politik yang memiliki eksekutif, birokrasi, legislatif, dan sistem kepartaian serta ditambah dengan organ negara lainnya.



Berpikir Kritis

Susunlah tugas menulis esai mengenai sistem politik yang diterapkan oleh negara-negara ASEAN (pilih 3 negara saja)! Langkah-langkah kerjanya sebagai berikut.

1. Carilah artikel atau berita disertai gambar, baik dari koran, majalah, maupun internet!
2. Bandingkan isi berita/artikel tentang ketiga negara tersebut dan buatlah ulasannya yang berkaitan dengan sistem ekonomi dan sosial negara tersebut!
3. Ketiklah tugasmu dengan rapi, minimal 5 halaman folio!
4. Kumpulkan kepada guru Anda untuk dinilai.

3. Sistem Politik di Berbagai Negara

Sistem politik yang banyak dianut oleh negara-negara di dunia saat ini adalah sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter/totaliter (mendemokrasi). Sebelum mempelajari sistem politik diberbagai negara, berikut ini penjelasan mengenai kedua macam sistem politik tersebut. Menurut Prof. Miriam Budardjo dalam buku “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, suatu sistem politik terdapat 4 variabel berikut ini.

a. Sistem Politik Demokrasi

Seorang tokoh politik bernama Austin Ranney dalam bukunya "*A Study of The General Election*" mengatakan bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang diorganisasikan berdasarkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, persamaan politik, konsultasi kepada rakyat, serta pemerintah mayoritas. Sebagai suatu sistem, terdapat beberapa prinsip yang diterapkan pada sistem Politik Demokrasi. Setiap prinsip tersebut saling berhubungan. Adapun prinsip-prinsip tersebut menurut Austin Ranney adalah sebagai berikut.

1) *Kedaulatan Rakyat*

Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan di dalam membuat keputusan-keputusan pemerintah yang pokok berada pada seluruh rakyat serta tidak pada orang-orang tertentu maupun golongan yang berkuasa.

2) *Persamaan Politik*

Setiap orang yang menjadi warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi didalam proses pembuatan suatu keputusan politik negara.

3) *Konsultasi Kepada Rakyat*

Setiap keputusan mengenai suatu kebijakan yang paling sesuai untuk mewujudkan kepentingan rakyat harus dibuat oleh rakyat sendiri dan bukan penguasa, tanpa ada pertanggungjawaban kepada rakyat.

4) *Pemerintah Mayoritas*

Setiap keputusan yang diambil untuk menentukan suatu kebijakan bagi kepentingan rakyat menurut pendapat yang benar tanpa mengabaikan pendapat yang minoritas.

Dengan demikian, ketentuan dari pihak mayoritas berhak untuk mengambil keputusan tetapi harus mengingat pihak minoritas, karena merupakan rakyat. Sistem politik demokrasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- 1) Legitimasi pemerintah didasarkan bahwa pemerintah tersebut mewakili keinginan rakyatnya. Artinya, pemerintah patuh pada aturan hukum didasarkan pada penekanan yang dilakukan merupakan kehendak rakyat.
- 2) Pengaturan yang mengorganisasikan perundingan (*bargaining*) untuk memperoleh legitimasi dilaksanakan melalui pemilihan umum yang kompetitif. Pemilihan dipilih dengan interval yang teratur serta pemilih dapat memilih di antara beberapa alternatif calon. Dalam praktiknya, paling tidak terdapat dua partai politik yang mempunyai kesempatan untuk menang sehingga pilihan tersebut benar-benar bermakna.



Sumber : <http://karawanginfo.com>

Gambar 6.7 Penyelenggaraan Pemilu merupakan indikator suatu negara yang menganut paham demokrasi.

Media massa sebagai sarana komunikasi di dalam negara demokrasi memiliki peran (fungsi) sebagai berikut.

- 1) Pemberitahuan informasi atau berita secara objektif.
- 2) Memberikan peringatan dini
- 3) Alat kontrol atau pengawasan sosial masyarakat (warga negara) terhadap penyelenggara negara.
- 4) Pelapor pertanggungjawaban penyelenggara negara
- 5) Sarana pembentuk pendapat umum.

Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru, kebebasan media massa sangat terkekang. Hal ini bertolak belakang dengan masa Reformasi saat ini yang memberikan keleluasaan/kebebasan media massa.

Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan kualitas pemberitaan dan kepatuhan etika jurnalistik sehingga dalam penyampaian berita memiliki keakuratan, berbobot, dan dapat dipertanggungjawabkan. Media massa ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Keberadaan media massa pada masa Reformasi ini diatur secara khusus di dalam UU No. 40 Tahun 1999.

e. Tokoh Politik (Political Figure)

Tokoh politik adalah seseorang yang menjadi pusat perhatian dalam bidang politik. Seseorang memiliki peranan yang sangat penting di dalam dinamika politik yang telah berlangsung maupun yang sedang berlangsung. Tokoh-tokoh politik di Indonesia, antara lain:

- 1) Soekarno (Presiden RI pertama)
- 2) Abdurrahman Wahid/Gus Dur (Presiden RI keempat serta Ketua Dewan Syuro PKB)
- 3) Megawati (Presiden RI kelima serta Ketua Umum PDIP)
- 4) Amien Rais (Ketua MPR serta Pembina PAN)
- 5) Dr. Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI keenam dan ketujuh)



B. Perbedaan Sistem Politik di Berbagai Negara

1. Sistem Politik

Untuk menjelaskan apa serta bagaimana sistem politik, terlebih dahulu dijelaskan mengenai "sistem" serta pengertian "politik".

a. Pengertian Sistem

Dalam buku *“Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia”* (2002), Prof. Pamudji mengatakan, bahwa sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau terorganisir, suatu himpunan atau perpaduan hal-hal atau bagian-bagian yang membentuk suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks atau utuh. Pengertian ini dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang melibatkan hal-hal yang berkaitan antara satu dengan lainnya.

- 3) Sebagian besar orang dewasa dapat ikut serta dalam proses pemilihan, baik sebagai pemilih maupun calon untuk menduduki jabatan penting.
- 4) Penduduk memilih secara rahasia serta tanpa dipaksa.

Penyertaan prinsip-prinsip lain yang terdapat dalam sistem politik demokrasi yaitu sebagai berikut.

- 1) Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda.
- 2) Pemerintahan konstitusional
- 3) Pemerintahan berdasarkan hukum (*rule of law*)
- 4) Pengawasan terhadap administrasi negara
- 5) Mekanisme politik yang berubah antara kehidupan politik masyarakat dengan kehidupan politik pemerintah
- 6) Kebijakan pemerintah dibuat oleh badan perwakilan politik tanpa paksaan dari lembaga mana pun.
- 7) Penempatan pejabat pemerintahan dengan merit sistem bukan *poil* sistem
- 8) Pemerintahan mayoritas
- 9) Pemerintahan dengan diskusi
- 10) Pemilihan umum yang bebas
- 11) Partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya
- 12) Manajemen terbuka
- 13) Pers yang bebas
- 14) Pengakuan terhadap hak-hak minoritas
- 15) Perlindungan terhadap hak asasi manusia;
- 16) Peradilan yang bebas serta tidak memihak.

b. Sistem Politik Otoriter atau Totaliter

Sistem ini disebut juga dengan istilah kediktatoran atau sistem politik nondemokrasi. Pada sistem politik ini mempunyai bentuk pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi dipegang oleh sekelompok kecil elite atau satu orang saja. Ciri-ciri khusus yang dimiliki sistem politik otoriter ini adalah sebagai berikut.

- 1) Negara memiliki satu ideologi yang mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya, yang meliputi kehidupan rohani dan fisik serta setiap warga harus tunduk pada ideologi tersebut.
- 2) Negara hanya memiliki satu partai massa tunggal.
- 3) Adanya kontrol yang ketat warga negaranya melalui kekuatan militer.
- 4) Pengendalian terpusat atas seluruh sektor ekonomi oleh pemerintah melalui jajaran birokrasi.
- 5) Pemerintah mengawasi seluruh kegiatan penduduk serta menjalankan sistem teror yang luas melalui sistem pengawasan polisi rahasia yang memanfaatkan teknologi modern.
- 6) Kontrol ketat dan monopoli semua media massa oleh penguasa serta partai penguasa.

Selain beberapa pendapat di atas, sistem politik ini juga memiliki prinsip-prinsip berikut ini.

- 1) Pemusatan kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu. Ketiga kekuasaan itu dipegang dan dijalankan oleh satu lembaga.
- 2) Satu partai politik, yaitu dalam pemerintah ada beberapa partai, tetapi hanya ada satu partai yang memonopoli kekuasaan.
- 3) Pemerintahan tidak berdasar konstitusional, yaitu pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan. Konstitusi tersebut memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah.
- 4) Rule of power atau prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan serta ketidaksamaan di depan hukum.
- 5) Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit.
- 6) Pemilihan umum yang tidak demokratis. Pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah.
- 7) Badan peradilan yang tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
- 8) Tidak ada kontrol atau pengendalian terhadap administrasi serta birokrasi. Birokrasi pemerintah yang sangat besar sehingga menjangkau seluruh wilayah kehidupan bermasyarakat.
- 9) Mekanisme dalam kehidupan politik dan sosial tidak dapat berubah serta bersifat sama.
- 10) Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan serta penggunaan paksaan.
- 11) Manajemen serta kepemimpinan yang tertutup serta tidak bertanggung jawab.
- 12) Menekan serta tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara.
- 13) Tidak adanya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. Meskipun ada pers, keberadaannya sangat dibatasi.
- 14) Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran atas hak asasi manusia.

4. Penerapan Sistem Politik

Sistem politik suatu negara berbeda-beda, meskipun memiliki ideologi yang sama. Misalnya, ideologi komunis yang diterapkan di RRC, Rusia, dan sebagainya. Negara-negara tersebut menganut paham yang sama, tetapi sistem politik yang diterapkan berbeda. Berikut ini beberapa contoh penerapan sistem politik yang ada di beberapa negara.

a. Sistem Politik Inggris

Bentuk negara Inggris adalah kerajaan. Negara Inggris ini tidak memiliki UUD (konstitusi) yang tertulis. Hal ini menjadi suatu keuntungan bagi pemerintah untuk menyesuaikan tindakan lembaga-lembaganya terhadap segala perubahan dan tuntutan dengan mudah di dalam prosedurnya. Masyarakat Inggris adalah masyarakat yang menghormati kebebasan dan hak asasi manusia serta simbol-simbol kekuasaan negara, yaitu Ratu dan pemerintah.

Dalam sistem politik Inggris ini, Anda diajak mempelajari badan eksekutif, parlemen, dan pemilu.

1) *Badan Eksekutif*

Badan Eksekutif di Inggris ada dua jenis. Pertama, Ratu/Raja yang memiliki kekuasaan bersifat simbolis, sehingga kedudukannya tidak dapat diganggu gugat, tetapi seorang Ratu/Raja secara formal harus memberikan persetujuan resmi terhadap peraturan perundang-undangan yang telah disahkan oleh parlemen serta bertanggung jawab atas penunjukan Perdana Menteri dan pembubaran parlemen sebelum masa pemilihan.



Sumber :

<http://washingtonbriefs.files.wordpress.com>

Gambar 6.8 Ratu Elizabeth II (1926 - sekarang)

Kedua, Perdana Menteri yang memiliki kekuasaan memimpin para menteri. Menteri-menteri kabinet berasal dari partai mayoritas dan menjadi anggota Majelis Rendah. Menurut konvensi, menteri harus diangkat dari anggota badan legislatif yang telah membuktikan dalam pemilu tersebut menteri itu dipercaya oleh rakyat. Perdana menteri memiliki kekuasaan di dalam sistem politik di Inggris, yaitu memimpin kabinet, memimpin majelis rendah, memimpin partai mayoritas, dan menghubungkan dengan raja.

2) *Parlemen*

Parlemen terdiri atas dua kamar, yaitu majelis rendah dan majelis tinggi. Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat atau disebut *House of Commons*, yang beranggotakan 630 orang. Perdana Menteri sebagai pemimpin partai mayoritas dalam majelis rendah dan pimpinan (ketua) dari politisi-politisi partai yang duduk dalam badan eksekutif ini dapat mengontrol parlemen. Para anggota parlemen dari partai mayoritas dapat berperan untuk mendukung segala rencana dan kebijakan kabinet untuk mempertahankan kekuasaan partainya dalam badan eksekutif.

Majelis tinggi disebut dengan *House of Lords*, yaitu badan majelis yang anggotanya memiliki kedudukan secara turun-temurun dan ada pula yang ditunjuk untuk jabatan seumur hidup karena jasa-jasa kepada masyarakat dan negara. Jumlah anggota majelis tinggi adalah 900 orang.



KATA SANG TOKOH

Orang-orang mengatakan bahwa saya adalah orang suci yang tersesat dalam dunia politik. Faktanya, saya seorang politikus yang sedang berusaha sekuat tenaga menjadi orang suci.

Mahatma Gandhi

Sumber: www.geocities.com

3) Pemilihan Umum

Pemilihan umum di Inggris menggunakan sistem distrik. Setiap distrik memiliki satu wakil dalam majelis rendah. Dengan demikian, jumlah anggota majelis rendah yang akan dipilih harus sama dengan jumlah distrik.



Berpikir Kritis

Setelah Anda memahami Sistem Politik di Inggris, lakukan tugas berikut ini.

1. Susunlah ulasan mengenai perbedaan penerapan sistem politik di negara Inggris dengan sistem politik di negara Indonesia! Ulasan diketik komputer dengan rapi sebanyak 10-15 halaman kertas ukuran kuarto.
2. Isi ulasan meliputi sistem ideologi yang dianut, sistem parlemen yang dianut, kekuasaan eksekutifnya, dan penerapan ideologi masing-masing negara dalam berbagai bidang kehidupan (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tatanan pemerintahannya).
3. Anda dapat melengkapi data-data ulasan dari berbagai sumber, misalnya internet, buku-buku pengetahuan umum, majalah, surat kabar, atau sumber-sumber lainnya. Jangan lupa sebutkan sumbernya secara lengkap dan jelas!
4. Tugas ini dikerjakan selama dua minggu. Selanjutnya, kumpulkan kepada guru Anda untuk diberi penilaian!

b. Sistem Politik di Amerika Serikat

Bentuk negara Amerika Serikat adalah republik federal, dengan 50 negara bagian, yaitu 49 negara bagian dan satu distrik. Sistem pemerintahannya adalah presidensiil sehingga presiden menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan.

Di Amerika Serikat, UUD merupakan alat/instrumen utama bagi pemerintah dan sebagai kekuasaan hukum tertinggi. Selama 200 tahun, UUD tersebut telah menuntut bagi proses perubahan berbagai lembaga pemerintahan dan dasar bagi stabilitas politik dan bidang-bidangnya yang lain, seperti ekonomi, sosial, dan kebebasan individu. Dalam sistem politik Amerika Serikat ini Anda akan diajak mempelajari mengenai badan legislatif, eksekutif, yudikatif, serta sistem check and balance.

1) Badan Legislatif

Badan legislatif disebut dengan congress dan memiliki dua kamar, yaitu Senat dan House of Representative. Teori politik dan politik praktis menghasilkan senat Amerika Serikat yang merupakan surat yang terdapat di dalam negara yang berbentuk federal dengan sistem presidensiil dengan anggota 100 orang yang berasal dari 50 negara bagian. Setiap negara bagian diwakilkan oleh dua orang senator dengan cara diadakan pemilihan secara langsung.

Dengan demikian senat merupakan lembaga perwakilan negara bagian, sedangkan *House of Representative* adalah merupakan lembaga perwakilan rakyat (DPR). Senat dan House of Representative memiliki kekuasaan untuk membuat undang-undang, menetapkan APBN serta mengawasi jalannya pemerintahan.

2) *Eksekutif*

Kekuasaan eksekutif dipegang dan dijalankan presiden serta dibantu oleh wakil presiden dan menteri-menteri. Kekuasaan presiden adalah sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara. Presiden Amerika Serikat selain memegang kekuasaan dalam pemerintahan juga memiliki kekuasaan yang lain, yaitu menjadi pemimpin tertinggi militer, memilih pejabat eksekutif dan para hakim, memveto rancangan undang-undang yang telah disetujui badan legislatif, memberi atau menolak grasi, serta mengadakan hubungan luar negeri.

3) *Yudikatif*

Kekuasaan yudikatif ini dipegang dan dijalankan oleh Supreme Court (Mahkamah Agung) serta lembaga-lembaga peradilan di bawahnya. Lembaga yang kedudukannya di bawah Supreme Court adalah peradilan negara bagian yang ada di setiap negara bagian. Pengadilan distrik yang merupakan peradilan terendah dan Hakim Keliling memiliki tugas untuk mendengarkan segala keluhan yang ada di pengadilan distrik.

4) *Check and Balance*

- Rakyat memilih presiden untuk memimpin pemerintahan yang akan menjalankan public policy.
- Di dalam Congress terdapat dua kamar, yaitu *House of Representative* (DPR) yang dipilih oleh rakyat secara nasional menurut sistem distrik dan senat yang dipilih oleh negara bagian. Setiap keputusan yang diambil oleh Congress harus mendapatkan persetujuan dari senat dan *House of Representative*.
- Undang-undang yang dibuat oleh Congress harus memperoleh persetujuan dari presiden. Dalam hal ini menunjukkan bahwa Presiden ikut serta dalam urusan legislatif. Undang-undang yang tidak memperoleh persetujuan dari presiden tidak dapat diundangkan sehingga terjadilah veto presiden terhadap rancangan undang-undang. Untuk itu, presiden harus memberikan alasannya.
- Meskipun presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, bila melanggar undang-undang dan hak asasi manusia maupun melakukan suatu kejahatan besar, maka Congress berhak memperhentikan (memecat) presiden.
- Presiden dalam memilih dan mengangkat para menteri atau anggota kabinet harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota senat (kabinet Amerika Serikat bukan kabinet parlementer, tetapi kabinet presidensial).
- Presiden dalam mengangkat Jaksa Agung harus mendapat persetujuan dari 2/3 anggota senat.

- Mahkamah Agung memiliki kewajiban untuk meneliti undang-undang yang dibuat oleh Congress.

PROFIL TOKOH

BARACK OBAMA

Barack Hussein Obama II lahir di Honolulu, Hawaii, tanggal 4 Agustus 1961. Pada umur 48 tahun, dia sudah menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44. Obama menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat sejak 20 Januari 2009, menggantikan George Walker Bush. Sebelumnya, ia sebagai Senator Junior dari Illinois, lalu menang dalam Pemilu Presiden 2008 pada tanggal 4 November 2008. Pada tahun 2009, Obama diumumkan sebagai pemenang anugerah Penghargaan Perdamaian Nobel karena mempromosikan diplomasi internasional untuk memecahkan masalah-masalah internasional.



Obama adalah keturunan Afrika-Amerika pertama yang menjabat Presiden Amerika Serikat, yang dicalonkan oleh sebuah partai politik besar Amerika. Obama adalah lulusan Universitas Columbia dan Sekolah Hukum Universitas Harvard. Selanjutnya ia menjabat sebagai presiden Harvard Law Review. Obama bekerja sebagai koordinator masyarakat dan menjabat sebagai pengacara hak sipil sebelum menjadi Senat Illinois selama tiga kali, tahun 1997-2004. Ia mengajar hukum konstitusional di Sekolah Hukum Universitas Chicago, pada tahun 1992-2004. Ia terpilih sebagai Senat pada bulan November 2004 dengan 70 persen suara. Obama mengumumkan kampanye presidennya pada bulan Februari 2007 dan dicalonkan pada Konvensi Nasional Demokrat 2008 dengan senator Delaware, Joe Biden sebagai pasangan kampanye.

Pada tanggal 4 November 2008, Barack Obama sukses mengalahkan rivalnya, senator John McCain, dari Partai Republik dan menjadi Presiden Amerika Serikat ke-44 sekaligus orang kulit hitam pertama sebagai Presiden Amerika Serikat.

Sumber : *id.Wikipedia.com*

Diskusi Ilmiah

1. Bentuklah kelompok diskusi sejumlah 4-5 orang, yang terdiri atas anak laki-laki dan perempuan!
2. Diskusikan tema berikut ini!
"Mampukah bangsa Indonesia menerapkan sistem politik seperti negara Amerika Serikat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara?"
3. Buatlah laporkan hasil diskusi kelompok Anda, lalu presentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan dan catatlah tanggapan dari kelompok lain tersebut! Guru Anda akan bertindak sebagai moderator.
4. Serahkan laporan hasil diskusi Anda disertai catatan tanggapan dari kelompok lain kepada guru Anda untuk diberi penilaian!

c. Sistem Politik RRC

Cina adalah negara dengan wilayah dan penduduk terbesar di dunia serta memiliki kekayaan sejarah kebudayaan dan peradaban yang tinggi. Kehidupan politik di RRC merupakan suatu produk dari masa revolusi yang panjang, yaitu antara tahun 1911-1949 yang meliputi tiga perombakan sistem politik dengan cara kekerasan.

1) *Revolusi Pertama*

Revolusi Pertama terjadi pada tahun 1911, yaitu menggantikan sistem kerajaan yang telah ada selama berabad-abad

2) *Revolusi Kedua*

Revolusi Kedua terjadi pada tahun 1928 dengan terbentuknya suatu pemerintahan pusat yang baru di bawah kekuasaan Kuomintang (Partai Nasionalis).

Kekuasaan ini menggantikan sistem pemerintahan Panglima Perang yang terpecah-pecah pada masa awal Republik Cina dengan sistem dominasi satu partai yang terorganisir dan terpusat. Pemimpin Kuomintang adalah Jendral Chiang Kai Sek.

3) *Revolusi Ketiga*

Revolusi Ketiga terjadi pada tahun 1949 yang membentuk sistem komunis dengan menggulingkan kekuasaan Kuomintang dan menjadikan Partai Komunis Cina sebagai partai penguasa tunggal di seluruh daratan China. Pemimpin Partai Komunis China yang pertama adalah Mao Tse Tung.

RRC resmi diproklamasikan pada tanggal 1 Oktober 1949 dan merupakan sistem politik baru. Akan tetapi tradisi politik pramodern Cina secara resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching yang memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan sekarang. Berdirinya negara Cina atau lebih dikenal dengan RRC dimulai sejak Partai Komunis Cina berkuasa di bawah pimpinan Mao Zedong, yang melalui tahapan-tahapan menjadikan Cina sebagai negara dengan demokrasi baru dan masyarakat sosialis, Rakyat Cina menerima dan menjalankan ajaran Karl Marx dan Lenin serta Mao Ze Dong didalam suatu revolusi kebudayaan. Konstitusi RRC mengalami banyak perubahan. Pada tahun 1975 terjadi pergolakan politik dalam kepemimpinan Partai Komunis Cina yang dikenal dengan timbulnya The Gang of Four di dalam suatu revolusi kebudayaan. Akhirnya pada tahun 1982 ditetapkan konstitusi yang secara jelas menyebutkan bahwa RRC adalah negara sosialis di bawah demokrasi rakyat yang dipimpin oleh kaum pekerja yang terdiri dari buruh dan tani. Kekuasaan adalah di tangan rakyat dan dijalankan oleh Kongres Rakyat Nasional dan Kongres Rakyat Lokal menurut tingkat yang berbeda.

Kedudukan Kongres Rakyat Nasional sebagai pelaksana kedaulatan rakyat merupakan lembaga tertinggi yang memiliki kekuasaan penuh untuk menentukan kehidupan ketatanegaraan Cina. Peranannya cukup luas untuk menentukan atau menetapkan organ-organ dan pejabat-pejabat negara yang tunduk dan bertanggung jawab kepada Kongres Rakyat Nasional. Untuk menjalankan tugas dan peranannya sehari-hari, Kongres Rakyat Nasional membentuk komite tetap (The Standing Committee). Kongres Rakyat Nasional terdiri dari wakil-wakil rakyat yang dipilih oleh provinsi-provinsi, daerah otonom, kotamadya yang langsung tunduk kepada Pemerintah Pusat dan Angkatan Bersenjata. Pemilihan Umum dipimpin oleh Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional.

d. Sistem Politik Yordania

Yordania merupakan negara yang berbentuk Monarchi Konstitusional dan menjalankan syariat Islam. Berikut ini Anda akan diajak mempelajari lembaga (badan) negara Yordania yang terdiri dari Raja, Dewan Menteri dan Majelis Nasional, dan Mahkamah (Majelis) Pengadilan.

1) Raja

Seorang raja memiliki kekuatan yang besar. Selain memegang kekuasaan eksekutif, raja turut serta dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif.

2) Dewan Menteri

Dewan Menteri terdiri dari Perdana Menteri dan para menteri yang memiliki tanggung jawab secara kolektif kepada raja mengenai persoalan-persoalan politik umum negara. Dengan demikian, kabinet di Yordania adalah kabinet raja.

3) *Majelis Nasional*

Majelis Nasional disebut sebagai Majelis Al Umma. Majelis ini merupakan pemegang kekuasaan legislatif bersama dengan raja. Majelis nasional ini terdiri dari:

- a) Majelis Al Ayaan, yaitu dewan orang-orang terdepan dan beranggotakan 30 orang, yang semuanya diangkat oleh raja.
- b) Majelis Al Nuwab (DPR), yaitu Badan Perwakilan yang beranggotakan 60 orang dan terdiri atas 48 anggota orang Muslim, 10 anggota orang Kristen, dan 2 anggota orang beragama Ciroassian.

4) *Majelis Pengadilan*

Majelis ini terbagi menjadi 3 golongan, yaitu Mahkamah Sipil, Mahkamah Agama, dan Mahkamah Istimewa.

f. Sistem Politik Jepang

Sebelum mempelajari kehidupan sistem politik di Jepang, Anda akan diajak mempelajari sejarah latar belakang lahirnya konstitusi Jepang. Jepang adalah negara yang menganut sistem militerisme dan totaliterisme. Dengan demikian ikut mendorong terjadinya Perang Dunia II dan menimbulkan kehancuran bagi Jepang sendiri. Akibatnya, membuat UUD (konstitusi) Jepang disusun kembali dan memuat hal-hal yang bersifat mencegah lahirnya militerisme, sebagaimana termuat di dalam Pembukaan UUD Jepang tahun 1947.

Lembaga (badan) negara Jepang terdiri dari Kaisar, Kabinet, Dewan Negara, Dewan Pemeriksa, Mahkamah Agung, Mahkamah Pendakwa.

1) *Kaisar*

Kaisar tidak memiliki kekuasaan dalam pemerintahan. Jadi, hanya merupakan lambang negara dan persatuan bangsa.

2) *Kabinet*

Kabinet memegang dan menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kabinet ini beranggotakan para menteri dan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, yang ditunjuk dari kalangan anggota-anggota Dewan Negara.

3) *Dewan Negara*

Dewan Negara merupakan badan kekuasaan yang tertinggi dan satu-satunya badan yang membentuk undang-undang. Dewan Negara terdiri dari 2 kamar, yaitu DPR dan Senat. Masa jabatan anggota DPR adalah 4 tahun, sedang anggota Senat 6 tahun.

4) *Dewan Pemeriksa*

Dewan Pemeriksa memiliki kekuasaan dan tanggung jawab terhadap penerimaan dan pengeluaran negara. Oleh kabinet, hasilnya diserahkan kepada Dewan Negara bersama-sama dengan laporan pemeriksaan selama tahun fiskal berikutnya.

5) *Mahkamah Agung*

Anggota Mahkamah Agung diangkat oleh kabinet, tetapi anggota kabinet tidak dapat mempengaruhi/menentukan jalannya suatu pengadilan. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan untuk menentukan konstitusional tidaknya suatu UU, peraturan, penetapan, atau tindakan pemerintah. Mahkamah Agung terdiri atas seorang hakim ketua dan hakim anggota yang jumlahnya ditentukan oleh UU.

6) *Mahkamah Pendakwa*

Mahkamah Pendakwa memiliki kekuasaan untuk mengadili hakim-hakim yang telah diminta untuk dipecat. Mahkamah Pendakwa dibentuk oleh Dewan Negara.

Selain itu dibahas pula mengenai Sistem Kepartaian (Partai Politik) yang terdapat di Jepang. Adapun partai-partai politik tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Partai Demokrasi Liberal*

Partai Demokrasi Liberal merupakan partai konservatif dan probisnis yang memberikan keberhasilan dalam bidang perekonomian. Hal ini disebabkan adanya dukungan keuangan yang besar dari pihak pengusaha.

2) *Partai Sosialis Demokrat*

Partai Sosialis Demokrat merupakan partai dari suatu federasi buruh dengan jumlah anggota 2 juta yang sebagian besar adalah pekerja kasar dari perusahaan-perusahaan swasta.

3) *Partai Sosialis*

Partai Sosialis merupakan partai dari serikat-serikat buruh.

4) *Partai Komunis*

Partai Komunis merupakan partai dari serikat-serikat buruh tertentu dan sekelompok kaum komunis yang kecil dan teguh.

5) *Komeito*

Komeito merupakan partai yang mendapat dukungan dari anggota Soka Gakkai.

Pada umumnya, untuk menjadi anggota partai sebagai cara untuk mendapatkan suatu identitas. Hal ini karena mereka memiliki penghasilan rendah di kota-kota yang tidak memiliki kaitan dengan instansi maupun perusahaan besar.

Berdasarkan penerapan sistem politik yang ada di Inggris, Amerika Serikat, RRC, Yordania, dan Jepang yang berdasarkan sistem politik demokrasi maupun nondemokrasi serta menganut ideologi yang berbeda-beda, dapat diketahui adanya perbedaan dalam penerapannya.

Hal itu dikarenakan faktor-faktor berikut ini.

- a. Adanya perbedaan di dalam masyarakat
- b. Adanya perbedaan pandangan hidup
- c. Adanya perbedaan sejarah
- d. Adanya perbedaan konstitusi
- e. Adanya perbedaan pengalaman

4. Sistem Politik di Indonesia

Setiap negara memiliki sistem politik yang sesuai dengan falsafah atau ideologi dari negara yang bersangkutan. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia yang perwujudannya tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.

a. Perkembangan Sistem Politik di Indonesia

Perkembangan sistem politik demokrasi di Indonesia mengalami pasang surut sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem politik telah mengalami beberapa kali perubahan, baik sebelum Amandemen UUD 1945 maupun sesudah Amandemen UUD 1945.

1) *Sistem Politik Indonesia sebelum Amandemen UUD 1945*

Sistem ini mengklasifikasikan dalam tiga periode perkembangan politik di Indonesia.

a) Periode 1945 - 1959

Periode ini menggunakan Demokrasi Liberal, dengan indikator sebagai berikut.

- Partai-partai politik sangat dominan yang menentukan arah perjalanan negara melalui badan perwakilan.
- Eksekutif berada pada posisi yang lemah, karena sering jatuh bangun karena adanya mosi partai.
- Adanya kebebasan pers yang relatif cukup baik, bahkan pada periode ini peraturan sensor dan pembredelan yang diberlakukan sejak zaman Belanda dicabut.

b) Periode 1959 - 1965

Periode ini menggunakan Demokrasi Terpimpin, dengan indikator sebagai berikut.

- Partai-partai politik sangat lemah, kekuatan politik ditandai dengan adanya tarik ulur antara Soekarno (sebagai Presiden Indonesia), Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
- Eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden dan mempunyai kedudukan yang sangat kuat. Pada waktu itu Presiden merangkap sebagai Ketua DPA yang di dalam praktiknya menjadi pembuat dan selektor produk legislatif.
- Kebebasan pers sangat terkekang. pada saat itu terjadi suatu tindakan anti pers yang jumlahnya sangat spektakuler.

c) Periode 1966-1998 (Orde Baru = Pemerintahan Soeharto) dengan indikator sebagai berikut.

- Partai politik lemah karena adanya kontrol ketat oleh eksekutif dan lembaga perwakilan penuh dengan tangan-tangan eksekutif.
- Kedudukan eksekutif (Pemerintahan Soeharto) sangat kuat dan selalu intervensi terhadap kehidupan partai-partai politik serta menentukan spektrum politik nasional.

- Kebebasan pers terkekang dengan adanya lembaga SIT yang selanjutnya diganti dengan SIUPP.

Berdasarkan uraian di atas, sistem politik demokrasi yang diterapkan di Indonesia bukan merupakan demokrasi Pancasila, meskipun dasar negara Pancasila dan tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945. Demokrasi yang digunakan pada waktu tahun 1945-1959 adalah Demokrasi Liberal atau demokrasi parlementer karena sistem pemerintahan pada masa itu parlementer. Saat itu terjadi tiga kali terjadi pergantian konstitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950. Pada tahun 1959-1965 menggunakan Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin ini timbul karena adanya reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap Demokrasi Parlementer, meskipun tidak berlangsung lama. Hal ini akibat pergolakan politik saat itu sehingga kekuasaan Presiden Soekarno mengalami keruntuhan.

Dalam rangka melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, sejak tahun 1965-1998 (masa Orde Baru) dikembangkan demokrasi yang disebut Demokrasi Pancasila. Menurut pendapat Karl D. Jackson, Demokrasi Pancasila di negara Indonesia semasa Orde Baru adalah Indonesia sebagai negara birokratik atau *Bureaucratic Polity*, yaitu terdapat sekelompok elit politik yang menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sedangkan rakyat (masyarakat) hanya dilibatkan didalam proses implementasi kebijaksanaan.

Menurut pendapat Dwight King, Indonesia pada masa Orde Baru sebagai *Bureaucratic Authoritarian with limited plurality*, artinya birokrat baik yang sipil maupun militer sangat dominan, bahkan cenderung otoriter. Akan tetapi, warna pluralisme tetap ada meskipun terbatas, yaitu dengan mengorganisasikan kepentingan secara korporatist seperti kepentingan guru, petani, buruh, dan lain-lain yang disusun secara vertikal dan bukan horisontal seperti yang dikenal dalam sistem demokrasi.

Sistem Politik Demokrasi Pancasila menurut UUD 1945 sebelum terjadi amandemen adalah sebagai berikut:

- a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.
- b) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang memiliki wewenang dan tugas menjalankan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD, memilih Presiden dan Wakil Presiden, dan mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden bila Presiden melanggar UUD.
- c) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki tugas menetapkan UU, menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan memberikan persetujuan kepada Presiden atas pernyataan perang, serta membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.

d) Presiden

Presiden merupakan lembaga tinggi negara. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Wewenang dan tugas dari Presiden adalah menetapkan peraturan pemerintah, mensahkan atau menolak untuk mengesahkan RUU yang telah disetujui oleh DPR, mencabut peraturan pemerintah yang tidak disetujui oleh DPR, menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, mengangkat duta dan konsul, memberi grasi, amnesti, dan rehabilitasi, serta mengangkat menteri-menteri.

Dari keterangan wewenang dan tugas presiden, terlihat adanya keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan legislatif dan yudikatif. Namun keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan legislatif tetap dibatasi, yaitu dengan mendapat persetujuan dari DPR mengenai RUU atau peraturan pemerintah pengganti UU.

Demikian pula keikutsertaan Presiden dalam kekuasaan yudikasi tetap dibatasi, yaitu hanya terbatas mengenai grasi, amnesti, dan rehabilitasi. Hal ini juga diterapkan di negara Perancis dan Jepang.

e) Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

DPA merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki kewajiban untuk memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan memiliki hak untuk mengajukan usul kepada pemerintah. Usul atau nasihat DPA hanya mengikat Presiden secara moral dan tidak secara konstitusional. Oleh sebab itu, nasihat atau usul tersebut boleh diperhatikan dan dijalankan ataupun sebaliknya. DPA tidak memiliki hak memaksa sehingga kedudukan DPA lemah.

f) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK merupakan lembaga tinggi negara. Peran atau tugas BPK adalah memeriksa jalannya keuangan negara. BPK merupakan lembaga negara yang memiliki kekuasaan terlepas dari pengaruh pemerintah. Namun, tidak berarti kedudukan BPK di atas pemerintah.

g) Mahkamah Agung (MA)

MA merupakan lembaga tinggi negara dan memegang kekuasaan yudikatif. MA dan badan peradilan di bawahnya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

2) *Sistem Politik Indonesia setelah Amandemen UUD 1945*

Berbeda dengan sebelum dilakukan perubahan, hasil amandemen UUD 1945 tidak mengenal lembaga tertinggi negara. Semua lembaga pada posisi yang sebanding antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain.

Selain itu ada lembaga negara yang dihapuskan, yaitu DPA (Dewan Pertimbangan Agung). Selain itu, ada beberapa lembaga negara yang diakomodasi, yaitu DPD (Dewan Perwakilan Daerah), MK (Mahkamah Konstitusi), dan KY (Komisi Yudisial). Sistem politik setelah Amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut.

- a) Bentuk negara adalah kesatuan dan bentuk pemerintah adalah republik yang terdiri dari 33 provinsi dengan memakai asas desentralisasi sehingga terdapat pemerintahan di daerah dan di pusat.
- b) Parlemen terdiri dari dua kamar (sistem bicameral), yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilu dan merupakan perwakilan dari rakyat. Anggota DPD merupakan perwakilan dari provinsi yang anggotanya dipilih oleh rakyat di daerah yang bersangkutan melalui pemilu, dengan masa jabatan lima tahun. Kekuasaan DPR adalah membuat Undang-undang, menetapkan APBN, dan mengawasi jalannya pemerintahan.
- c) Majelis Permusyawaratan Rakyat
Anggota MPR adalah anggota DPR dan anggota DPD, yang memiliki masa jabatan lima tahun. Tugasnya melantik Presiden dan Wakil Presiden, memperhentikan presiden dan wakil presiden, serta berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD.
- d) Eksekutif dipegang dan dijalankan oleh Presiden. Kedudukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu, untuk masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali sekali dalam jabatan yang sama. Presiden sebagai kepala pemerintahan membentuk kabinet yang terdiri dari menteri-menteri. Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen.
- e) Kekuasaan Yudikatif dipegang dan dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, serta Mahkamah Konstitusi. Komisi Yudisial yang memberikan usulan mengenai pengangkatan Hakim Agung.
- f) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR dan DPD. Selain itu, juga memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam satu paket.
- g) Sistem kepartaian yaitu multi partai. Jumlah partai yang mengikuti Pemilu pada tahun 2004 adalah 24 partai dan pada tahun 2009 adalah 34 partai politik.
- h) BPK merupakan badan yang memiliki kekuasaan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Hasil pemeriksaan diserahkan pada DPR. Anggota BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden.
- i) Pada pemerintahan Daerah yaitu Provinsi dan Kotamadya/Kabupaten dibentuk pula badan/lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 - (1) Kekuasaan legislatif dijalankan oleh DPRD Provinsi di daerah Provinsi dan DPRD Kotamadya/Kabupaten di daerah kotamadya/kabupaten. Anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilu.

- (2) Kekuasaan eksekutif pada provinsi dipegang oleh Gubernur, sedang di daerah kotamadya/kabupaten dipegang oleh Walikota/Bupati. Semuanya kekuasaan itu dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing melalui Pemilu.
- (3) Kekuasaan yudikatif pada provinsi dijalankan oleh Pengadilan Tinggi dan untuk kotamadya/kabupaten dijalankan oleh Pengadilan Negeri.

WAWASAN KEBANGSAAN

PEMILU PERTAMA TAHUN 1955

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diadakan oleh Republik Indonesia. Pemilu ini merupakan "reaksi" atas Maklumat Nomor X/1945 tanggal 3 November 1945 dari Wakil Presiden Moh. Hatta, yang menginstruksikan pendirian partai-partai politik di Indonesia. Pemilu pun, menurut Maklumat, harus diadakan secepat mungkin. Namun, akibat belum siapnya aturan perundangan dan logistik (juga kericuhan politik dalam negeri/pemberontakan), Pemilu tersebut baru diadakan tahun 1955.

Landasan hukum Pemilu 1955 adalah UU No. 7 tahun 1953 yang diundangkan pada tanggal 4 April 1953. Dalam UU tersebut, Pemilu 1955 bertujuan memilih anggota bikameral: Anggota DPR dan Konstituante (seperti MPR). Sistem yang digunakan adalah Proporsional. Oleh sebab itu, Pemilu 1955 diadakan dalam 2 putaran. Pertama, untuk memilih anggota DPR pada tanggal 29 September 1955. Kedua, untuk memilih anggota Konstituante pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu untuk memilih anggota DPR diikuti 118 parpol/gabungan/perseorangan dengan total suara 43.104.464 dengan 37.785.299 suara sah. Sementara itu, untuk pemilihan anggota Konstituante, jumlah suara sah meningkat menjadi 37.837.105 suara. Pemilu DPR akhirnya memilih 257 anggota DPR, sementara pemilu Konstituante akhirnya memilih 514 anggota Konstituante.

b. Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Sebagai negara yang menganut sistem Demokrasi Pancasila, sistem pemerintahan di negara Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang tidak langsung. Artinya, meski kedaulatan ada di tangan rakyat, rakyat tidak langsung memerintah, tetapi melalui para wakilnya yang dipilih oleh rakyat sendiri melalui suatu Pemilu untuk duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Demokrasi Pancasila memiliki ciri yang khas adanya keseimbangan antara kebebasan dan kebersamaan semua warganya. Hal ini tercermin di dalam sila-sila dari Pancasila yang merupakan ajaran demokrasi Pancasila sebagai berikut.

- 1) Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa
Adanya kebebasan setiap orang untuk memeluk agama merupakan suatu hak individual (hak asasi manusia) untuk bebas sesuai dengan keinginannya. Hal ini merupakan esensi dari sistem Demokrasi.
- 2) Sila Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab
Adanya penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia, sebagaimana ajaran demokrasi.
- 3) Sila Ketiga, persatuan Indonesia
Adanya pengakuan terhadap perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat Indonesia untuk saling bekerja sama, sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tertib, sebagaimana ajaran demokrasi, yaitu keamanan dan ketertiban.
- 4) Sila Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Adanya kedaulatan di tangan rakyat yang dijalankan melalui suatu sistem perwakilan dengan mekanisme permusyawaratan perwakilan.
Setiap pengambilan keputusan harus diupayakan melalui musyawarah untuk mufakat. Hal ini menjadi landasan mekanisme dari Demokrasi Pancasila.
- 5) Sila Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Adanya tujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan ajaran Demokrasi. Demokrasi Pancasila merupakan cita-cita demokrasi Indonesia.

Prinsip-prinsip demokrasi yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai berikut.

- 1) Demokrasi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Demokrasi berdasarkan hak asasi manusia.
- 3) Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat.
- 4) Demokrasi berdasarkan kecerdasan rakyat.
- 5) Demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan negara.
- 6) Demokrasi berdasarkan otonomi daerah.
- 7) Demokrasi berdasarkan supremasi hukum (*rule of law*).
- 8) Demokrasi berdasarkan peradilan yang bebas.
- 9) Demokrasi berdasarkan kesejahteraan rakyat.
- 10) Demokrasi berdasarkan keadilan sosial.

Dalam Demokrasi Pancasila terdapat prinsip-prinsip dasar pelaksanaan sistem politik di Indonesia yang diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan sistem politik Demokrasi Pancasila tersebut adalah sebagai berikut.

1) *Bentuk Negara*

Bentuk negara Indonesia yang sesuai adalah negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik.

2) *Kedaulatan Rakyat*

Kedaulatan ada ditangan rakyat. Artinya, pemegang kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Jadi, kehendak rakyat merupakan dasar bagi pemerintahan demokrasi.

3) *Pemerintah Berdasarkan Konstitusi*

Dalam menjalankan kekuasaannya, pemerintah berdasarkan UUD 1945, sehingga memiliki kekuasaan yang terbatas dan bertanggung jawab.

4) *Negara Berdasarkan Hukum*

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Hukum yang ada di Indonesia harus sesuai dengan Pancasila. Segala aktivitas kegiatan dalam negara harus berdasarkan pada hukum, sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan maupun penindasan.

5) *Sistem Perwakilan*

Rakyat tidak langsung memerintah negara melainkan melalui para wakilnya yang duduk di lembaga perwakilan. Dalam kegiatan penyelenggaraan negara, pemerintah harus benar-benar dapat menyuarkan amanat hati nurani rakyat.

6) *Sistem Presidensial*

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Dengan demikian, presiden sebagai penyelenggara negara tertinggi.

c. Pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia harus dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Isi pokok pelaksanaan Demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan Pancasila yang termuat di dalam UUD 1945.
- 2) Pelaksanaan demokrasi Pancasila harus menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- 3) Pelaksanaan sistem ketatanegaraan harus berdasarkan atas institusional yang sesuai dengan UUD 1945.
- 4) Pelaksanaan demokrasi harus berdasarkan atas hukum.

Demokrasi Pancasila meliputi berbagai hal yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selain sistem politik yang berdasarkan Pancasila, ada juga sistem sosial dan ekonomi yang berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Demokrasi sosial artinya hubungan antaranggota warga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan. Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila. Demokrasi ekonomi artinya sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi, yang didasarkan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga terwujud keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

Sistem politik di Indonesia yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila secara khusus terdapat pada sila keempat, yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kekuasaan ada di tangan rakyat dan untuk menjalankannya melalui badan/lembaga perwakilan. Anggotanya, baik yang ada di Parlemen maupun di eksekutif (presiden dan wakil presiden), dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali.

Demokrasi Pancasila menekankan adanya musyawarah untuk mencapai mufakat. Ini merupakan suatu mekanisme demokrasi menurut sila keempat. Dalam musyawarah mufakat ini yang dipenting adalah isi dari berbagai pendapat dan berlangsungnya musyawarah tersebut. Cara voting sebenarnya tidak dikehendaki dalam demokrasi Pancasila. Meskipun tidak serta menolak cara voting tersebut, tetapi dalam sistem demokrasi Pancasila lebih mementingkan musyawarah mufakat yang selanjutnya dapat dilakukan dengan cara voting. Dengan syarat, bila musyawarah mufakat tersebut tidak berhasil mencapai suatu keputusan bersama. Untuk itu, perlu pemahaman mengenai tata cara bermusyawarah menurut demokrasi Pancasila.

- 1) Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat.
- 2) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama.
- 3) Mengutamakan semangat kekeluargaan dalam musyawarah mufakat.
- 4) Tidak memaksakan suatu kehendak, baik kehendak pribadi maupun golongan, kepada orang lain.
- 5) Mengutamakan itikad baik dan tanggung jawab untuk menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah.
- 6) Secara moral, pengambilan hasil keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.
- 7) Musyawarah harus dilakukan dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur.

Cara pelaksanaan dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat ini diatur dalam Ketetapan MPR sebagai berikut.

- 1) TAP MPR No. 1/MPR/1993 Pasal 87 dan 92 jo TAP MPR No. II/MPR/1990 Pasal 79
Pengambilan keputusan sejauh mungkin diusahakan melalui musyawarah untuk mufakat. Jika tidak berhasil, dapat ditempuh dengan jalan suara terbanyak.
- 2) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 93
Syarat sahnya putusan berdasarkan musyawarah, yaitu apabila diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani lebih dari separuh jumlah anggota rapat yang mencerminkan setiap fraksi.
- 3) TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85
Syarat-syarat sahnya pengambilan putusan berdasarkan suara terbanyak adalah sebagai berikut.
 - a) Diambil dalam suatu rapat yang daftar hadirnya telah ditandatangani sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota rapat.
 - b) Disetujui lebih dari separuh anggota yang hadir.

TAP MPR No. II/MPR/1999 Pasal 85 berisi mengenai syarat voting. Berdasarkan ketetapan tersebut, cara voting dalam Demokrasi Pancasila dilakukan dengan syarat-syarat berikut ini.

- 1) Apabila musyawarah untuk mufakat telah dilakukan maksimal, tetapi tidak mendapatkan keputusan bersama.
- 2) Adanya perbedaan pendapat dan pendirian yang mendasar, sehingga tidak mungkin ditemukan lagi.
- 3) Adanya kondisi dan keadaan yang mendesak, sehingga harus secepatnya diambil suatu keputusan.
- 4) Sebelum dilakukan voting, terlebih dulu diadakan evaluasi untuk mempelajari pendapat-pendapat yang berbeda.
- 5) Pengambilan voting ini sah apabila diambil dalam suatu rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota rapat dan disetujui oleh lebih dari separuh jumlah anggota yang hadir memenuhi kuorum.

Dengan demikian terdapat prinsip yang terkandung dalam proses musyawarah untuk mufakat, yaitu musyawarah untuk mufakat harus berdasarkan pada sila keempat. Pancasila dan setiap keputusan yang diambil tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta secara moral dapat dipertanggungjawabkan.

d. Perbedaan Antara Sistem Politik Demokrasi Liberal dan Sistem Politik Demokrasi Pancasila

Meskipun di beberapa negara sama-sama menggunakan sistem demokrasi, tetapi terdapat berbagai perbedaan. Hal ini karena adanya pandangan hidup (falsafah) dari masing-masing negara yang bersangkutan. Pada sistem politik demokrasi liberal menggunakan falsafah liberalisme, sedangkan pada sistem politik demokrasi Pancasila menggunakan falsafah Pancasila.

Perbedaan-perbedaan tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Demokrasi liberal mengakui adanya kebebasan individual, sehingga memiliki paham individualis. Demokrasi Pancasila mengakui bahwa manusia adalah makhluk pribadi dan makhluk sosial. Kedua hal tersebut harus seimbang dan selaras. Kebebasan individu tidak boleh merusak kerja sama antarwarga, begitu juga kerja sama warga tidak boleh merusak kebebasan individu.
- 2) Negara dalam Demokrasi Liberal adalah negara sekuler, sedangkan negara dalam demokrasi Pancasila adalah sosial religius.

Demokrasi merupakan prinsip universal, bahkan hampir semua negara di dunia menganut ajaran demokrasi ini, meskipun cara demokrasi setiap negara berbeda-beda. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang sesuai diterapkan di negara Indonesia. Pada dasarnya, Pancasila merupakan nilai-nilai kehidupan yang telah ada sebelum negara ini diproklamasikan. Salah satunya adalah musyawarah untuk mufakat yang menjadi dasar bagi sistem politik di negara Indonesia.



Partisipasi Masyarakat dalam Sistem Politik di Indonesia

1. Pengertian Partisipasi dalam Sistem Politik Indonesia

Tahukan Anda yang dimaksud dengan hakikat sistem politik? Apakah Anda sudah berpartisipasi dalam sistem politik di Indonesia.

Hakikat sistem politik demokrasi adalah adanya pengakuan terhadap kekuasaan di tangan rakyat. Oleh karena itu, sistem politik demokrasi akan terjelma jika rakyat (warga negara) berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki partisipasi yang berbeda-beda. Ada warga negara yang aktif dalam berpartisipasi politik, misalnya menduduki jabatan tertentu dalam partai politik, sedangkan ada warga negara yang tidak aktif seperti hanya berpartisipasi saat Pemilu.

Partisipasi warga negara dapat dibedakan menjadi berikut ini.

a. Partisipasi Aktif

Partisipasi aktif adalah kegiatan untuk mengajukan usul kebijakan, kritik, perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, serta meluruskan kebijakan.

b. Partisipasi Pasif

Partisipasi pasif adalah kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah.

Selain itu, masih ada tingkatan-tingkatan bagi warga negara dalam partisipasi politik.

- a. Kegiatan gladiator, meliputi:
 - 1) memegang jabatan publik atau partai,
 - 2) menjadi calon pejabat,
 - 3) menghimpun dana politik,
 - 4) menjadi anggota aktif suatu partai, dan
 - 5) menyisihkan waktu untuk kampanye politik.
- b. Kegiatan transisi, meliputi:
 - 1) mengikuti rapat atau pegawai politik,
 - 2) memberi dukungan dana partai atau calon, dan
 - 3) jumlah pejabat publik atau pemimpin politik.
- c. Kegiatan menonton, meliputi:
 - 1) memakai simbol/identitas partai/organisasi politik,
 - 2) mengajak orang untuk memilih,
 - 3) menyelenggarakan diskusi politik, dan
 - 4) memberi suara.
- d. Kegiatan apatis/masa bodoh

Ukuran pokok yang dapat digunakan untuk menilai partisipasi masyarakat dalam politik adalah sebagai berikut.

a. Pengetahuan dan Penghayatan terhadap Politik yang Dimiliki Masyarakat

Warga negara (masyarakat) yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang tinggi, mampu berpartisipasi secara aktif dan lebih rasional. Warga negara (masyarakat) yang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik yang rendah, dapat berpartisipasi secara aktif tetapi cenderung kurang rasional.

b. Kadar Kepercayaan Warga Negara (Masyarakat) terhadap Sistem Politik yang Berlaku

Kadar kepercayaan tersebut, antara lain, ditentukan oleh kemampuan sistem politik untuk menjawab tuntutan-tuntutan yang wajar dari masyarakat secara memuaskan.

Berdasarkan dua ukuran pokok tersebut terdapat hubungan yang erat, yaitu apabila warga negara memiliki pengetahuan dan penghayatan yang tinggi, akan memiliki kemampuan yang tinggi pula didalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar dan masuk akal. Oleh karenanya, akan lahir pola partisipasi yang aktif dan bertanggung jawab yang akan menjamin kelangsungan hidup sistem politik negara tersebut. Sebaliknya, jika warga negara yang kurang memiliki pengetahuan dan penghayatan politik, akan mengalami banyak kesulitan di dalam menentukan tuntutan-tuntutan yang wajar. Apabila partisipasi aktif dari warga negara tersebut dimunculkan, akan melahirkan tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan membahayakan keutuhan sistem politik yang berlaku.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

a. Partisipasi politik secara konvensional

1) Diskusi Politik

Diskusi politik adalah proses membicarakan berbagai isu politik yang sedang berkembang saat itu dengan kritis. Pada umumnya, diskusi politik yang dilakukan akan berujung pada suatu rekomendasi ataupun pendapat-pendapat yang dapat menjadi alternatif solusi dalam suatu isu politik tertentu.

2) Membentuk dan bergabung dalam organisasi kemasyarakatan atau kelompok kepentingan.

Caranya, dengan membentuk dan bergabung dalam suatu organisasi. Dengan cara tersebut, masyarakat sudah melakukan partisipasi politik.

3) Komunikasi personal dengan pejabat pemerintah atau pimpinan politik.

Artinya, melakukan komunikasi secara pribadi dengan pejabat pemerintahan atau pimpinan politik. Cara ini pada umumnya menemui banyak kendala dan tidak setiap individu dapat melakukannya. Namun, cara ini juga merupakan suatu partisipasi politik masyarakat.

4) Memberikan Suara

Memberikan suara termasuk melakukan dalam kegiatan pemilihan umum. Setiap anggota warga negara dapat melakukannya karena caranya mudah, biaya murah, dan kecil risikonya.

5) Mengikuti Kegiatan Kampanye

Kegiatan kampanye diselenggarakan oleh partai politik ketika menjelang Pemilu.

b. Partisipasi Politik secara Nonkonvensional

1) Demonstrasi

Demonstrasi merupakan kegiatan masyarakat untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah maupun pihak lain yang dianggap oleh para demonstran membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang diwakilinya. Demonstrasi ini dilakukan dengan berbagai cara, antara lain, dengan atribut-atribut yang berupa spanduk bertuliskan pernyataan protesnya, meneriakkan slogan-slogannya, dan melakukan *long march*. Biasanya, demonstrasi berujung dengan keributan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, meskipun ada yang berakhir dengan baik.

2) Pembangkangan Tanpa Kekerasan

Pembangkangan tanpa kekerasan adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang/masyarakat mengenai suatu tindakan atau kebijakan dari pemerintah yang dilakukan tanpa kekerasan. Pada umumnya melakukan perlawanan dalam bentuk ketidaktaatan, misalnya menolak membayar pajak.

3) Mogok

Mogok adalah bentuk kegiatan untuk menghentikan kerja secara bersama-sama oleh sekelompok pekerja. Isitilah mogok ini dalam bidang perekonomian berarti mogok kerja. Contohnya, sejumlah karyawan pada perusahaan garment melakukan mogok kerja untuk menuntut kenaikan gaji. Dalam perkembangannya mogok ini juga dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuannya secara politik, misalnya mogok makan atau mogok yang dilakukan oleh tenaga kerja untuk menekan pemerintah agar mencabut peraturan tertentu yang merugikan pihak tenaga kerja.

3. Faktor Pengaruh Partisipasi Politik

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk berpartisipasi dalam bidang politik yang dilakukannya. Setiap orang memiliki perbedaan-perbedaan dalam berpartisipasi politik karena dipengaruhi beberapa hal berikut.

a. Pendidikan Politik

Pendidikan politik merupakan usaha untuk mencerdaskan kehidupan politik masyarakat. Dengan pendidikan politik, akan diperoleh suatu pemahaman dan penghayatan mengenai politik. Pada umumnya masyarakat yang tidak mengetahui "politik" akan merasa takut apabila berhubungan dengan politik sebab pandangan dan pemahaman yang keliru mengenai politik. Untuk itu, dengan pendidikan akan diperoleh manfaat atau kegunaan berikut ini.

- 1) Meningkatkan pemahaman dan penghayatan politik dan masalah-masalah yang bersifat politis.
- 2) Meningkatkan kualitas diri dalam berpolitik sesuai undang-undang yang berlaku.

b. Sosialisasi Politik

Ada beberapa sarana yang dijadikan proses sosialisasi politik kepada masyarakat (warga negara), yaitu sebagai berikut.

1) *Keluarga*

Pemahaman mengenai politik dimulai dari keluarga. Misalnya, adanya percakapan antara ayah dan anak mengenai isu-isu politik.

2) *Sekolah*

Pemahaman mengenai politik dapat diperoleh melalui pendidikan formal yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pengetahuan ini merupakan proses awal untuk memahami dan menghayati secara benar dari kehidupan berpolitik suatu negara.

3) *Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan*

Pemahaman mengenai politik dapat diperoleh dengan cara ikut berorganisasi, baik melalui partai politik maupun organisasi kemasyarakatan. Dengan mengikuti secara langsung, akan diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai kehidupan berpolitik dalam negara.

c. Kesadaran Politik

Kesadaran politik yaitu proses batin yang menampakkan keinsafan dari setiap warga negara akan urgensi urusan kenegaraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, tanpa adanya kesadaran berpolitik dari warga negara, akan berdampak kurang baik bagi kemajuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Unjuk Kerja

1. Bentuklah kelompok dengan anggota 4 - 5 orang, yang terdiri dari siswa laki-laki dan perempuan!
2. Lakukan jajak pendapat di lingkungan sekolahmu, mengenai "Perlu atau Tidak Partai Oposisi dalam Sistem Kenegaraan Kita?"

Keberadaan Partai Oposisi dalam Sistem Politik di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<ul style="list-style-type: none">- Perlu sekali, sebagai control dari partai penguasa- Agak perlu, karena semua partai harus diakomodir pendapatnya.- Tidak perlu karena tidak diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan										

Keberadaan Partai Oposisi dalam Sistem Politik di Indonesia	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
<ul style="list-style-type: none"> - Tidak perlu, karena hanya akan membuat gaduh dunia politik tanah air . - Tidak perlu, karena akan mencederai semangat Demokrasi Pancasila - Tidak tahu 										

Catatan : P1 : Pendapatan 1

- Carilah beberapa responden, lalu mintalah mereka mengisi daftar kolom di atas dengan memberi tanda centang!
- Berilah ulasan singkat dari hasil jajak pendapat tersebut, lalu salah satu wakil kelompok mempresentasikan di depan kelas! Mintalah kelompok lain memberikan tanggapan dan catatlah hasil tanggapan tersebut!
- Kumpulkan kepada guru Anda, lembar hasil jajak pendapat, ulasan singkat, dan catatan tanggapan dari kelompok lain!



Rangkuman

- Suprastruktur politik adalah struktur politik negara yang meliputi lembaga-lembaga negara, yaitu MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Infrastruktur politik adalah struktur politik masyarakat yang meliputi komponen-komponen, yaitu partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok kepentingan, kelompok penekan, media massa, dan tokoh politik.
- Demokrasi yang digunakan pada tahun 1945-1959 adalah demokrasi liberal atau demokrasi parlementer. Sistem pemerintahan pada masa itu adalah parlementer dan telah 3 kali terjadi pergantian kontitusi, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS, dan UUD 1950.
- Pada tahun 1959-1965 menggunakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi yang timbul karena adanya reaksi penolakan ataupun koreksi terhadap demokrasi parlementer.

4. Sejak tahun 1965-1998 atau pada masa Orde Baru, mulai dikembangkan demokrasi Pancasila. Dalam kenyataannya, demokrasi Pancasila semasa Orde Baru ini Indonesia sebagai negara birokratik atau Bureaucratic Polity. Di dalam negara ini terdapat sekelompok elit politik yang menguasai sepenuhnya pengambilan keputusan politik negara, sedangkan rakyat (masyarakat) hanya dilibatkan dalam proses implementasi kebijaksanaan.
5. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menghendaki suatu sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kedaulatan rakyat. Artinya, sistem pemerintahan menempatkan rakyat sebagai pemilik atau pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara.
6. Demokrasi sosial artinya hubungan antaranggota warga negara (masyarakat) harus berlandaskan pada penghormatan terhadap kemerdekaan, solidaritas, dan persamaan kedudukan. Hubungan tersebut harus berdasarkan pada nilai-nilai dalam Pancasila.
7. Demokrasi ekonomi adalah suatu sistem pengelolaan perekonomian yang berlandaskan pada demokrasi. Dalam hal ini pengelolaan perekonomian harus berdasarkan nilai-nilai dalam Pancasila, sehingga terwujud suatu keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
8. Partisipasi aktif adalah kegiatan untuk mengajukan usul suatu kebijakan, mengajukan kritik, mengajukan perbaikan, memilih pemimpin dalam pemerintahan, dan meluruskan kebijakan.
9. Partisipasi pasif adalah kegiatan untuk menaati peraturan pemerintah, menerima, dan melaksanakan kebijakan dari pemerintah.
10. Demonstrasi merupakan bentuk kegiatan masyarakat untuk memberikan pernyataan protes terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah maupun pihak lain yang dianggap membawa kerugian pada kelompok masyarakat yang diwakilinya.

○ UJI KOMPETENSI ○

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Salah satu bentuk politik seorang warga negara biasa adalah
 - a. membuat keputusan politik
 - b. menegakkan keputusan politik
 - c. menjalankan keputusan politik
 - d. memengaruhi keputusan politik
 - e. mengawasi keputusan politik

2. Sebutan untuk lembaga-lembaga politik yang ada dalam suatu negara adalah
- a. komunikasi politik
 - b. suprastruktur
 - c. partisipasi politik
 - d. infrastruktur
 - e. politik masyarakat
3. Tujuan partisipasi politik masyarakat adalah
- a. melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab
 - b. mengadakan pengawasan terhadap setiap keputusan pemerintah
 - c. mengawasi dan mengontrol setiap peraturan yang ada
 - d. memengaruhi pemilihan pejabat publik
 - e. mewujudkan sistem politik yang berbasis pada perwakilan rakyat
4. Partisipasi politik dalam rangka memberikan suara dalam Pemilu termasuk kategori
- a. transisi
 - b. menonton
 - c. gladiator
 - d. aktif
 - e. pasif
5. Suprastruktur politik antara lain
- a. kelompok penekan
 - b. partai politik
 - c. organisasi kemasyarakatan
 - d. DPR
 - e. media massa
6. Apabila demokrasi merupakan sistem politik, kekuasaan yang dimiliki oleh negara adalah
- a. tidak terbatas
 - b. mutlak
 - c. luas
 - d. menyeluruh
 - e. terbatas
7. Komponen yang dimiliki infrastruktur politik adalah
- a. BPK
 - b. MK
 - c. Partai Politik
 - d. DPR
 - e. MPR

8. Pada umumnya, sistem politik yang dianut oleh suatu negara dengan ideologi komunis adalah
 - a. tradisional
 - b. kediktatoran
 - c. otoriter
 - d. demokratis
 - e. semi otoriter
9. Dalam kehidupan politik, aktivitas seseorang/sekelompok orang untuk belajar politik dan mengembangkan orientasi politiknya secara aktif disebut
 - a. dinamika politik
 - b. partisipasi politik
 - c. sosialisasi politik
 - d. komunikasi politik
 - e. sistem politik
10. Sistem politik yang mencerminkan suatu pemerintahan oleh seorang/sekelompok orang yang memonopoli kekuasaan dalam negara tanpa batas disebut
 - a. demokrasi
 - b. totaliter
 - c. terpimpin
 - d. liberal
 - e. diktator
11. Dalam suasana kemasyarakatan, struktur-struktur politik yang hidup berfungsi sebagai
 - a. infrastruktur politik
 - b. wahana struktur politik
 - c. suprastruktur politik
 - d. organisasi struktur politik
 - e. aparat struktur politik
12. Organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan golongan lain yang memiliki pandangan berbeda disebut partai politik. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh
 - a. Carl J. Friedrich
 - b. Sigmund Neumann
 - c. Miriam Budiardjo
 - d. Rit Soltau
 - e. Maurice Duverger

13. Negara Indonesia menganut sistem politik
- a. Sosialis
 - b. Liberalisme
 - c. Totaliter
 - d. Pancasila
 - e. Materialisme
14. Sistem politik menurut Almond dan Powell dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu
- a. primitif, anarki, dan modern
 - b. tradisional, modern, dan demokrasi
 - c. tradisional, totaliter, dan demokrasi
 - d. modern, totaliter, dan demokrasi
 - e. primitif, tradisional, dan modern
15. Lembaga yang menjalankan fungsi agregasi kepentingan dalam sistem politik di Indonesia adalah
- a. media massa
 - b. wakil rakyat
 - c. presiden
 - d. partai politik
 - e. LSM/ormas
16. Berikut ini merupakan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah, *kecuali*
- a. dialog
 - b. adu argumen
 - c. lobi
 - d. voting
 - e. kompromi
17. Ciri khas demokrasi Pancasila yang bersumber pada Pancasila merupakan mekanisme musyawarah untuk mufakat, termasuk sila
- a. pertama
 - b. kedua
 - c. keempat
 - d. kedua dan keempat
 - e. kelima
18. Bentuk partisipasi politik nonkonvensional adalah
- a. pemberian suara
 - b. mogok makan
 - c. membentuk kelompok kepentingan
 - d. diskusi politik
 - e. komunikasi dengan pejabat politik

19. Aktivitas yang dilakukan suatu kelompok tanpa kekerasan untuk membuat segalanya tidak nyaman bagi lawan politik atau pemerintah disebut
- mogok
 - diskusi politik
 - pembangkangan sipil
 - boikot
 - demonstrasi
20. Salah satu bentuk partisipasi politik yang tinggi adalah
- menjadi simpatisan partai
 - menjadi anggota partai
 - mengikuti kampanye
 - mengikuti pemilu
 - menjadi pengurus partai

B. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar!

1. Apa yang Anda ketahui tentang infrastruktur politik? Jelaskan pula komponen (lembaga) yang termasuk dalam infrastruktur politik tersebut!
2. "Sosialisasi politik dalam kegiatan partisipasi politik di Indonesia sangat penting". Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
3. Kelompok kepentingan dengan kelompok penekan memiliki perbedaan. Coba sebutkan bentuk-bentuk perbedaan tersebut!
4. "Sistem politik di Indonesia menganut paham demokrasi dan dilandasi dengan Pancasila". Jelaskan maksud pernyataan tersebut!
5. "Gerakan partisipasi politik di Indonesia pada masa Reformasi cenderung meningkat dibandingkan pada masa Orde Baru". Jelaskan maksud pernyataan tersebut!

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 2

A. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

1. Fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara adalah ...
 - a. membuat sanksi kepada warga negara
 - b. membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak sewenang-wenang
 - c. memudahkan pelaksanaan pemilu
 - d. memudahkan hubungan dengan negara asing
 - e. membatasi penanaman modal asing
2. Dalam sistem politik indonesia lembaga negara yang berwenang memberhentikan presiden dan atau wakil presiden adalah
 - a. DPR
 - b. MPR
 - c. DPD
 - d. partai politik
 - e. rakyat
3. Faktor-faktor pendukung partisipasi politik sebagai berikut, *kecuali*
 - a. pendidikan politik
 - b. kesadaran politik
 - c. budaya politik
 - d. menuver politik
 - e. sosialisasi politik
4. Dalam sistem pemerintahan parlementer kabinet bertanggung jawab kepada
 - a. raja
 - b. presiden
 - c. parlemen
 - d. perdana menteri
 - e. rakyat
5. Apabila pasangan suami istri dari suku Baduy dan beragama Islam akan mengajukan perceraian maka lembaga pengadilan yang berwenang untuk memutuskannya adalah
 - a. Pengadilan negeri
 - b. Pengadilan militer
 - c. Pengadilan tata usaha negara
 - d. Pengadilan adat
 - e. Pengadilan agama
6. Yang tidak termasuk tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah
 - a. memelihara perdamaian dan keamanan internasional
 - b. mengembangkan hubungan persaudaraan bangsaa-bangsa
 - c. menjadi pusat kesesuaian bangsa-bangsa dalam mencapai tujuan bersama
 - d. menjaga produksi minyak dunia agar tidak berlebihan
 - e. bekerja sama secara internasional untuk memecahkan persoalan dunia

7. Apabila pasangan suami istri yang tidak beragama Islam akan mengajukan pembagian harta warisan maka lembaga pengadilan yang berwenang untuk memutuskannya adalah
- a. Pengadilan negeri
 - b. Pengadilan militer
 - c. Pengadilan tata usaha negara
 - d. Pengadilan adat
 - e. Pengadilan agama
8. Perubahan politik dunia yang menjadi kekuatan meningkatnya globalisasi antara lain karena runtuhnya komunisme di Uni Soviet, beberapa negara bekas blok Uni Soviet bergerak ke arah
- a. sistem politik bebas aktif
 - b. sistem ekonomi terpusat
 - c. sistem ekonomi dan politik ala negara-negara Barat
 - d. sistem ekonomi dan politik ala negara Jepang
 - e. sistem ekonomi dan politik ala Komunis China
9. Dalam kehidupan bermasyarakat, norma sebagai perlindungan kepentingan bersama. Di bawah ini yang tidak tergolong norma adalah
- a. norma agama
 - b. norma kesusilaan
 - c. norma kecerdasan
 - d. norma kesopanan
 - e. norma hukum
10. Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis, pelaksanaan nilai-nilainya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi dalam setiap kurun waktu. Pengertian ini mengandung arti bahwa Pancasila sebagai
- a. ideologi agamis
 - b. ideologi liberalis
 - c. ideologi nasional
 - d. ideologi terbuka
 - e. ideologi tertutup
11. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 101 tahun 2000, pemerintahan yang baik adalah yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip di bawah ini, *kecuali*
- a. profesionalitas, akuntabilitas, transparansi
 - b. pelayanan prima, demokrasi
 - c. mobokrasi, tirani
 - d. efisiensi, supremasi hukum
 - e. dapat diterima oleh seluruh masyarakat
12. Amandemen pertama terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ditunjukkan untuk mengurangi kewenangan Presiden. Hal ini karena sebelumnya era reformasi kekuasaan presiden
- a. cenderung kurang bekerjasama dengan lembaga-lembaga negara lain
 - b. adanya dominasi kekuasaan eksekutif yang mengarah kepada otoriter
 - c. DPR kesulitan mengadakan kontrol terhadap kerja presiden
 - d. pertanggungjawaban presiden sulit dipelajari oleh lembaga negara lain
 - e. MPR tidak dapat mengevaluasi kerja presiden dengan efektif

13. Contoh partisipasi politik warga negara Indonesia sebagai berikut, *kecuali*
 - a. memberikan suasana dalam pemilu
 - b. melakukan diskusi politik
 - c. memprakarsai disintegrasi bangsa
 - d. demonstrasi
 - e. menjalin komunikasi dengan elit politik
14. Bidang hukum dan pemerintahan sebagai jaminan keadilan bagi negara Indonesia tertuang di dalam
 - a. Pembukaan UUD 1945 alinea IV
 - b. Pasal 26 UUD 1945
 - c. Pasal 27 UUD 1945
 - d. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981
 - e. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003
15. Pemerintah dalam arti luas, adalah suatu pemerintah berdaulat sebagai gabungan semua badan atau lembaga kenegaraan yang berkuasa dan memerintah di wilayah suatu negara meliputi badan
 - a. eksekutif dan yudikatif
 - b. eksekutif dan legislatif
 - c. legislatif dan yudikatif
 - d. eksekutif, legislatif, dan yudikatif
 - e. eksekutif, federatif dan yudikatif
16. Setelah mengalami amandemen Undang-Undang Dasar 1945 maka Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga Bikomeral yang terdiri dari
 - a. DPR dan Presiden
 - b. Presiden dan DPD
 - c. DPR, DPD, dan Presiden
 - d. MPR dan DPD
 - e. DPR dan DPD
17. Apabila di Inggris, Raja/Ratu adalah kepala negara dan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri sedangkan Presiden di Indonesia adalah sebagai
 - a. kepala negara saja
 - b. kepala pemerintahan saja
 - c. sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
 - d. mandataris MPR
 - e. bertanggung jawab pada DPR
18. Mempengaruhi para pembuat keputusan, sehingga produk hukum yang dihasilkan/dikeluarkan sesuai dengan kepentingan masyarakat, merupakan perwujudan partisipasi dalam hal
 - a. ekonomi
 - b. sosial
 - c. budaya
 - d. politik
 - e. hankam

19. Hambatan-hambatan dalam pengembangan potensi diri sebagai berikut, *kecuali*
- lingkungan budaya yang tidak menunjang
 - kuantitas yang tinggi
 - pendidikan masih rendah
 - berprasangka negatif terhadap sesuatu keadaan
 - tidak memiliki tujuan
20. Yang dimaksud Pancasila sebagai Pandangan Bangsa adalah
- Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur penyelenggaraan negara oleh karena itu segala norma hukum tertulis maupun tidak tertulis harus bersumberkan Pancasila
 - Pancasila merupakan pedoman/penuntun arah bagi warga negara dalam semua aktifitas hidup dan kehidupan
 - Pancasila berperan menjadi dan memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa lain
 - Pancasila merupakan hasil hasil persetujuan bersama wakil-wakil rakyat menjelang Proklamasi Kemerdekaan dan disetujui bersama serta disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945
 - Tujuan pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pelaksanaan dari tujuan yang ingin dicapai oleh Pancasila
21. Asas hukum internasional yang melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua barang yang ada di wilayahnya disebut asas
- teritorial
 - kepentingan umum
 - kebangsaan
 - sun servada
 - kepentingan pribadi
22. Asas kewarganegaraan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang mengikuti kewarganegaraan orangtuanya disebut
- Asas ius soli
 - Asas ius sanguinis
 - Apatriide
 - hak repudiasi
 - bipatriide
23. Menurut Almod dan Powell, sistem politik dapat di kategorikan antara lain
- primitif, anarki, modern
 - tradisional, totaliter, dan demokrasi
 - tradisional, modern, dan demokrasi
 - modern, totaliter, dan demokrasi
 - primitif, tradisional dan modern
24. Salah satu peran serta masyarakat dalam proses pembangunan adalah
- turut berpartisipasi dalam pemerintahan
 - melaporkan setiap kejahatan yang ditemui
 - membayar pajak tepat pada waktunya
 - demonstrasi menuntut setiap kebijakan pemerintah
 - mengawasi kinerja aparat penegak hukum

25. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti
 - a. setiap pembangunan adalah untuk kesejahteraan masyarakat
 - b. setiap pembangunan harus bermanfaat
 - c. setiap aspek pembangunan nasional harus adil dan merata
 - d. setiap pembangunan harus dilakukan bersama antara pemerintah dan rakyat
 - e. setiap aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila
26. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kabinet tidak dapat dibubarkan oleh parlemen karena
 - a. menteri dipilih dan bertanggung jawab kepada presiden
 - b. menteri dipilih dan bertanggung jawab kepada parlemen
 - c. menteri dipilih oleh Presiden dan bertanggung jawab kepada Parlemen
 - d. menteri dipilih oleh parlemen dan bertanggung jawab kepada presiden
 - e. menteri langsung bertanggung jawab kepada parlemen
27. Lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial terdiri atas
 - a. eksekutif dan yudikatif
 - b. eksekutif, legislatif dan yudikatif
 - c. eksekutif dan legislatif
 - d. legislatif, dan yudikatif
 - e. eksekutif, federatif dan yudikatif
28. Asas yang didasarkan pada kekuasaan negara untuk warganegaraanya yaitu setiap warga negara dimanapun berada tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya disebut asas

a. teritorial	d. sun servada
b. kepentingan umum	e. kepentingan pribadi
c. kebangsaan	
29. Kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) setelah perubahan UUD 1945 adalah
 - a. penasehat Presiden
 - b. pembantu Presiden
 - c. dihapus
 - d. memberhentikan Presiden
 - e. pemberi pertimbangan kepada Presiden
30. Pelaksana kekuasaan yudikatif setelah amandemen UUD 1945 adalah
 - a. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya
 - b. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
 - c. KPU, KPK, dan KOMNASHAM
 - d. Presiden dan Wapres
 - e. Mahkamah Agung, dan lembaga peradilan dibawahnya, Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial

31. Dalam suatu masyarakat A tingkat partisipasi dalam kehidupan politiknya rendah sebagai akibat faktor rendahnya tingkat pendidikan. Hal itu berarti dalam masyarakat tersebut dalam taraf budaya politik
- Partisipan (participant Politic Culture)
 - Kaula (Subject Politic Culture)
 - Parokial (Parochial Politic Culture)
 - Kelas Menengah (Middle Politic Culture)
 - Kelas Baawah (Bottom Politic Culture)
32. Salah satu kelebihan sistem pemerintahan parlementer sehingga sistem ini banyak diadopsi oleh negara-negara demokrasi di dunia adalah
- kekuasaan kepala negara bersifat mutlak
 - sistem yang dipraktekan oleh negara-negara maju
 - pemerintah sering berganti-ganti akibat masi tidak percaya
 - perdana menteri dipilih rakyat secara langsung
 - kontrol terhadap kekuasaan eksekutif dapat dilakukan secara efektif melalui parlemen
33. Wujud peran serta anda dalam pembangunan bangsa dan negara adalah
- mengikuti tren yang berkembang
 - memantau kinerja pemerintahan
 - belajar dengan giat dan sungguh-sungguh
 - rajin menabung
 - mengikuti perkembangan berita
34. Perhatikan pernyataan berikut :
- adanya DPD yang dipilih langsung oleh rakyat
 - pengakuan dan perlindungan HAM telah dijamin secara langsung oleh UUD 1945
 - masa jabatan presiden 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
 - MPR dapat memberhentikan Presiden dan atau Wapres secara langsung tanpa pertimbangan MK
- Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kelebihan sistem pemerintahan di Indonesia adalah
- 1 dan 3
 - 2 dan 4
 - 1 dan 2
 - 3 dan 4
 - 2 dan 3
35. Kelebihan sistem pemerintahan Presidensial antara lain sebagai berikut, kecuali
- sistem check dan balance dapat menghasilkan keseimbangan antara organ yang disertai tugas
 - dapat mencegah terjadinya kekuasaan absolut
 - kedudukan badan eksekutif lebih stabil
 - penyusunan program mudah disesuaikan dengan masa jabatan seksekutif
 - menteri lebih berhati-hati menjalankan tugasnya karena dapat dijatuhkan sewaktu-waktu oleh parlemen

36. Asas kewarganegaraan yang menyatakan bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan negara tempat kelahirannya disebut
 - a. Asas ius soli
 - b. Asas ius sanguinis
 - c. Apatride
 - d. hak repudiasi
 - e. bipatride
37. Dalam Pemilu 2009 tingkat keikutsertaan rakyat Indonesia dalam pemungutan suara mencapai 70% dan sangat aktif serta penuh kesadaran. Hal itu berarti dalam masyarakat tersebut dalam taraf budaya politik
 - a. Partisipan (participant Politic Culture)
 - b. Kaula (Subject Politic Culture)
 - c. Parokial (Parochial Politic Culture)
 - d. Kelas Menengah (Middle Politic Culture)
 - e. Kelas Baawah (Bottom Politic Culture)
38. Teori tentang asal mula terjadinya suatu negara yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau dalam bukunya "Do Contrac Social" adalah bahwa negara timbul karena
 - a. adanya organisasi kemasyarakatan
 - b. atas dasar perjanjian masyarakat
 - c. belum ada yang menguasai
 - d. atas dasar kekuasaan belaka
 - e. atas dasar kehendak Tuhan
39. Fungsi partai politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antara lain sebagai sarana
 - a. latihan dan penggodokan simpatisan partai
 - b. pengendalian berbagai kepentingan rakyat
 - c. hubungan pemerintah dengan rakyat
 - d. pengendalian simpatisan partai
 - e. pembentukan kader politik
40. Yang mendorong terjadinya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah
 - a. ekspansi militer yang makin meluas dan melibatkan banyak Negara
 - b. gagalnya pertemuan Presiden Wilson dengan Mussolini dari Italia
 - c. gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan Keamanan Dunia
 - d. tidak adanya institusi yang berfungsi sebagai mediator
 - e. munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral

B. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar!

1. Jelaskan prinsip yang dilaksanakan dalam pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia yang disebut dengan "bebas aktif"!

2. Sistem apakah yang dipakai pada Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota?
3. Jelaskan dan berikanlah contoh apa yang disebut dengan Kabinet Parlementer!
4. Apakah yang dimaksud dengan ciri negara hukum Indonesia adalah adanya kekuasaan kehakiman yang bebas?
5. Apakah yang dimaksud dengan Gagasan konstitusionalisme pada dasarnya berisi jaminan atas hak warga negara?
6. Dimana kita dapat melihat secara jelas mengenai Prinsip, tujuan, bentuk, sifat dan Dasar Negara Indonesia dalam mendirikan Negara Kesatuan RI? Jelaskan!
7. Sebutkan apa sajakah fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara!
8. Sebutkanlah Lembaga apa sajakah yang menyelenggarakan pemerintahan dalam sistem pemerintah presidensial!
9. Jelaskan apa yang dimaksudkan dengan Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama ! Berikanlah contoh kasusnya!
10. Jelaskan mengapa berdasarkan sejarah ketatanegaraan RI memberikan keyakinan kepada kita bahwa UUD 1945 lebih menjamin kestabilan pemerintahan!

Apatriide	: orang yang tidak memiliki kewarganegaraan
Asas hukum	: kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan pada hukum yang merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya sebagai pembawaan umum; tetapi tidak boleh tidak harus ada (P. Scholten).
Bellum omnium contra omnes	: perang antara semua melawan semua.
Bhineka Tunggal Ika	: asas yang mengajarkan adanya persatuan dan sikap toleransi kehidupan antar suku-suku bangsa, antaretnis, antar golongan dan antar umat beragama yang berbeda-beda.
Bipatriide	: orang yang memiliki kewarganegaraan ganda
By the grace of God	: dengan berkat dan rahmat Tuhan
Charakter Gemeinschaft	: persamaan nasib/karakter.
Check and Balance	: Sistem mekanisme pengawasan yang dilakukan
CHR (The Commission on Human Rights)	: Komisi Hak Asasi Manusia
Civil State	: keadaan bernegara
Community	: masyarakat
Covenant	: perjanjian
Crime against humanity	: kejahatan kemanusiaan
Crime of aggression	: kejahatan agresi
Crime of genocide	: kejahatan genosida
Crime of war	: kejahatan perang dan pemerintahan
Dasar negara	: ajaran yang merupakan gagasan pemikiran tentang kehidupan dunia serta kehidupan bernegara yang menjadi pedoman dasar dalam mengatur, memelihara serta mengembangkan kehidupan suatu negara.
Dasar Negara Pancasila	: prinsip pengarah (guiding principle) yang menjadi dasar, arah serta tujuan pada penyelenggaraan serta pengembangan kelangsungan kehidupan berbangsa serta bernegara Indonesia.
Declaration des droits de l'homme et du citoyen	: Pernyataan Hak-Hak Manusia dan Warga Negara.
Declaration Universal of Human Rights	: Deklarasi Universal Hak Asasi
Delegated powers	: pendelegasian wewenang
Demokrasi	: Kekuasaan ada di tangan rakyat
Diktator	: Kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak
Doktrin	: pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya.
Eksekutif	: kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk di dalamnya kekuasaan mengadili pelanggar undang-undang.
Eksekutif	: Kekuasaan untuk menjalankan undang-undang
Fasisme	: pada paham ini menganut sistem Kediktatoran yang dipersamakan dengan Otoritarian.
Federatifs	: kekuasaan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.
Freedom from Fear	: kebebasan dari ketakutan
Freedom from Want	: kebebasan dari kemelaratan
Freedom of Religion	: kebebasan untuk beragama
Freedom of Speech	: kebebasan untuk berbicara dan berpendapat

Fundamentalisme	: sebuah sistem politik dalam negara yang menetapkan agama sebagai ideologi.
General will	: kehendak umum
Genocide	: usaha sistematis untuk menghabisi
Gotong royong	: kerjasama untuk kepentingan bersama yang hasilnya dinikmati bersama.
Gregariousness	: naluri manusia untuk selalu hidup dengan orang lain
Hak	: kewenangan untuk bertindak.
Hak Opsi	: hak untuk memilih menjadi warga negara
Hak Repudiansi	: hak untuk menolak menjadi warga negara
HAM	: hak Asasi Manusia; Hak yang dimiliki oleh semua umat manusia disegala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia (A.J.M. Milne); seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999).
Homo Sapiens	: suatu makhluk yang berakal dan budi
House of Commons	: Majelis Rendah (dalam sistem perwakilan di Inggris)
House of Lords	: Majelis Tinggi (dalam sistem perwakilan di Inggris)
House of Representative	: pemegang kekuasaan legislatif di Amerika Serikat
Ideologi	: konsensus (mayoritas) warga negara tentang nilai-nilai dasar negara yang ingin diwujudkan dengan mengadakan negara mereka itu.
Infrastruktur Politik	: struktur politik masyarakat
Ius Constituendum	: yaitu hukum yang diharapkan atau dicita-citakan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, rancangan undang-undang yang sedang diproses oleh DPR bersama Pemerintah.
Ius Constitutum	: hukum yang berlaku dalam suatu negara pada saat sekarang disebut juga hukum positif.
Ius Sangunis	: asas berdasarkan keturunan
Ius Soli	: asas berdasarkan tempat lahir
Kekeluargaan	: asas yang mengajarkan adanya penghargaan dan penghormatan terhadap hak dan kewajiban manusia sebagai anggota masyarakat.
Kepribadian bangsa Indonesia	: sebuah tatanan kehidupan bagi bangsa Indonesia yang terpolo secara menyeluruh pada nilai yang termuat serta diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia.
Konvensi	: merupakan suatu aturan yang tidak tertulis yang ada dan dipelihara dalam praktik penyelenggaraan negara disuatu negara.
Law enforcement	: proses penegakan hukum
Legislatif	: kekuasaan membuat undang-undang.
Liberalisme	: ideologi paham kebebasan, yang mengakui hak-hak individual yang dilindungi oleh campur tangan Negara serta badan-badan yang lain.
Magna Charta	: piagam perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan (1215).
Monarki	: sistem pemerintahan berbentuk kerajaan
Monoisme	: suatu prinsip atau pandangan yang menolak adanya golongan-golongan dalam masyarakat.
Musyawaharah	: sebuah keputusan atau menentukan keputusan yang didasarkan pada kepentingan bersama atau rakyat.
Naluri	: hasrat
Nasionalisme	: paham kebangsaan atau semangat kebangsaan.
Nomokrasi Islam	: konsep negara hukum yang pada umumnya diterapkan di negara-negara Islam.
Opinio necessitatis	: pendapat bahwa demikianlah seharusnya.
Otokrasi	: kekuasaan ada di tangan satu orang yang menjadi penguasa

Pactum objectionis	:	perjajian antarindividu untuk membentuk negara.
Pandangan Hidup	:	sebuah pemersatu bangsa untuk mencapai kesejahteraan serta kebahagiaan lahir serta batin bangsa Indonesia yang mempunyai bermacam-macam suku bangsa.
Personal rights	:	hak asasi pribadi
Political rights	:	hak asasi politik
Powers constitutif	:	wewenang membentuk undang-undang dasar sendiri serta wewenang mengatur bentuk organisasi sendiri dalam kerangka dan batas-batas konstitusi federasi
Poverty rights	:	hak asasi ekonomi
Procedural rights	:	hak asasi untuk memperoleh perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan
Rechtsstaat	:	konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Eropa-Kontinental seperti Belanda, Jerman, dan Prancis.
Revolusi	:	perubahan ketatanegaraan atau keadaan sosial yang dilakukan dengan jalan kekerasan.
Revolusi Amerika	:	perang kemerdekaan rakyat Amerika
Rights of legal equality	:	hak asasi untuk memperoleh
Rule of Law	:	konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara Anglo-Saxon. Misalnya, Inggris dan Amerika Serikat.
Senat	:	dewan perwakilan rakyat yang tertinggi
Separation of power	:	pemisahan kekuasaan dalam pemerintahan negara.
Sistem	:	suatu sarana yang menguasai keadaan dan pekerjaan agar dalam menjalankan tugas secara teratur, atau suatu tatanan dari hal-hal yang saling berkaitan dan berhubungan sehingga membentuk suatu kesatuan dan satu keseluruhan (Prof. Sumantri).
Social and cultural rights	:	hak asasi sosial dan kebudayaan
Social Animal	:	hewan sosial
Socialis Legality	:	konsep negara hukum yang diterapkan di negara-negara komunis.
Sumber hukum	:	segala yang menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yaitu aturan-aturan yang pelanggaran-pelanggarannya dikenai sanksi yang tegas dan nyata.
Suprastruktur Politik	:	struktur Politik Pemerintah
Tata hukum	:	hukum positif atau hukum yang sedang berlaku di dalam suatu negara saat ini .
Traktat	:	perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan.
UDHR (The Universal Declaration of Human Rights)	:	Pernyataan Sedunia mengenai Hak Asasi Manusia
Unsur konstitutif	:	unsur pembentuk sebagai unsur mutlak, unsur yang harus ada untuk terjadinya negara.
Voting	:	pemungutan suara
Yudikatif	:	kekuasaan mengadili terhadap pelanggar undang-undang.
Yudikatif	:	kekuasaan untuk mengawasi terhadap
Yurisprudensi	:	keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.

- Adam Jamrozik, 2004. *The Chains of Colonial Inheritance : Searching for Identity in a Subservient Nation*. Sydney: University of New South Wales Press Ltd.
- Adnan Buyung Nasution. 2001. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia : Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956 - 1959*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta .
- Ahmad Fauzan. 2004. *Himpunan Undang-undang Lengkap tentang Badan Peradilan*. Bandung : Yarama Widya.
- Almond Powel. 1978. *Comparative Politics: System, Process, and Policy*. Boston: Brown Ltd.
- Anderson, Bennedict. 2001. *The Nation as Imagined Community*. Oslo: University of Oslo Press.
- A.S. Hikam. 2000. *Islam, Demokratisasi, dan Pemberdayaan Civil Society*. Jakarta: Erlangga.
- Austin Ranmey. 1985. *A Study of The General Election*. New York: American Enterprise Institute for Public Policy Research.
- Azyumardi Azra. 2007. *Keragaman Suku, Agama, Ras, Gender sebagai Modal Sosial untuk Demokrasi dan Masyarakat Madani: Resiko, Tantangan dan Peluang*. Yogyakarta : Institute for Community Behavioral Change (ICBC) dan Konrad Adenauer Stiftung (KAS) .Yogyakarta, 13 Agustus, 2007
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Brook-Shepherd, Gordon. 1996. *The Austrians: A Thousand-year Odyssey*. Harper Collins.
- C. de Rover. 2000. *To Serve & To Protect : Acuan Universal Penegakan HAM*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Charles Himawan. 2003. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta: Gramedia. .
- Cahrles E. Merrien. 1991. *The Making of Citizens: A Comparative Study of Methods of Civic Training*. Chicago: University of Chicago Press.
- David Beetham & Kevin Boyle. 2004. *Demokrasi : 80 Tanya Jawab*. Yogyakarta : Kanisius.
- Deliar Noer. 1990. *Mohammad Hatta, Biografi Politik*. Jakarta: LP3ES.
- Eko Ernada. 2005. *Penyelesaian Sengketa Ambalat*. Published at: Jawa Pos/ Indo Pos, Rabu, 16 Mar 2005.
- Ernest Renant. 1992. *La Reforme Intellectuelle et Morale*. Paris: Calmann-Levy.
- Franz Magnis Suseno. 2000. *Etika Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Fred W. Riggs. 2008. *A Critique of Fred W. Riggs "Politic of Public Administration"*. Volume 9 Issue 1. New York: Interntional Public Management Review.
- G. Bingham Powell.2000. *Liberal Democracy*. London : Cambridge University Press.
- G. Jellinek. 1959. *Allgemeinen Staatsre*. Germany.
- Ginanjjar Kartasasmita, A. Prabowo, Bambang Kesowo ... et al. 1995. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Cet 1. Jakarta : Sekretariat Negara. ISBN 979-8300-04-1, 979-83000.
- G.N. Atiyeh, I.M. Oweiss. 1988. *Ibn Khaldun, The Father of Econimics in Arab Civilization: Challenges and Responses*. New York: State University of New York Press.
- Greta O. Wilson (ed.). 1998. *Regents, reformers, and revolutionaries: Indonesian Voices of Colonial*

- Days. Asian Studies at Hawaii, no 21.* Honolulu : The University Press of Hawaii.
- Hans Kohn. 1996. *Nationalism and Liberty: The Swiss Example.* London: George Allen and Unwin Inc.
- Harlord D. Laswell. 1976. *On Political Sociology.* Chicago: University of Chicago Press.
- Hartanti, Evi, S.H., 2005. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta : Sinar Grafika
- Hommes, H.J. Eikema. 1974. *The Functions of Law and The Role of Legal Principles.* New York: Philosophia Reformata.
- Jimly Asshiddiqie. 2003. *Struktur Ketatanegaraan Indonesia setelah Perubahan Keempat UUD tahun 1945, Makalah Seminar Pembangunan Hukum Nasional VII.* Denpasar : Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
- _____. 2005. *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional.* Jakarta : Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Kaelan, 2002, *Pendidikan Pancasila.* Yogyakarta: Nagatirta.
- Kansil, Prof CST, 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Koerniatmanto. 2003. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme: Memahami Keterlibatan Sosial Gereja.* Jakarta: Kanisius.
- Leslie Holme, *"Communist and Post-Communist Systems,"* New York : Cambridge University Press.
- Mansour Fakhri, Antonius M. Indianto. 2003. *Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan.* Yogyakarta : Insist Press.
- Marpaung, Leden, S.H., 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua.* Sinar Grafika : Jakarta.
- Maswardi Rauf, *Perkembangan UU Bidang Politik Pasca Amandemen UUD 1945, (Pembanding Tulisan makalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie.SH berjudul "Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945" yang disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional di Denpasar, Bali, pada tanggal 14-18 Juli 2003.)* h.5.
- Michael Banton. 1999. *Racial and Ethnic Competition.* New York : Cambridge University Press.
- Miriam Budihardjo. 1985. *Dasar-dasar Ilmu Politik.* Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Mary Hawkesworth and Maurice Kogan. 1992. *Encyclopedia of Government and Politics.* London: Routledge.
- Musaneff. 1983. *Manajemen Kepegawaian di Indonesia.* Jakarta: Gunung Agung.
- P. Scholten. 2005. *Struktur Ilmu Hukum.* Bandung: Alumi.
- Parsudi Suparlan. *Kesetaraan Warga dan Hak Budaya Komuniti dalam Masyarakat Majemuk Indonesia, (Antropologi Indonesia, 66, 2001).*
- Paul S. Baut dan Benny K. Harman. 1998. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia.* Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI).
- Ramlan Surbakti. 2003. *Memahami Politik Pembangunan Pancasila.* Jakarta: Gramedia.
- Robert A. Dahl. 2006. *On Political Equality.* University of Yale Press.
- Robert Wesson. 1998. *Politics: Individual and State.* New Jersey: Prentice Hall.
- Ronald H. Chilcote. 2001. *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm.* Colorado: Westview Press.
- Rusadi Kartaprawira. 2004. *Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar.* Jakarta: Sinar Baru Algesindo.

- Samuel Huntington. 2004. *Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Ploitik Dunia (The Clash of Civilations and the Remaking of World Order)*. Yogyakarta: Qalam.
- S. Pamudji. 2001. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Shriver, Donald W. 2005. *An Ethics for Enemies: Forgiveness in Politics*. London: Oxford University Press,
- Stassen, Glenn. 2002. *Just Peacemaking: transforming initiatives for Justice and Peace*. Kentucky: Westminster/John Knox Press.
- The Carter Center. 2004. *Indonesia Election Report*. Atlanta : The Carter Center.
- Todung Mulya Lubis 1993. *In Search of Human Right : Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996 - 1990*. Jakarta : Gramedia & SPES Foundation.
- Undang-undang Dasar 1945, Amandemen 4.*
- Undang-undang No.7/1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat*
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*
- Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*
- Undang-undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
- Undang-undang No.19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.*
- Van Apeldoorn. 1950. *Inleiding tot de Studie van het Nederlands Recht*. Amsterdam.
- Winataputra, Udin S. Prof.Dr.MPd, 2006. *Pendidikan Kewargane-garaan Menuju Masyarakat Demokrasi dan Berkeadaban*. Jakarta: Ditjen Dikti.

A

Achmad Ali 39
 Amandemen 202, 230, 233, 234
 amandemen 201, 202, 231, 233
 Amendemen 147, 148, 160
 amendemen 143, 148, 152
 amnesti 84, 204, 205, 232
 Anarkisme 16, 35
 anarkisme 16
 Apatride 161, 164
 apatride 165, 177, 194
 Asas 42, 136, 161, 163, 164, 177, 194, 196
 asas 20, 40, 41, 42, 46, 74, 98, 136, 140, 142, 163, 164, 171, 177, 194, 196, 197, 198, 210, 233
 Austin Ranney 163, 196, 216, 219

B

Bipatride 161, 164
 bipatride 165, 173, 177, 194, 197

C

CF. Strong 142, 158
 chauvinisme 28
 Check and Balance 224
 check and balance 148, 223

D

Declaration of Independence 92, 136, 137, 186
 Demokrasi 155, 159, 199, 206, 211, 215, 217, 219, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 243, 244

demokrasi 20, 22, 29, 140, 162, 179, 185, 187, 189, 200, 206, 208, 209, 210, 211, 215, 218, 219, 220, 227, 229, 230, 231, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 244, 245, 246, 247, 248

Demokrasi Liberal 211, 229, 230, 231, 238
 Demokrasi liberal 238
 demokrasi liberal 238, 243
 Demokrasi Terpimpin 211, 215, 231
 Demokrasi terpimpin 231
 demokrasi terpimpin 243
 Djokosutono 42
 Doktrin 46, 47
 doktrin 45, 46, 80

E

ECS. Wade 142, 158
 Etnis 106
 etnis 23, 35, 87, 98, 100, 113, 156
 evolusi 145
 ewuh pekewuh 103

F

Fasisme 35, 131, 135
 fasisme 135, 157
 federasi 17, 18, 229
 Fundamentalisme 131, 135, 159
 fundamentalisme 157

G

Genosida 109
 genosida 59, 97, 98, 100, 112, 119
 grasi 54, 55, 84, 185, 204, 206, 224, 232

Gratifikasi 72
 gratifikasi 72, 76
 guilding principle 137
 Gus Dur
 144, 155, 156, 157, 215

H

HAK 85
 Hak 43, 44, 59, 77, 78, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 105, 108, 109, 110, 111, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 161, 171, 179, 180, 182, 185, 188, 197, 198, 208
 hak 3, 12, 14, 22, 24, 28, 43, 44, 50, 59, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 101, 103, 104, 106, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 134, 135, 136, 142, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 154, 156, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 171, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 201, 212, 220, 221, 224, 225, 232, 235, 236
 hak opsi 165, 167
 hak repudiasi 165, 167
 Hakiki 85, 88, 118
 hakiki 4

I

Individualisme 16, 35
 individualisme 16, 33
 Ius Constituendum 49
 Ius Constitutum 49

Ius Sanguinis 164, 196
ius sanguinis 82, 171, 177,
197
Ius Soli 164, 194, 196
ius soli 171, 177, 197, 198

J

John Locke 33, 36, 92

K

KC. Wheare 141, 158
Kebiasaan 45
kebiasaan 38, 45, 46, 49,
67, 80, 81, 103, 108
Kekuasaan 47, 51, 70, 83,
103, 201, 204, 206, 207,
224, 226, 227, 233, 234,
236
kekuasaan 2, 7, 8, 9, 11,
12, 14, 31, 35, 43,
46, 47, 50, 51, 52,
54, 55, 56, 61, 63,
66, 70, 72, 83, 84,
95, 103, 143, 144,
145, 147, 148, 151,
154, 155, 158, 160,
163, 177, 195, 200,
201, 202, 203, 204,
206, 207, 208, 209,
211, 213, 214, 216,
217, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 226,
227, 228, 229, 231,
232, 233, 234, 235,
236, 239, 244, 245, 246
Kekuasaan Eksekutif 201
Kekuasaan eksekutif 47, 201,
224, 234
kekuasaan Eksekutif 203
kekuasaan eksekutif 211, 220,
227
Kekuasaan Legislatif 201
Kekuasaan legislatif 47, 201,
233
kekuasaan legislatif 158, 204,
221, 227, 228, 232

Kekuasaan Yudikatif 201, 233
Kekuasaan yudikatif 47, 201,
224, 234
kekuasaan Yudikatif 201
kekuasaan yudikatif 206, 207
kodrati 2, 3, 44, 87
Kolusi 70
kolusi 22, 76
Komisi Yudisial 56, 143, 202,
205, 206, 207, 208, 232
komisi yudisial 233
Komunisme 16, 124, 131,
134, 159
komunisme 16, 33, 133, 134,
135, 144, 157
KONSTITUSI 73, 131, 170
Konstitusi 51, 55, 56, 57,
84, 95, 119, 131, 139,
140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 148, 152, 153,
154, 157, 158, 159, 201,
202, 203, 206, 207, 221,
227, 231, 232, 233, 236,
243
konstitusi 10, 13, 15, 17,
31, 50, 88, 91, 93, 95,
104, 108, 122, 132, 139,
140, 141, 142, 143, 144,
145, 146, 153, 154, 155,
157, 158, 159, 160, 180,
187, 200, 205, 221, 227,
228, 229, 242
Konvensi 10, 14, 36, 46, 85,
90, 109, 110, 111, 143,
225
konvensi 45, 46, 49, 109,
123, 140, 143, 158, 222
Korupsi 37, 60, 64, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 79, 81
korupsi 22, 57, 60, 70, 71,
72, 73, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 84, 105
kuratif 81

L

Leon Duguit 39

Liberalisme 102, 103, 124,
131, 134, 159, 247
liberalisme 33, 120, 133,
157, 238

M

Magna Charta 85, 92, 118,
186
Makhluk 1, 3, 4
makhluk 2, 3, 4, 33, 35, 36,
86, 88, 89, 102, 118,
134, 137, 238
Makhluk Individu 3
Makhluk individu 1
makhluk individu 2, 4, 33,
36, 89
Makhluk Sosial 4
Makhluk sosial 1
makhluk sosial 2, 33, 36, 89,
137, 238
Marxisme 131, 134, 159
marxisme 157
Meyers 39
Monoisme 135
Montesquieu 46, 213
Musaneuf 39

N

Nasionalisme 1, 23, 24, 26,
27, 28, 29, 31, 35, 36
nasionalisme 2, 5, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31,
33, 34, 136
Naturalisasi 169, 195
naturalisasi 166, 169, 197
Nepotisme 70
nepotisme 22, 76
Norma 39, 82, 83
norma 39, 40, 42, 45, 78,
81, 82, 83, 132, 133,
137, 139, 140, 152, 213

O

Otonomi 205
otonomi 20, 23, 101, 148,
205, 235

P

Padmo Wahyono 42
Patriotisme 1, 25, 26, 28,
31, 36
patriotisme 2, 25, 26, 27,
28, 29, 31
preventif 81

R

rehabilitasi
63, 66, 204, 206,
232
Revolusi 85, 92, 226
revolusi 145, 226, 227

S

Simorangkir 40
Sosialisme
16, 35, 131, 134,
159
sosialisme
16, 33, 133, 134,
157, 160
Sri Soemantri 142, 158
Sudikno Mertokusumo 40

T

Traktat 48, 109
traktat 45, 48, 49, 80, 109
Traktat bilateral 48
Traktat multilateral 48
Trias Politica 46

U

Universal 85, 87, 89, 90,
92, 93, 96, 108, 118
universal
87, 88, 92, 93, 94,
98, 108, 118, 120, 121,
180, 238
Utrecht 39

V

voting 237, 238, 247

Y

Yurisprudensi 48
yurisprudensi 45, 46, 48,
80, 84

Z

zoon politicon 35

Kunci Jawaban PKn Kelas X

BAB 1

- A
1. E
 2. A
 3. A
 4. D
 5. C
 6. B
 7. E
 8. A
 9. B
 10. C
 11. C
 12. B
 13. A
 14. A
 15. B
 16. D
 17. C
 18. C
 19. D
 20. C

- B
1. Untuk menjawab, anda dapat membaca dan memahami kembali sub bab a. Manusia sebagai Makhluk Individu dan b. Manusia sebagai Makhluk Sosial (hal 3 & 4)
 2. Sifat monopoli perlu dipunyai oleh negara, karena dengan sifat tersebut negara bisa mengatur semua aspek kehidupan warga negaranya, seperti negara monopoli pemungutan segala jenis/bentuk pajak, demi dipergunakan untuk membangun negara (dikembalikan penggunaannya kepada warga negaranya)
 3.
 - a. Mengembangkan semangat bela negara
 - b. Mengembangkan sikap dan tindakan untuk mencintai produk-produk dalam negeri
 - c. Belajar dan bekerja keras untuk mengejar cita-cita
 - d. Menjaga ketertiban umum dan mendahulukan kepentingan umum

4. Indonesia termasuk kedalam teori perjuangan. Artinya bahwa pembentukan negara Indonesia adalah hasil dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, merebut kemerdekaannya dari genggaman penjajah. "Separation of Power: adalah pembagian kekuasaan dalam negara yaitu eksekutif, yudikatif, legislatif
5. Indonesia adalah suatu negara yang sangat majemuk, beragam suku, agama, bahasa daerah, kebudayaan daerah, etnis, golongan (ideologi). Kondisi semacam ini adalah sangat rentan terjadinya perpecahan (desintegrasi) dan konflik. Dengan dipilihnya bentuk negara kesatuan ini maka akan timbul simbol-simbol perekat bangsa (lambang negara, bahwa persatuan, konstitusi negara dan sebagainya) dan negara

BAB 2

- A
1. C
 2. B
 3. A
 4. B
 5. B
 6. D
 7. C
 8. B
 9. A
 10. C
 11. E
 12. C
 13. A
 14. A
 15. C
 16. B
 17. C
 19. A
 19. E
 20. C

- B. 1. Faktor-faktor pendorong penyebab gejala korupsi pada suatu negara, antara lain,
- Anggapan bahwa korupsi adalah sudah menjadi suatu "kebiasaan".
 - Rendahnya kesadaran hukum
 - Kurang tegasnya dalam penindakan hukum bagi pelaku korupsi.
 - Lemahnya pengawasan
2. Yurisprudensi, adalah keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara yang serupa.
3. Suatu perkara dilanjutkan ke mahkamah agung (MA), bila:
- perkara tersebut merupakan/ berujung pada permohonan kasasi dan sengkewa dan sengkewa tentang kewenangan
 - perkara tersebut berujung pada permohonan peninjauan kembali (PK)
4. Kalian dapat membacanya langsung pada kitab KUHP.
5. Kalian dapat menjawabnya dengan membaca pada sub bab 2. Jenis lembaga Peradilan di Indonesia

BAB 3

- A. 1. E
2. C
3. C
4. E
5. A
6. D
7. D
8. B
9. E
10. B
11. D
12. B
13. B
14. E
15. D
16. D
17. B
18. B

19. B
20. E

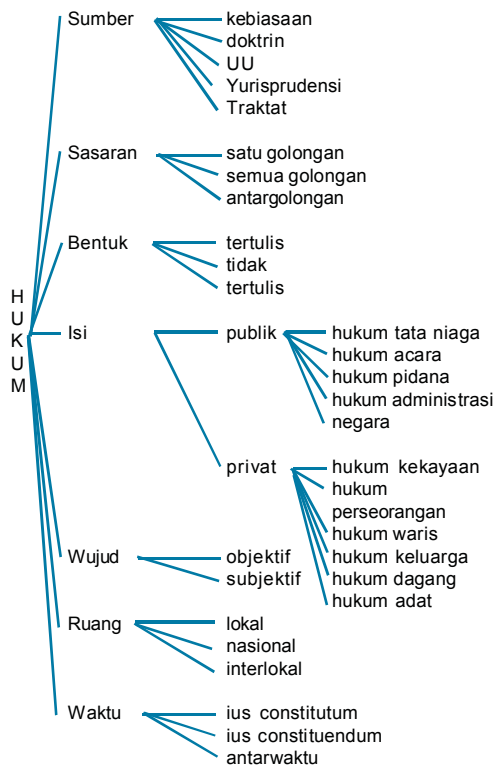
- B. 1. Karena meskipun HAM adalah hak asasi manusia yang bersifat hakiki dan bersifat kodati, namun demikian dalam pelaksanaannya harus tetap memperhatikan berbagai kepentingan umum, keselarasan antarmanusia, dan kepentingan negara
2. Karena titik berat daipada ideologi komunisme pada hakikatnya adalah penghilangan hak-hak pribadi seseorang manusia dan terlalu mengagungkan kepentingan komunal, sedangkan ideologi liberalisme adalah menitikberatkan kepada pengagungan terhadap hak-hak individual (pribadi) seorang manusia dan mengesampingkan hak-hak negara
3. Peran serta aktif seluruh komponen masyarakat, dalam penegakan HAM sangat diperlukan agar:
- Meminimalisir pelanggaran HAM
 - Memperkuat segenap perangkat hukum penegakan HAM
 - Meminimalisir penafsiran yang salah tentang pelaksanaan HAM
4. Konsekuensi terhadap manusia Indonesia, yaitu lahirnya suatu Keppres No 50 tahun 1993 (7 Juni 1993), yang merupakan dasar dibentuknya komnas HAM. Dimana Keppres No 50 tahun 1993, dilakukan atas rekomendasi Lokakarya I HAM yang diselenggarakan oleh Deplu RI yang disponsori oleh PBB.
5. Kalian dapat menjawabnya dengan membaca pada hal 104

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 1

- A. 1. D
2. C
3. A
4. A
5. B
6. D

7. D
8. C
9. C
10. C
11. E
12. E
13. E
14. D
15. C
16. E
17. A
18. E
19. D
20. D
21. A
22. E
23. A
24. B
25. C
26. C
27. D
28. B
29. A
30. E

B. 1.



2. Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk pribadi
Nepotisme adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang, dikarenakan faktor kekerabatan (family)
Kolusi adalah perbuatan berupa suatu persengkolan yang dapat berupa tindakan yang mengakibatkan kerugian pada negara atau kepentingan umum
3. Akibat-akibat bagi Indonesia:
 - a. Penutupan kegiatan ekonominya di Indonesia
 - b. Larinya modal asing yang tadinya ditanamkan, ke luar negeri
 - c. Dengan penutupan usaha, berujung pada PHK karyawan
 - d. Memperbesar angka pengangguran
4. Tujuan nasional dan internasional bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945
 - a. Tujuan nasional
 - Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
 - Memajukan kesejahteraan umum
 - Mencederaskan kehidupan bangsa
 - b. Tujuan internasional
Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
5. Hak adalah kewenangan untuk bertindak, sebagai contoh: seseorang ketua RT berhak memimpin di wilayah RT-nya karena ia mendapatkan mandat di seluruh warga untuk dapat mengatur tata laksana kehidupan yang baik di lingkungan RT tersebut.
Hak asasi adalah hak-hak yang dimiliki manusia dan bukan karena pemberian kewenangan. Hak ini berasal dari Tuhan dan manusia memilikinya karena ia adalah seorang manusia. Contoh: hak hidup, hak memeluk agama, hak berpolitik

6. Tokoh atau pemimpin dalam masyarakat akan menjadi simbol kebaian masyarakatnya. Hal ini berkaitan dengan tingkat kepercayaan warga terhadap pemimpinnya. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat kepada pemimpinnya, semakin berkualitas kepemimpinannya
7. Upaya-upaya memperkecil dampak korupsi di Indonesia
 - a. Pengawasan dan kontrol masyarakat luas melalui surat pembaca, kotak pos, opini, dan sebagainya melalui media massa terhadap tindak pidana korupsi
 - b. Pengawasan lembaga-lembaga yang berpotensi terjadinya penyimpangan (korupsi) oleh KPK dan LSM-LSM yang berkecimpung dalam bidang penanggulangan korupsi.
8. Terbentuknya suatu negara menurut teori kekuasaan/kekuatan, adalah berpendapat bahwa negara timbul karena orang-orang kuat menaklukkan orang-orang lemah. Untuk dapat menguasai orang-orang lemah maka didirikanlah organisasi, yaitu negara.
9. Untuk dapat menjawab pertanyaan pada soal no 9, kamu dapat menyimak kembali A. Mengenal Hakikat Bangsa dan Negara
10. Untuk dapat menjawab pertanyaan pada soal nomo 10, kalian dapat menyimak kembali 3. Peradilan terhadap Pelanggar HAM Internasional pada hal 111
11. Jawablah menurut pendapat dan opini kalian sendiri, namun sebaiknya tetap membaca pada sub bab B. Hakikat Negara dan Bentuk-Bentuk Kenegaraan
12. Beberapa alasan mengapa ajaran komunisme tidak bisa diterapkan di Indonesia
 - Pahami komunisme melarang rakyatnya memeluk agama karena dianggap menghambat kemajuan
 - Pahami komunisme, hanya mengenal 1 partai yaitu partai komunis. Jadi, tidak ada partai yang lain, artinya komunisme meniadakan demokrasi.
 - Pahami komunisme, melarang segala bentuk swasta di bidang perekonomian. Semuanya dipegang oleh pemerintah (partai komunis)
13. Hak asasi demokrasi adalah hak-hak asasi manusia di bidang demokrasi, seperti:
 - hak atas berpikir dan beragama
 - hak kebebasan berkumpul secara damai
 - hak atas kebebasan dan persamaan
 - hak berpendapat tanpa mengalami gangguan
 - hak untuk membentuk perserikatan
14. Karena pada tiap negara memiliki nilai-nilai dasar dan nilai-nilai budayanya sendiri-sendiri. Sehingga dalam pelaksanaannya pun HAM harus disesuaikan dengan budaya dan etika serta moral masyarakat setempat
15. Pencantuman HAM sebaiknya tercantum dalam konstitusi negara adalah agar benar-benar menjadi dasar pijakan hukum-hukum di bawahnya. Mengingat konstitusi adalah hukum dasar pada suatu negara

BAB 4

- A 1. B
2. D
3. C
4. A
5. B
6. D
7. D
8. C
9. D
10. C
11. A
12. D

13. A
 14. D
 15. C
 16. A
 17. A
 18. D
 19. B
 20. A
- B. 1. Pembukaan UUD 1945 berisi tentang hukum dasar bernegara dan cita-cita serta melahirkan hukum negara yang dilandasi tujuan negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Kedudukan Pembukaan UUD dalam NKRI adalah sebagai berikut.
- a. Sebagai pokok kaidah negara yang menentukan adanya UUD 1945 serta Pancasila sebagai dasar dari Pembukaan UUD 1945
 - Sebagai tertib hukum tertinggi di NKRI
 - Memiliki kedudukan yang kuat dan tetap
 2. Fungsi dan kedudukan Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia adalah sebagai berikut.
 - a. Sebagai dasar negara
 - b. Sebagai kepribadian negara
 - c. Sebagai pandangan hidup bangsa
 - d. Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia.

Untuk lebih jelasnya kalian dapat mempelajari guna menjawabnya pada 4. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia, hal 136-138)
 3. Kalian dapat menjawabnya secara rinci setelah membaca dan memahami tentang 5. Sikap Positif Terhadap Konstitusi Negara, (hal 152-154)
 4. Dilakukannya amandemen UUD 1945, dimaksudkan untuk memperbaiki hal-hal berikut ini
 - a. Menegaskan dan memperkuat peran badan legislatif
 - b. Pembatasan kekuasaan eksekutif
 - c. Pembaharuan badan-badan negara
 - d. Menegaskan adanya otonomi daerah
 5. Pancasila ialah dasar NKRI yang juga sebagai norma tertinggi. Pancasila sebagai dasar negara dapat disebut juga sebagai norma dasar, norma pertama, norma fundamental negara yang dapat menjadi sumber pembentukan-pembentukan dan sumber konstitusi.

BAB 5

- A. 1. D
2. D
3. A
4. A
5. D
6. D
7. A
8. E
9. D
10. B
11. C
12. C
13. E
14. D
15. B
16. C
17. A
18. A
19. E
20. E
- B. 1. Status orang tersebut adalah Apatride (selanjutnya baca kembali materi tentang Apatride, hal 164)
2. Status kewarganegaraan bagi seseorang berarti orang tersebut memiliki hubungan hukum dalam bentuk hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya.
3. Untuk menjawabnya, kalian dapat menyimal kembali pada hal 168-177
4. Untuk menjawabnya kalian dapat menyimak kembali pada materi "Bentuk-Bentuk Penghargaan terhadap Persamaan Kedudukan Warga Negara" (hal 193)

5. Setiap WNI mempunyai hak dasar seperti yang diatut dalam UUD 1945. Yaitu hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia adalah hak yang bersifat mendasar dan melekat pada diri manusia sejak dia lahir serta keberadaannya dijamin oleh negara. Sedangkan hak warga negara adalah ada yang bersifat mendasar dan melekat pada diri seseorang semenjak ia resmi menjadi warga negara tersebut dan dijamin oleh negara.

BAB 6

- A
1. C
 2. D
 3. C
 4. D
 5. D
 6. E
 7. D
 8. C
 9. B
 10. B
 11. A
 12. C
 13. D
 14. E
 15. D
 16. D
 17. D
 18. B
 19. C
 20. E

- B
1. Infrastruktur politik adalah suatu lembaga politik yang ada di masyarakat. Infrastruktur politik meliputi: partai-partai politik, organisasi-organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM), kelompok-kelompok penekan, media massa, tokoh-tokoh politik, dan kelompok kepentingan

2. Dengan adanya sebuah “Sosialisasi Politik” dalam kegiatan politik di Indonesia, akan menyebutkan timbulnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam suatu kegiatan politik.
Contoh suatu kegiatan-kegiatan sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh KPU beserta jajarannya tentang perlunya menggunakan hak pilih dan bagaimana cara memilih yang benar secara terus-menerus akan menimbulkan antusias masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan pemilu tersebut.
3. Untuk menjawab soal nomor 3 ini, kalian bisa menemukan jawabannya, dengan menyimak kembali halaman 250 hingga hal 251 tentang kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group)
4. Artinya bahwa sistem politik Indonesia tidaklah dibangun dan dilaksanakan berlandaskan kepada ideologi-ideologi besar dunia seperti kapitalis-liberalis maupun komunis-sosialis, namun sistem politik Indonesia berdasarkan pada nilai-nilai luhur dan pandangan hidup bangsa yaitu Pancasila
5. Maksudnya adalah semenjak runtuhnya orde baru dan tumbuhnya orde reformasi, pintu kebebasan “berpolitik” warga negara dibuka selebar-lebarnya, hal ini nampak pada:
 - Kebebasan untuk mendirikan partai politik
 - Kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politik tanpa paksaan dan tekanan
 - Kebebasan menyalurkan aspirasi untuk PNS dan keluarga TNI/POLRI kepada partai-partai politik

LATIHAN ULANGAN UMUM SEMESTER 2

- A.
1. B
 2. B
 3. D
 4. D
 5. D
 6. D
 7. A
 8. C
 9. C
 10. D
 11. C
 12. B
 13. C
 14. C
 15. D
 16. D
 17. C
 18. D
 19. B
 20. B
 21. D
 22. B
 23. E
 24. C
 25. E
 26. A
 27. B
 28. D
 29. C
 30. E
 31. E
 32. E
 33. C
 34. C
 35. E
 36. A
 37. A
 38. B
 39. B
 40. C
- B.
1. Politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan “bebas aktif” adalah “bebas” artinya Indonesia tidak terikat dengan blok politik dunia ataupun pakta militer manapun, dan Indonesia berjuang sesuai amanat, arah, dan tujuan konstitusi Indonesia. “Aktif” artinya Indonesia tetap berusaha memainkan peran aktifnya dalam menjaga stabilitas dan perdamaian dunia.
 2. Sistem pemilihan langsung kepada para calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
 3. Kabinet parlementer adalah sistem kabinet yang dikepalai oleh seorang perdana menteri. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh perdana menteri. Perdana menteri inilah yang merupakan kepala pemerintahan. Sedangkan kepala negara (sebagai simbol) adalah seorang presiden, bisa juga seorang raja, ratu, atau kaisar.
Contoh: Inggris, Malaysia, Pakistan, India, dan RRC
 4. Kekuasaan kehakiman yang besar artinya bahwa kekuasaan kehakiman (yudikatif) adalah “independent” dan bebas dari intervensi lembaga-lembaga lain seperti eksekutif dan legislatif.
 5. Gagasan konstitusionalisme adalah suatu manifestasi dari negara berdasarkan hukum. Dimana semua kebijakan lembaga negara harus bersumber pada hukum dan konstitusi, sehingga diharapkan tidak terjadi kesewenang-wenangan para penyelenggara negara terhadap warga negaranya. Dan negara menjamin hak dan kewajiban tiap-tiap warga negaranya.
 6. Dalam Pembukaan UUD 1945
 7. Fungsi konstitusi dalam penyelenggaraan negara:
 - a. Sebagai hukum dasar
Konstitusi memuat aturan-aturan pokok tentang penyelenggaraan negara yaitu badan-badan pemerintahan yang memberikan kekuasaan serta prosedur penggunaan kekuasaan tersebut kepada badan-badan pemerintahan
 - b. Sebagai hukum tertinggi
Konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi terhadap peraturan-peraturan yang lain dalam tata hukum suatu negara

8. Presiden dan wakil presiden - menteri - gubernur dan wakil gubernur - bupati dan wakil bupati/kota
9. Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden tidak bisa membubarkan DPR. Begitu juga DPR, tidak bisa menjatuhkan presiden dan DPR tidak diangkar atau bertanggung jawab kepada presiden.
10. UUD 1945 lebih menjamin kestabilan pemerintahan karena:
 - a. UUD 1945 di dalamnya menganut pembagian kekuasaan (eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
 - b. UUD 1945 menganut sistem yang khas menurut kepribadian bangsa Indonesia
 - c. UUD 1945 di dalamnya tidak berdasarkan pada perusakan kekuasaan secara materiil, namun berdasarkan pada pemisahan kekuasaan secara formal.



ISBN 978-979-095-670-4 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-095-672-8 (jil.1.2)

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 32 Tahun 2010, tanggal 12 November 2010.**

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp.19.512,00